

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta 2025 - 2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional Dinas Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Di dalamnya juga tertuang komitmen Dinas Sumber Daya Air untuk mengelola sumber daya air termasuk pengelolaan konservasi air baku, pengelolaan air limbah domestik, pengendalian banjir dan rob serta pengembangan pesisir.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan sumber daya air di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan standar, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJMN, RKP, dan kebijakan sektoral terkait.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Akhirnya dengan dengan izin Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta serta dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait, kami berharap seluruh target dan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ini bisa tercapai dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur Kota Jakarta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.

Jakarta, 24 September 2025

Kepala Dinas Sumber Daya Air

Provinsi DKI Jakarta,



Ika Agustina Ningrum
NIP. 198208012006042013



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA 8

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR 8

2.2 SUMBER DAYA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA..... 11

2.2.1 Sumber Daya Manusia 11

2.2.2 Aset 14

2.2.3 Teknologi Informasi 28

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA 29

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja 29

2.3.2 Realisasi Anggaran 64

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAKARTA 70

2.5 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI
JAKARTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN 71

2.5.1 Dukungan PAM JAYA..... 71

2.5.2 Dukungan PAL JAYA..... 75

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA 78

2.6.1 Potensi dan Ancaman dari Lingkungan Eksternal..... 78

2.6.2 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta..... 82

2.6.3 Permasalahan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta..... 84

2.6.4 Penelaahan terhadap berbagai Perencanaan dan Strategi terkait Sumber Daya Air DKI
Jakarta 90

2.6.5 Penelaahan Terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Jakarta 2025-2029..... 106

2.6.6 Penelaahan Terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029..... 115

2.6.7 Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Jakarta 2025-
2029 119

2.6.8 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta Tahun 2023-2026124

2.6.9 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2024-2044 125

2.6.10 . Penelaahan Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) 150

2.6.11 Penelaahan Terhadap Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Jakarta 2024-2044 155

2.6.12 Penelaahan Terhadap Konsep Pengendalian Banjir Terpadu dan Pradesain Tanggul Laut
Terpadu (PTPIN/NCICD) 156

2.6.13 Penelaahan Terhadap Talkshow Jakarta Future Festival 2025 158

2.6.14 Kondisi Kepulauan Seribu 159

2.6.15 Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 161

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 169

3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta 169

3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 169

3.2.1 Visi 169

3.2.2 Misi 169

3.2.3 Tujuan dan Sasaran 170

3.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan 181

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA 236

4.1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DSDA 2025-2029 236

4.2 Kinerja Dinas Sumber Daya Air 2025 – 2029 253

BAB V PENUTUP 255



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Waduk Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 15

Tabel 2.2. Daftar Sumur Resapan Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 16

Tabel 2.3. Daftar Pintu Air di Provinsi Jakarta 16

Tabel 2.4. Daftar Pompa Stasioner Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta..... 17

Tabel 2.5. Daftar Pompa Mobile Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 22

Tabel 2.6. Daftar Instalasi Pengolahan Air Bersih/ Sistem Penyediaan Air Minum Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 22

Tabel 2.7. Daftar Instalasi Pengolahan Air Limbah Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta..... 24

Tabel 2.8. Rekapitulasi Alat Berat Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 26

Tabel 2.9. Rekapitulasi Dump Truck Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 27

Tabel 2.10. Aplikasi Layanan Eksternal dan Internal pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta 28

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Dinas SDA Provinsi Jakarta 2020-2022 30

Tabel 2.12. Skala Nilai Peringkat Kinerja 31

Tabel 2.13. Kronologi Penanganan Genangan 2020-2022..... 32

Tabel 2.14. Perhitungan Cakupan Pelayanan Air Bersih 34

Tabel 2.15. Perhitungan Cakupan Pelayanan Air Limbah..... 34

Tabel 2.16. Angka Penurunan Permukaan Tanah 36

Tabel 2.17. Realisasi Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah 36

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Dinas SDA Provinsi Jakarta 2023-2024 42

Tabel 2.19. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air Minum Layak 44

Tabel 2.20. Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan 2023-2024 45

Tabel 2.21. Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman 2023-2024 46

Tabel 2.22. Indeks Bahaya Banjir per Kelurahan 47

Tabel 2.23. Luas Area Genangan Tahun 2023-2024..... 50

Tabel 2.24. Tingkat Penurunan Muka Tanah tahun 2023-2024 54

Tabel 2.25. Sumber Air yang Digunakan setiap Pemilik Bangunan/Gedung tahun 2023-2024..... 62

Tabel 2.26. Capaian Anggaran Dinas SDA Provinsi Jakarta 2020-2024 65

Tabel 2.27. Program Utama dan Inisiatif Pengelolaan Air dan Ketahanan Bencana..... 91

Tabel 2.28. Arah Kebijakan RPJPD Jakarta Tahun 2025 - 2045 97

Tabel 2.29. Arah Pembangunan Daerah 2025 – 2045..... 98

Tabel 2.30. Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 99

Tabel 2.31. Tujuan dan Sasaran RPJMD beserta Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran 109

Tabel 2.32. Strategi Pembangunan menurut Tujuan dan Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni yang Berkaitan dengan DSDA 111

Tabel 2.33. Arah Kebijakan pada 5 Tahun ke depan 112

Tabel 2.34. Isu-Isu Strategis Di Masing-Masing Wilayah Provinsi DKI Jakarta..... 113

Tabel 2.35. Turunan Outcome dan Program Prioritas dari Misi 4 dan Tujuan 4.1 117

Tabel 2.36. Isu Pembangunan Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Jakarta 2025-2029 117

Tabel 2.37. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS RPJMD 121

Tabel 2.38. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jakarta Tahun 2024-2044 127

Tabel 2.39. Identifikasi Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air 165

Tabel 3.1. Arah Kebijakan pada 5 Tahun ke depan..... 168

Tabel 3.2. Pohon Kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 170

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, dan Target DSDA Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 176

Tabel 3.4. Definisi Operasional Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DSDA Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 177

Tabel 3.5 Infrastruktur NBS beserta Definisi, Jenis, dan Manfaatnya 185

Tabel 3.6 Pemetaan penerapan NBS dalam nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan Pembangunan dan Penganggaran di Daerah 195

Tabel 3.7 Potensi Sungai sebagai Sumber Air Baku Jakarta 197

Tabel 3.8 Potensi Waduk sebagai Sumber Air Baku Jakarta 197

Tabel 3.9 Potensi IPAL sebagai Sumber Air Baku Jakarta 198

Tabel 3.10 Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat 202

Tabel 3.11 Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat..... 203

Tabel 3.12 Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan..... 204

Tabel 3.13 Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur..... 205

Tabel 3.14 Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara 205

Tabel 3.15 Rencana Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 206

Tabel 3.16 Sungai/Kali Prioritas untuk dilakukan Normalisasi 5 tahun ke depan..... 211

Tabel 3.17 Lokasi Prioritas untuk Pembangunan dan Revitalisasi Polder, Pompa, Waduk, dan Embung 5 tahun ke depan 213

Tabel 3.18 Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pembagian Tugas Pelaksanaan PTPIN Stage A tahun 2020 218

Tabel 3.19 Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pembagian Tugas Pelaksanaan PTPIN Stage A tahun 2025 222

Tabel 3.20 Rencana dan Progress Pembangunan Tanggul NCICD Fase A Kewenangan Pemprov DKI Jakarta (update per Desember 2024) berdasarkan MOU 2020 226

Tabel 3.21 Usulan Penambahan Lokasi Kritis pada MOU 2025 226

Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan DSDA 2025-2029 236



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta9

Gambar 2.2. Komposisi PNS Dinas Sumber Daya Air 12

Gambar 2.3. Rincian PNS Dinas SDA Provinsi Jakarta berdasarkan kualifikasi (a) pendidikan, (b) golongan, dan (c) jabatan 13

Gambar 2.4. Uraian Detail PJLP pada Dinas dan Suku Dinas 14

Gambar 2.5. Rekap Sarana dan Prasarana Dinas SDA Provinsi Jakarta 14

Gambar 2.6. Beberapa Contoh infrastruktur Terbangun ((a) 2020; (b) 2021; (c) 2022 : (c.1) 942 Project (9 Polder, 4 Ruang Limpah Sungai, 2 Sungai/Kali); (c.2) Pembangunan 9 Polder; (c.3) Pembangunan 4 Waduk/Ruang Limpah Sungai; (c.4) Pembangunan/Revitalisasi 2 Sungai/Kali; (c.5) Pembangunan SPALD-T 41

Gambar 2.7. Beberapa Contoh infrastruktur Terbangun ((a) 2023; (b) 2024 64

Gambar 2.8. Kerangka Kerja Kota Global Jakarta 91

Gambar 2.9. Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 5 105

Gambar 2.10. Potensi Skema Pembiayaan Infrastruktur Jakarta Menuju Kota Global 106

Gambar 2.11. Perumusan Tujuan Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis 108

Gambar 2.12. Penyelarasan Isu Strategis dan Misi RPJMD dengan Program Kerja Janji Politik Gubernur 116

Gambar 2.13. Rekomendasi Outcome Prioritas..... 116

Gambar 2.14. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 151

Gambar 3.1. Gambaran peningkatan kondisi runoff mengikuti tutupan lahan kedap air (*impervious cover*) 183

Gambar 3.2. Identifikasi penerapan infrastruktur NBS di Provinsi DKI Jakarta pada a. Skala Permukiman dan b. Skala Persil/Bangunan 184

Gambar 3.3. Ilustrasi Normalisasi Sungai 2025-2029..... 212

Gambar 3.4. Ilustrasi Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 1)..... 215

Gambar 3.5. Ilustrasi Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 2) 216

Gambar 3.6. Ilustrasi Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 3) 217

Gambar 3.7. Rumah Pompa dan Polder Eksisting dan Rencana Pembangunan Pompa dan Polder 2025-2029 218

Gambar 3.8. Rencana dan Progress Pembangunan Tanggul NCICD Fase A..... 226

Gambar 3.9. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1 230

Gambar 3.10. Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1..... 230

Gambar 3.11. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 2 .. 231

Gambar 3.12. Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 2..... 232

Gambar 3.13. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap III 229

Gambar 3.14. Landscape Klaster Ancol Barat-Asahimas 230

Gambar 3.15. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap IV 230

Gambar 3.16. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap V 231

Gambar 3.17. Ilustrasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai 232





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki di daerahnya masing-masing.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan juga Renstra PD. Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029. Sebagai substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029. Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang di dalamnya memuat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada periode tertentu.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Sistem penyediaan Air Minum;

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 112/KPTS/M/2022 Tentang Konsep Pengendalian Banjir Terpadu dan Pra-desain Tanggul Laut Tahap B Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/ National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Di Pesisir Teluk Jakarta;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
41. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
43. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
44. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
45. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;

46. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
47. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Zona Bebas Air Tanah;
48. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sumur Resapan;
49. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
50. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga;
51. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 41 tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044;
52. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 42 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2029;
53. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 294 tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua puluh) Besar Kota Global Dunia;
54. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029, ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, dan urusan geologi di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2025-2029;
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya, dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program sampai ditetapkannya Gubernur terpilih.

Tujuan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang sifatnya indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
2. Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis untuk pencapaian indikator yang ditetapkan;
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja Unit-Unit Kerja di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari 2020-2024.

Selain itu bagian ini juga memaparkan permasalahan yang dirumuskan dari RPJMD Jakarta 2025-2029, Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029, KLHS RPJMD 2025-2029, RPD Jakarta 2023-2026, RTRW Jakarta 2024-2044, SDGS, RISPAM Jakarta 2024-2044, Konsep PTPIN/NCICD yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, serta hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

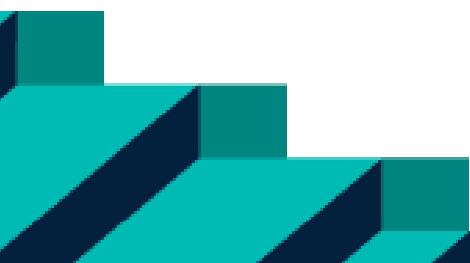
**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Bagian ini berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, output, dan outcome. Program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya.

Bagian ini juga berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS SUMBER
DAYA AIR PROVINSI DKI
JAKARTA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

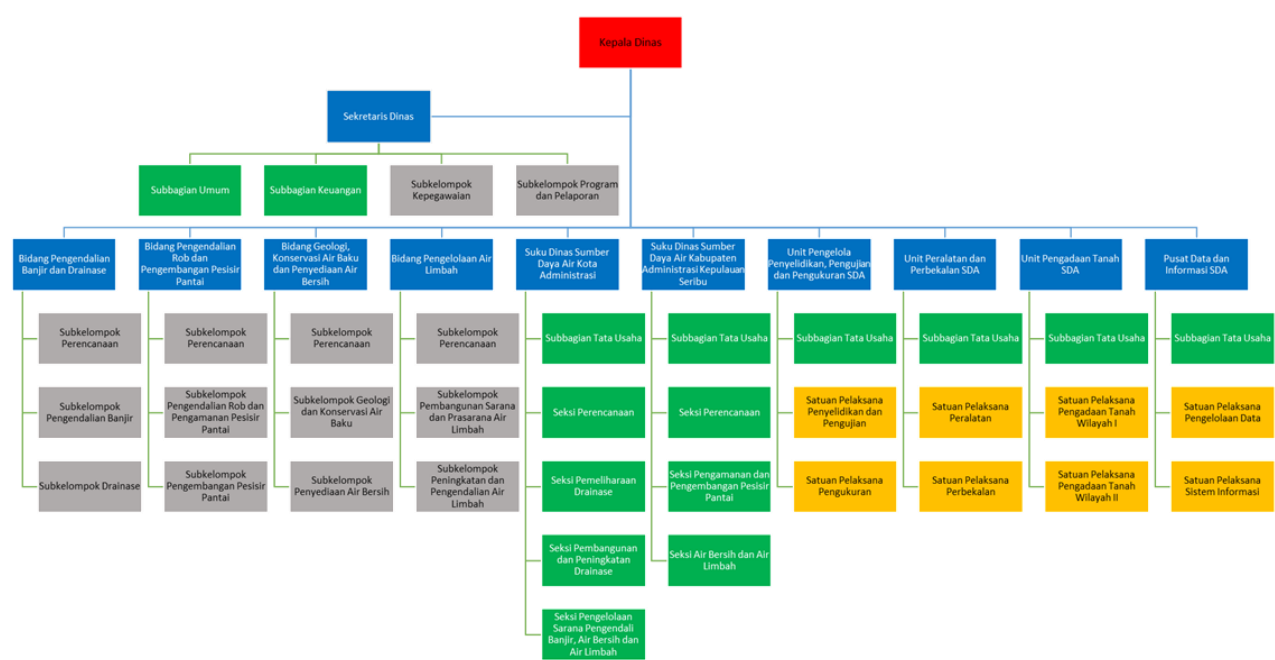
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air (Lampiran VII), dijelaskan bahwa Dinas Sumber Daya Air merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi. Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, penelitian, pengembangan sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
8. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
9. Pelaksanaan pengendalian banjir dan abrasi;
10. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air bersih;
11. Pelaksanaan pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai;
12. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan air limbah;

13. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelola sumber daya air;
14. Pelaksanaan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
15. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
16. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin di bidang pengelolaan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase dan geologi;
17. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian subsidi kepada badan usaha milik daerah di bidang air bersih dan air limbah;
18. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
19. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
20. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur dan/atau sekretaris daerah

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta
(Sumber: LKIP DSDA Provinsi Jakarta 2024)

Susunan organisasi struktural Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;

- b. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - d. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian Banjir; dan
 - c. Seksi Drainase
4. Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Geologi dan Konservasi Air Baku; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih
5. Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pesisir Pantai
6. Bidang Pengelolaan Air Limbah, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah; dan
 - c. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Air Limbah
7. Suku Dinas terdiri dari:
- a. Suku Dinas Kota, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pemeliharaan Drainase;
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase;
 - Seksi Pengelolaan Sarana Pengendali Banjir, Air Bersih dan Air Limbah; dan
 - Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan
 - b. Suku Dinas Kabupaten, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Pantai; dan
 - Seksi Air Bersih dan Air Limbah
8. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
- a. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian; dan
 - Satuan Pelaksana Pengukuran

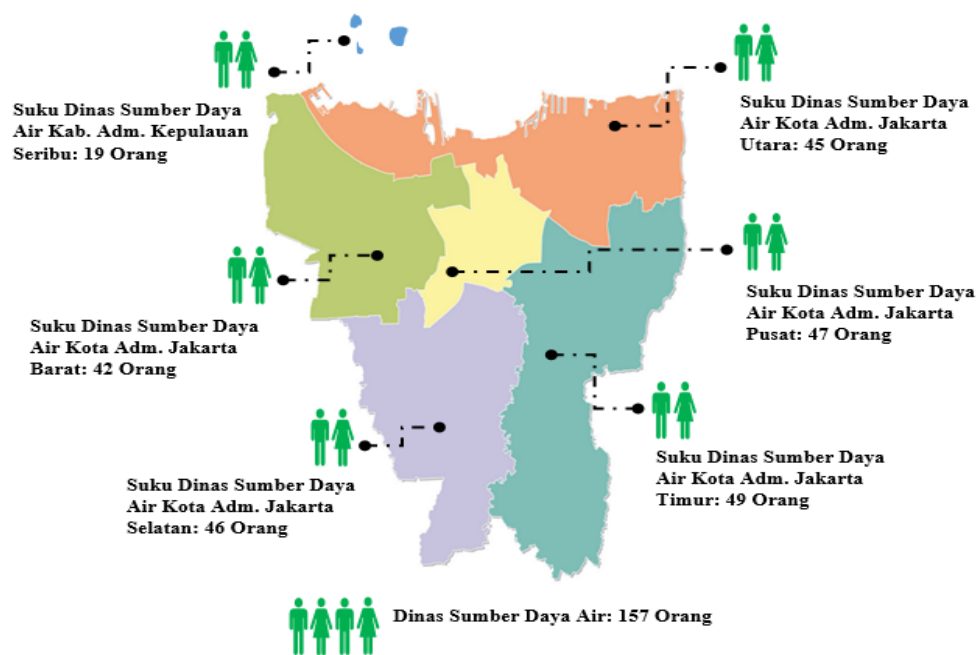
- b. Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Peralatan; dan
 - Satuan Pelaksana Perbekalan
 - c. Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I; dan
 - Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II;
 - d. Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Satuan Pelaksana Pengelolaan Data; dan
 - Satuan Pelaksana Sistem Informasi
9. Jabatan Fungsional
10. Jabatan Pelaksana

2.2 SUMBER DAYA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

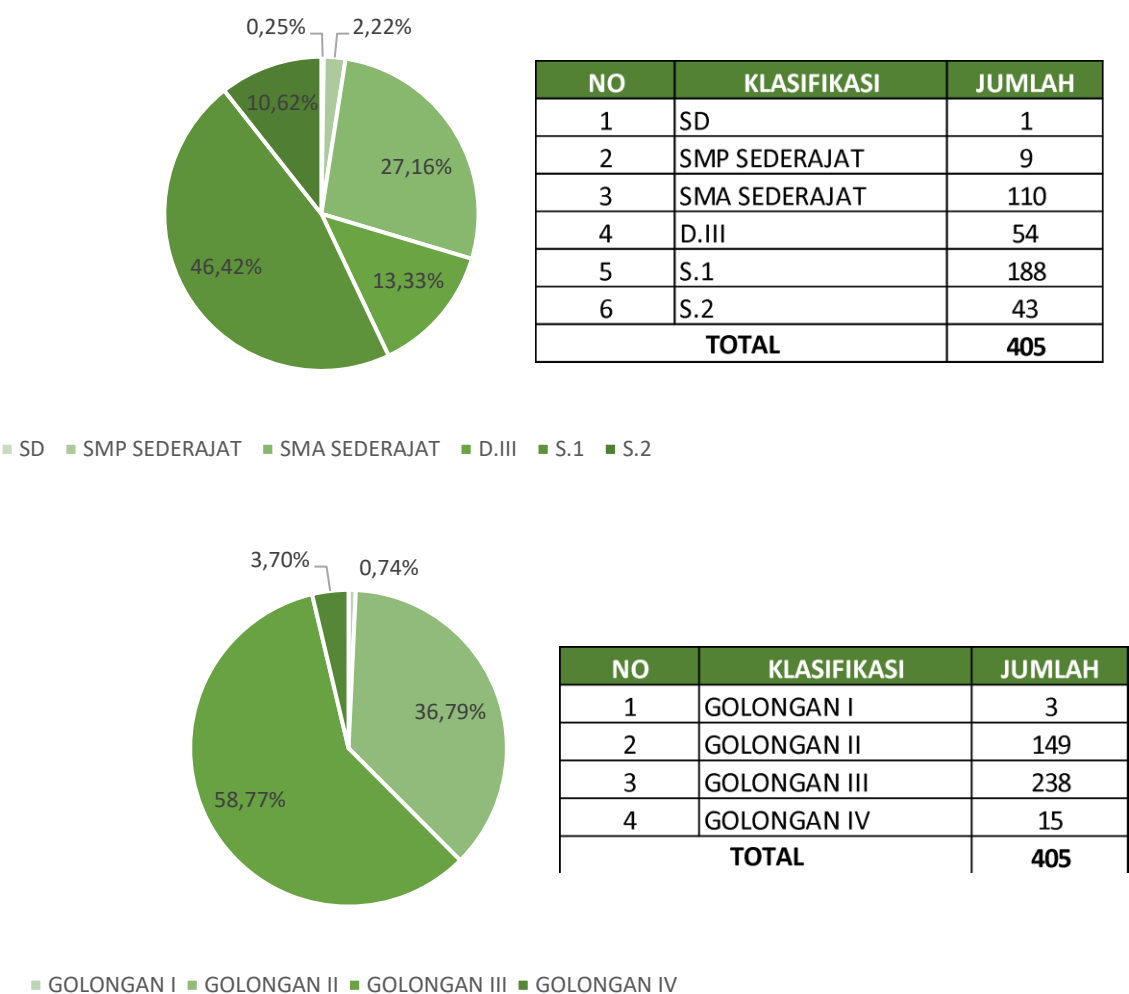
Dalam rangka penuntasan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan dukungan berupa tersedianya sumber daya yang berkualitas yang dapat menunjang untuk dapat menghasilkan kinerja maksimal dengan capaian sesuai yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun sarana dan prasarana penunjang.

Terkait dengan dukungan Sumber Daya Manusia, Berdasarkan Dokumen LKIP Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 405 orang yang tersebar pada Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota dan Kabupaten Administrasi serta Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan. Komposisi PNS pada tiap unit kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:

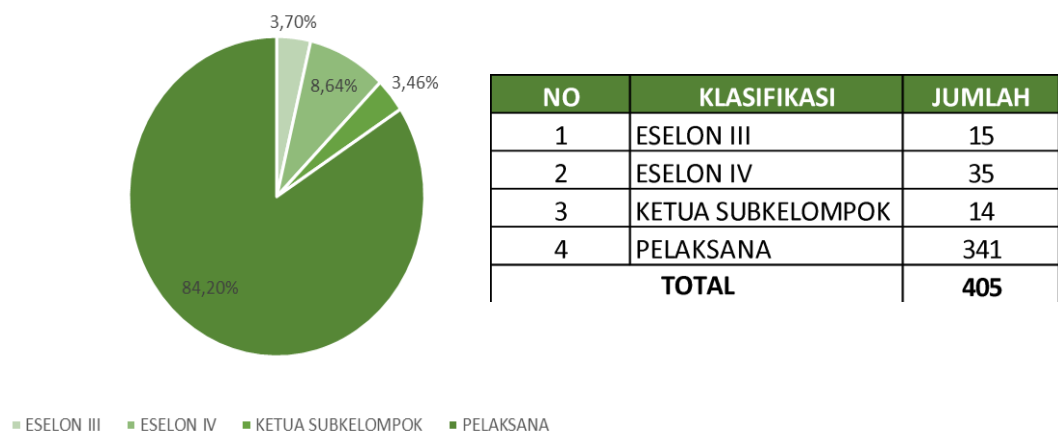


Gambar 2.2. Komposisi PNS Dinas Sumber Daya Air
(sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2024)

Rincian PNS Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta berdasarkan kualifikasi (a) pendidikan, (b) golongan, dan (c) jabatan ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:



(b)



Gambar 2.3. Rincian PNS Dinas SDA Provinsi Jakarta berdasarkan kualifikasi (a) pendidikan, (b) golongan, dan (c) jabatan
(Sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2024)

Berdasarkan Gambar di atas, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta didukung oleh sumber daya PNS yang mayoritas memiliki kualifikasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 188 orang (46,42%), diikuti dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sejumlah 110 orang (27,16%) dari total seluruh pegawai. Sisanya memiliki tingkat Pendidikan yang bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1 orang (0,25%), SMP/Sederajat sejumlah 9 orang (2,22%), Diploma (DIII) sejumlah 54 orang (13,33%) dan Magister (S2) sejumlah 43 Orang (10,62%).

Untuk pangkat/golongan, mayoritas PNS Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta memiliki pangkat Golongan III sejumlah 238 orang (58,77%) diikuti dengan Golongan II sejumlah 149 orang (36,79%) dari jumlah seluruh PNS. Sisanya memiliki kualifikasi pangkat golongan I sejumlah 3 orang (0,74%) dan Golongan IV sejumlah 15 orang (3,70%).

Sementara, jika dilihat dari jabatan, dari sejumlah 405 orang PNS Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, mayoritas PNS sebanyak 341 orang (84,20%) merupakan staff/pelaksana, 14 orang (3,46%) menduduki jabatan sebagai Ketua Subkelompok pada unit kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, sebanyak 35 orang (8,64%) adalah Eselon IV, dan sebanyak 15 orang (3,70%) adalah Eselon III. Selain PNS, Dinas Sumber Daya Air juga didukung oleh sumber daya non-ASN/pegawai honorer (PJLP) yang berjumlah 7718 orang dengan rincian 968 orang berkontrak pada Dinas dan 6750 orang berkontrak pada Suku Dinas. Uraianya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Uraian Detail PJLP pada Dinas dan Suku Dinas
(Sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2024)

2.2.2 Aset

Dalam upaya pengelolaan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta didukung oleh sarana dan prasarana, yakni antara lain berupa, alat berat, pompa dan pintu air, waduk IPA dan IPAL, dan sebagainya. Ilustrasinya ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 2.5. Rekap Sarana dan Prasarana Dinas SDA Provinsi Jakarta
(Sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2024)

1. Waduk

Waduk yang dikelola ada 52 buah waduk yang tersebar di seluruh wilayah kota administrasi, dengan jenis: embung, situ, *storage*, dan waduk. Sementara untuk fungsionalnya terbagi menjadi waduk retensi, waduk detensi, serta waduk wisata. Berikut adalah waduk yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.1. Daftar Waduk Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Waduk Menurut Jenisnya						
No	Wilayah	Embung	Situ	Storage	Waduk	Grand Total
1	Kota Adm. Jakarta Barat				7	7
2	Kota Adm. Jakarta Pusat		1		2	3
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	3	3		6	12
4	Kota Adm. Jakarta Timur	5	4		11	20
5	Kota Adm. Jakarta Utara			3	7	10
	TOTAL	8	8	3	33	52
Waduk menurut Fungsionalnya						
No	Wilayah	Detensi	Retensi	Wisata	Grand Total	
1	Kota Adm. Jakarta Barat	7	-	-	7	
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	1	1	1	3	
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	3	8	1	12	
4	Kota Adm. Jakarta Timur	4	16	-	20	
5	Kota Adm. Jakarta Utara	9	-	1	10	
	TOTAL	24	25	3	52	

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)

2. Sumur Resapan

Untuk mendukung konservasi air tanah dan juga mengurangi limpasan, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta juga membuat dan mengelola sumur resapan. Sumur resapan yang dimiliki saat ini berjumlah 29.887 titik yang tersebar di kelima wilayah Jakarta. Berikut adalah sumur resapan yang dikelola Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.2. Daftar Sumur Resapan Kewenangan Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Jumlah Titik 2019	Jumlah Titik 2020	Jumlah Titik 2021	Jumlah Titik 2022	Jumlah Titik 2023	Jumlah Titik 2024	Total Jumlah Titik
Kota Adm. Jakarta Pusat	360	175	1628	12	15	8	2.198
Kota Adm. Jakarta Utara	35	0	3	0	0	0	38
Kota Adm. Jakarta Barat	258	152	3999	26	0	0	4.435
Kota Adm. Jakarta Selatan	436	561	12169	45	22	2	13.235
Kota Adm. Jakarta Timur	227	638	8245	280	65	31	9.486
Kab. Adm. Kep. Seribu	0	132	305	19	39	0	495
	1.316	1.658	26.349	382	141	41	29.887

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 24 September 2025)

3. Pintu Air

Pintu Air yang dimiliki sebanyak 589 buah yang tersebar di setiap wilayah administrasi dengan jenis aliran barat, tengah, atau timur. Berikut adalah sebaran pintu air di Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.3. Daftar Pintu Air di Provinsi Jakarta

No	Wilayah	Aliran Barat	Aliran Tengah	Aliran Timur	Total
1	Kota Adm. Jakarta Barat	266	1	1	268
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	2	92	7	101
3	Kota Adm. Jakarta Selatan	18	56	-	74
4	Kota Adm. Jakarta Timur	-	-	30	30

No	Wilayah	Aliran Barat	Aliran Tengah	Aliran Timur	Total
5	Kota Adm. Jakarta Utara	10	5	101	116
	Total	296	154	139	589

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)

4. Pompa Stasioner dan Mobile

Untuk meningkatkan kecepatan laju air menuju laut maupun saluran selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Mengelola sejumlah pompa air, baik pompa stasioner maupun pompa *mobile*. Pompa stasioner tersebar di 205 lokasi, dengan jumlah 602 pompa dan total kapasitas 651,1 m³/s. Berikut adalah daftar pompa stasioner :

Tabel 2.4. Daftar Pompa Stasioner Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Lokasi Pompa	Jumlah Pompa	Total Kapasitas (m³/s)
1	Cibubur	1	1
2	Daan Mogot KM13	2	0,5
3	Departemen Agama	2	1
4	Dharma Wanita 1	2	1,8
5	Dharma Wanita 2	1	0,5
6	Duta Mas	1	1
7	Fly Over Tomang	3	6
8	Gang Macan	5	2,1
9	Gate Poglar	6	6
10	Green Garden	5	18,25
11	Jelambar 2	3	2,5
12	Jelambar Borobudur	2	1
13	Kali Apuran	2	0,75
14	Kampung Apung	5	1,7
15	Kebon Raya	5	2,6
16	Kedoya Utara	2	0,5
17	KFT	1	1
18	Klingkit Cengkareng	3	1,6
19	Kyai Tapa 1	3	6
20	Kyai Tapa 2	3	2,5
21	Mangga Raya	4	1,2
22	Patra	6	6
23	Perumnas Cengkareng	3	7,5
24	Pinangsia	4	1,05
25	Pondok Bandung	4	3
26	Pool PPD	3	0,85
27	Rawa Kepa	4	8

No	Lokasi Pompa	Jumlah Pompa	Total Kapasitas (m ³ /s)
28	RW 01 Kembangan Utara	2	0,75
29	RW 01 Semanan	3	1,1
30	RW 03 Kalideres	3	1,5
31	RW 04 Kembangan Utara	3	1,1
32	RW 07 Semanan	3	1,6
33	RW 08 Kedaung Kali Angke	2	0,96
34	RW 09 Pedongkelan	3	1,5
35	Saluran phb Bojong	5	3,25
36	Satpas Sim	2	1
37	Satria	2	0,5
38	Slipi Hankam 1	3	1,1
39	Slipi Hankam 2	4	0,86
40	Susilo	2	2
41	Taman Ratu	2	0,5
42	Tanjung Duren	2	2
43	Teratai Kembangan Utara	3	1,1
44	Waduk Bojong Indah	3	1,5
45	Waduk Grogol	3	2,7
46	Waduk Tomang Barat	8	10,96
47	Waduk Wijaya Kusuma	4	3,5
48	Wijaya Kusuma	3	2,5
49	Angkasa	3	2,25
50	Batu Ceper	3	1,95
51	Benhil	2	0,5
52	Cempaka Baru/Serdang	2	1
53	Cempaka Putih	3	1,5
54	Cideng	11	51,2
55	Dwi Warna	2	2
56	Gedung Jaya	6	2
57	Hayam Wuruk/ Sukarjo W	3	1,95
58	Industri	9	4,1
59	Istana	4	1
60	Jati Pinggir 1	4	1,5
61	Jati Pinggir 2	4	1,55
62	Jati Pinggir 3	2	0,2
63	Jayakarta	4	2
64	Jembatan Merah	2	0,5
65	Kali Item	4	8
66	Kartini V	5	3,05
67	Kelinci	2	1,4
68	Mangga Besar 13	4	0,7
69	Mangga dua abdad	5	1,8
70	Mapalus (Lippo Thamrin)	3	3
71	Melati	10	17,6
72	Menara Topas	2	1,5
73	Penataran	2	0,5

No	Lokasi Pompa	Jumlah Pompa	Total Kapasitas (m ³ /s)
74	Pumgate Jl Batu	1	0,25
75	Rajawali Selatan	3	1
76	Sumur Batu	3	0,75
77	Arcadia	1	0,1
78	Atmajaya	3	1,25
79	Beo cenek	2	0,2
80	Bukit Duri 1	3	0,675
81	Bukit Duri 2	2	0,15
82	Bukit Duri 3	2	0,55
83	Bukit Duri 4	3	0,725
84	Bukit Duri 5	2	0,15
85	Bukit Duri 6	2	0,1
86	Bukit Duri 7	1	0,075
87	Bukit Duri 8	3	0,45
88	Bukit Duri 9	3	0,65
89	Canadiyanti	2	1
90	Gandaria City	2	0,276
91	H. Muhi 12	3	0,65
92	H. Muhi 8	2	0,5
93	IKPN	4	1,45
94	Jl. Ciledug Raya (Perempatan SESCOAL)	2	0,276
95	Jl. Madrasah	2	0,25
96	Jl. Swadarma Raya	1	0,5
97	Kebon Baru Jl. D RW. 04	3	0,7
98	Kebon Baru Jl. H RW. 08	3	0,7
99	Kebon Baru Jl. J RW. 09	3	1,5
100	Kebon Baru PLN	1	0,075
101	Kebon Baru RW. 01	3	0,7
102	Kebon Baru RW. 02	3	0,95
103	Kemang Jaya	2	1
104	Kemang Raya	4	2
105	Kemang Timur 1	2	0,308
106	Kemang Timur 2	2	0,75
107	Komplek Bumi Pesanggrahan Mas	1	0,5
108	Komplek Deplu	1	0,138
109	Komplek Loka Indah	2	0,388
110	Komplek Shangrila	1	0,5
111	Kompleks Lemigas	1	0,058
112	Kompleks Perdatam	3	0,788
113	Kompleks Ulujami Permai	2	0,33
114	Pembangunan (Pabrik Tempe)	2	0,2
115	Pengadegan	2	0,75
116	Phb. Mujair	2	0,5

No	Lokasi Pompa	Jumlah Pompa	Total Kapasitas (m ³ /s)
117	Poncol	2	1
118	Pondok Jaya	3	1,6
119	Pondok Labu	2	0,5
120	Pulo Raya	4	2,55
121	Setiabudi Barat	7	8,38
122	Setiabudi Timur	6	8,52
123	TVRI	2	0,75
124	Waduk Pondok Labu	2	0,6
125	Adhyaksa	1	0,5
126	Aneka Elok	2	2
127	Bidara Cina	1	0,15
128	Brantas	2	0,5
129	Cawang WKA (Cipinang Cempedak)	2	1
130	Cipinang Indah	1	1
131	Gg. Asem	4	1,45
132	Gg. Klaten	1	0,075
133	Gg. Pertama	3	0,7
134	Jl. Tipala, Makasar	1	0,25
135	Kampung Ambon	4	4
136	Kampung Pulo No 1	3	0,625
137	Kampung Pulo no 2	2	0,1
138	Kampung Pulo no 3	1	0,05
139	Kampung Pulo no 4	2	0,1
140	Kampung Pulo no 5	1	0,075
141	Kebon Nanas	4	4
142	Kebon Sayur	2	0,2
143	Kramayudha	1	1
144	Pulomas 2	5	6
145	RW.11 Kramat Jati	3	1,25
146	UPPPP	1	0,25
147	Waduk JGC Site B	2	0,5
148	Waduk JGC Site C	3	5,5
149	Ancol	3	13,5
150	Artha Gading	5	7,5
151	ASMI (Perintis Kemerdekaan)	2	1
152	Banglio	3	6
153	Bendungan Melayu	2	1
154	BGR Kelapa Gading	3	4,25
155	Bimoli	2	1
156	Bulak Cabe	3	7,25
157	Cilincing	2	1
158	Dewa Ruci	3	1,5
159	Gaya Motor 1	2	0,5
160	Gaya Motor 2	1	0,25
161	IKIP	3	3

No	Lokasi Pompa	Jumlah Pompa	Total Kapasitas (m ³ /s)
162	Junction	3	4,5
163	Jupiter	5	2,6
164	Kali Asin	3	2,62
165	Kali Betik	5	7,5
166	Kali Duri	3	6
167	Kamal Muara	2	1
168	Kampung Gusti	1	0,5
169	Kapuk 1	4	4
170	Kapuk 1 B	1	1
171	Kapuk 2	3	2,25
172	Kapuk 3	3	1,5
173	Kelapa Gading Don Bosco	2	4
174	Koja	2	4
175	Lagoa	1	0,5
176	Luar batang	2	0,75
177	Mangga Dua	3	2,62
178	Mangga Dua Sisi Selatan	2	1,8
179	Mangga Dua Sisi Utara	2	1,8
180	Marina	5	1,566
181	Mars	2	1
182	MOI	2	1
183	Muara Angke	6	7,52
184	Pasar Ikan	10	31
185	Pinang	4	6
186	Pluit Village	3	10,25
187	Plumpang	2	1
188	Polder Kamal	3	30
189	Pulomas 1	3	7,5
190	Sindang	2	2
191	Sunter C	3	6
192	Sunter Kirana	2	0,5
193	Sunter Selatan	6	15
194	Sunter Timur 1 Kodamar	3	4,02
195	Sunter Timur 3 Rawa Badak	3	15,51
196	Sunter Utara	5	19,9
197	Taman BMW	1	0,25
198	Tanjungan	3	12
199	Venus	2	1
200	Viaduct Gunung Sahari	2	0,75
201	Waduk Pluit	10	49
202	Waduk Teluk Gong	6	6,62
203	WTC	2	0,75
204	Yos Sudarso 1	2	1
205	Yos Sudarso 2	3	2,7
	TOTAL	602	651,1

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)

Sementara untuk pompa mobile yang dimiliki ada 573 buah yang terbagi ke dalam 4 jenis/tipe pompa, dan memiliki total kapasitas 87.716 LPS. Berikut adalah pompa mobile yang dikelola Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.5. Daftar Pompa Mobile Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis/Tipe Pompa	Jumlah per Jenis	Kapasitas (LPS)
1	Mobile Trailer	128	39.640
2	Mobile Truck	78	24.366
3	Pompa Apung	263	15.330
4	Pompa Portable	104	8.380
	Total	573	87.716

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)

5. SPAM/IPA

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Provinsi DKI Jakarta pada kawasan yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM, maka Dinas Sumber Daya Air mengelola Instalasi Pengolahan Air Bersih/Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6. Daftar Instalasi Pengolahan Air Bersih/ Sistem Penyediaan Air Minum Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Lokasi	Kategori	Jumlah	Peruntukan
1	BWRO Gaga Rawa Kompeni	BWRO	1	Air Baku
2	BWRO Kalibaru	BWRO	1	Air Baku
3	BWRO Kamal Muara	BWRO	1	Air Baku
4	BWRO Kampung Bambu Kuning - Marunda	BWRO	1	Air Baku
5	BWRO Pulau Harapan	BWRO	1	Air Baku
6	BWRO Pulau Karya	BWRO	1	Air Baku
7	BWRO Pulau Kelapa	BWRO	1	Air Baku
8	BWRO Pulau Kelapa Dua	BWRO	1	Air Baku
9	BWRO Pulau Lancang	BWRO	1	Air Baku
10	BWRO Pulau Panggang	BWRO	1	Air Baku
11	BWRO Pulau Pari	BWRO	1	Air Baku
12	BWRO Pulau Pramuka	BWRO	1	Air Baku
13	BWRO Pulau Sebira	BWRO	1	Air Baku
14	BWRO Pulau Tidung	BWRO	1	Air Baku
15	BWRO Pulau Untung Jawa	BWRO	1	Air Baku
16	BWRO Rawa Melati - Tegal Alur	BWRO	1	Air Baku
17	IPA Buaran	IPA Stasioner	1	Air Minum
18	IPA Cilandak	IPA Stasioner	1	Air Minum
19	IPA Hutan Kota	IPA Stasioner	1	Air Minum
20	IPA Mobile (1 unit)	IPA Mobile	1	Air Baku

No	Nama Lokasi	Kategori	Jumlah	Peruntukan
21	IPA Mobile (5 unit)	IPA Mobile	5	Air Minum
22	IPA Mookervart	IPA Stasioner	1	Air Minum
23	IPA Pejompongan	IPA Stasioner	1	Air Minum
24	IPA Pompa Ancol	IPA Stasioner	1	Air Baku
25	IPA Pulo Gadung	IPA Stasioner	1	Air Minum
26	IPA Setu Babakan	IPA Stasioner	1	Air Baku
27	IPA Taman Kota	IPA Stasioner	1	Air Minum
28	IPA Waduk Sunter Selatan	IPA Stasioner	1	Air Baku
29	IPA Waduk Tomang Barat	IPA Stasioner	1	Air Baku
30	Kios Air Kelurahan Joglo	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
31	Kios Air Kelurahan Kedaung Kali Angke	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
32	Kios Air Kelurahan Kembangan Selatan	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
33	Kios Air Kelurahan Kembangan Utara	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
34	Kios Air Kelurahan Meruya Selatan	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
35	Kios Air Kelurahan Meruya Utara	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
36	Kios Air Kelurahan Pademangan Barat	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
37	Kios Air Kelurahan Pademangan Timur	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
38	Kios Air Kelurahan Rawa Buaya	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
39	Kios Air Kelurahan Srengseng	Kios Air	1	Air Baku dan Air Minum
40	Mobil Tangki Air (12 unit)	Mobil Tangki	12	Air Baku
41	SWRO Pulau Kelapa dan Pulau Harapan	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
42	SWRO Pulau Kelapa Dua	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
43	SWRO Pulau Lancang	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
44	SWRO Pulau Panggang	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
45	SWRO Pulau Payung	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
46	SWRO Pulau Pramuka	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
47	SWRO Pulau Sebir	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
48	SWRO Pulau Tidung	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum
49	SWRO Pulau Untung Jawa	SWRO	1	Air Baku dan Air Minum

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)



6. SPALD/IPAL

Dalam rangka pengolahan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta, maka dibangunlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, berikut adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang merupakan kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 2.7. Daftar Instalasi Pengolahan Air Limbah Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Nama SPALD	Sistem	Jenis
1	Filtrasi Kali Besar, Kota Tua	Pemisah Lumpur dan sampah	Filterisasi (Penyaringan)
2	IPAL di sekitar RPTRA Waru Timbul	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
3	IPAL Sasana Krida Lenteng Agung	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
4	IPAL Zona 1 Pulau Panggang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
5	IPAL Zona 1 Pulau Harapan	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
6	IPAL Zona 1 Pulau Kelapa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
7	IPAL Zona 1 Pulau Kelapa Dua	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
8	IPAL Zona 1 Pulau Lancang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
9	IPAL Zona 1 Pulau Pramuka	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
10	IPAL Zona 1 Pulau Sabira	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
11	IPAL Zona 1 Pulau Untung Jawa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
12	IPAL Zona 2 Pulau Kelapa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
13	IPAL Zona 2 Pulau Lancang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
14	IPAL Zona 2 Pulau Panggang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
15	IPAL Zona 2 Pulau Pramuka	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
16	IPAL Zona 3 Pulau Kelapa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
17	IPAL Zona 3 Pulau Panggang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
18	IPAL Zona 3 Pulau Pramuka	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
19	IPAL Zona 4 Pulau Kelapa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
20	IPAL Zona 4 Pulau Panggang	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
21	IPAL Zona 4 Pulau Pramuka	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
22	IPAL Zona 5 Pulau Pramuka	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
23	IPAL Zona Barat Pulau Tidung	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
24	IPAL Zona Selatan Pulau Tidung	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
25	IPAL Zona Timur Pulau Tidung	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
26	IPAL Zona Utara Pulau Tidung	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
27	SPALD Asrama Damkar Ciganjur	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
28	SPALD Asrama Damkar Semper	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
29	SPALD Asrama Dinas Lingkungan Hidup Ciracas	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
30	SPALD Cahaya Ujung Krawang	Biofilter Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
31	SPALD DLH Rumah Susun Semper Barat	Anoxic	Komunal (Sistem Perpipaan)
32	SPALD Harapan Mulia	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)

No	Nama SPALD	Sistem	Jenis
33	SPALD Interceptor Situ Mangga Bolong	MBBR (Moving Bed Bio Reactor)-	Waduk (Interceptor)
34	SPALD Interceptor Waduk Aneka Elok	Extended Aeration	Waduk (Interceptor)
35	SPALD Interceptor Waduk Brigif	MBBR (Moving Bed Bio Reactor)-	Aerator Waduk
36	SPALD Interceptor Waduk Pondok Ranggon	MBBR (Moving Bed Bio Reactor)	Waduk (Interceptor)
37	SPALD Kawasan Terpadu Cakung Barat	Aerob Anaerob + Bio MediaBioactivat or	Komunal (Sistem Perpipaan)
38	SPALD Koja	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
39	SPALD Kompleks Damkar Joglo, kembangan	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
40	SPALD Lagoa	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
41	SPALD Lahan Parkir Gelanggang Remaja Matraman	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
42	SPALD Lahan Sekitar RPTRA Rawa Badak Utara	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
43	SPALD Lahan Sekitar Waduk Kampung Rambutan 3	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
44	SPALD Malaka Sari	Aerob Anaerob + Bio MediaBioactivat or	Komunal (Sistem Perpipaan)
45	SPALD Mardani Asri	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
46	SPALD Pulau Payung	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
47	SPALD Recycle Waduk Grogol	Pabrikasi Andrich Tech System	Waduk (Interceptor)
48	SPALD Recycle Waduk Kp. Rambutan	Pabrikasi Andrich Tech System	Waduk (Interceptor)
49	SPALD RPTRA Ciracas Prima	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
50	SPALD RPTRA Dahlia	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
51	SPALD RPTRA Kampung Indah Lestari	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
52	SPALD RPTRA Kemandoran	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
53	SPALD RPTRA Tunas Harapan	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
54	SPALD RTH Pedaengan	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
55	SPALD Rumah Pompa Sunter Timur 3 Rawa Badak	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
56	SPALD Rumah Pompa Sunter Utara	Biofilter Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
57	SPALD Rumah Pompa Waduk Melati	Interceptor	Waduk (Interceptor)

No	Nama SPALD	Sistem	Jenis
58	SPALD Rusun Damkar Cengkareng	MBRC	Komunal (Sistem Perpipaan)
59	SPALD Rusun DLH Cengkareng	MBRC	Komunal (Sistem Perpipaan)
60	SPALD Rusun Tanah Tinggi	Anaerob Aerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
61	SPALD Sekitar RPTRA Kembangan	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
62	SPALD Sentra Primer Barat	MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)	Waduk (Interceptor)
63	SPALD Setu Babakan	Interceptor	Waduk (Interceptor)
64	SPALD Waduk Cimanggis	Aerob Anaerob	Komunal (Sistem Perpipaan)
65	SPALD Waduk Grogol	MBBR	Komunal (Sistem Perpipaan)
66	SPALD Waduk Jagakarsa	Extended Aeration	Waduk (Interceptor)
67	SPALD Waduk Kaja	Interceptor	Waduk (Interceptor)
68	SPALD Waduk Kampung Rambutan	Interceptor	Waduk (Interceptor)
69	SPALD Waduk Kampung Rambutan 2	Extended Aeration	Waduk (Interceptor)
70	SPALD Waduk Melati	MBBR (Moving Bed Bio Reactor)	Waduk (Interceptor)
71	SPALD Waduk Sunter Selatan	Bioactivator	Komunal (Sistem Perpipaan)
72	SPALD Waduk Tomang Barat	Aerator Tenaga Surya dan Aerator Tenaga Listrik	Aerator Waduk

(Sumber: Portal Data Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, diakses pada 15 Juni 2025)

7. Alat Berat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengerukan dan pengurasan saluran makro, saluran sub makro dan saluran penghubung di Provinsi DKI Jakarta, maka dibutuhkan alat berat yang dikelola oleh Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air. Berikut adalah Alat Berat dan Dump Truck yang menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 2.8. Rekapitulasi Alat Berat Kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Jenis	Jumlah
Crane Terrain (Tadano)	2
Excavator Amphibius Besar	38
Excavator Amphibius Kecil	19
Excavator Amphibius Mini	27
Excavator Amphibius Sedang	3
Excavator Kecil	9
Excavator Long Arm	44




optimalisasi peran dan fungsi Dinas. Untuk itu secara bertahap setiap tahunnya dilakukan perencanaan dan pembangunan aset tetap, serta pengadaan aset bergerak mengikuti perkembangan teknologi terkini yang dapat diaplikasikan dalam meningkatkan efektivitas peran dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

2.2.3 Teknologi Informasi

Dalam upaya menjalankan peran dan fungsi Dinas, serta menuntaskan target kinerja yang telah ditetapkan, mempermudah dan mempersingkat pelayanan dalam bidang Sumber Daya Air kepada masyarakat, Dinas Sumber Daya Air juga telah mengembangkan sarana dan prasarana teknologi berupa aplikasi layanan baik secara eksternal maupun internal yang dapat diakses secara luas baik oleh masyarakat maupun user pada Unit Kerja Dinas Sumber Daya Air, uraiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10. Aplikasi Layanan Eksternal dan Internal pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Layanan Eksternal		Layanan Internal	
	Posko Banjir DSDA (Sistem Pantau Realtime Tinggi Muka Air dan Curah Hujan di berbagai lokasi pengamatan berbasis website)		e-Monev (Sistem berbasis website yang dirancang untuk memonitor dan mengevaluasi anggaran serta tagihan di Dinas Sumber Daya Air)
	Portal Data DSDA (Sistem Informasi tentang infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air berbasis website)		Penomoran Surat (Layanan berbasis website untuk mengajukan penomoran surat)
	SINARJI (Sistem Informasi terkait mitigasi bencana banjir rob dan penurunan tanah)		SPP/SPM (Sistem Pembuatan semua jenis tagihan yang berada pada Dinas Sumber Daya Air)
	UP4 DSDA (Layanan terkait Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran sumber daya air)		SIPA (Sistem Informasi Pencatatan Air Tanah yang digunakan untuk pengelolaan dan

Layanan Eksternal		Layanan Internal	
			pencatatan penggunaan air tanah secara transparan dan efektif)
	SIGA (Sistem Informasi pelayanan terkait informasi geologi dan air tanah)		Mail Merge (Sistem yang digunakan untuk standarisasi pada surat yang digunakan pada tagihan di Dinas Sumber Daya Air)
	Mobile App TMA (Sistem pantau tinggi muka air dan curah hujan secara realtime di berbagai lokasi via mobile app)		

(Sumber : LKIP DSDA Provinsi Jakarta, 2024)

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir akan dibagi 2 (dua) pembahasan karena kinerja 2020-2022 mengacu pada Renstra 2017-2022, sedangkan kinerja 2023-2024 mengacu pada Renstra 2023-2026.

A. Capaian Indikator Kinerja DSDA 2020-2022

Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Dinas SDA Provinsi Jakarta 2020-2022

Tujuan/ Sasaran		Indikator		Satuan	Tahun			
					Kinerja	2020	2021	2022
Sasaran 1	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi	IKU 1	Jumlah Titik Genangan Banjir	titik	Target	6	5	0
					Realisasi	4	3	1
					Capaian	122,22%	140%	93,33%
Sasaran 2	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	IKU 2	Cakupan pelayanan air bersih	%	Target	66,09	63,65	64
					Realisasi	64,24	65,30	65,41
					Capaian	97,2%	102,59%	102,20%
		IKU 3	Cakupan pelayanan air limbah	%	Target	20,49	19,99	21,26
					Realisasi	17,75	18,19	20,595
					Capaian	86,63%	91%	96,87%
Sasaran 3	Tingkat penurunan permukaan tanah	IKU 4	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidience)	cm	Target	-	3,99	3,87
					Realisasi	-	4	3,9
					Capaian	-	99,62%	99,22%
Sasaran 4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	IKU 5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Target	-	91	91
					Realisasi	-	77,05	94,44
					Capaian	-	84,67	103,78%

(Sumber : LKIP DSDA 2020-2022)

Warna hijau tua, hijau muda pada tabel di atas mengacu pada Tabel berikut :

Tabel 2.12. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Kode Warna
$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama DSDA Provinsi Jakarta, seluruh indikator tercapai dengan kategori Sangat Baik di tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) IKU yang masuk kategori Tinggi yaitu untuk IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Sementara di tahun 2020 baru ada 3 (tiga) IKU yang ditetapkan dengan IKU Cakupan pelayanan air limbah masih masuk kategori Tinggi. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa selama tahun 2020-2022 capaiannya IKU berdasarkan data **Tabel 2.11** di atas memiliki kecenderungan meningkat capaian kinerjanya setiap tahun yang menandakan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

IKU1: Jumlah Titik Genangan Banjir

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah melalui pengurangan titik genangan banjir pada 15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan berulang yang sumbernya bukan dari luapan kali/sungai. Target dari sasaran strategis ini disusun menggunakan formulasi *minimize* dimana indikator keberhasilan dilihat dari penurunan titik genangan banjir tiap tahunnya. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun, dapat dikatakan capaian kinerja semakin baik.

Kronologi penanganan genangan yang dilakukan tahun 2020-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13. Kronologi Penanganan Genangan 2020-2022

Target Lokasi	Target					Realisasi					Sisa Genangan yang belum Tertangani
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Perempatan ITC Fatmawati		X					X				1. Jl. Mayjend. Sutoyo depan UKI
2. Komplek Paspampres Kramat Jati					X		X				
3. Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda)					X		X				
4. Jl. D.I Panjaitan					X				X		
5. Jl. Patra Raya	X					X					
6. Jl. Letjend. S. Parman	X					X					
7. Jl. Industri/Industri 1		X					X				
8. Jl. Mangga dua Raya		X								X	
9. Jl. Boulevart Barat			X					X			
10. Jl. Pahlawan Kalibata		X				X					
11. Jl. Petogogan					X					X	
12. Jl. Mayjend. Sutoyo depan UKI					X						
13. Jl. Balai Pustaka				X			X				
14. Jl. Arjuna selatan	X					X					
15. Jl. Plumpang Semper		X					X				

(Sumber : LKIP DSDA 2022)

Dari tabel di atas, dapat dilihat masih ada 1 (satu) lokasi yang belum ditangani, yaitu Jl. Mayjend. Sutoyo depan UKI, sementara itu ke-14 lokasi lainnya sudah ditangani sejak 2018. Detil penanganan yang dilakukan pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan genangan tahun 2020

Pada Tahun 2020, Dinas Sumber Daya Air telah menangani titik genangan banjir pada lokasi Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan saluran *precast* yang menghubungkan titik/lokasi yang sering dilaporkan terjadinya genangan sampai pada Saluran Penghubung (PHB) BGR sepanjang 230 Meter dengan bekerja sama antara pasukan biru Dinas Sumber Daya Air dengan pihak kontraktor jalan tol Kelapa Gading-Pulo Gebang.

2. Penanganan genangan tahun 2021

Penanganan titik genangan banjir dilakukan melalui pembangunan sistem drainase (saluran *crossing*) dan sumur resapan di kawasan Jl. D.I. Panjaitan.

3. Penanganan genangan tahun 2022

Pada tahun 2022 ini tersisa target 3 titik genangan sesuai kronologi pada tabel di atas. Adapun 3 lokasi titik genangan yang harus dituntaskan di tahun 2022 adalah pada lokasi Kel. Petogogan, Jl. Mangga Dua Raya, dan Jl. Mayjen Sutoyo (depan UKI) yang masing-masing dilakukan melalui pembangunan Waduk Brigif, Polder Mangga Dua, dan Pembangunan Pompa Cipa.

IKU 2 : Cakupan Pelayanan Air Bersih

Terkait dengan peningkatan capaian air minum di Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaannya dilaksanakan oleh PAM Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini bertindak sebagai regulator.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 2 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan PAM Jaya dengan jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan SWRO dan IPA RO Dinas Sumber Daya Air dibagi dengan total jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.14. Perhitungan Cakupan Pelayanan Air Bersih

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan PDAM	-	7.001.915	7.067.207
2	Jumlah penduduk yang terlayani IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu	-	4.721	4.721
3	Jumlah Penduduk Provinsi Jakarta yang terlayani air bersih (1+2)	-	7.006.636	7.071.928
4	Target proyeksi jumlah penduduk tahun x	-	10.729.100	10.810.100
	Cakupan Pelayanan Air Bersih (3/4)	64,24%	65,30%	65,41%

(Sumber : LKIP DSDA 2020-2022)

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target IKU 2 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air bersih merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 21 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan KSD Nomor 51 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah kurangnya sumber air yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk air baku dan air minum di Provinsi DKI Jakarta, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan air minum perlu adanya *supply* air dari wilayah/daerah lain melalui pembangunan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota.

IKU 3 : Cakupan Pelayanan Air Limbah

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 3 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan Perumda PAL Jaya dan layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman Dinas Sumber Daya dibagi dengan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.15. Perhitungan Cakupan Pelayanan Air Limbah

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk yang terlayani layanan air limbah PAL Jaya	-	1.779.565	2.020.178

No	Uraian	2020	2021	2022
2	Jumlah penduduk yang terlayani SPALD	-	171.895	205.081
3	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan limbah perpipaan dan no perpipaan (1+2)	-	1.951.460	2.225.259
4	Target proyeksi jumlah penduduk tahun x	-	10.729.100	10.810.100
	Cakupan Pelayanan Air Limbah (3/4)	17,75%	18,19%	20,595%

(Sumber : LKIP DSDA 2020-2022)

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target IKU 3 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air limbah merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan KSD Nomor 52 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD yang membuat kinerja tidak dapat maksimal. Pada tahun 2022 pembangunan SPALD yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air ditargetkan dibangun pada 10 (sepuluh) lokasi namun yang terealisasi baru 6 (enam). Sementara 4 (empat) lokasi lain yakni pada lokasi Pintu Seng, Lebak Bulus, Tipar Asri, Lahan Parkir Penjaringan ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat terbangun.

IKU 4 : Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)

Berdasarkan definisi operasionalnya, realisasi dari IKU 4 ini diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.

Dalam perhitungan realisasinya, digunakan data yang diperoleh berdasarkan kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung pada 172 lokasi di tahun 2021 dan 272 lokasi di tahun 2022 dengan hasil pengukuran menggunakan Metode GPS Geodetik menghasilkan angka penurunan permukaan tanah di Provinsi Jakarta sebagai berikut :

Tabel 2.16. Angka Penurunan Permukaan Tanah

IKU 4	2020	2021	2022
Penurunan permukaan tanah maksimal (cm)	Belum menjadi IKU	9	10,9
Rata-rata penurunan permukaan tanah (cm)	Belum menjadi IKU	4	3,9

(Sumber : LKIP DSDA 2021-2022)

IKU 4 merupakan IKU yang definisi operasional dan targetnya seluruhnya dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Energi pada RPJMD 2017-2022. IKU ini dilimpahkan pelaksanaannya ke Dinas Sumber Daya Air sebagai akibat adanya perubahan SOTK pada Tahun 2020. Pada tahun 2020 IKU ini belum ditetapkan dan baru dimunculkan pada tahun 2021.

IKU 5 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU 5 menghitung capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dihitung dengan menggunakan 3 rumusan formulasi yakni

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% ; Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$; Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$; Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Tabel 2.17. Realisasi Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah

No	Capaian IKU 5	2020	2021	2022
1	Pagu Anggaran (Rp)	-	4.412.146.904.199	1.098.809.766.763
2	Realisasi Anggaran (Rp)	-	3.151.940.559.826	1.001.326.081.739
3	Penyerapan anggaran (2/1)(%)	-	71,44%	91,12%
4	Pencapaian output (dari e-SAKIP) (%)	-	96,95%	100%
5	Efisiensi (Rp) (1-2)	-	-	97.483.685.024
6	Efisiensi (%) (5/1)	-	-	8,87
	Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	77,05%	94,44%

(Sumber : LKIP DSDA 2020-2022)

Capaian IKU 5 memiliki tren kecenderungan yang bergerak naik dengan capaian kinerja tertinggi tercatat pada tahun 2022 yang dipengaruhi maksimalnya

penyerapan pada sub kegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Beberapa contoh infrastruktur terbangun selama periode 2020-2022 dalam rangka penuntasan IKU adalah sebagai berikut:



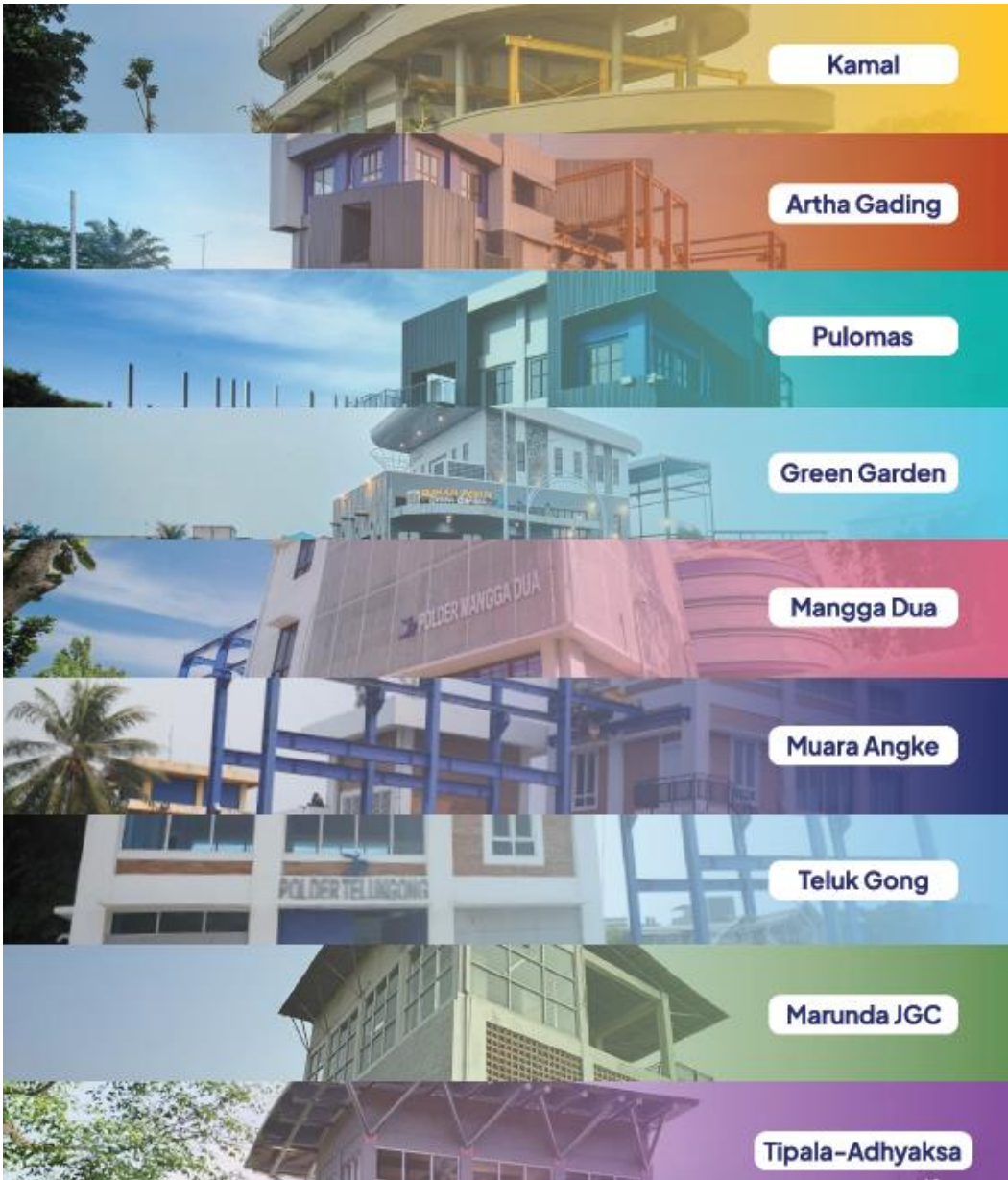
(a)



(b)



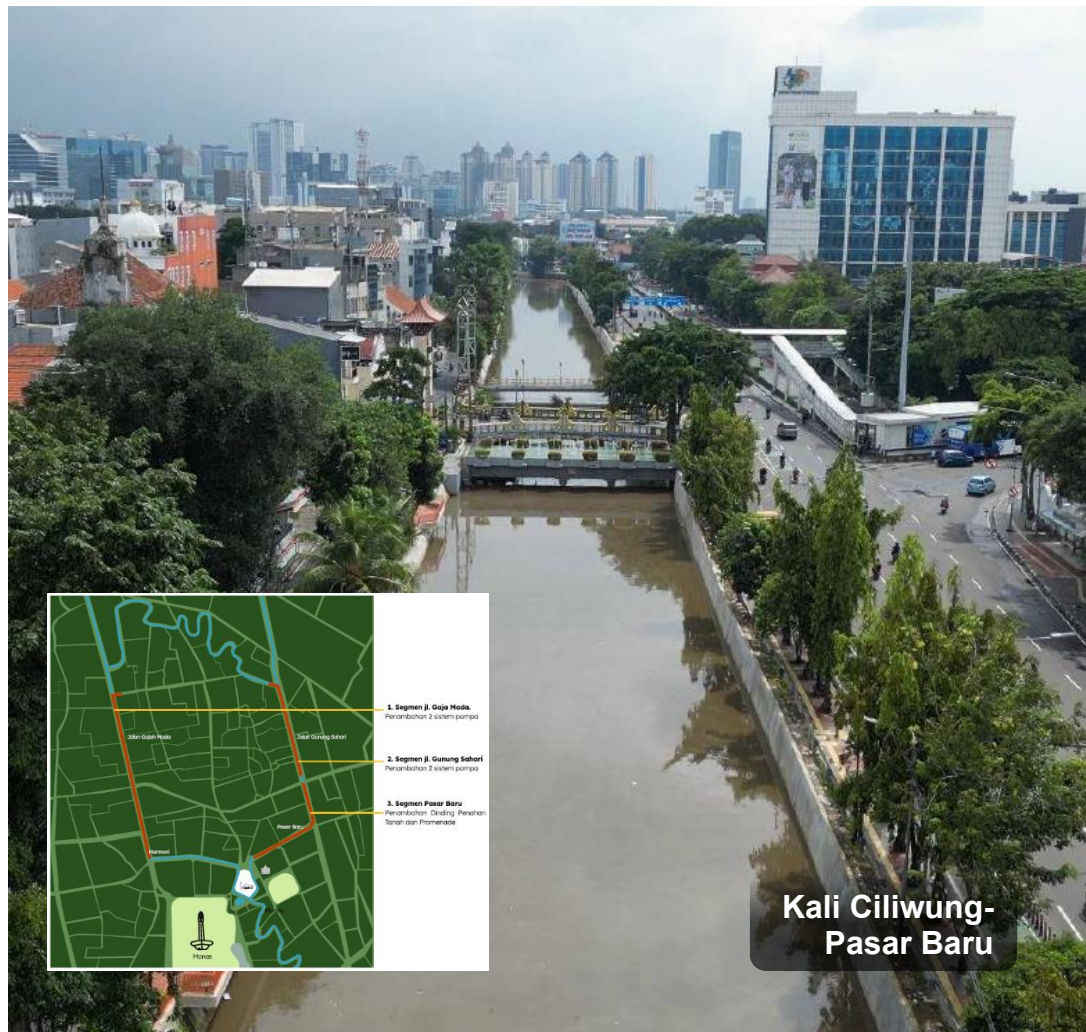
(c.1)



(c.2)



(c.3) Pembangunan 4 Waduk/Ruang Limpah Sungai



(c.4)



(c.5)

Gambar 2.6. Beberapa Contoh infrastruktur Terbangun ((a) 2020; (b) 2021; (c) 2022 : (c.1) 942 Project (9 Polder, 4 Ruang Limpah Sungai, 2 Sungai/Kali); (c.2) Pembangunan 9 Polder; (c.3) Pembangunan 4 Waduk/Ruang Limpah Sungai; (c.4) Pembangunan/Revitalisasi 2 Sungai/Kali; (c.5) Pembangunan SPALD-T (Sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2020-2022, Buku RLS dan Buku 942 Project, 2023))

B. Capaian Indikator Kinerja DSDA 2023-2024

Setelah Renstra DSDA berakhir di tahun 2022, selanjutnya dilakukan penyusunan Renstra untuk 5 tahun selanjutnya, maka kinerja DSDA tahun 2023 dan 2024 mengacu pada Renstra DSDA 2023-2026. Berikut adalah kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024 :

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta 2023-2024

Tujuan/ Sasaran		Indikator		Satuan	Kinerja	Tahun	
						2023	2024
Tujuan 1	Peningkatan Terhadap Akses Layanan Dasar	IKU 1	Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	%	Target	97,74	98,51
					Realisasi	96,46	96,99
					Capaian	98,7%	98,46%
Sasaran 1.1	Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	IKU 2	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	%	Target	64,24	70,03
					Realisasi	66,73	70,03
					Capaian	100,7%	100%
Sasaran 1.2	Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	IKU 3	Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman	%	Target	18,636	22,73
					Realisasi	21,188	23,83
					Capaian	113,7%	104,84%
Tujuan 2	Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengamanan Pesisir Serta Peningkatan Upaya Retensi dan Daur Ulang Air	IKU 4	Indeks Bahaya Banjir	Skor	Target	2,0532	2,0329
					Realisasi	2,0329	2,0041
					Capaian	100,99%	101,42%
Sasaran 2.1	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan	IKU 5	Luasan Daerah Tergenang	Ha	Target	1071,54	1000
					Realisasi	1029,69	966,41
					Capaian	96,1%	103,36%
Tujuan 3	Konservasi Air Tanah Dan Mitigasi Penurunan Muka Tanah	IKU 6	Tingkat Penurunan Muka Tanah	cm	Target	8	8
					Realisasi	10	9,1
					Capaian	75%	86,25%
Sasaran 3.1	Pengendalian Penurunan Muka Tanah Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Terkendali	IKU 7	Jumlah Area Pengendalian Zona Konservasi Air Tanah	Area	Target	1	21
					Realisasi	21	21
					Capaian	2100%	100%

(Sumber : Renstra DSDA 2023-2026, LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama DSDA, ada 1 (satu Indikator yang capaiannya termasuk kriteria rendah, yaitu Tingkat Penurunan Muka Tanah yang ditargetkan hanya 8 cm, namun realisasinya adalah 10cm. Hal ini disebabkan karena masih masifnya penggunaan air tanah oleh masyarakat, mengingat wilayah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya terlayani dengan jaringan air minum perpipaan dengan cakupan eksisting yang baru mencapai $\pm 70\%$.

Sebagai evaluasi Dinas Sumber Daya Air berkomitmen untuk meningkatkan cakupan air minum Dinas melalui pembangunan SPAM/IPA komunal selama masa transisi ke air minum perpipaan, dan bekerja sama dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum aman perpipaan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian, serta dengan Perumda PAM Jaya dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk capaian kinerja tahun 2024, dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang ada, terdapat 1 Indikator yang capaiannya tidak mencapai 100% atau masuk kategori Tinggi, yaitu Tingkat Penurunan Muka Tanah yang ditargetkan hanya 8 cm, namun realisasinya 9,1cm. Indikator ini cakupannya sangat luas karena upaya penurunan tingkat permukaan tanah membutuhkan kerjasama dan perhatian dari segenap *stakeholder* karena hal tersebut terkait dengan pengintegrasian pengelolaan sumber daya air secara terpadu antar instansi dan masyarakat. Penyebab ketidaktercapaian dimungkinkan oleh masih masifnya penggunaan air tanah oleh masyarakat, mengingat wilayah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya terlayani dengan jaringan air minum perpipaan dengan cakupan eksisting saat ini baru mencapai $\pm 70\%$. Sebagai evaluasi, Dinas Sumber Daya Air berkomitmen untuk meningkatkan cakupan air minum melalui pembangunan SPAM/IPA komunal selama masa transisi ke air minum perpipaan, dan bekerja sama dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum aman perpipaan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian, serta dengan Perumda PAM Jaya dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum di Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian kinerja tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana penurunan muka tanahnya mencapai 10 cm.

IKU 1 : Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses layanan Air Minum dan Sanitasi merupakan jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Cara perhitungan dilakukan dengan merata-rata capaian Persentase Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak yang angkanya diperoleh berdasarkan survei Susenas Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data Susenas BPS diperoleh akses air minum dan sanitasi layak 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air Minum Layak

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air Minum Layak	2023	2024
Akses Air Minum Layak	99,42%	99,96%
Akses Sanitasi Layak	93,5%	94,01%
Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	96,46%	96,99%

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Dari tabel di atas terlihat peningkatan kinerja untuk indikator persentase akses layanan air minum dan sanitasi layak dari 2023 ke 2024. Namun demikian pencapaiannya belum mencapai 100%. Belum sepenuhnya capaian kinerja dapat disebabkan oleh karena luasnya cakupan IKU 3, dimana terdapat faktor yang bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air sesuai Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja menjadi komponen yang terhitung sebagai capaian IKU. Komponen tersebut adalah persoalan Sanitasi yang pada Dinas Sumber Daya Air hanya terkait pengelolaan air limbah namun komponen didalamnya juga terkait dengan pengelolaan sampah dan pengendalian penyebaran penyakit yang tidak menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Sumber Daya Air sesuai Pergub 57 Tahun 2022.

IKU 2 : Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan

Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan Perumda PAM Jaya.



Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA jaringan air minum Perumda PAM Jaya yaitu: Volume produksi IPA selama 1 tahun x 150 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari. Pemakaian air bersih untuk peruntukan bangunan rumah biasa = 150L/penghuni/hari (Pergub Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018) Tahun 2024. Jumlah penduduk terlayani air minum Perumda PAM Jaya kemudian dibagi dengan data proyeksi jumlah penduduk DKI Jakarta. Hasil perhitungan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20. Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan 2023-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total jumlah penduduk yang terlayani air bersih				7.265.566	7.476.579
2	Proyeksi jumlah penduduk				10.887.800	10.684.950
	Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan (1/2x100%)	64,24%	65,30%	65,41%	66,73%	70,03%

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya tren kenaikan persentase capaian realisasi tiap tahun untuk mengejar target Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi target air minum perpipaan sebesar 100% pada tahun 2030 sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

IKU 3 : Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman

Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman adalah cakupan layanan air limbah yang terhubung jaringan perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) atau memiliki tangki septik yang dilakukan penyedotan secara rutin termasuk dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Cakupan layanan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang terlayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah adalah 1 Rumah Tangga terdiri dari 5 orang untuk SPALD yang dikelola DSDA dan berdasarkan *Person Equivalent* (PE) untuk SPALD yang dikelola PD PAL Jaya.



Jumlah penduduk menggunakan Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010–2035 (Katalog BPS: 2101018) Tahun 2024.

Adapun realisasi IKU Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman 2023 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.21. Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman 2023–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proyeksi Jumlah Penduduk	-	-	-	10.887.800	10.684.950
2	Populasi Terlayani Perumda PAL Jaya	-	-	-	2.077.023	2.077.023
3	Capaian SPALD yang dibangun Pemerintah	-	-	-	229.927	249.741
4	Jumlah Ekuivalen Penduduk Terlayani (2+3)	-	-	-	2.306.951	2.326.765
	Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman (4/1x100%)	17,75%	18,19%	20,58%	21,188%	23,830%

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat adanya tren kenaikan persentase capaian realisasi tiap tahun untuk persentase akses layanan air limbah aman. Namun demikian belum sempurnanya pencapaian disebabkan karena pelaksanaan penuntasan IKU ini sering kali menemui permasalahan dan kendala diantaranya adanya penolakan Masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan SPALD yang seringkali mengakibatkan SPALD gagal dibangun serta adanya gagal Lelang pada saat proses pengadaan barang dan jasa.

IKU 4 : Indeks Bahaya Banjir

Indeks bahaya banjir adalah skor yang menunjukkan tingkat bahaya/hazard dari peristiwa banjir yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas yakni rendah dengan skor <1,5, sedang dengan skor 1,5 sd 2, dan tinggi dengan skor > 2 sesuai Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Perhitungan klasifikasi skor tingkat bahaya/hazard dihitung menggunakan formulasi: $(0,4 \times \text{nilai tinggi genangan}) + (0,2 \times \text{nilai lama genangan}) + (0,2 \times \text{frekuensi genangan}) + (0,2 \times \text{luas genangan})$ berdasarkan skala kelurahan. Realisasinya ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22. Indeks Bahaya Banjir per Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Bahaya Banjir	
			2023	2024
JAKARTA PUSAT				
1	Tanah Abang	Petamburan	1,8	1,8
		Karet Tengsin	2,2	2,2
		Bendungan Hilir	2,2	2,2
2	Sawah Besar	Pasar Baru	1,8	1,8
JAKARTA UTARA				
3	Penjaringan	Kamal Muara	1,8	1,8
		Kapuk Muara	1,8	1,8
		Pluit	2,2	2,2
		Pejagalan	2,2	2,2
		Penjaringan	1,8	1,8
4	Cilincing	Marunda	1,8	1,8
		Semper Barat	1,8	1,8
		Semper Timur	1,5	1,5
		Rorotan	1,8	1,8
		Sukapura	2,2	2,2
5	Koja	Koja	1,8	1,8
		Rawa Badak Selatan	1,8	1,8
6	Tanjung Priok	Sungai Bambu	1,8	1,8
7	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	1,8	1,8
8	Pademangan	Ancol	2,2	2,2
JAKARTA BARAT				
9	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	1,8	1,8
		Sukabumi Selatan	2,2	2,2
		Kedoya Utara	2,4	1,5
		Kedoya Selatan	1,5	1,5
10	Kembangan	Meruya Selatan	1,8	1,8
		Kembangan Utara	2,0	2,0
		Kembangan Selatan	1,5	1,5
		Srengseng	2,2	2,2
		Joglo	1,8	1,8
		Meruya Utara	1,8	1,8
11	Cengkareng	Rawa Buaya	2,1	2,1
		Cengkaren Timur	1,8	1,8
		Cengkareng Barat	1,8	1,8
		Kedaung Kali Angke	1,8	1,8
		Kapuk	1,8	1,8
		Duri Kosambi	2,2	2,2
12	Palmerah	Jati Pulo	1,8	1,8

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Bahaya Banjir	
			2023	2024
		Slipi	1,8	1,8
13	Kali Deres	Tegal Alur	2,0	2,0
		Pegadungan	1,8	1,8
		Kamal	1,8	1,8
JAKARTA SELATAN				
14	Kebayoran Baru	Kramat Pela	1,8	1,8
		Petogokan	1,8	1,8
		Pulo	1,8	1,8
		Cipete Utara	1,8	1,8
		Gunung	1,8	1,8
15	Kebayoran Lama	Grogol Utara	1,8	1,8
		Cipulir	2,4	1,5
		Pondok Pinang	2,4	2,4
		Kebayoran Lama Selatan	1,8	1,8
16	Pasar Minggu	Pejaten Timur	2,8	2,8
		Pejaten Barat	2,2	2,2
		Jati Padang	2,4	2,4
		Cilandak Timur	2,4	2,4
17	Cilandak	Gandaria Selatan	1,8	1,8
		Cipete Selatan	1,8	1,8
		Cilandak Barat	1,8	1,8
		Lebak Bulus	2,2	2,2
		Pondok Labu	2,2	2,2
18	Setiabudi	Kuningan Timur	1,8	1,8
		Menteng Atas	1,8	1,8
		Karet Semanggi	1,8	1,8
19	Pancoran	Rawa Jati	2,6	2,6
		Duren Tiga	2,2	2,2
		Pancoran	1,8	1,8
		Pengadegan	2,6	2,6
		Kalibata	1,8	1,8
20	Tebet	Kebon Baru	2,6	2,6
		Manggarai	1,8	1,8
		Tebet Barat	1,8	1,8
		Bukit Duri	1,8	1,8
21	Mampang Prapatan	Bangka	1,5	1,5

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Bahaya Banjir	
			2023	2024
		Mampang Prapatan	1,8	1,8
		Kuningan Barat	2,4	2,4
		Tegal Parang	2,2	2,2
		Pela Ampang	2,6	2,6
22	Jagakarsa	Lenteng Agung	2,2	2,2
		Jagakarsa	2,2	2,2
		Ciganjur	2,2	2,2
		Srengseng Sawah	2,2	2,2
		Tanjung Barat	1,5	1,5
23	Pesanggrahan	Bintaro	2,4	2,4
		Ulujami	2,2	2,2
		Petukangan Utara	2,6	2,6
		Petukangan Selatan	1,8	1,8
JAKARTA TIMUR				
24	Matraman	Pisangan Baru	1,8	1,8
		Kebon Manggis	2,6	2,6
25	Makasar	Cipinang Melayu	2,4	2,4
		Makasar	2,2	1,5
		Kebon Pala	1,8	1,8
26	Cakung	Rawa Terate	2,4	2,4
		Pulo Gebang	1,8	1,8
		Cakung Timur	1,8	1,8
27	Jatinegara	Cipinang Muara	2,4	2,4
		Kampung Melayu	2,8	2,8
		Bidara Cina	2,4	2,4
28	Kramat Jati	Cawang	2,8	2,8
		Kramat Jati	2,6	2,6
		Cililitan	2,8	2,8
		Bale Kambang	2,6	2,6
		Kampung Tengah	1,5	1,5
		Batu Ampar	1,8	1,8
		Dukuh	1,8	1,8
29	Duren Sawit	Pondok Kelapa	2,2	2,2
		Pondok Bambu	2,2	2,2
		Malaka Sari	1,8	1,8

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Bahaya Banjir	
			2023	2024
		Kelender	1,8	1,8
30	Pasar Rebo	Pekayon	2,2	2,2
		Kalisari	2,2	2,2
		Baru	2,2	2,2
		Cijantung	1,8	1,8
31	Cipayung	Lubang Buaya	1,8	1,8
		Cilangkap	2,2	2,2
		Bambu Apus	2,2	2,2
32	Ciracas	Kelapa Dua Wetan	2,2	2,2
		Rambutan	2,2	2,2
33	Pulo Gadung	Pisangan Timur	1,8	1,8
KEPULAUAN SERIBU				
34	Kepulauan Seribu Utana	Pulau Kelapa	1,8	1,8
35	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Pari	1,8	1,8
	Rata-Rata		2,0329 (TINGGI)	2,0041 (TINGGI)

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penuntasan target IKU ini berlangsung dengan baik yang ditandai dengan capaian kinerja pada selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2023 dan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan serta adanya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

IKU 5 : Luasan Daerah Tergenang

Luas daerah genangan banjir dihitung berdasarkan selisih luasan banjir yang diperoleh melalui peta Sebaran Genangan Berbasis Rumah Tangga Tahun 2021 yang bersumber pada Data Genangan berdasarkan Pantau Banjir *Jakarta Smart City* dengan Reduksi luasan banjir akibat pembangunan Polder/Waduk/Kali yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Realisasinya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.23. Luas Area Genangan Tahun 2023-2024

Daerah Genangan	Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2023	Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2024
CAKUNG	10,84	10,84
Pulo Gebang	10,84	10,84
CENGKARENG	104,67	104,67

Daerah Genangan		Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2023	Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2024
	Duri Kosambi	45,32	45,32
	Kedaung Kali Angke	6,57	6,57
	Rawa Buaya	52,79	52,79
CILANDAK		19,81	19,81
	Cilandak Barat	2,33	2,33
	Cipete Selatan	8,21	8,21
	Gandarian Selatan	1,40	1,40
	Lebak Bulus	0,58	0,58
	Pondok Labu	7,29	7,29
CILINCING		4,80	4,80
	Kalibaru	2,95 Waduk Marunda (reduksi 2,95)	
	Sukapura	1,85	1,85
CIPAYUNG		81,79	81,79
	Bambu Apus	4,55	4,55
	Cilangkap	20,16	20,16
	Lubang Buaya	57,07	57,07
CIRACAS		14,35	14,35
	Kelapa Dua Wetan	0,96	0,96
	Rambutan	13,39	13,39
DUREN SAWIT		10,34	10,34
	Malaka Sari	2,18	2,18
	Pondok Bambu	8,16	8,16
JAGAKARSA		29,72	29,72
	Jagakarsa	23,68	23,68
	Tanjung Barat	6,05 Jacking Tj Barat (reduksi 6,05)	
JATINEGARA		37,48	37,48
	Bidara Cina	11,21	11,21
	Cipinang Muara	9,74	9,74
	Kampung Melayu	16,53	16,53
KALI DERES		34,61	34,61
	Kamal	18,87	18,87
	Tegal Alur	15,74	15,74
KEBAYORAN BARU		17,37	17,37
	Cipete Utara	3,99	3,99
	Gunung	4,72	4,72
	Petogoan	7,40	7,40
	Pulo	1,26	1,26
KEBAYORAN LAMA		13,81	13,81
	Cipulir	0,50	0,50 Pompa Cipulir

Daerah Genangan		Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2023	Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2024
			(reduksi 0,05)
	Pondok Pinang	13,31	13,31
KEBON JERUK		86,50	85,50
	Kedoya Selatan	58,04	
	Kedoya Utara	19,59	19,59 Polder Greenville (reduksi 19,59)
	Sukabumi Selatan	8,87	8,87
KEMBANGAN		59,83	59,83
	Joglo	0,51	0,51
	Kembangan Selatan	22,24	
	Kembangan Utara	19,59	19,59
	Meruya Utara	17,49	17,49
KRAMAT JATI		158,03	158,03
	Bale Kambing	26,50	26,50
	Batu Ampar	46,24	46,24
	Cawang	33,50	33,50
	Cililitan	8,93	8,93
	Kampung Tengah	11,34 Tanggul Kali Baru Timur (reduksi 11,34)	
	Kramat Jati	31,53	31,53
MAKASAR		60,39	60,39
	Cipinang Melayu	47,06	47,06
	Kebon Pala	1,72	1,72
	Makasar	11,60	11,60 Pompa Tipala (reduksi 11,60)
MAMPANG PRAPATAN		73,35	73,35
	Bangka	24,93 Jacking Kemang (reduksi 24,93)	
	Kuningan Barat	7,88	7,88
	Pela Mampang	39,63	39,63
	Tegal Parang	0,92	0,92
MATRAMAN		1,31	1,31
	Kebon Manggis	1,31	1,31
PADEMANGAN		11,82	11,82
	Ancol	11,82	11,82
PANCORAN		47,25	47,25
	Duren Tiga	6,71	6,71

Daerah Genangan		Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2023	Luas Daerah Genangan (Ha) Tahun 2024
	Kalibata	3,00	3,00
	Pengadegan	3,83	3,83
	Rawa Jati	33,71	33,71
PASAR MINGGU		137,79	137,70
	Cilandak Timur	41,92	41,92
	Jati Padang	60,58	60,58
	Pejaten Barat	30,26	30,26
	Pejaten Timur	5,02	5,02
PASAR REBO		45,05	45,05
	Baru	14,99	14,99
	Cinjantung	3,62	3,62
	Kalisari	19,13	19,13
	Pekayon	7,32	7,32
PENJARINGAN		4,18	4,18
	Pejagalan	0,56	0,56
	Penjaringan	3,62	3,62
PESANGGRAHAN		60,05	60,05
	Bintaro	31,59	31,59 Polder IKPN (reduksi 31,59)
	Pesanggrahan	2,78	2,78
	Petukangan Selatan	15,89	15,89
	Petukangan Utara	4,98	4,98
	Ulujami	4,81	4,81
SETIABUDI		7,49	7,49
	Karet Semanggi	7,49	7,49
TANAH ABANG		17,45	17,45
	Bendungan Hilir	2,11	2,11
	Karet Tengsin	12,81	12,81
	Petamburan	2,53	2,53
TEBET		5,14	5,14
	Kebon Baru	2,86	2,86
	Manggarai	1,89	1,89
	Tebet Barat	0,39	0,39
TOTAL		1.155,230	1.029,687
SISA GENANGAN		1029,69	996,41

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penuntasan target IKU ini berlangsung dengan baik yang ditandai dengan capaian kinerja pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan serta adanya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

IKU Indeks Bahaya Banjir dan IKU Luasan Daerah Tergenang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Salah satu tupoksi Dinas Sumber Daya Air Provinsi

DKI Jakarta adalah melaksanakan pengendalian banjir dan genangan di Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang mana diharapkan infrastruktur yang dibangun akan dapat memberikan *impact* dalam penurunan luasan daerah genangan dan penurunan indeks bahaya banjir.

IKU 6 : Tingkat Penurunan Muka Tanah

Berdasarkan definisi operasionalnya, realisasi dari IKU 6 ini diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.

Dalam perhitungan realisasinya, digunakan data yang diperoleh berdasarkan kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung pada 255 lokasi pada tahun 2023 dan 230 lokasi pada tahun 2024 dengan hasil pengukuran menggunakan Metode GPS Geodetik menghasilkan angka penurunan permukaan tanah di Provinsi DKI Jakarta berkisar antara 0 s.d. 10 cm. Detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Tingkat Penurunan Muka Tanah tahun 2023-2024

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
1	311K/BSKI	BASUKI RAHMAT	-2,7	-1,7
2	439B/PLUIT	WADUK PLUIT	-4,8	-3,0
3	014JS/PP1332B	JALAN KELAPA HIJAU	-0,2	
4	02JT	JALAN SETU PAYUNG	0	
5	1311L/PP481B	TB SIMATUPANG	-1,5	
6	149B	DANAU SUNTER BARAT	-4,4	
7	14JT	ROROTAN MARUNDA	-3,9	
8	312K	PERINTIS KEMERDEKAAN	-3,4	
9	407B/PP476B	TB SIMATUPANG	-0,1	
10	852A	MERUYA BARAT	-5,9	
11	ASTN/PP142	ASTON ANCOL	-4,1	-3,0
12	BM11/KMAL	TANJUNGAN KAMAL	-6,5	-5,0
13	BM12	TANJUNG PRIOK	-3,0	-,2,1
14	BBKN/PP012JS	SITU BABAKAN	0	0
15	CBA1	CENGKARENG BARAT	-7,9	-4,9
16	CDTB/PP477B	CONDET	0	
17	CINB/PP025JS	CINERE	-2,0	
18	CKNI/PP935	CIKINI	-3,5	-3,5
19	CP08/RAWA BUAYA	RAWA BUAYA	-6,5	
20	C001/03JU	ROROTAN MARUNDA	-3,0	-3,0
21	C002/1245B	CILINCING RAYA	-3,0	-2,0

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
22	C003/481A/PP90 5A	JALAN H SAMANHUDI	-2,9	-2,0
23	C004/852A	MERUYA UTARA	-5,9	-4,5
24	C005/782A/782B	TUBAGUS ANGKE	-4,4	-3,9
25	C006	JALAN MOH SAIDI CILEDUG	-4,4	-3,2
26	C007/PBJR	JL WIRYOPRANOTO PECENONGAN	-3,0	-3,0
27	C008/PP038	KRAMAT JAYA RAYA	-3,3	-3,3
28	C009/PP13JU02	DANAU SUNTER UTARA	-3,8	-3,0
29	C010/PIND/PP146 5B	PONDOK INDAH	-2,5	-2,0
30	C011/1266/PP765/ DAAN	DAAN MOGOT	-5,2	-4,2
31	C012	JL RAYA JOGLO	-4,8	-4,1
32	C013/PP743	DAAN MOGOT	-4,4	-4,1
33	C014/PP637	JL RC VETERAN	-3,8	-3,0
34	C015	JL HBR MOTIC	-3,9	-3,1
35	C016	PANTAI MUTIARA	-7,6	-5,6
36	C017	ANCOL BARAT VI	-4,3	-3,3
37	C018/PP741A	DAAN MOGOT	-4,5	-3,3
38	C019	KALIANGKE	-2,7	-2,0
39	C020	JL PLUIT RAYA BARAT	-4,1	-3,2
40	C021	JL TAMAN PALEM SARI	-4,5	-3,2
41	C022	DAAN MOGOT	-4,3	-4,0
42	C023/ANGKE	MUARA ANGKE	-9,7	-7,0
43	C024	ARTERI KELAPA GADING	-3,0	-3,0
44	C025	KAWASAN WISATA ANCOL	-3,7	-3,7
45	C026/))952A	JALAN TENTARA PELAJAR	-3,7	-3,0
46	C028	KAWASAN WISATA ANCOL	-3,9	-3,1
47	C029	KAWASAN WISATA ANCOL	-4,7	-4,0
48	C030	WADUK PLUIT SELATAN	-4,4	-4,0
49	C032/PP651B	POS PENGUMBEN KEBAYORAN LAMA	-4,0	-3,2
50	C033	JL SATU MARET KELAPA GADING	-4,4	-4,1
51	C034/PP77B	DANAU SUNTER SELATAN	-3,0	-2,8
52	C035	PANTAI INDAH TIMUR	-4,5	-3,5
53	C036	JALAN SATRIA LUMENTEN	-3,1	-3,0
54	C038	JALAN BULAK SEREH	-4,9	-4,1
55	C039	CITY RESORT BOULOVARD CENGKARENG	-4,1	-3,9

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
56	C040/MARU	JALAN AKSES MARUNDA	-4,7	-4,2
57	C041/P877	JALAN RAYA JOGLO	-4,0	-3,0
58	C042/PP351B	JALAN BEKASI TIMUR RAYA	-2,2	-2,0
59	C043	JALAN PANTAI INDAH BARAT	-3,9	-3,0
60	C044	PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-3,8	-3,0
61	C046/PP070	JALAN RAYA PEGANGSAAN DUA	-3,9	-3,0
62	C047/916	JALAN JUANDA	-3,0	-3,0
63	C050	KAMAL MUARA	-9,2	-8,2
64	C052/P917	JALAN VETERAN	-2,0	-2,0
65	C053/PP1080B	JALAN RADIN INTEN II	-3,3	-3,0
66	C055/PP780	JL PEJAGALAN RAYA BANDENGAN	-4,1	-3,5
67	C056/PP510A	JL WOLTER MONGINSIDI	-2,7	-2,0
68	C057	JALAN BUGIS KEBON BAWANG	-3,5	-3,0
69	C058/MERU	MERUYA	-5,7	-5,2
70	C059/PP1379B	JALAN MATRAMAN RAYA	-2,8	-2,8
71	C060	JALAN BENYAMIN SUEB	-3,0	-3,0
72	C061	JALAN KEMBANGAN BARU	-5,7	-5,5
73	C062	JALAN WADUK PLUIT SELATAN	-4,4,	-4,0
74	C063	KAWASAN WISATA ANCOL	-3,3	-3,0
75	C064/PP1241B	JALAN PEMUDA	-2,5	-2,0
76	C065	JALAN MANGGA DUA RAYA	-2,0	-2,0
77	C066	JALAN PANTAI INDAH UTARA 1	-4,2	-4,0
78	C067/NWP6	JALAN RAYA BOGOR	0	0
79	C068	MUARA BARU	-7,7	-7,0
80	C069/PP707	JALAN KAMAL RAYA	-7,0	-6,7
81	C071	PANTAI INDAH KAPUK	-6,6	-6,6
82	C072/451B	JALAN PULOMAS SELATAN	-3,0	-3,0
83	C073	JALAN HAYAM WURUK	-3,0	-3,0
84	C074/921A	TANAH ABANG	-3,0	-3,0
85	C075	JALAN PANTAI INDAH TIMUR	-7,1	-6,6
86	C077/PP920	JALAN CIDENG TIMUR	-3,4	-3,0
87	C079/WISMA PTM	GAMBIR	-3,7	-3,0
88	C080/PP128A	JEMBATAN TIGA	-4,4	-4,0

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
89	C081	MUARA BARU RAYA	-5,5	-5,0
90	C082	TANJUNGAN KAMAL	-5,9	-5,5
91	C083/PP828B	JALAN KEMANGGISAN LAMA	-4,4	-4,4
92	C085/PP017	STASIUN TANJUNG PRIOK	-2,9	-2,9
93	C086/PP435B	JALAN TIPAR CAKUNG	-3,6	-3,6
94	C087/KAMU	KAMAL MUARA	-8,8	-7,8
95	C088/951B	JALAN LATU HARHARI	-2,0	-1,5
96	C089/PP160	TAMAN KOTA YOS SUDARSO	-3,7	-3,0
97	C091/315B/TTG172 A	JL INSPEKSI SALURAN KALI MALANG	-4,2	-4,0
98	C092	JALAN KEMUNING RAYA	-4,5	-4,5
99	C094	PANTAI INDAH KAPUK	-5,9	-5,9
100	C095/926A	JALAN PERWIRA GAMBIR	-2,8	-2,8
101	C096/06JP	SALEMBA	-2,9	-2,9
102	C097/PP930/KWI TANG	TUGU TANI KWITANG	-3,0	-3,0
103	C098	JALAN PLUIT RAYA BARAT	-4,5	-4,0
104	C099	PANTAI MUTIARA	-6,2	-6,0
105	C100	JALAN UTAN JATI DAAN MOGOT	-5,1	-5,0
106	C101	JALAN KAMAL RAYA	-7,7	-7,5
107	C103	JALAN PANTAI INDAH SELATAN	-4,1	-4,0
108	C104/P637	SUDIRMAN THAMRIN	-2,2	-2,0
109	C105	JALAN AQUARIUM	-2,7	-2,0
110	C106/TNKL	PASAR IKAN SUNDA KELAPA	-4,4	-4,0
111	C108/836B	KEDOYA RAYA	-3,7	-3,0
112	C111	RE MARTADINATA ANCOL	-3,8	-3,0
113	C112	KAWASAN WISATA ANCOL	-3,9	-3,0
114	C113/22JU	PLUIT KARANG RAYA	-5,5	-5,0
115	C114/21JU	PLUIT SELATAN RAYA	-5,3	-5,0
116	C115/15JB	JALAN PANJANG	-4,0	-4,0
117	C116	JALAN KAPUK KAMAL RAYA	-5,0	-5,0
118	C117/775A/PP802 A	JALAN KEDOYA RAYA	-4,4	-4,2
119	C119/04JB	LINGKAR LUAR BARAT	-6,0	-6,0
120	CP02/PP120B/PL UIT	AKSES TIMUR PANTAI MUTIARA	-6,0	-6,0
121	CP05	PANTAI MUTIARA	-7,7	-7,0

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
122	DADP	DADAP	-9,1	
123	GEMP	GEMPOL	-3,7	
124	GMIN	TANJUNG PRIOK	-4,0	
125	GPS11/PP1162B	RE MARTADINATA ANCOL	-3,1	-3,0
126	GPS52	PANTAI MUTIARA	-7,7	-7,4
127	GPS62	PANTAI MUTIARA	-7,5	-7,4
128	ISNA	ISTANA NEGARA	-3,1	-3,0
129	KBA1	KEBAYORAN BARU	-3,5	-3,0
130	KLBR	KALI BARU CILINCING	-3,7	-3,2
131	KLGD/PP80	KELAPA GADING	-4,0	-3,3
132	KMAY	KEMAYORAN	-3,9	-3,0
133	KUNI/PP502	KUNINGAN	-1,8	-1,5
134	LNTN	LENTENAN	-3,7	-3,1
135	MONA	MONAS	-3,5	-3,1
136	MRND	MARUNDA	-4,7	-3,2
137	MUBA	MUARA BARU	-10,0	-9,1
138	MUTI	PANTAI MUTIARA	-5,5	-5,5
139	NRP3	PANTAI MUTIARA	-7,7	-7,0
140	PRIO	TANJUNG PRIOK	-4,0	-4,0
141	P367/PP439B	DEWI SARTIKA	0	
142	P394/PP1337B	BAMBU APUS	-1,3	
143	PH01	GREEN BAY PLUIT	-5,4	-5,1
144	PIK2/PP110A	PANTAI INDAH KAPUK	-4,7	-4,1
145	PP03	DANAU SUNTER UTARA	-3,1	
146	PP1515B	JALAN MATRAMAN RAYA	-1,1	
147	PP202/PP208	PULO MAS TIMUR	-3,5	
148	PP864B	JALAN HAJI SABAA	-5,4	
149	PP913	JALAN KH HASYIM ANSHARI	-3,4	
150	PPNN	JALAN KELAPA HIJAU	0	
151	RG06	JALAN KEBAYORAN BARU	-3,9	
152	SHIA1	JALAN MINANG KABAU TIMUR	-2,0	-2,0
153	SHIA2/PP784	TUBAGUS ANGKE	-4,1	-4,1
154	SUNT	SUNTER UTARA	-3,3	
155	UBPP	KANTOR PU JAKTIM	-3,7	
156	UKP4/PP1390B	SUNTER	-3,5	-3,0
157	PM01	POMPA KAMAL	-9,1	-8,1
158	PM02	WTP/PUMPSTATION	-4,5	-4,1
159	PM03	JUNCTION	-5,0	-5,0
160	PM04	SEMANAN RW07	-4,2	-4,0
161	PM05	RW01 SEMANAN	-4,5	-4,1
162	PM06	DEPARTEMENT AGAMA	-3,9	-3,7
163	PM07	PERUMNAS CENGKARENG	-3,6	-3,3

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
164	PM08	KEDAUNG KALI ANGKE	-4,3	-4,0
165	PM09	GATE POGLAR	-4,1	-4,1
166	PM10	WADUK GROGOL	-3,0	-3,0
167	PM11	KALI DURI	-4,0	-4,0
168	PM12	KAPUK 1	-3,9	-3,0
169	PM13	MUARA ANGKE	-8,6	-7,7
170	PM14	WADUK BOJONG INDAH	-4,7	-4,2
171	PM15	WADUK PLUIT	-6,9	-6,0
172	PM16	PLUIT VILLAGE	-4,6	-4,0
173	PM17	BIMOLI	-4,4	-4,1
174	PM18	POMPA TOMANG BARAT	-3,8	-3,8
175	PM19	PASAR IKAN	-4,0	-4,0
176	PM20	PINANGSIA	-2,9	-2,9
177	PM21	KARTINI V	-3,2	-3,0
178	PM22	INDUSTRI	-3,6	-3,0
179	PM23	POSKO KEMBANGAN	-4,9	-4,5
180	PM24	PINTU AIR KAMPUNG BANDAN	-4,1	-3,3
181	PM25	RAJAWALI SELATAN	-3,9	-3,2
182	PM26	ANCOL	-3,1	-2,8
183	PM27	SUNTER UTARA	-3,7	-3,0
184	PM28	SUNTER SELATAN	-3,7	-3,0
185	PM29	CEMPAKA BARU SERDANG	-3,7	-3,7
186	PM30	SUMUR BATU	-3,0	-3,0
187	PM31	YOS SUDARSO 1	-3,8	-3,1
188	PM32	YOS SUDARSO 2	-2,9	-2,4
189	PM33	PULO MAS	-2,8	-2,4
190	PM34	PLUMPANG	-3,4	-3,0
191	PM35	SUNTER TIMUR 3 RAWA BADAQ	-3,7	-3,1
192	PM36	KOJA	-3,8	-3,2
193	PM37	LAGOA	-3,7	-3,5
194	PM38	DEWA RUCI	-2,9	-2,5
195	PM39	BANGLIO	-3,8	-3,0
196	PM40	KELAPA GADING	-3,7	-3,3
197	PM41	KALIDERES	-4,0	-4,0
198	PM42	RW01 KEMBANGAN UTARA	-6,1	-5,5
199	PM43	PHB BOJONG	-4,9	-4,1
200	PM44	PEDONGKELAN	-3,9	-4,0
201	PM45	BULAK CABE	-4,1	-4,3
202	PM46	KAPUK 2	-4,3	-4,3
203	PM47	SINDANG	-4,0	-4,0
204	PM48	GAYA MOTOR 2	-3,5	-3,0

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
205	PM49	BGR	-3,1	-3,0
206	PM50	ANEKA ELOK	-2,9	-2,4
207	PM51	CIDENG	-2,7	-2,2
208	PM52	PUMPGATE JALAN BATU	-3,2	-3,2
209	PM53	GEDUNG JAYA	-4,0	-4,2
210	PM54	PINTU AIR TARAKAN	-3,4	-3,2
211	PM55	PINTU AIR MARINA	-3,4	-3,3
212	PM56	MABES13	-2,9	-2,0
213	PM57	MANGGA DUA SISI UTARA	-3,0	-3,0
214	PM58	CEMPAKA PUTIH	-3,1	-3,0
215	PM59	GANG MACAN	-4,0	-4,0
216	PM60	PINTU AIR HONDA	-3,2	-3,1
217	PM61	ATMAJAYA	-3,4	-3,0
218	PM62	WIJAYA KUSUMA	-4,4	-4,0
219	PM63	KEMANG TIMUR 1	-2,6	-2,0
220	PM64	PULO RAYA	-3,0	-2,0
221	PM65	PONCOL	-2,9	-2,1
222	PM66	PONDOK JAYA	-2,3	-2,1
223	PM67	BUKIT DURI 9	-2,0	-2,0
224	PM68	BUKIT DURI I	-3,0	-3,0
225	PM69	PINTU AIR MANGGARAI	-2,7	-2,2
226	PM70	SETIA BUDI TIMUR	-3,2	-3,4
227	PM71	SLIPI HANKAM II	-3,5	-3,7
228	PM72	PINTU AIR KARET	-3,8	-3,6
229	PM73	TVRI	-3,5	-3,1
230	PM74	ULUJAMI	-3,7	-3,1
231	PM75	PERDATAM	-4,0	-4,0
232	PM76	CAWANG WIKA	-4,2	-4,0
233	PM77	WADUK MELATI	-2,9	-2,0
234	PM78	KERAMAT JATI	-2,0	-1,0
235	PM79	BIDARA CINA	-2,9	-2,3
236	PM80	KEBON BARU RW 09	-3,1	-3,1
237	PM81	TELUK GONG	-4,7	-4,1
238	PM82	PINTU AIRKAMPUNG GUSTI	-4,6	-4,1
239	PM83	WADUK WIJAYAKUSUMA	-4,4	-3,9
240	PM84	KLINGKIT	-4,7	-4,2
241	PM85	DAAN MOGOT KM13	-4,7	-4,4
242	PM86	PINTU AIR KALIDURI LEDENG	-4,1	-3,6
243	PM87	IPAL FILTERASI KOTA TUA	-3,4	-3,0
244	PM88	RAWA KEPA	-3,0	-3,0
245	PM89	PINTU AIR SOGO	-3,1	-3,0

No	ID	Lokasi	Rate (cm) 2023	Rate (cm) 2024
246	PM90	SETIABUDI BARAT	-2,9	-2,4
247	PM91	IPAL WADUK SUNTER SELATAN	-3,3	-3,1
248	PM92	PINANG	-3,9	-3,1
249	PM93	IPAL ASRAMA DINAS KEBAKARAN	-3,5	-3,0
250	PM94	IPAL DLH SEMPER BARAT	-3,9	-3,0
251	PM95	IPAL RTH PEDAEANGAN	-2,9	-3,0
252	PM96	IPAL MALAKA SARI	-3,8	-3,0
253	PM97	UBPP	-3,6	-3,3
254	PM98	DAMKAR JOGLO KEMBANGAN	-5,1	-4,9
255	PM99	IPAL RUSUN DLH CENGKARENG	-4,2	-4,0

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

IKU ini merupakan IKU yang cakupannya sangat luas karena upaya penurunan tingkat permukaan tanah membutuhkan kerjasama dan perhatian dari segenap *stakeholder* karena hal tersebut terkait dengan pengintegrasian pengelolaan sumber daya air secara terpadu antar instansi dan masyarakat dari hulu dan hilir.

Penyebab ketidaktercapaian dimungkinkan oleh masih masifnya penggunaan air tanah oleh masyarakat, mengingat wilayah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya terlayani dengan jaringan air minum perpipaan dengan cakupan eksisting saat ini baru mencapai $\pm 70\%$. Sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja, Dinas Sumber Daya Air berkomitmen untuk meningkatkan cakupan air minum melalui pembangunan SPAM/IPA komunal selama masa transisi ke air minum perpipaan serta mengurangi pemakaian air tanah oleh masyarakat sehingga akan memperbesar imbuhan/*recharge* air tanah dan mengurangi penurunan tanah secara masif. Dinas Sumber Daya Air juga tetap akan bekerja sama dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum aman perpipaan melalui pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian dan melalui pembangunan IPA pada lokasi-lokasi lain, serta dengan Perumda PAM Jaya dalam penyediaan dan peningkatan akses air minum di Provinsi DKI Jakarta.

IKU 7 : Jumlah Area Pengendalian Zona Konservasi Air Tanah

Area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah adalah area yang dilakukan pengendalian penggunaan air tanah. Area tersebut sesuai dengan kawasan dan ruas jalan yang termuat dalam Pergub 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (12 ruas jalan dan 9 Kawasan).

Hasil Audit Penggunaan Air Tanah menunjukkan bahwa terdapat 496 (empat ratus sembilan puluh enam) bangunan/gedung yang masuk ke dalam kriteria Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Berdasarkan neraca air yang didapat melalui Audit Penggunaan Air Tanah yang telah dilakukan, diketahui sumber- sumber air yang digunakan oleh tiap pemilik/pengelola bangunan adalah sebagai berikut:

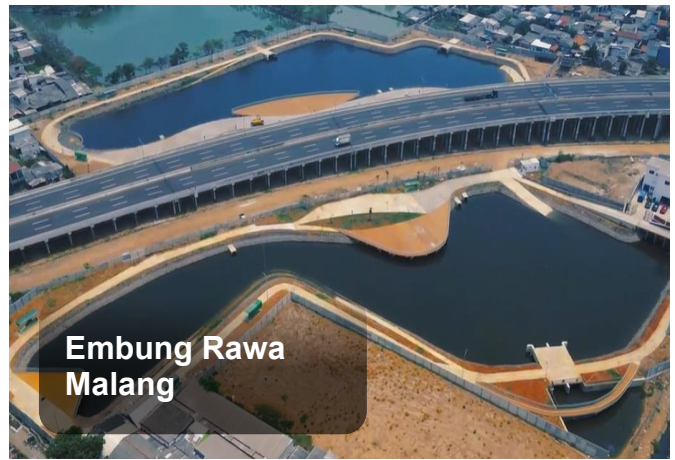
Tabel 2.25. Sumber Air yang Digunakan setiap Pemilik Bangunan/Gedung tahun 2023-2024

Kota Administrasi	Jumlah Bangunan/Gedung					Total	Keterangan
	Air Tanah	Air Perpipaan	Air Perpipaan dan Air Tanah	Truk Tangki	Tidak Ada Data		
Jakarta Pusat	1	130	20	-	15	166	Pengendalian dilakukan pada 21 area (12 ruas jalan dan 9 kawasan)
Jakarta Selatan	2	114	31	-	9	156	
Jakarta Timur	2	19	19	-	-	40	
Jakarta Utara	-	133	-	1	-	134	
Total	5	396	70	1	24	496	

(Sumber : LKIP DSDA 2023 dan 2024)

Penuntasan IKU Tingkat Penurunan Muka Tanah dan IKU Jumlah Area Pengendalian Zona Konservasi Air Tanah dipengaruhi oleh pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian melalui pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah di 3 titik lokasi rumah pompa pada tahun 2024 yaitu Kamal Muara, Sunter Jaya, dan Pelindo Sunda Kelapa Kota Administrasi Jakarta Utara, serta 3 titik lokasi rumah pompa pada tahun 2023 yaitu Muara Angke, Junction PIK, dan Kodamar, serta *Automatic Water Level Recorder (AWLR)* dan *Master Controller Unit (MCU)* untuk kebutuhan Sistem Monitoring Penurunan Tanah dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.

Capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air 2020-2024 berupa beberapa contoh infrastruktur terbangun dirangkum sebagai berikut:



(a)



(b)

Gambar 2.7. Beberapa Contoh infrastruktur Terbangun ((a) 2023; (b) 2024
(Sumber : LKIP Dinas SDA Provinsi Jakarta 2023-2024)

2.3.2 Realisasi Anggaran

Capaian kinerja anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26. Capaian Anggaran Dinas SDA Provinsi Jakarta 2020-2024

Satuan	Anggaran, Realisasi dan Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengendali Banjir dan Abrasi	Anggaran Murni	2.746.792.247.998	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	1.745.772.001.596	-	-	-	-
	Realisasi	1.301.919.994.326	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	74,58%	-	-	-	-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	Anggaran Murni	208.641.464.822	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	37.984.636.931	-	-	-	-
	Realisasi	33.885.108.331	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	89,21%	-	-	-	-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Anggaran Murni	640.773.069.213	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	42.196.197.717	-	-	-	-
	Realisasi	38.408.436.284	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	91,02%	-	-	-	-
Program konservasi air	Anggaran Murni	19.034.367.755	-	-	-	-

Satuan	Anggaran, Realisasi dan Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah	Anggaran Perubahan	10.305.923.602	-	-	-	-
	Realisasi	7.150.630.363	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	69,38%	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	Anggaran Murni	190.491.131.081	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	180.578.928.616	-	-	-	-
	Realisasi	173.550.109.314	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	96,11%	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral	Anggaran Murni	361.881.828	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	359.488.844	-	-	-	-
	Realisasi	348.654.364	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	96,99%	-	-	-	-
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional	Anggaran Murni	10.449.941.563	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	6.548.474.985	-	-	-	-

Satuan	Anggaran, Realisasi dan Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	Realisasi	4.638.629.527	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	70,84%	-	-	-	-
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral	Anggaran Murni	187.028.669	-	-	-	-
	Anggaran Perubahan	38.210.020	-	-	-	-
	Realisasi	-	-	-	-	-
	Kinerja Anggaran	0,00%	-	-	-	-
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggaran Murni	-	2.780.526.980.948	2.737.378.416.206	2.125.783.822.619	1.696.027.024.358
	Anggaran Perubahan	-	2.843.875.032.274	2.528.667.799.532	1.930.051.362.748	2,050,685,548,907
	Realisasi	-	1.939.712.129.592	2.113.825.170.104	1.479.037.286.187	1.828.188.192.957
	Kinerja Anggaran	-	68,21%	83,59%	76,63%	89,15%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Anggaran Murni	-	530.994.960.841	417.538.384.202	818.386.446.781	907.767.487.599
	Anggaran Perubahan	-	473.502.414.479	377.992.028.729	854.930.242.954	916.029.345.920
	Realisasi	-	439.222.331.350	356.729.415.701	809.019.876.107	888.444.945.829

Satuan	Anggaran, Realisasi dan Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kinerja Anggaran	-	92,76%	94,37%	94,63	96,69%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Anggaran Murni	-	100.148.934.465	54.614.975.292	36.412.270.077	23.540.920.956
	Anggaran Perubahan	-	96.733.410.116	17.567.915.298	37.434.348.497	22.266.374.312
	Realisasi	-	47.807.554.313	4.268.213.145	22.713.617.101	20.404.747.385
	Kinerja Anggaran	-	49,42%	24,30%	60,68%	91,64%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Anggaran Murni	-	172.298.693.108	141.081906.011	642.100.261.674	680.148.129.002
	Anggaran Perubahan	-	133.861.219.443	122.484.689.032	482.749.732.073	659.333.715.040
	Realisasi	-	113.148.639.119	103.184.325.039	382.847.448.021	483.737.685.134
	Kinerja Anggaran	-	84,53%	84,24%	79,31%	73,37%
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Anggaran Murni	-	11.049.054.109	9.242.639.546	16.141.797.968	17.699.999.922
	Anggaran Perubahan	-	10.513.981.508	8.426.379.643	16.141.797.604	17.699.999.922
	Realisasi	-	8.797.255.598	8.169.137.750	14.832.029.920	15.589.187.922
	Kinerja Anggaran	-	83,67%	96,95%	91,89%	88,07%
Program Penunjang Urusan	Anggaran Murni	-	903.068.072.796	1.107.332.856.707	733.486.167.234	678.097.028.398

Satuan	Anggaran, Realisasi dan Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintahan Daerah Provinsi	Anggaran Perubahan	-	853.648.101.049	1.098.809.766.763	717.947.844.631	698.676.536.034
	Realisasi	-	603.233.114.854	1.040.597.198.013	666.148.822.513	646.445.216.272
	Kinerja Anggaran	-	70,67%	94,70%	92,79	92,52%
Total	Anggaran Murni	3.816.731.132.929	4.498.086.696.267	4.467.189.177.964	4.372.310.766.353	4.003.280.590.235
	Anggaran Perubahan	2.023.783.862.311	4.412.149.904.199	4.153.948.578.997	4.039.255.328.507	4.364.691.520.135
	Realisasi	1.559.901.562.509	3.151.940.559.826	3.626.773.459.752	3.374.599.079.849	3.882.809.975.499
	Kinerja Anggaran	77,08%	71,44%	87,31%	83,55%	88,96%

(Sumber LKIP DSDA 2020-2024)



Dilihat dari tabel di atas secara umum penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta menunjukkan tren penyerapan yang fluktuatif selama 5 tahun dengan tren yang cenderung bergerak naik per tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa adanya upaya perbaikan yang kontinu dalam hal pemaksimalan serapan anggaran yang terus diupayakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta setiap tahunnya.

Secara lebih spesifik, Program Pengelolaan SDA menunjukkan tren penyerapan anggaran yang fluktuatif, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menunjukkan tren penyerapan anggaran yang lebih baik, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjukkan tren penyerapan anggaran yang sangat membaik, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah menunjukkan tren penyerapan anggaran yang menurun dalam tiga tahun terakhir, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian menunjukkan tren penyerapan anggaran yang menurun dalam tiga tahun terakhir, serta Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi menunjukkan tren penyerapan yang cukup stabil.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAKARTA

Kelompok sasaran layanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah seluruh masyarakat Jakarta pada umumnya, mencakup masyarakat yang paling membutuhkan intervensi baik di bidang penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, maupun mitigasi banjir. Berikut prioritas rincian kelompok sasarannya:

1. Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kawasan permukiman padat/informal
 - Kawasan kumuh atau padat penduduk terutama yang minim akses terhadap jaringan air perpipaan dan fasilitas sanitasi layak.
 - Program Revitalisasi Tangki Septik difokuskan pada wilayah padat dan miskin.
 - Masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang biasanya hidup di kawasan permukiman padat penduduk menghadapi masalah kekurangan air bersih juga akses sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah stunting, gizi buruk, angka buang air besar sembarangan yang tinggi, serta menyebabkan kemudahan penyebaran berbagai penyakit. Dinas Sumber Daya Air juga hadir untuk memastikan tersedianya akses air bersih serta akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat MBR dan masyarakat miskin tersebut dalam

rangka kontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.

2. Kawasan Prioritas dengan Akses Air Minum Rendah

- Beberapa kelurahan prioritas dengan cakupan layanan air minum sangat rendah, termasuk di Kepulauan Seribu (Pulau Untung Jawa, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Panggang)

3. Masyarakat Pulau-pulau Kecil (Kepulauan Seribu)

- Meliputi penduduk di 8–11 pulau utama di wilayah itu, dengan penerapan teknologi seperti *SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)*, kios air, dan IPA mobile.
- Juga dalam cakupan program sanitasi seperti *JSDP (Jakarta Sewerage Development Project)* dan SPALD skala lokal.

4. Warga yang Bergantung pada Air Tanah di Daerah Rawan

- Masyarakat di wilayah dengan kualitas air tanah buruk atau *over-extraction* (potensi intrusi air laut, penurunan muka tanah), khususnya di Jakarta Utara.
- Program konversi ke “air perpipaan” diarahkan ke zona tersebut

5. Masyarakat Kawasan Rawan Banjir Akibat Curah Hujan atau Air Kiriman

- Permukiman di dataran rendah dan bantaran sungai, terutama yang sering terendam ketika hujan deras atau hujan lama, seperti yang terdapat di zona rawan sepanjang aliran Sungai Ciliwung, Cakung Cilincing.
- Masyarakat di daerah yang menerima banjir kiriman, termasuk dari daerah hulu seperti Bogor–Depok, menjadi prioritas dalam kegiatan seperti pengerukan dan optimalisasi pintu air serta pompa drainase.

6. Masyarakat Kawasan Pesisir Rawan Banjir Rob

- Fokus khusus ke area pesisir Jakarta Utara, di titik-titik seperti Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Kali Blencong, dan Kali Adem.

2.5 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

2.5.1 Dukungan PAM JAYA

A. Sejarah Singkat PAM JAYA

Pada tahun 1843 Pemerintah Hindia Belanda berupaya memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Kota Jakarta (Batavia) melalui pengadaan air bersih yang berasal dari sumur bor/artesis. Di tahun 1918–1920, ditemukan sumber mata air Ciburial di daerah Ciomas Bogor dengan kapasitas 484 liter/detik. Pada masa inilah

pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Gementeestaat-waterleidingen van Batavia*. Pada tanggal 23 Desember 1922 untuk pertama kalinya air yang berasal dari Ciburial Bogor dialirkan ke Kota Jakarta dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi PAM JAYA.

Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun 1945 pelayanan air minum dilaksanakan oleh Dinas Saluran Air Minum Kota Praja di bawah Kesatuan Pekerjaan Umum Kota Praja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 April 1977 mengesahkan PAM JAYA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA). Pada tanggal 2 November 1977 PAM JAYA dikukuhkan oleh SK Mendagri No. PEM/10/53/13350 yang diundangkan dalam Lembaran DKI Jakarta No. 74 Tahun 1977.

Pada tanggal 15 Oktober 1992, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 diubah menjadi Peraturan Daerah–Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA). Perubahan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan pelayanan, fungsi serta peranan Perusahaan Air Minum sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan saat itu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 terjadi proses restrukturisasi perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 4 Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Diharapkan dengan adanya perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dapat meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

B. Penugasan PAM JAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA), Tujuan PAM JAYA adalah pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan

pendapatan asli Daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian Daerah. Sedangkan Tugas pokok PAM JAYA adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, PAM JAYA berfungsi :

1. mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah
2. membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air
3. membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum, antara lain : hidran umum, terminal air dan tangki air
4. memasang dan memelihara pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
5. mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air minum;
6. melakukan penelitian laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum sesuai dengan syarat-syarat kesehatan;
7. melakukan survey dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;
8. melayani permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel, dan lain-lain
9. melakukan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum
10. menagih uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan per.undang-undangan yang berlaku;
11. mengambil tindakan terhadap pemakai air minum yang tidak sah
12. menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota
13. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. memberikan izin dan mengawasi instalatur di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. meningkatkan mutu, keterampilan, dan kesejahteraan karyawan dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karir untuk meningkatkan pelayanan umum.

C. Perubahan Bentuk Hukum PD PAM JAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, PAM JAYA didirikan dengan maksud:

- a. bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
- b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Tujuan pendirian PAM JAYA adalah:

- a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha PAM JAYA meliputi:

- a. membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;
- b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman,
- c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
- d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

D. Penugasan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Provinsi Jakarta Kepada PAM JAYA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. SPAM Jatiluhur - Hilir;

- b. SPAM Karian Serpong – Hilir;
- c. SPAM Buaran III dan Penambahan kapasitas (uprating) SPAM Buaran I –II sesuai dengan neraca air yang tersedia;
- d. SPAM Provinsi, di antaranya Pesanggrahan, Ciliwung, Komunal, Cilandak;
- e. pengurangan *non-revenue water*;
- f. perawatan berkala (*cyclical maintenance*);
- g. sambungan langsung (*connections*); dan
- h. prasarana pendukung (*others and building*).

Penugasan di atas bertujuan untuk:

- a. mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% di tahun 2030; dan
- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota.

Dalam pelaksanaan penugasan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:

- b. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan;
- c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat;
- d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Dukungan PAL JAYA

A. Penugasan PAL JAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, didirikan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disebut PD PAL JAYA. Pendirian PD PAL JAYA bertujuan: membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem perpipaan serta pengolahannya.

Dalam menyelenggarakan usahanya tersebut PD PAL JAYA melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem penyaluran air limbah dan pengolahannya;
- b. Menyusun dan melaksanakan program survei, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan pengolahan air limbah;
- c. Membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;
- d. Mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
- e. Melayani permohonan pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
- f. Mengawasi kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana Pemerintah Daerah di bidang pembangunan jaringan pipa air limbah dan pengolahannya;
- h. Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

B. Penugasan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga PD PAL JAYA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan Revitalisasi Tangki Septik rumah tangga yang meliputi :

- a. Perencanaan, dan
- b. Pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik

Perencanaan dilakukan oleh DSDA Provinsi Jakarta, sementara itu Pembangunan dan/atau perbaikan Tangki Septik dilakukan oleh PD PAL JAYA.

C. Perubahan Bentuk Hukum PD PAL JAYA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan

Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, Paljaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pengelolaan air limbah serta membantu terciptanya lingkungan hidup yang baik di Provinsi DKI Jakarta;
- c. berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- d. berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan air limbah kepada masyarakat,
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk mencapai tujuan di atas, kegiatan usaha yang dilakukan meliputi:

- a. penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem perpipaan/ system terpusat, sistem komunal, sistem setempat, dan kegiatan pendukung lainnya seperti pengelolaan lumpur tangki septik/instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung/ sistem plambing serta pengolahannya;
- b. pembangunan sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
- d. pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
- e. penyedotan lumpur tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan;
- f. pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
- g. jasa konsultasi pengelolaan air limbah;
- h. publikasi dan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah;
- i. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- j. pemanfaatan/utilisasi aset yang dimiliki untuk menunjang pendapatan usaha; dan;
- k. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

2.6.1 Potensi dan Ancaman dari Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dapat mempengaruhi kinerja dinas dan harus disusun kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengantisipasinya. Lingkungan eksternal ini membawa potensi atau manfaat yang dapat mendukung kinerja yang lebih tinggi, namun juga membawa tantangan dan ancaman yang tidak kecil dan berakibat buruk bagi masyarakat dalam kaitan dengan sumber daya air.

Beberapa aspek lingkungan eksternal yang mempengaruhi sumber daya air adalah sebagai berikut :

a. Cuaca dan Iklim

Dunia mengalami *triple planetary crisis*, di mana ada 3 krisis besar yang saling berkaitan dan mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi yaitu :

- Krisis iklim : peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan gangguan pola curah hujan akibat dampak emisi gas rumah kaca
- Krisis keanekaragaman hayati : percepatan hilangnya spesies dan degradasi habitat vital, yang mengganggu ekosistem
- Krisis polusi : pencemaran air, tanah, serta tumpukan limbah plastik dan bahan kimia yang berbahaya

Cuaca dan iklim saat ini sudah berubah dan sering menimbulkan hujan ekstrem di Jakarta. Dalam kondisi hujan normal, curah hujan per hari rata-rata di bawah 100 mm. Namun cuaca saat ini bisa membawa hujan ekstrem hingga di atas 150 mm/ hari. Akibatnya sering kali jumlah air hujan melebihi daya tampung drainase sehingga terjadi genangan dan banjir.

Permukaan air laut juga semakin lama semakin naik. Dari tahun ke tahun rata-rata air laut di pesisir Jakarta naik sekitar 3-8 mm/ tahun. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan muka tanah sehingga ancaman tenggelamnya pesisir Utara Jakarta semakin besar.

Kenaikan air laut dan penurunan muka tanah juga menyebabkan penurunan kualitas air tanah di Jakarta karena sudah terintrusi oleh air laut. Karena itu semakin lama air tanah di Jakarta mungkin akan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Cadangan air bersih lokal juga akan semakin menurun.

Selain curah hujan ekstrem, perubahan cuaca dan iklim juga dapat menimbulkan kemarau yang berkepanjangan yang dapat mengurangi ketersediaan air permukaan di danau, waduk, situ dan sungai. Hal ini dapat menyebabkan krisis air baku.

Ancaman lainnya datang dari krisis polusi. Datangnya hujan deras akan mencuci limbah domestik, sampah dan limbah industri ke sungai sehingga memperburuk kualitas air sungai. Di musim kemarau saat debit air sungai menurun, polutan-polutan tersebut akan semakin terkonsentrasi dan memperburuk pencemaran.

b. Geografis dan Geologis

Secara geografis Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir dari beberapa DAS yaitu DAS Ciliwung, DAS Pesanggrahan, DAS Angke, DAS Cakung, DAS Sunter, dan DAS Krukut Grogol. Selain itu, karakteristik ekoregion daratan DKI Jakarta hampir 50% luasnya memiliki karakteristik ekoregion rawan banjir yaitu berupa ekoregion fluvial bermaterial aluvium, fluviomarine dan dataran organik.

Selain itu, terjadi penurunan permukaan air tanah, dipengaruhi oleh penggunaan atau eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tanah, diperkirakan laju penurunan tanah sekitar 3 - 18 cm per tahun. Selain itu, wilayah Jakarta Utara berbatasan dengan laut, sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga mengakibatkan aliran air dari hulu tidak dapat terbangun atau mengalir langsung ke laut.

Secara topologi ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air. Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa saluran air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran

Lama, dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing).

c. Ekonomi dan Sosial

Kota Jakarta merupakan magnet yang membuat kota ini menjadi salah satu kota terpadat. Peningkatan jumlah penduduk Jakarta relatif sangat rendah (< 1% per tahun) dan mungkin sudah mulai terjadi *out-migration* yang mungkin akan mengurangi jumlah penduduknya, Jakarta tetap memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini menyebabkan tanah semakin tertutup oleh lapisan kedap yang tidak memungkinkan air meresap ke dalam tanah sehingga menimbulkan genangan dan banjir.

Dari sudut sosial, masyarakat yang tingkat kesadaran akan lingkungannya rendah juga memperburuk banjir yang terjadi dengan membuang sampah sembarangan.

Dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk serta perekonomian di Jakarta juga membawa dampak kerugian akibat banjir yang semakin besar. Rata-rata Jakarta mengalami kerugian ekonomi sebesar 2 triliun rupiah per tahun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 10 triliun rupiah per tahun bisa tidak dilakukan langkah-langkah signifikan untuk pengendalian banjir dan mekanisme mitigasi banjir.

d. Teknologi

Teknologi merupakan satu faktor yang menjadi potensi bagi Dinas Sumber Daya Air untuk mengelola penanganan banjir, diantaranya:

1. Pemantauan dan Prediksi Banjir

IoT Sensor dan Smart Monitoring

Sensor debit, curah hujan, dan ketinggian muka air di sungai/drainase terhubung real-time ke dashboard. Contoh: *Smart Water Level Sensor* di sungai dan polder.

Big Data dan Artificial Intelligence (AI)

- Prediksi banjir berbasis *AI (machine learning)* yang menggabungkan data cuaca, curah hujan, pasang laut, dan kondisi pompa.
- Bisa membuat *early warning system (EWS)* dengan akurasi lebih tinggi.

Remote Sensing dan Satelit

- Citra satelit (Sentinel, Landsat) dan *drone* untuk mendeteksi genangan, sedimentasi, intrusi air laut.
- Membantu pemetaan wilayah rawan banjir/rob secara cepat.

2. Pengelolaan Infrastruktur Drainase dan Pompa

Smart Pumping System

Pompa banjir otomatis dengan kontrol berbasis sensor di mana dapat menyala/mati sesuai elevasi air dan prediksi banjir.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Sistem kendali jarak jauh untuk memonitor status pompa, tanggul, pintu air secara real-time dari pusat kontrol.

Digital Twin Infrastruktur Air

Membuat model virtual dari sistem drainase, waduk, tanggul, pompa. Dapat dilakukan simulasi skenario banjir dan pemeliharaan prediktif.

3. Konservasi Air dan Air Bersih

Rainwater Harvesting Modern

Tangki pintar (*smart reservoir*) dengan sensor kualitas air, terhubung ke jaringan distribusi.

Desalinasi dan Pengolahan Air yang Canggih

Memanfaatkan *membrane bioreactor (MBR)* atau *reverse osmosis* skala kota untuk suplai air bersih, khusus di daerah pesisir.

Artificial Recharge

Teknologi injeksi air hujan ke akuifer untuk mengurangi intrusi air laut dan penurunan muka tanah.

4. Solusi Berbasis Alam (*Nature-Based Solutions / NBS*)

Blue-Green Infrastructure

Kanal, taman resapan, *eco-drainase* yang mengurangi limpasan air.

Permeable Pavement dan Smart Biopore

Jalan/halaman dengan bahan berpori ditambah sensor kelembaban tanah untuk memaksimalkan infiltrasi.

Mangrove Restoration dengan Drone

Penanaman mangrove otomatis via drone untuk melindungi pesisir dari rob.

5. Manajemen Data dan Layanan Publik

GIS dan Smart Mapping

Peta interaktif banjir, drainase, dan intrusi air laut berbasis GIS.

Mobile Apps untuk Warga

Aplikasi pelaporan banjir/genangan (*crowdsourcing* data warga) dengan info status pompa dan pintu air.

Blockchain untuk Air

Pencatatan distribusi air bersih, biaya operasional pompa, hingga proyek *CSR* berbasis *ledger* agar transparan.

2.6.2 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta

Untuk mengantisipasi tantangan/ ancaman dan memanfaatkan potensi dari lingkungan eksternal, perlu dianalisis kekuatan dan kelemahan yang ada di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar kedepannya dapat ditingkatkan.

A. Kekuatan (Strengths)

1. Prioritas Tinggi dalam Agenda Pemerintah Daerah

Isu banjir, drainase, dan ketersediaan air bersih adalah masalah vital di Jakarta. Karena itu, sektor SDA mendapat perhatian besar dari Gubernur, DPRD, hingga pemerintah pusat. Hal ini memastikan alokasi anggaran relatif besar dan adanya legitimasi politik yang kuat untuk pembangunan infrastruktur air.

2. Pengalaman Historis dan Kapasitas Teknis

Jakarta sudah lama menghadapi masalah banjir dan pengelolaan air. Dinas SDA memiliki pengalaman puluhan tahun dalam membangun waduk, saluran drainase, pintu air, pompa banjir, tanggul, hingga program normalisasi sungai. SDM teknis (insinyur, operator, teknisi pompa, tenaga survei hidrologi) relatif berpengalaman.

3. Infrastruktur yang Sudah Terbangun

Jakarta memiliki puluhan rumah pompa besar, jaringan drainase utama, waduk (Pluit, Ria-Rio, Sunter), pintu air, tanggul laut darurat, dan kanal banjir (BKB dan BKT). Infrastruktur ini menjadi modal dasar yang penting untuk memperkuat sistem pengendalian banjir.

4. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Internasional

Ada dukungan program nasional (misalnya *NCICD/Tanggul Laut Raksasa Jakarta*) dan proyek revitalisasi sungai oleh Kementerian PUPR. Dukungan dari lembaga internasional (JICA, Bank Dunia) memberi akses ke teknologi, pendanaan, dan pengetahuan global.

5. Regulasi dan Kerangka Hukum yang Mendukung

Dinas SDA bekerja dengan dasar hukum yang jelas (Perda, Pergub, RPJMD, Renstra, serta koordinasi dengan RPJMN). Regulasi ini memberi kepastian arah kebijakan.

6. Kapasitas Digital Mulai Berkembang

Pemanfaatan sistem pemantauan digital (*CCTV* di pintu air, sensor debit air, *dashboard* banjir) sudah mulai diterapkan. Langkah awal menuju *Smart Water Management* sudah ada.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Ketergantungan Tinggi pada Infrastruktur Mekanis

Sistem pengendalian banjir di Jakarta sangat bergantung pada pompa air dan tanggul. Jika listrik padam, pompa rusak, atau kapasitas berkurang, banjir sulit dihindari. Pemeliharaan rutin membutuhkan biaya besar dan sering terkendala.

2. Koordinasi Lintas Sektor yang Masih Lemah

Pengelolaan SDA bersinggungan dengan banyak instansi: Dinas Lingkungan Hidup (sampah dan limbah), Dinas Bina Marga (jalan dan saluran), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Perhubungan, hingga PLN, PAM Jaya, dan PAL Jaya. Koordinasi sering terhambat birokrasi sehingga mengurangi efektivitas penanganan permasalahan.

3. Data dan Sistem Informasi Belum Terintegrasi Penuh

Informasi curah hujan, debit sungai, pasang laut, dan kondisi pompa belum semuanya *real-time* dan terhubung lintas instansi. Akibatnya, pengambilan keputusan sering reaktif, bukan prediktif.

4. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah

Banyak warga masih membuang sampah ke kali, tidak memiliki *septic tank* standar, dan membangun rumah di sempadan sungai. Dinas SDA sering dipaksa “memadamkan masalah” akibat perilaku masyarakat, bukan mencegahnya.

5. Alih Fungsi Lahan dan Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jakarta kekurangan RTH (baru sekitar 5,209% dari total luas kota, jauh dari target 30%). Minimnya ruang resapan membuat setiap hujan deras langsung membebani saluran drainase. Dinas SDA kesulitan menambah area konservasi air karena konflik kepentingan tata ruang.

6. Pendekatan yang Masih Dominan Struktural (*Hard Engineering*)

Fokus pembangunan masih banyak pada infrastruktur beton: tanggul, kanal, pompa. Solusi berbasis alam (*nature-based solutions*) seperti taman resapan, biopori, sumur injeksi, *mangrove restoration* masih terbatas penerapannya.

7. Respon Darurat Lebih Dominan daripada Pencegahan

Seringkali langkah yang dilakukan reaktif (misalnya penyedotan banjir dengan pompa darurat) dibanding preventif (misalnya pengendalian tata ruang, pengurangan air tanah). Pola ini menyebabkan masalah banjir berulang terus-menerus.

8. Ketergantungan Tinggi pada Anggaran Pemerintah

Meski besar, APBD tidak selalu cukup untuk membiayai proyek besar (contoh: NCICD butuh lebih dari Rp 500 triliun). Keterlibatan sektor swasta/CSR masih minim.

9. Kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan Penurunan Tanah

Meski punya pengalaman teknis, kecepatan adaptasi terhadap tantangan baru (kenaikan air laut, rob, dsb) masih lambat. Beberapa wilayah pesisir sudah tergenang permanen, namun strategi jangka panjang belum jelas.

2.6.3 Permasalahan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dapat dianalisis per bidang yang ditangani oleh dinas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengendalian Banjir dan Genangan

Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Jakarta. Genangan dalam jumlah besar dapat melumpuhkan Ibukota dan menimbulkan dampak yang cukup besar karena banyak kegiatan ekonomi yang terganggu. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir dari beberapa DAS yaitu DAS Ciliwung, DAS Pesanggrahan, DAS Angke, DAS Cakung, DAS Sunter, dan DAS Krukut Grogol. Selain itu, karakteristik ekoregion daratan DKI Jakarta hampir 50% luasnya memiliki karakteristik ekoregion rawan banjir yaitu berupa ekoregion fluvial bermaterial aluvium, fluvimarine dan dataran organik.

Kejadian banjir di wilayah DKI Jakarta yang merupakan hilir DAS ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi di wilayah DAS bagian Hulu dan DAS bagian Tengah

yang mana letaknya di luar wilayah administrasi DKI Jakarta. Oleh karenanya penanganan banjir di DKI Jakarta harus terintegrasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Selain itu, permasalahan banjir tidak hanya disebabkan semata karena faktor alam. Pada umumnya permasalahan banjir terkait dengan makin berkurangnya kemampuan wilayah meresapkan air dan/atau mengalirkan air ke laut (karena daerah hilir). Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan banjir sangat berkaitan dengan luasan wilayah resapan air atau kondisi infrastruktur hidrologi yang ada seperti saluran drainase, situ, bangunan pengendali banjir serta kondisi sungai yang baik. Menurut Ketua Panitia Khusus Banjir (Pansus Banjir) DPRD DKI Jakarta (2020 dalam SIKPLHD Jakarta 2022) menyebutkan bahwa kapasitas sungai yang ada di DKI Jakarta dalam mengalirkan air hanya $950 \text{ m}^3/\text{s}$, sedangkan rata-rata debit air banjir tahunan mencapai $2.100\text{--}2.650 \text{ m}^3/\text{s}$. Terjadinya sedimentasi dan penyempitan daerah aliran sungai karena alih guna fungsi lahan juga membuat sungai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengalirkan air.

Ditinjau dari aspek hidrologi atau faktor alam, sumber banjir di DKI Jakarta adalah 1) hujan yang jatuh di wilayah Jabodetabek dan mengalir atau bermuara di Jakarta; 2) tingginya curah hujan yang terjadi di Jakarta; dan 3) adanya pasang naik air laut di wilayah Jakarta Utara. Risiko bencana banjir tersebut diperparah oleh faktor manusia maupun tata kelola kota. Berdasarkan hasil kajian BNPBD DKI Jakarta terdapat beberapa faktor lain yang memperparah bencana banjir, yaitu:

- a. Penurunan permukaan air tanah, dipengaruhi oleh penggunaan atau eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tanah, diperkirakan laju penurunan tanah sekitar 3 - 18 cm per tahun. Selain itu, wilayah Jakarta Utara berbatasan dengan laut, sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga mengakibatkan aliran air dari hulu tidak dapat terbuang atau mengalir langsung ke laut.
- b. Keberadaan jaringan drainase di Provinsi DKI Jakarta yang kurang kapasitasnya dalam menampung air hujan. Hal ini dapat terlihat dari genangan air di berbagai lokasi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tidak optimalnya fungsi drainase disebabkan oleh saluran air yang ada tersumbat oleh sampah dan tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi material yang kedap air, sehingga air tidak dapat meresap dalam tanah dengan baik.
- c. Pendangkalan dan rusaknya saluran dan tangkapan air seperti drainase, waduk, banjir kanal, dan sungai. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kapasitas dalam menampung volume air yang menyebabkan terjadinya

- peluapan air. Selain itu, terjadinya pendangkalan sungai-sungai yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta memicu terjadinya banjir, hal ini diperparah dengan terjadinya curah hujan ekstrim dengan intensitas tinggi dan durasi lama di wilayah hulu (Bogor dan sekitarnya).
- d. Perubahan tutupan lahan. Dari tahun ke tahun terjadi perubahan tutupan lahan yang signifikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seperti permukiman semakin luas dan keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin kecil. Kondisi tersebut memicu peluang meluapnya sungai dan jaringan drainase jika terjadi hujan lebat.
 - e. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin hari kian menurun, seperti pembuangan sampah secara sembarangan dan pembangunan secara masif di sekitar bantaran sungai.

B. Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Air

Keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta berada dalam posisi yang rentan. Hal ini ditunjukkan melalui analisis daya dukung dan daya tampung air yang telah dibahas sebelumnya. Kondisi sumber daya air terutama di wilayah daratan 98% wilayahnya berada pada status telah terlampaui. Sementara di Kepulauan Seribu, secara agregat ketersediaan air juga belum mampu mencukupi kebutuhan domestik.

Ketersediaan air di DKI Jakarta didukung oleh wilayah lain. Sebanyak 81 persen air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 16 persen berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang, dan 3 persen berasal dari sungai-sungai di Jakarta. Hal ini menandakan bahwa wilayah fungsional sangat berperan penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta. Padahal, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui.

Kerentanan sumber daya air di Jakarta diperparah dengan kondisi eksisting pemanfaatan air perpipaan yang masih minim. Saat ini hanya sekitar $\pm 70\%$ daerah teraliri jaringan perpipaan. Sementara itu pemanfaatan air tanah juga masih secara masif dilakukan.

Kondisi pemanfaatan air tanah saat ini DKI Jakarta hampir menyeluruh di DKI Jakarta meskipun jaringan perpipaan telah tersedia. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya *land subsidence* di berbagai tempat khususnya di wilayah utara Jakarta. Serangkaian upaya dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air

tanah telah dilakukan salah satunya yaitu penetapan zona bebas air tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 93 tahun 2021.

Permasalahan *land subsidence* dan intrusi air laut sangat terkait erat dengan pola konsumsi masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam penyediaan air bersih. Hingga saat ini penyediaan air jaringan perpipaan di DKI Jakarta masih rendah. Berdasarkan Kementerian PUPR (2020), rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 56,6% dimana salah satu sumber paling banyak dimanfaatkan adalah melalui penggunaan sumur yang memanfaatkan kapasitas air tanah. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, penggunaan air tanah di pada Januari-September tahun 2019 telah mencapai 6.693.949 m³ (DIKPLHD, 2021).

Sebagai kawasan metropolitan, kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur diperlukan penyediaan air sampai mencapai akses air aman dan layak melalui jaringan perpipaan guna meningkatkan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Pelayanan air bersih jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur masih berkisar pada angka 29% angka ini masih berada di bawah target SDGs tahun 2030 sebesar 80%. Belum meratanya pelayanan air bersih ini berdampak pada fenomena stunting dan gizi buruk. Pemerataan akses air bersih di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur dihadapkan dengan tantangan ketersediaan air baku serta efisiensi infrastruktur SPAM. Oleh sebab itu, diperlukan aksi guna percepatan pemerataan akses air bersih serta penyelesaian isu strategis penyediaan air bersih. Aksi tersebut berfokus pada pengelolaan sumber daya air secara regional dengan mempersiapkan konsep pengelolaan yang berkelanjutan serta pengembangan alternatif pendanaan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur SPAM.

C. Kerentanan Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pantai

Bencana alam banjir rob sering pula disebut sebagai bencana gelombang ekstrem. Dampak dari gelombang ini antara lain abrasi atau erosi di pesisir Pantai. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi ini mengancam kehidupan di wilayah pesisir Jakarta Utara dan kepulauan Seribu.

Wilayah Jakarta bagian utara tercatat memiliki elevasi terendah sebesar -13 mdpl. Tingkat penurunan muka tanah di Jakarta bagian utara juga cukup tinggi. Dengan kombinasi tersebut, jika air laut sedang pasang, banjir rob tidak dapat dielakkan. Pada tahun 2050 ketinggian muka air pasang laut diproyeksikan sebesar 149,72 cm (Karma dan Qamila, 2022). Sehingga wilayah dengan ketinggian kurang dari

149,72 cm akan terkena banjir rob, dengan luas area sekitar 19.463,26 Ha atau 29,39% dari luas daratan DKI Jakarta. Wilayah yang terkena bencana banjir rob akan makin meluas dan makin tinggi jika air laut pasang terjadi bersamaan dengan hadirnya hujan di wilayah Jakarta bagian utara.

Wilayah yang menjadi daerah rawan genangan banjir di kawasan Pantai Utara Jakarta antara lain: Kapuk Kamal Muara, Kapuk Kamal, Kapuk Muara Teluk Gong, Pluit, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Sunter Agung, Rawa Badak, Tugu, Lagoa, Tugu Utara, Perum Walikota Jakarta Utara, Kebon Bawang, Warakas, Sungai Bambu dan sebagainya.

Pada umumnya kejadian rob di pantai Utara Jakarta terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari setiap tahunnya. Bulan-bulan tersebut merupakan musim angin musim Barat dimana angin bertiup dari arah Barat Laut dengan kecepatan 8,21-10,62 knot. Beberapa wilayah yang terkena dampak rob adalah Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Ancol, Kalibaru, Cilincing dan Marunda.

Berdasarkan data November 2020 dari laman website BPBD DKI Jakarta, kejadian banjir rob terjadi di 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Kalideres, Penjaringan, Pademangan dan Cilincing. Dimana rata-rata ketinggian banjir berkisar antara 10-70 cm. Lokasi terparah terjadinya banjir rob terjadi di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Berdasarkan Hasil kajian BPBD DKI Jakarta, Kelas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah Rendah dan Kelas Kerentanan juga Rendah. Sementara untuk Jakarta Utara, Kelas Bahaya Gelombang Ekstrim dan abrasi dalam kelas Bahaya Tinggi dan kelas Kerentanan Tinggi. Kelas bahaya tinggi di wilayah Jakarta Utara antara lain dipengaruhi oleh terjadinya *land subsidence*.

D. Pengelolaan Air Limbah

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia adalah salah satu kota megapolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa di wilayah administratifnya, dan lebih dari 30 juta jiwa di wilayah Jabodetabek. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, volume limbah domestik baik cair maupun padat juga meningkat secara signifikan. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti: Air limbah dari toilet (*blackwater*) dan Air limbah dari dapur, mandi, dan cuci (*greywater*).

Cakupan layanan pengelolaan air limbah sangat rendah. Saat ini, hanya sekitar 4-5% penduduk Jakarta yang terlayani sistem pengolahan air limbah terpusat melalui IPAL Setiabudi dan IPAL Waduk Pluit. Mayoritas warga menggunakan

tangki septik individu, namun hanya sebagian kecil yang memenuhi standar teknis (tangki kedap dan disedot rutin). Sebagian besar air limbah (*greywater* dan sebagian *blackwater*) langsung dibuang ke saluran air tanpa pengolahan.

Belum ada sistem terpusat yang menyeluruh. Rencana pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah Domestik (*JSDP*) baru dimulai, dengan progres lambat karena kendala pembebasan lahan, dana, dan koordinasi lintas sektor. Jakarta masih sangat bergantung pada sistem sanitasi *on-site* (*septic tank*), tanpa sistem penyedotan dan pengolahan yang tertata.

Air limbah yang tidak diolah mencemari sungai, saluran air, dan badan air lainnya. Lebih dari 13 sungai di Jakarta mengalami tingkat pencemaran berat. Kualitas air tanah dangkal di banyak titik di Jakarta sudah tercemar bakteri E.Coli, terutama akibat rembesan dari *septic tank* yang tidak kedap. Kontaminasi air tanah meningkatkan risiko penyakit di masyarakat seperti: diare, Hepatitis A, dan infeksi kulit.

Permasalahan ini terjadi karena tidak ada jaringan pipa limbah domestik terpusat seperti di kota besar dunia lainnya, IPAL eksisting hanya mencakup wilayah sangat kecil dan tidak terkoneksi secara luas, Layanan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) belum menjadi kewajiban semua warga, banyak warga tidak pernah menyedot *septic tank*-nya, dan membuang ke saluran atau got. Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) juga terbatas, masih terjadi perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di daerah padat penduduk, belum ada sanksi tegas terhadap pelanggaran pembuangan limbah rumah tangga ke saluran air umum, serta regulasi teknis *septic tank* aman sering diabaikan dalam pembangunan rumah.

E. Land Subsidence

Land subsidence adalah penurunan permukaan tanah secara bertahap akibat perubahan struktur di bawah permukaan tanah, baik karena proses alami maupun aktivitas manusia. Di Jakarta, fenomena ini menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlanjutan kota karena menyebabkan banjir makin parah, kerusakan infrastruktur, dan risiko tenggelamnya sebagian kota di masa depan.

Land subsidence telah terjadi sejak lebih dari 30 tahun terakhir. Kecepatan penurunan tanah bervariasi, antara 2 cm hingga 11 cm per tahun, tergantung lokasi. Wilayah yang paling terdampak parah: Jakarta Utara, seperti Pluit, Penjaringan, Muara Baru, Cilincing, dan Marunda. Diperkirakan sekitar 40% wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan laut.

Penyebab *Land Subsidence* di Jakarta adalah karena mayoritas rumah, gedung, dan industri di Jakarta menggunakan air tanah dalam, terutama di kawasan yang belum terlayani air perpipaan. Penurunan muka tanah terjadi karena lapisan tanah menjadi kosong dan terkompresi setelah air ditarik secara terus-menerus. Selain itu karena kepadatan penduduk yang semakin meningkat mendorong pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dan pembangunan masif menekan permukaan tanah, terutama di tanah aluvial lunak. Jakarta Utara yang bertanah lunak sangat rentan mengalami kompaksi akibat beban berlebih. Kompaksi alami tanah juga menjadi salah satu penyebab, tanah di wilayah pesisir utara Jakarta terdiri dari endapan aluvial muda yang secara alami akan memadat dari waktu ke waktu. Reklamasi dan perubahan tata guna lahan, pengurugan pantai dan pembangunan lahan baru di utara Jakarta turut mengubah keseimbangan tanah dan memicu penurunan.

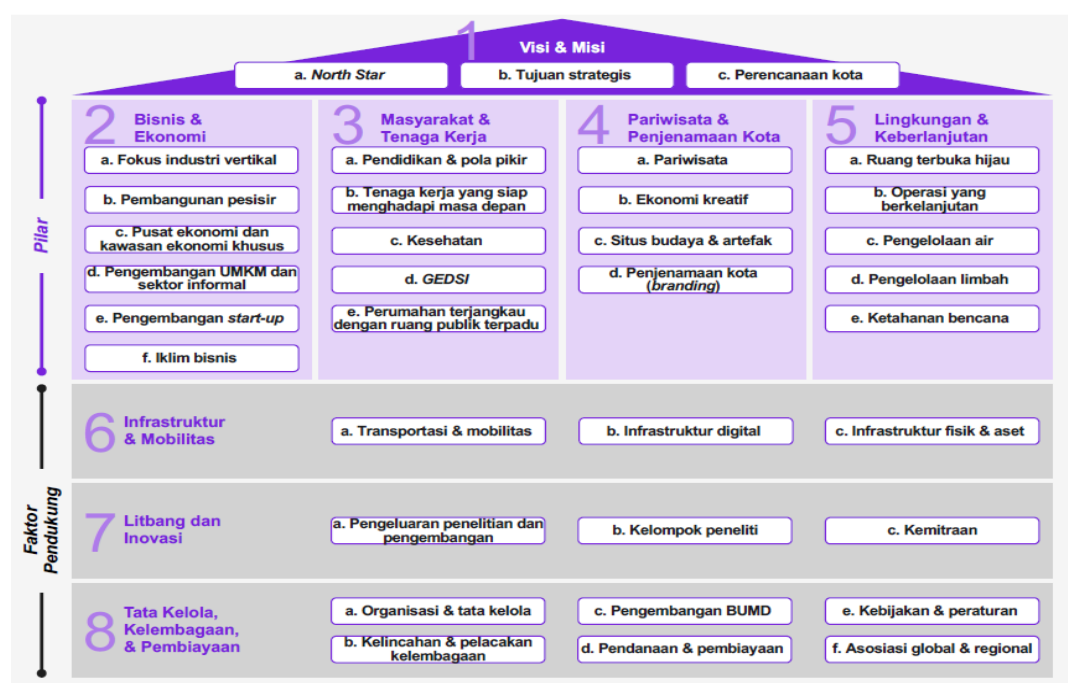
Dampak serius dari *land subsidence* adalah Permukaan tanah yang turun menyebabkan wilayah semakin mudah tergenang air laut. Di beberapa tempat, banjir rob terjadi harian. Jalan retak, bangunan miring, saluran air rusak, dan jaringan pipa bocor akibat ketidakseimbangan tanah. Perencanaan infrastruktur seperti MRT, jalan tol, dan jaringan drainase harus menyesuaikan dengan deformasi tanah. Biaya perbaikan, pemeliharaan, dan mitigasi meningkat drastis setiap tahun. Eksploitasi air tanah menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, memicu krisis air bersih.

2.6.4 Penelaahan terhadap berbagai Perencanaan dan Strategi terkait Sumber Daya Air DKI Jakarta

A. Penelaahan Terhadap Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia

Di dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 294 tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia, terdapat 8 (delapan) buku yang menjabarkan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian Kota Jakarta untuk menjadi 20 (dua puluh) besar kota global dunia. Untuk mencapai status kota global, Jakarta memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan unik yang dihadapi serta memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan jangka panjang yang terstruktur, sebuah Kerangka Kerja Kota Global telah dikembangkan untuk menjadi panduan bagi kemajuan Jakarta di masa depan. Kerangka Kerja Kota Global terdiri dari berbagai komponen utama yang mencakup ambisi lebih luas Jakarta.

Komponen-komponen ini saling terhubung dan memberikan arahan strategis untuk pembangunan kota ini selama beberapa dekade mendatang. Bersama-sama, komponen-komponen tersebut akan membantu Jakarta berkembang menjadi kota yang unggul dalam aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan di tingkat global. Berikut adalah Kerangka Kerja Kota Global Jakarta:



Gambar 2.8. Kerangka Kerja Kota Global Jakarta
(Sumber : Buku Jakarta Rise #20 : Langkah Menuju 20 Kota Global Teratas)

Peran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta dalam mendukung Jakarta menjadi Kota Global, ada pada pilar ke-5 : Lingkungan dan Berkelanjutan. Di dalam pilar tersebut ada 5 (lima) elemen yang dianggap penting. Elemen yang berkaitan dengan fungsi Dinas SDA Provinsi Jakarta adalah faktor : Pengelolaan Air dan Ketahanan Bencana. Untuk masing-masing elemen, dirumuskan Program Utama. Untuk masing-masing Program Utama diturunkan ke dalam Inisiatif yang lebih konkrit sebagai berikut :

Tabel 2.27. Program Utama dan Inisiatif Pengelolaan Air dan Ketahanan Bencana

Elemen	Program Utama	Inisiatif
Pengelolaan Air	Meningkatkan ketersediaan pasokan air	Mengembangkan sumber air alternatif, seperti pemanenan air hujan, termasuk pemanenan di atap, serta menerapkan inisiatif pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang air (3R)
		Menerapkan desalinasi skala besar untuk menambah pasokan air bagi kota

Elemen	Program Utama	Inisiatif
	Meminimalkan kehilangan air dalam sistem distribusi	Mengembangkan model Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) yang disesuaikan untuk menarik investasi swasta dalam memperluas jaringan pipa, terutama di wilayah dengan potensi pengembalian finansial yang rendah
		Memperbarui jaringan pipa tua untuk mengurangi kehilangan air dan mencegah kerusakan yang sering terjadi
		Melakukan audit rutin infrastruktur air untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran, serta mengatasi inefisiensi (misalnya, dengan menggunakan teknologi berbasis IoT)
	Mendorong konservasi air di kalangan individu dan bisnis	Memperluas pembangunan sumur resapan untuk meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi limpasan permukaan, yang diterapkan pada semua bangunan
		Meluncurkan kampanye edukasi tingkat kota tentang teknik penghematan air dan praktik sanitasi yang tepat guna mengurangi limbah dan bahan berbahaya yang dibuang ke saluran air
		Memperkenalkan penetapan harga air berbasis musim untuk mencegah penggunaan berlebihan selama musim kemarau
		Mewajibkan pengguna besar (misalnya, dengan konsumsi di atas batas tertentu) untuk menyusun Rencana Pengelolaan Efisiensi Air, termasuk penilaian penggunaan dan pelaporan rencana konservasi tahunan berikut pembaruan implementasinya

Elemen	Program Utama	Inisiatif
	Memperkuat pengendalian pencemaran air di semua sumber dan meningkatkan infrastruktur sanitasi	Mempercepat pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Jakarta (Jakarta Sewerage System/JSS) sebagai langkah penting dalam pengelolaan air limbah
		Mengorganisir program berbasis masyarakat untuk melibatkan warga dalam kegiatan pembersihan, konservasi saluran air, serta inisiatif keberlanjutan, seperti pembersihan dan rehabilitasi menyeluruh Sungai Citarum, sekaligus mempromosikan kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan
		Menegakkan kepatuhan ketat terhadap standar pembuangan air limbah, terutama bagi entitas industri dan komersial, dengan didukung inspeksi rutin
		Menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tumpang tindih tanggung jawab pengelolaan air, termasuk pengaturan pengambilan air tanah
Ketahanan Bencana	Menerapkan solusi pencegahan banjir yang komprehensif	Meningkatkan dan memperluas jaringan drainase untuk mengatasi curah hujan ekstrem, mengatasi penyumbatan, mengintegrasikan sistem drainase vertikal pada bangunan, dan menerapkan kebijakan zero delta Q
		Memperluas ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan taman vertical untuk mengelola limpasan air hujan
		Mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung dan saluran air lainnya, termasuk pengembangan sistem polder dan waduk



Elemen	Program Utama	Inisiatif
	Mengoperasikan proyek Tanggul Laut Raksasa untuk mitigasi bencana dan menjamin pasokan air tawar baru	Mempercepat dan mendukung penyelesaian Giant Sea Wall Tahap A (tanggul pantai)
		Memantau dan mempercepat pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) Fase B dan C (tanggul laut) bersama pemerintah pusat
	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan memanfaatkan teknologi canggih	Memperluas cakupan sistem peringatan dini seperti Stasiun Cuaca Otomatis (AWS) dan Pencatat Ketinggian Air Otomatis (AWLR) untuk prediksi yang lebih akurat dan peringatan yang tepat waktu
		Memanfaatkan teknologi canggih untuk peringatan evakuasi dan penilaian kerusakan secara real-time
		Mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana ke dalam kurikulum sekolah dengan menggunakan simulasi interaktif dan pembelajaran berbasis video
		Menerapkan program latihan bencana di seluruh wilayah kota setiap tahunnya untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas tanggap darurat bencana
	Membangun infrastruktur perkotaan yang tangguh dan adaptif	Merancang bangunan dan ruang publik dengan fitur tahan banjir dan adaptif, seperti permukaan yang dapat ditembus air
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat pengawasan bangunan untuk memastikan ketahanan terhadap bencana
		Mengembangkan penampungan air berskala besar untuk

Elemen	Program Utama	Inisiatif
		mengalihkan dan menyimpan kelebihan air hujan
		Memperkenalkan asuransi bencana yang disubsidi pemerintah untuk daerah berisiko tinggi, seperti rumah tangga berpenghasilan rendah yang rawan kebakaran atau perumahan yang rawan banjir

(Sumber : Buku Jakarta Rise #20 : Langkah Menuju 20 Kota Global Teratas)

1. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jakarta Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045 tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan kekuatan modal dasar yang dimiliki Jakarta, isu dan permasalahan yang dihadapi, tantangan nasional, regional, dan global ke depan, pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta upaya perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, maka visi Jakarta diterjemahkan dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Jakarta Tahun 2025 - 2045 sebagai :

“Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.”

Pemahaman terhadap Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Maju** : Jakarta sebagai kota yang maju pada tahun 2045, merupakan manifestasi dari cita-cita besar untuk menjadi kota yang modern, inovatif, responsif, dan progresif, dengan semangat terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Jakarta yang maju dicirikan dengan pemanfaatan pengetahuan dan inovasi pada seluruh elemen pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur modern yang berkualitas dan adaptif, penyediaan layanan dan jasa yang terdepan, regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang transparan, responsif, dan efektif terhadap kebutuhan aktivitas perkotaan, serta penduduk yang sejahtera, setara, dan berkebudayaan maju yang tetap mempertahankan identitas budaya Jakarta serta nilai-nilai luhur bangsa.



- b. **Berkeadilan** : Jakarta sebagai kota inklusif yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, akses infrastruktur, layanan publik, dan perlindungan hukum. Pembangunan Jakarta ke depan memperhatikan memastikan setiap masyarakat Jakarta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari tujuan pembangunan.
- c. **Berdaya Saing** : Jakarta mampu menempatkan diri sebagai kota yang kompetitif dan memiliki semangat menjadi sebuah kota yang unggul di kancah nasional maupun global, untuk dapat menarik sumber daya finansial, manusia, barang, serta informasi dan pengetahuan seluas-luasnya dengan memaksimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kolaboratif. Jakarta yang berdaya saing dicirikan dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkeahlian tinggi, ekonomi yang berketahanan, produktif dan berdaya saing global, infrastruktur yang andal dan mumpuni, interaksi budaya yang mendunia, serta memiliki peran dan pengaruh diplomasi yang kuat dalam pergaulan kota-kota dunia.
- d. **Berkelanjutan** : pembangunan Jakarta ke depan tetap mengutamakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta ke depan adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik, nyaman, dan lestari serta menghadapi berbagai risiko dan ancaman perubahan iklim, bencana alam, maupun non alam. Jakarta yang berkelanjutan ditandai dengan terciptanya kualitas lingkungan yang baik, nyaman, dan lestari, berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca, serta memiliki ketahanan air, energi, dan pangan.

Dalam upaya mewujudkan Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, 8 Misi Pembangunan Jangka Panjang Jakarta 2025 – 2045 yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera
2. Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan
3. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, dan Pengaruh Jakarta di Kancah Global

5. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan

Dari 8 Misi Pembangunan Jangka Panjang Jakarta 2025-2045 di atas, Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, yaitu Misi nomor 5 : Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis

Pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD Jakarta 2025 - 2045.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Adapun arah kebijakan dalam pembangunan jangka panjang Jakarta dijabarkan secara umum ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan utama.

Tabel 2.28. Arah Kebijakan RPJPD Jakarta Tahun 2025 - 2045

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2025-2030	2031-2035	2035-2040	2041-2045
Misi 5 : Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan	Peningkatan Perlindungan Hak Dasar Sosial Budaya dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Aktualisasi Jakarta Berketahanan Sosial dan Ekologi yang Mampu Mewadahi Aktivitas Kota Global	Perwujudan Jakarta Kota Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Adaptif terhadap Perubahan

(Sumber : RPJPD Jakarta Tahun 2025-2045)



Tahap I : Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan

Pada 2025- 2030 fokus pembangunan mengarah pada penguatan landasan dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya ekologi, yang melingkupi pada penguatan pada beberapa aspek seperti warisan budaya Pancasila dan agama sebagai landasan pendidikan karakter, serta pemahaman terhadap hak dasar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan keluarga. Fokus pengembangan rencana aksi jangka panjang dalam meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan akan menjadi pijakan pembangunan di tahap pertama, sejalan dengan penguatan tata kelola dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar kota dan mitigasi perubahan iklim.

Arah Pembangunan Daerah merupakan manifestasi transformasi pembangunan jangka panjang Jakarta yang berkesinambungan dengan Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045. Arah Pembangunan Daerah akan menjadi pedoman dalam membangun dan mewujudkan cita-cita Jakarta dua puluh tahun ke depan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Jakarta. Arah Pembangunan Jakarta 2025 – 2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.29. Arah Pembangunan Daerah 2025 – 2045

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Pembangunan Daerah	
Transformasi Sosial	1	Masyarakat Jakarta yang Sehat Menyeluruh
	2	Masyarakat Jakarta yang Berkeahlian Tinggi, Unggul, dan Bermartabat
	3	Masyarakat Jakarta yang Tangguh dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan
Transformasi Ekonomi	4	Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing berbasis IPTEK dan Inovasi
	5	Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan
	6	Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global
	7	Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global
	8	Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan	10	Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif
	11	Ekonomi Jakarta yang Stabil Kuat, dan Mandiri
	12	Diplomasi Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancan Global

Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Pembangunan Daerah	
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Jakarta yang Beragama dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga dan Masyarakat Jakarta yang Mandiri, Produktif, dan Setara
	15	Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	16	Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan
	17	Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim

(Sumber : RPJPD Jakarta Tahun 2025-2045)

Dari 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Daerah di atas ada Arah Pembangunan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, yaitu Arah Pembangunan Daerah : Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan dan Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim.

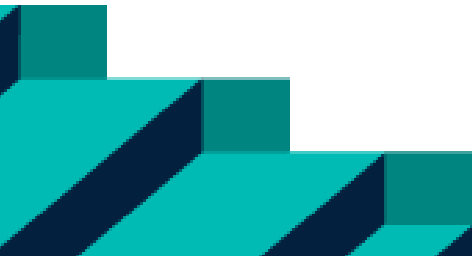
Arah Kebijakan Transformasi merupakan penerjemahan strategi transformasi dari RPJPN 2025 – 2045 untuk pembangunan daerah. Arah Kebijakan Transformasi menjadi pedoman arah pembangunan Jakarta untuk mewujudkan transformasi pembangunan Jakarta dalam dua puluh tahun ke depan yang sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ada 71 (tujuh puluh satu) Arah Kebijakan Transformasi terkait Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Beberapa diantaranya berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta. Arah Kebijakan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30. Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kebudayaan serta pelestarian cagar budaya. 2. Pemanfaatan museum dan pusat-pusat kebudayaan untuk menghidupkan aktivitas di kawasan perkotaan. 3. Pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya tak benda yang berkelanjutan. 4. Peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam dialog kerukunan, penyampaian pesan toleransi, dan pencegahan serta penyelesaian konflik antarumat.

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebebasan beragama dan beribadat, serta kemudahan dalam pembangunan fasilitas ibadah. 6. Pelibatan lembaga, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai agen perdamaian dan penyebaran nilai-nilai agama yang universal seperti perdamaian, keadilan, dan toleransi. 7. Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. 8. Pengelolaan potensi ekonomi keagamaan umat melalui penguatan regulasi, pendataan, dan peningkatan kualitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan. 9. Partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 10. Peningkatan kerja sama dan standardisasi penilaian produk halal. 11. Pengembangan pusat pelayanan keluarga sebagai pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. 12. Peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan secara responsif melalui layanan pendampingan dan advokasi keluarga yang komprehensif dan terintegrasi. 13. Penguatan literasi pengelolaan keuangan rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga. 14. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia) melalui kesempatan mengembangkan diri sepanjang hayat, baik melalui pendidikan formal maupun informal. 15. Penyediaan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan (anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia) di ruang publik dan komersial. 16. Pemanfaatan ruang dan fasilitas publik untuk menampung aktivitas dan kebutuhan tumbuh kembang anak dan remaja yang aman dan relevan. 17. Pengembangan fasilitas layanan geriatri yang holistik mulai dari panti wreda, layanan medis, layanan pengasuhan, dan peningkatan aktivitas ramah lansia. 18. Optimalisasi perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui layanan penanganan tindak kekerasan yang terpadu dan edukasi pencegahan kekerasan. 19. Penguatan layanan konseling dan pendampingan anak dan remaja yang komprehensif dalam mencegah eksploitasi, kekerasan, pornografi, kehamilan tidak diinginkan, dan dampak negatif pernikahan bawah umur.

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>20. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengawasan dan penegakan regulasi.</p> <p>21. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pengembangan kompetensi maupun jenis-jenis pekerjaan yang ramah perempuan.</p> <p>22. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan manajerial perusahaan maupun jabatan publik.</p> <p>23. Penguatan pembinaan kepemimpinan pemuda serta dukungan akses permodalan bagi kewirausahaan pemuda.</p> <p>24. Pelibatan bermakna seluruh kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.</p> <p>25. Pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, desain infrastruktur, akses terhadap pelayanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar.</p> <p>26. Penguatan strategi dan kebijakan pengendalian penduduk berbasis kerja sama dengan daerah lain melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan penertiban administrasi kependudukan.</p> <p>27. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota.</p> <p>28. Penerapan mekanisme insentif-disinsentif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH dengan konsep solusi berbasis alam (<i>nature-based solution</i>) untuk mengurangi fenomena <i>urban heat island</i>.</p> <p>29. Pelestarian keanekaragaman hayati melalui pemulihan habitat dan penanaman serta pemeliharaan vegetasi endemi.</p> <p>30. Penciptaan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati.</p> <p>31. Pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil melalui restorasi lahan basah, konservasi dan rehabilitasi bakau, terumbu karang, dan habitat laut lainnya, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.</p> <p>32. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung Taman Wisata Angke.</p> <p>33. Penerapan indeks hijau-biru Indonesia dan regulasi gedung hijau untuk menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif terhadap pembangunan bangunan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>34. Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (<i>Jakarta Sewerage System</i>) maupun setempat.</p> <p>35. Peningkatan operasional sarana/prasarana sanitasi aman</p>



Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>36. Pengurangan timbulan sampah perkotaan di sumber secara kolaboratif.</p> <p>37. Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular.</p> <p>38. Penyediaan sarana dan layanan pengolahan sampah B3 rumah tangga.</p> <p>39. Pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan perairan pesisir.</p> <p>40. Pengembangan sarana pengolahan sampah perairan (sungai, danau, embung, waduk, situ, dan teluk).</p> <p>41. Pemanfaatan hasil olahan sampah menjadi sumber energi alternatif melalui kerja sama dengan pemasok kebutuhan industri/pasar (<i>offtaker</i>).</p> <p>42. Penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan (air, laut, udara, tutupan lahan dan pengelolaan sampah) Jakarta.</p> <p>43. Peningkatan pengelolaan sampah secara cerdas dan tepat guna melalui konsep <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R).</p> <p>44. Penerapan pembangunan kota yang menyesuaikan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>45. Penyediaan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan di seluruh wilayah, terutama di wilayah Kepulauan Seribu.</p> <p>46. Diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi sumber-sumber potensi energi baru terbarukan dan konversi energi dari hasil pengelolaan limbah dan biomassa.</p> <p>47. Penguatan tata kelola dan regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan di Jakarta.</p> <p>48. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam menjaga rantai pasokan pangan.</p> <p>49. Diversifikasi sumber pangan melalui pertanian perkotaan, pengembangan industri pengolahan produk perikanan, budidaya perikanan, dan perikanan tangkap yang berkelanjutan.</p> <p>50. Penguatan ketahanan, keamanan, dan jaminan ketersediaan pangan;</p> <p>51. Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan industri makanan.</p> <p>52. Penganekaragaman pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang bernutrisi seimbang.</p> <p>53. Pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, cakupan, kontinuitas, dan keterjangkauan.</p>

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>54. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM yang profesional dan andal.</p> <p>55. Peningkatan kedaulatan air melalui pengembangan sumber air baku alternatif seperti <i>reservoir</i> muara, tangkapan air hujan, desalinasi, dan daur ulang air.</p> <p>56. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri.</p> <p>57. Peningkatan efisiensi produksi, penguatan riset, dan pemanfaatan energi, air, dan pangan (FEW Nexus).</p> <p>58. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai.</p> <p>59. Integrasi fungsi ruang dan pemanfaatan infrastruktur kota dalam mitigasi dan adaptasi bencana, serta penerapan konsep solusi berbasis alam (<i>nature-based solution</i>).</p> <p>60. Pengendalian daya rusak air pada wilayah aglomerasi secara komprehensif dan terintegrasi</p> <p>61. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi segala jenis bahaya di lingkungan perkotaan.</p> <p>62. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan pangkalan data kebencanaan terintegrasi dalam mengembangkan sistem peringatan bencana dini, simulasi dan penanggulangan bencana, serta layanan komunikasi kedaruratan.</p> <p>63. Akselerasi transisi energi dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).</p> <p>64. Penciptaan ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim dan penyediaan infrastruktur hijau untuk mewujudkan suhu perkotaan yang nyaman.</p> <p>65. Penerapan konsep bangunan hijau dan arsitektur pasif (<i>passive architecture</i>) untuk mengefisiensi konsumsi energi pada bangunan, baik melalui perbaikan (<i>retrofit</i>) bangunan lama maupun regulasi bangunan baru.</p> <p>66. Pengendalian sumber polusi melalui pengetatan regulasi dan standar emisi, pengawasan baku mutu gas buang dan limbah sektor industri dan transportasi dari dalam Jakarta maupun wilayah sekitar (<i>transboundary pollution</i>).</p> <p>67. Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan.</p> <p>68. Implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon melalui penerapan nilai ekonomi karbon (<i>carbon pricing</i>), pajak karbon, perluasan kawasan rendah emisi (<i>low emission zone</i>), serta penandaan anggaran perubahan</p>

Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	iklim (<i>climate budget tagging</i>) dalam perencanaan pembangunan. 69. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penciptaan ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim dan mewujudkan iklim mikro perkotaan yang nyaman. 70. Penguatan kelembagaan dan kerja sama antar pihak, baik dengan wilayah sekitar, lembaga internasional, akademisi, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan dan sinergis. 71. Mengarahkan kota yang berketahanan air dengan pembangunan infrastruktur Jakarta yang ramah dan adaptif terhadap air dan memastikan setiap pembangunan kota mengarah pada konsep <i>zero run off</i> .

(Sumber : RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045)

Pembangunan Jakarta 20 tahun ke depan mensyaratkan beberapa pengembangan prioritas demi terwujudnya visi pembangunan Jakarta. Rumusan Pengembangan Prioritas (*Game Changers*) dilakukan dengan penentuan beberapa sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Terdapat 7 sektor prioritas yang dinilai memiliki paling banyak keterkaitan dengan sektor lainnya. Implikasi dari hal ini adalah dengan memprioritaskan sektor tersebut, maka akan didapatkan efek berganda sehingga sektor-sektor lainnya juga akan terdorong dan tujuan pembangunan makro dapat tercapai. Adapun ke tujuh subsektor tersebut adalah Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Inovasi dan Riset, Pariwisata, Lingkungan, Konektivitas, dan Tata Kelola. *Game Changers* yang berkaitan kuat dengan tugas dan fungsi DSDA Jakarta adalah Subsektor Lingkungan:















Game Changer 5 Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan

Gamechanger	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan.	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota			
	Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (<i>Jakarta Sewerage System</i>) maupun setempat			
	Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular			
	Pemenuhan cakupan layanan air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, <i>coverage</i> , kontinuitas, dan keterjangkauan			
	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM diantaranya melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri			
	Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai			
	Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan			

Gambar 2.9. Arah Kebijakan Transformasi Prioritas Game Changer 5
(Sumber : RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045)

Kerangka Pendanaan Pembangunan

Secara skematis, berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan untuk membiayai proyeksi kebutuhan infrastruktur Jakarta menuju kota global pada gambar berikut. Adapun besaran biaya kebutuhan masing-masing infrastruktur merupakan anggaran indikatif sesuai dengan kondisi pada saat penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

Kebutuhan Infrastruktur		Keterangan	Rupa (Miliar Rupiah)	Potensi Skema Pendanaan / Pembiayaan				
1	 Jakarta Sewerage System (JSS)	Zona 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10 Zona 3, 7, 9, 11, 12, 13, dan 14	89,84	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Climate Finance	Hibah
2	 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Subsidi Air Bersih untuk daerah krisis air dan layanan SPAM Regional	14,47	APBD/APBN	KPBU	Blended Finance	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	
3	 Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Susun dan Peningkatan Kualitas Permukiman	47,33	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	
4	 Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi tanggul pengaman pantai, sistem polder, sistem pompa dan pintu air, waduk dan situ, pengadaan tanah sungai dan waduk, pengerukan dan peningkatan kapasitas saluran dan drainase	14,82	APBD/APBN	Pinjaman Daerah			
5	 Penanganan Sampah	RDF dalam kota, saringan sampah, landfill mining, PLTsa, sarana (truck)	14,12	APBD/APBN	Transfer Development Right (TDR)	Pinjaman Daerah		
6	 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Infrastruktur complete street	28,45	APBD/APBN	Transfer Development Right (TDR)	Disinsentif Pemanfaatan Ruang		
7	 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemda	Penerapan konsep green energy dan ramah disabilitas	11,74	APBD/APBN	Climate Finance			
8	 Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan tanah dan pembangunan taman	98,46	APBD/APBN	Climate Finance	CSR		
9	 Pendidikan	Rehabitasi/pembangunan sekolah	6,5	APBD/APBN	CSR			
10	 Mass Rapid Transit (MRT)	North-South Line (extension), East-West (Fase 1)	123,91	Pinjaman Luar Negeri	Hibah			
11	 Light Rail Transit (LRT)	Manggarai-Dukuh Atas-Karet-Pesing-Rajawali-JIS-Danau Sunter Barat-Kelapa Gading; Danau Sunter Barat-PIK; Velodrome-Klender-Halim; Pulogebang-Joglo	79,95	APBD/APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah	
12	 Penanggulangan Bencana	Infrastruktur Kebakaran dan Penyelamatan	2,13	APBD/APBN	CSR			
13	 Transformasi Digital	SPBE, Ekosistem Kota Cerdas	2,76	KPBU				
14	 Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)	Fase B	123	APBD/APBN	KPBU	Private Investment	Obligasi/Sukuk Daerah	
Total Kebutuhan Biaya			657,48					

Gambar 2.10. Potensi Skema Pembiayaan Infrastruktur Jakarta Menuju Kota Global

(Sumber : RPJPD Jakarta Tahun 2025–2045)

2.6.5 Penelaahan Terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2025–2029

Dalam RPJMD 2025–2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 adalah:

“**JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA”**

JAKARTA KOTA GLOBAL: merupakan aspirasi jangka panjang Jakarta untuk mensejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dimana Jakarta dapat menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik.

PUSAT PEREKONOMIAN: merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. GDP per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan

dan *high-income countries* di dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.

BERDAYA SAING: dalam konstelasi kota global daya saing merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis dibandingkan dengan kota lain.

BERKELANJUTAN: makna kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

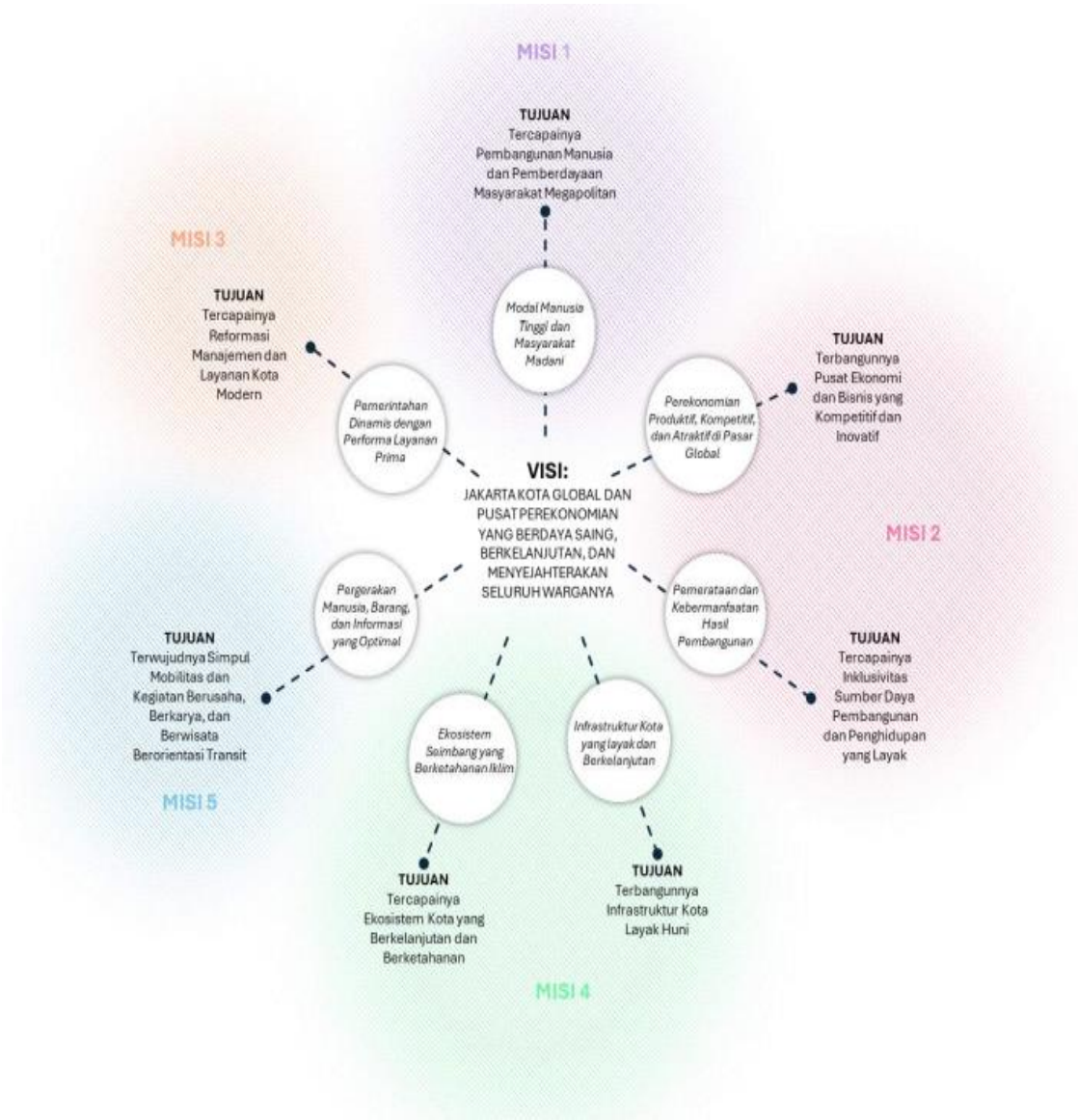
MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA: memiliki makna bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep *well-being* yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai 'sejahtera' seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan, Pemerintah dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau *cities for all*.

Sementara itu Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima Misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera

- 2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
- 3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
- 4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
- 5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tujuan dan Sasaran adalah kinerja strategis pembangunan daerah yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di akhir periode RPJMD. Proses analisis terhadap *critical success factor* dari masing-masing tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara berjenjang. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan merupakan kontribusi lintas sektor Pemerintah, stakeholders eksternal, maupun peran serta masyarakat.



Gambar 2.11. Perumusan Tujuan Pembangunan Berdasarkan Isu Strategis
(Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

Berikut adalah detail Tujuan dan Sasaran RPJMD beserta Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut:

Tabel 2.31. Tujuan dan Sasaran RPJMD beserta Indikator Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja
1	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Modal Manusia• PDRB per Kapita
1.a	Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Dimensi Pendidikan
1.b	Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Usia Harapan Hidup• Prevalensi Stunting
1.c	Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan Pemuda• Indeks Ketimpangan Gender
1.d	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan Kebudayaan• Indeks Demokrasi
2.1	Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Laju Pertumbuhan Ekonomi• Tingkat Inflasi• Indeks Ekonomi Hijau
2.1.a	Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Total PDRB• Indeks Ekonomi Biru
2.1.b	Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Daya Saing Daerah• Pembentukan Modal Tetap Bruto
2.1.c	Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	<ul style="list-style-type: none">• PDRB Ekraf• Jumlah Tamu Mancanegara
2.2	Tercapainya Inklusivitas Sumber Daya Pembangunan dan Penghidupan yang Layak	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Kemiskinan• Tingkat Kemiskinan Ekstrem• Rasio Gini
2.2.a	Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Pengangguran Terbuka
2.2.b	Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kesejahteraan Sosial• Indeks Ketahanan Pangan
3	Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Reformasi Birokrasi
3.a	Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)• Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Integritas Daerah
3.b	Berkembangnya Kapasitas dan Integritas Kerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Merit
3.c	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks SPBE
3.d	Meningkatnya Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pelayanan Publik
4.1	Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
4.1.a	Meningkatnya Layanan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak • Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
4.1.b	Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
4.2	Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Emisi GRK
4.2.a	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4.2.b	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Risiko Bencana
5	Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit	<ul style="list-style-type: none"> • Public Transport Mode Share
5.a	Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Layanan Angkutan Umum Massal
5.b	Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit	<ul style="list-style-type: none"> • People Near Transit

(Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

Dari 5 (lima) Tujuan RPJMD di atas, yang berkaitan erat dengan peran dan fungsi DSDA Provinsi DKI Jakarta adalah Tujuan nomor 4.1.a Meningkatkan Layanan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja : Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan *critical success factor* dari kondisi yang diharapkan di tahun akhir pelaksanaan RPJMD dari masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan mana yang memiliki kontribusi terhadap

pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Berikut adalah Strategi Pembangunan menurut Tujuan dan Sasaran 4.1. Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni :

Tabel 2.32. Strategi Pembangunan menurut Tujuan dan Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni yang Berkaitan dengan DSDA

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi yang diharapkan di akhir RPJMD	Critical Success Factor (Strategi)
Meningkatkan Layanan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Akses air bersih perpipaan dan sanitasi terintegrasi yang melayani mayoritas rumah tangga INDIKATOR: <ul style="list-style-type: none">• % Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak• Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	1 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum 2 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah 3 Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan 4 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi

(sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

Arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dilandasi dari tahapan pembangunan pada RPJPD DKI Jakarta 2025-2045, yaitu perbaikan fundamental sebagai tahapan pertama. Pada fase ini, pembangunan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial dan lingkungan serta penguatan fondasi ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja. Selain itu, penguatan aspek sosial dan lingkungan juga dilakukan melalui perbaikan sistem kelembagaan dan regulasi, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Jakarta ditajamkan melalui beberapa pendekatan yaitu; penentuan tahapan pembangunan per tahun selama periode 2025-2029, penjabaran aspek fundamental dari setiap Misi untuk diintegrasikan sebagai rekomendasi kebijakan prioritas untuk setiap Tujuan, penelaahan arah kebijakan rekomendasi KLHS, dan perencanaan pengembangan wilayah.

Tahapan pembangunan adalah serangkaian langkah atau fase yang dilakukan dalam suatu proses pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial dalam rangka memantapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Jakarta periode 2025-2029. Pentahapan dilaksanakan atas pertimbangan waktu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mengakselerasi prioritas pembangunan Jakarta serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, sesuai dengan tahap pertama RPJPD 2025-2029 adalah Perbaikan Fundamental; berupa pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Tahapan pembangunan per tahun tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.33. Arah Kebijakan pada 5 Tahun ke depan

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang berkelanjutan	Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan	Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan

(Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan wilayah adalah sarana untuk memetakan arah pembangunan Jakarta yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan karakter wilayah masing-masing. Penyusunan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Jakarta 2025-2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang merepresentasikan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang, yaitu perbaikan fundamental dan visi untuk menjadi Kota Global. Beberapa pertimbangan strategis tersebut di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; Kawasan Strategis yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2024-2044; dan Koridor Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Kajian Kota Global *Jakarta Rise*.

Penerapan konsep pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025-2029 memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Walikota/Bupati, Perangkat Daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Tantangan dari sisi internal, eksternal, dan global perlu dipertimbangkan untuk menentukan prioritas penguatan di tiap wilayah. Arah pembangunan kewilayahan dapat menjadi landasan bagi Jakarta dalam

menghadapi dinamika perkotaan di masa depan dan memastikan pertumbuhan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dirancang dengan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan permasalahan dan potensi spesifik di setiap wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tema pembangunan dari masing-masing wilayah untuk periode 2025-2029 adalah:

- JAKARTA PUSAT: Pusat bisnis, jasa keuangan, dan sentra perdagangan internasional
- JAKARTA UTARA: Kota pesisir dengan hub logistik, industri perikanan, dan pelabuhan modern
- JAKARTA BARAT: Kota niaga, pusat riset dan pendidikan tinggi, serta destinasi warisan budaya
- JAKARTA SELATAN: Sentra ASEAN, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta destinasi wisata urban
- JAKARTA TIMUR: Sentra kawasan industri produktif, permukiman, dan hub transportasi regional
- KEPULAUAN SERIBU: Kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Berikut adalah isu-isu strategis di masing-masing wilayah, yang terkait dengan peran dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 2.34. Isu-Isu Strategis Di Masing-Masing Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Jakarta Pusat	Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi dan gas, serta sarana dan prasarana lainnya pada Kawasan Segitiga Emas dan Kawasan Tanah Abang
		Pengembangan ruang publik termasuk ruang hijau biru yang inklusif untuk kegiatan sosial budaya masyarakat pada Kawasan Menteng dan Kawasan Waduk Melati
Jakarta Utara	Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Penyediaan Utilitas dasar seperti Pengelolaan Sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas pada Kawasan Rorotan
		Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur

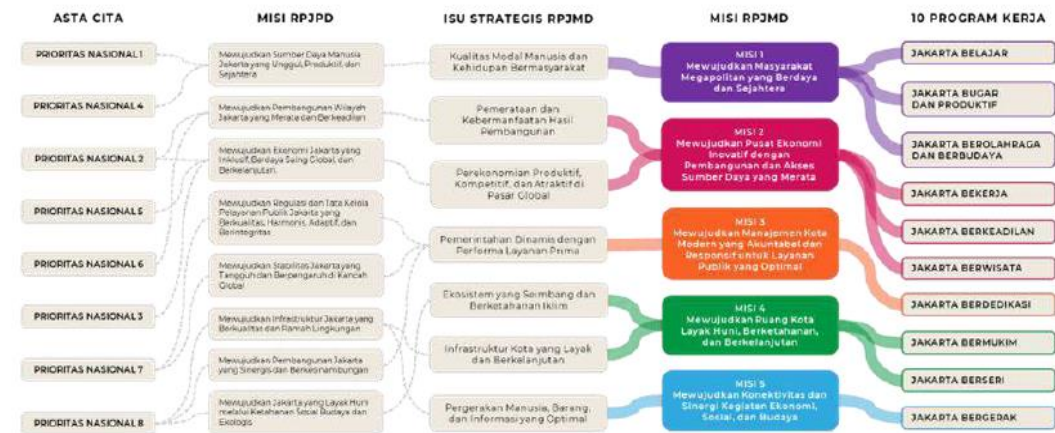
Wilayah	Isu Strategis	Kebijakan Strategis
		Peningkatan infrastruktur dasar kawasan melalui peningkatan ketersediaan dan layanan air bersih dan listrik, penataan sistem Sungai dan drainase kawasan secara menyeluruh dan terpadu, serta peningkatan kualitas sistem persampahan dan limbah pada Kawasan Pluit-Muara Angke
		Pengembangan, penyediaan, dan optimalisasi fungsi ruang publik dan ruang hijau termasuk pantai publik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan pada Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
		Penyediaan lahan kontribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekurangnya sebesar 5% (lima persen) dari total luas area kotor yang telah menjadi daratan pada Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama
		Pengembangan Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan fasilitas public pada Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama
	Pembangunan tanggul pantai dan pengembangan kawasan pesisir yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan dan peningkatan kualitas tanggul rob pada Kawasan Pluit-Muara Angke sepanjang Kawasan Pesisir Utara
		Pada area tanah timbul dan/atau area yang terbentuk sebagai akibat dari pembangunan tanggul pantai, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang serta tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Kawasan Pesisir Utara bagian Barat
Jakarta Barat	Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana umum untuk menunjang fungsi kawasan pada Kawasan Glodok
		Peningkatan insfrastruktur dasar kawasan Pasar Bunga Rawa Belong

Wilayah	Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Jakarta Selatan	Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan
Jakarta Timur	Lingkungan yang adaptif terhadap resiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem	Penyediaan ruang hijau dan Badan Air skala kawasan sebagai tempat rekreasi dan usaha penanggulangan banjir pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung
Kepulauan Seribu	Lingkungan yang adaptif terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem	Pembangunan tanggul pada 4 (empat) pulau terdampak banjir rob di Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan
	Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Penambahan <i>Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)</i> sebagai pemenuhan air bersih untuk warga Kepulauan Seribu

(Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

2.6.6 Penelaahan Terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029

Program-program yang dijabarkan dalam sub-bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil analisis kondisi yang diperlukan untuk menjawab isu-isu strategis periode 2025-2029. Program prioritas disusun dengan menyelaraskan program kerja sesuai dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Misi RPJMD, yang kemudian menjadi *outcome* prioritas setiap Tujuan dan Sasaran RPJMD yang bersifat *cross-cutting* dan pencapaiannya ditunjang oleh kinerja lintas bidang urusan. Selain itu *outcome* prioritas pembangunan juga disusun berdasarkan hasil kajian peta jalan kota global yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 294 tahun 2025, yang dikelompokkan ke dalam *DKI Strategic Project (DSP)* dan *Global City Project (GCP)* untuk memenuhi amanat perbaikan fundamental.



Gambar III.18 Penyelarasan Isu Strategis dan Misi RPJMD dengan Program Kerja Janji Politik Gubernur

Gambar 2.12. Penyelarasan Isu Strategis dan Misi RPJMD dengan Program Kerja Janji Politik Gubernur
(Sumber : Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029)

Adapun nomenklatur program-program prioritas tercantum telah disesuaikan dengan daftar program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

CONTINUITY QUICK WINS + IMPLEMENTASI 10 PROGRAM KERJA		PROGRAM PRIORITAS TERKAIT PERBAIKAN FUNDAMENTAL & PERINGKAT KOTA GLOBAL	
Continuity Quick Wins 100 Hari	Implementasi 10 Program Kerja	DKI Strategic Project (DSP)	Global City Programs (GCP)
<p>2027</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksekusi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyelenggaraan Event Road to Jakarta 500 <p>2028</p> <ul style="list-style-type: none"> RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit dengan Layanan Berstandar Internasional Menyediakan hunian layak rumah kumuh dan memberdayakan ekonomi masyarakat Kampung Sutan Bayan melalui Pelatihan Ketersampilan Penyerapan Tenaga Pengelola RS serta Pengembangan Unit Farming Daycare di Perkantoran Pemerintah, di perluas untuk MBR <p>2030</p> <ul style="list-style-type: none"> Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan Pengembangan Kawasan TOD Garis Transportasi Umum Massal untuk 15 Golongan Masyarakat Pengkatan IAKI sebagai SuperApps Pelayanan Publik Home Service Untuk Warga Jakarta (Pusatkan Pulih) My Local Development untuk membangun hunian vertikal bagi Warga Jakarta Pemantauan RAN Kumuh Pengkatan Blok N sebagai Sentra ASBAN Pengembangan Transportasi Jaladalek dan Kepulauan Gesakan Transportasi Atasi Bebas Emisi Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih Security CCTV di Permukiman Ekosistem Pengendalian Banjir Pengembangan SIUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) Desain Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendali Polusi Aktivasi Taman Kota 24 jam Balai Latihan Kerja di Kelurahan Merajut Supply Pangan melalui Contract Farming Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna Anggaran Berbagi (BEBER) KRAM (Kerangka dan Sejahtera) Award untuk Peningkatan Daya Tarik Kota Peningkatan Pariwisata Melalui Promosi Budaya Betawi Hubung Jakarta Collaboration Fund Gesakan Masyarakat Turun APRI (Aparatur) Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan Pengkatan Rerum untuk Warga Pengkatan Infirasi Pangan Menyajikan Ibu Puri 	<p>JAKARTA BELAJAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib belajar 12 tahun dengan peningkatan daya tampung Sekolah Negeri dan kerjasama dengan sekolah swasta Penyediaan pengkaderan guru sesuai UMP Jakarta Pengkatan untuk penguasaan digitalisasi untuk pelatihan guru dalam mendukung merdeka belajar dan digitalisasi Beasiswa magister, doktorat, serta pelatihan bersertifikat untuk peningkatan kompetensi guru dan dosen <p>JAKARTA BUGAR DAN PRODUKTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat waktu tunggu RPJMD dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perbaikan pusat layanan dan RSUD, khususnya di wilayah padat penduduk Tambahan rumah sakit dan klinik apung di Kepulauan Seribu Hotline 24/7 untuk konseling kesehatan keluarga Layanan pengembangan diri dan ketahanan mental bagi generasi muda, bekerjasama dengan universitas <p>JAKARTA BEROLAH RAGA DAN BERBUDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> Standarisasi kegiatan RPJMD dengan Ombudsman Revitalisasi GEDSI dan RPJMD sebagai pusat olahraga dan budaya Pengkatan sentra budaya Betawi Jakarta Creative Hub di Kepulauan Seribu Dana Abadi Kebudayaan untuk Budaya Jawa Jakarta <p>JAKARTA BEKERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi Lowongan Pekerjaan Terintegrasi Aplikasi IAKI Fleksibilitas jam dan lokasi kerja untuk mendukung kemandirian Pelatihan bagi Masyarakat Putus Sekolah <p>JAKARTA BERKEADILAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat tinggal layak bagi kampung miskin kota Pembiayaan rumah layak untuk perumahan dan akses modal Akses layanan publik inklusif bagi disabilitas dan lansia <p>JAKARTA BERDEKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi aplikasi Algoritma Betawi PBB 12 gratis untuk hunian di bawah Rp 2 miliar Balai Rakyat di Kepulauan Seribu <p>JAKARTA BERHUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> Titik parkir dan ride di wilayah DKI Jakarta Pengembangan rumah <p>JAKARTA BERSENI</p> <ul style="list-style-type: none"> Sumur resapan & normalisasi sungai Pengembangan pusat udara Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru Implementasi Rooftop Garden (taman atap) pada bangunan vertikal Jakarta Single Axi belum mencapai target 100% respond time <p>JAKARTA BERGERAK</p> <ul style="list-style-type: none"> Bus Sekolah Terintegrasi Pengembangan Transportasi di Kepulauan Seribu <p>JAKARTA BERWISATA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wisata Kepulauan Seribu Revitalisasi Aktivasi Olayok Bersejarah dan Kampanye Sejarah Jakarta Pengembangan Teluk Jakarta sebagai Waterfront City Modern Kawasan Wisata Ruang Terbuka Hijau Tersekat Revitalisasi Pantai Marunda sebagai wisata rakyat gratis Kampanye wisata "Jakarta from North to South" 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah Pembangunan Rumah Sakit Internasional/Sentral Internasional Transformasi Digital Pemerintahan Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Jakarta Sewerage System Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan jaringan gas perkotaan Pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan Perumahan/ Kawasan Permukiman Sistem Pengendalian Banjir Sistem Pengelolaan Limbah Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Ruang Terbuka Hijau Manajemen Bencana Grand Sea Wall Tanggul Pantai MIT LRT Para and Ride Pembangunan simpang tak sebidang Pengembangan aksesibilitas angkutan barang dalam mendukung fungsi Jakarta sebagai hub perdagangan internasional Infrastruktur digital kota 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pendidikan yang future-proof Ekosistem layanan kesehatan kelas dunia Masyarakat inklusif (GEDSI, populasi lanjut usia) Pusat talenta masa depan Pengembangan pejalan kaki Kalim usaha yang konduktif Ekosistem infrastruktur digital yang kuat Organisasi yang agile dan monitoring yang komprehensif Perumahan terjangkau Pengembangan lanskap ruang hijau perkotaan Sistem pengelolaan air terpadu Solusi zero-waste yang inovatif Infrastruktur tangguh dan siap menghadapi bencana Jaringan mobilitas perkotaan yang inklusif dan tanpa hambatan Ekosistem infrastruktur digital yang kuat Citra kota global yang ikonik

Gambar 2.13. Rekomendasi Outcome Prioritas
(Sumber : Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029)

Turunan *Outcome* dan Program Prioritas dari Misi 4 dan Tujuan 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35. Turunan Outcome dan Program Prioritas dari Misi 4 dan Tujuan 4.1

Misi 4: Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan		
Tujuan 4.1: Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni		
Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatkan Layanan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan infrastruktur air bersih melalui akses perpipaan, penurunan tingkat kebocoran <i>non-revenue water</i>, dan pembangunan SPAM regional dan komunal• Pembangunan <i>Jakarta Sewerage System (JSS)</i> Zona 1 dan 6• Penanganan sampah rumah tangga melalui pelayanan terjadwal, pengelolaan sampah pada kawasan mandiri, dan peningkatan TPS/TPS-3R/<i>recycling center</i>• Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi modern yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Persampahan• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Menyediakan Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan rumah susun dan fasilitas kepemilikan rumah• Peningkatan kualitas kawasan permukiman• Penyelesaian administrasi dan sertifikasi bidang tanah di kawasan permukiman• Konsolidasi tanah vertikal untuk	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengembangan Perumahan• Program Kawasan Permukiman• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)• Program Penatagunaan Tanah

Misi 4: Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan		
Tujuan 4.1: Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni		
Sasaran	Outcome	Program Prioritas
	pembangunan hunian layak	

(Sumber : Program Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029)

Jakarta, sebagai salah satu megapolitan terbesar di belahan selatan bumi, masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar infrastruktur dan pelayanan dasar agar dapat setara dengan kota-kota global lainnya. Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini meliputi penyediaan air minum aman, sanitasi aman, serta permukiman layak huni, dengan pembiayaan dari APBD, APBN, Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), maupun sumber pendanaan lainnya. Untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan air, dilakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi daerah aliran sungai, mendorong sistem pengelolaan air terpadu, pengurangan kebocoran, pemanfaatan kembali air, serta pembangunan fasilitas penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku dengan memperhatikan siklus hidrologi.

Pada tahun 2024, Jakarta telah mencapai 99,96% cakupan layanan air minum layak, namun layanan air minum perpipaan baru menjangkau 70,03%, dengan tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW) mencapai 46,2%. Diharapkan pada 2030, cakupan layanan air minum aman perpipaan mencapai 100%, selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044, serta RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045. Untuk mencapai target tersebut langkah yang akan diambil mencakup pengurangan NRW secara fisik dan komersial, pembangunan SPAM Regional (seperti Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (diantaranya Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota), pembangunan IPA (Muara Karang, Condet, Semanan, Hutan Kota 2, dan uprating IPA Cilandak), *road to IPO*, pembangunan sentra pelayanan PAM Jaya, serta peningkatan tata kelola air secara menyeluruh. Fokus khusus juga diberikan pada daerah krisis air di pesisir utara Jakarta dan wilayah Kepulauan Seribu khususnya pulau-pulau penduduk melalui pemanfaatan teknologi termasuk namun tidak terbatas pada *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* juga pemberian subsidi yang mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan dasar melalui perbaikan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Upaya peningkatan cakupan layanan air limbah antara lain dilakukan dengan konstruksi sistem pengelolaan air limbah terpadu *Jakarta Sewerage System (JSS)* Zona 1 yang direncanakan beroperasi awal 2027, konstruksi JSS Zona 6, dan perencanaan serta pendanaan untuk Zona 2, 5, dan 8 yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Selain itu, upaya peningkatan sanitasi aman dan berkelanjutan juga didukung dengan pembangunan 64 SPALD komunal dan MCK serta mendorong pelaksanaan revitalisasi tangki septik bersubsidi guna mencapai target bebas praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan mendukung pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA), penguatan tata kelola, dan alih kelola ke PD PAL Jaya dengan penetapan tarif yang jelas.

2.6.7 Penelaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Jakarta 2025-2029

Hasil rumusan isu pembangunan strategis yang dihasilkan setelah melalui proses FGD dan Konsultasi Publik diperoleh enam kelompok isu pembangunan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36. Isu Pembangunan Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Jakarta 2025-2029

Kelompok Isu Pembangunan Strategis	Isu Pembangunan Strategis
1. Tingginya Resiko Bencana	<div>1. Rob</div> <div>2. Banjir</div> <div>3. <i>Land Subsidence</i></div> <div>4. <i>Urban Heat Island</i></div> <div>5. Kekeringan</div> <div>6. Kebakaran</div> <div>7. Kurang Optimalnya Penanganan Korban Bencana</div> <div>8. Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Belum Mencapai Target</div> <div>9. Infrastruktur kebencanaan belum optimal</div> <div>10. Penggunaan energi ramah lingkungan belum optimal</div>
2. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam	<div>1. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air Baku</div> <div>2. Tingginya Intensitas Pemanfaatan Air Tanah</div> <div>3. Moratorium air tanah tidak menyeluruh</div> <div>4. Pencemaran Sampah pada Air Laut</div> <div>5. D3TLH Air Terlampaui</div> <div>6. Degradasi Keanekaragaman Hayati</div>

Kelompok Isu Pembangunan Strategis	Isu Pembangunan Strategis
	7. Potensi Pariwisata wilayah pesisir belum maksimal
3. Ketimpangan Sosial-Ekonomi	8. Pengentasan stunting belum optimal 9. Ketimpangan Infrastruktur yang Menunjang Pemerataan Pembangunan (<i>Urban - Island Based</i>) 10. Ketimpangan Akses Pendidikan 11. Kapasitas SDM belum menyeluruh 12. Tingkat Pengangguran Tinggi 13. Pengembangan Transportasi Umum dan Fasilitas Pendukungnya Belum Maksimal 14. Kualitas Kesehatan Masyarakat Belum Sesuai Target 15. Belum Menyeluruhnya Jaminan Kesehatan 16. Tingginya Kawasan Kumuh 17. Sarana dan Prasarana Permukiman Belum Mencapai Target 18. Rentannya penghidupan nelayan
4. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	19. Belum optimalnya akses air bersih perpipaan 20. Pemenuhan sanitasi aman 21. Pencemaran Udara 22. Kemacetan 23. Ruang Terbuka Hijau Terbatas 24. Perubahan Iklim 25. Peningkatan Suhu Udara 26. Peningkatan Permukaan Air Laut 27. Timbulan Sampah Domestik yang Semakin Meningkat
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota berkelanjutan	28. Rendahnya kegiatan pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB 29. Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (FI)
6. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance)	30. Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan 31. Permasalahan Manajemen Aset 32. Tidak Selarasnya Kebijakan Nasional dengan Daerah 33. Kurangnya Kepastian Hukum Berusaha 34. Penataan Wilayah Pesisir, Reklamasi Liar 35. Penataan Kawasan Perkotaan 36. Kurangnya partisipasi publik 37. Digitalisasi pelayanan publik belum merata 38. Keterbatasan transparansi kepada publik

(Sumber : KLHS RPJMD Jakarta 2025-2029)

Dari 6 (enam) kelompok isu pembangunan strategis di atas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DSDA Provinsi DKI Jakarta adalah isu nomor 1 : Tingginya Risiko Bencana dan nomor 2: Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam.

Dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025–2029. Pada dokumen tersebut, untuk menjawab isu strategis dan skenario proyeksinya, telah dirumuskan rekomendasi arahan kebijakan dan arahan program. Arahan tersebut disusun berdasarkan alternatif strategi masing-masing isu strategis KLHS, rekomendasi arahan kebijakan Tahap I (2025–2029) dari KLHS RPJPD 2025–2045, serta diharmonisasikan dengan Rancangan RPJPN 2045, Ranperda RTRW Jakarta 2044 dan RPPLH Jakarta. Rekomendasi arahan kebijakan dan program prioritas dari KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS RPJMD

Isu KLHS	Rekomendasi Arahan Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
Rekomendasi Tingginya Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder• Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana	<ul style="list-style-type: none">• 1.05.03 Penanggulangan Bencana• 1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran• 1.06.06 Program Penanganan Bencana• 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase• 1.03.08. Penataan Bangunan Gedung• 1.04.02 Pengembangan Perumahan• 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arah Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan • Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multisektor, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.03.02 Pengelolaan SDA • 1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • 1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • 1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • 2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • 2.11.08 Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • 2.11.11 Pengelolaan Persampahan • 3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil • 3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • 3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • 3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian
Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau • Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • 2.11.02 Perencanaan Lingkungan Hidup • 2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • 2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) • 2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan

Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arah Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
		Penyuluhan LH untuk Masyarakat
Ketimpangan sosial-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sektor bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) berskala internasional • Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif • Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.01.02 Pengelolaan Pendidikan • 1.01.03 Pengembangan Kurikulum • 1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • 1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • 1.03.07 Pengembangan Permukiman • 1.04.02 Pengembangan Perumahan • 1.04.03 Program Kawasan Permukiman • 1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • 1.06.02. Pemberdayaan Sosial • 1.06.05. Perlindungan dan Jaminan Sosial • 2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • 2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • 2.17.07 Pemberdayaan UMKM • 2.17.08 Pengembangan UMKM • 3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • 3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata • 3.26.03 Pemasaran Pariwisata • 3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • 3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • 4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan
Belum optimalnya tata kelola yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang • 4.01.02. Program Penataan Organisasi

Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arah Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
(good governance)	<p>pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern •</p> <p>Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (Triple Planetary Crisis)</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian good governance dan global city	<ul style="list-style-type: none">• 4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah• 4.01.06. Program Perekonomian dan Pembangunan• 5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah• 5.03.02. Program Kepegawaian Daerah• 5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia• 5.07.02. Program Pelayanan Penghubung• 6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan
Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan• 2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)• 2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik• 3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual• 5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah

(Sumber : KLHS RPJMD Jakarta 2025-2029)

2.6.8 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta Tahun 2023-2026

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, salah satu strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Provinsi DKI Jakarta adalah pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas. Salah satu sasaran pembangunan tersebut adalah penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum. Upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong

penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air.

- b. Pada tahun 2026, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses air minum perpipaan dan menurunkan tingkat kebocoran *NRW* menjadi 40% diharapkan pada tahun 2030 akses ini dapat mencapai target 100% sebagaimana amanat *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melalui penurunan *NRW* baik fisik maupun komersial, pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota, dan lainnya), serta peningkatan tata kelola air di Jakarta.
- c. Penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air seperti kampung prioritas (di antaranya Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng, dan Kerang Hijau) melalui pemberian subsidi yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan keuangan daerah.
- d. Prioritas peningkatan layanan akses air bersih lainnya yaitu wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan air bersihnya dengan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi *sea water reverse osmosis (SWRO)* disertai peningkatan tata kelola dan alih kelola SWRO tersebut oleh PAM JAYA.

2.6.9 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2024–2044

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044 ditetapkan strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan kota yang adaptif terhadap Sumber Daya Air (*water adaptive city*) menuju bebas banjir dan penataan kawasan sempadan berbasis pelestarian Sumber Daya Air serta kerja sama antar daerah Bodetabekpunjur, meliputi:

- a. mewajibkan penerapan kebijakan *Zero Delta Q* dan/atau *Zero Run Off* pada kavling Bangunan Gedung yang dikenakan persyaratan Bangunan Gedung Hijau;
- b. mengevaluasi, membangun, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem drainase, Sungai, SDEW, hingga mampu menampung curah hujan periode mulai dari 5 (lima) sampai 100 (seratus) tahun;

- c. membangun dan merevitalisasi sistem Polder di 70 (tujuh puluh) lokasi;
- d. membangun infrastruktur pengendali banjir rob di sepanjang garis pantai guna mengantisipasi kenaikan air laut;
- e. mewujudkan 100% (seratus persen) Wilayah Provinsi DKI Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/pembatasan penggunaan air tanah;
- f. mengembangkan sarana dan prasarana konservasi Sumber Daya Air dan daur ulang air di setiap atau kumpulan beberapa bangunan Gedung;
- g. memisahkan secara bertahap jaringan saluran drainase dan saluran air limbah;
- h. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di setiap atau kumpulan Bangunan Gedung;
- i. membangun 14 (empat belas) zona IPA limbah kota dan instalasi pengolahan limbah komunal;
- j. mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar dalam hal pengendalian banjir dan pasokan air bersih dari hulu; dan
- k. mengembangkan kawasan sempadan dengan pendekatan *waterfront city*.

Berikut adalah indikator program utama jangka menengah lima tahun pertama RTRW Provinsi Jakarta yang berkaitan dengan Dinas Sumber Daya Air:

Tabel 2.38. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jakarta Tahun 2024-2044

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir				
Revitalisasi kanal	DAS Ciliwung, DAS Krukut, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Blencong, Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT)	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Normalisasi dan naturalisasi sungai	Kali Krukut Bawah, Kali Besar dan Sodetan /Kanal Museum Bahari, Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru, Kali Ciliwung Kampung Walang Jl. Lodan, Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu, Saluran Drainase Kawasan Semanggi Atmajaya dan Balai Kartini, Kali Ciliwung, Kali Jatikramat, Kali Sunter Atas, Kali Krukut Atas, Kali Grogol Atas, Kali Pesanggrahan, Kali Cakung Lama, Kali Buaran, Kali Petukangan, Kali Angke Lama, Kali Baru Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
	Kali Ancol			2024-2026
	Kali Angke			2027, 2029
	Kali Apuran Atas			2024-2026
	Kali Apuran Bawah			2028

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Kali Cakung Lama			2024-2025
	Kali Cideng			2024-2026
	Kali Mampang			2027
	Kali Petukangan			2026
	Kali Sekertaris			2029
Pengembangan dan pemeliharaan kanal banjir Jakarta	Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan peningkatan sistem pengendalian banjir dan rob berupa peningkatan kualitas jaringan drainase	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, Bappeda, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
	Sungai Angke			2027, 2029
	Kalibaru Timur			2026
	Sungai Cakung			2026
	Sungai Grogol			2028
	Kali Ancol			2024-2026
	Kali Apuran Atas			2024-2026
	Kali Apuran Bawah			2028
	Kali Cideng			2024-2026
	Kali Kamal			2024-2026
	Kali Mampang			2027
	Kali Petukangan			2029
	Kali Sekertaris			2026
	Kali Semongol			2024-2026

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Sal. Phb Green Ville			2024-2026
	Sal. Phb Kamal RW. 01			2024-2026
	Sal. Phb Kamal RW. 03			2024-2026
	Sal. Phb Mangga Raya			2024-2026
	Sal. Phb Polor			2024-2026
	Sal. Phb Rawa Badak			2027
	Sal. Phb Rawa Badak BPP			2027
	Sal. Phb Rawa Badak BRT			2027
	Sal. Phb Rawa Badak/TTA 1			2027
Penerapan Zero Delta Q pada kavling bangunan gedung	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengendalian dan pengawasan kapasitas tampung drainase, sungai, dan kanal secara berkala	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat		2024-2029
Peningkatan kapasitas aliran Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain dan pembangunan Cengkareng Drain II untuk kawasan bagian Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Peningkatan Kapasitas Aliran Cakung Drain, Sungai Sunter, dan Pembangunan Kanal	Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Banjir Timur Untuk Kawasan Bagian Tengah Dan Timur				
Pembangunan jalur sungai, kanal, dan jaringan drainase yang saling terhubung satu sama lain untuk mengurangi beban debit air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan peningkatan sistem <i>flood forecasting and early warning system</i> di area rawan banjir dan genangan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pelebaran aliran sungai untuk penambahan daya tampung debit air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan tanggul pantai (<i>NCICD</i>) dan tanggul laut	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan	Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan	APBN, APBD, Swasta dan/atau	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
peningkatan sarana dan prasarana tanggul, tanggul pemecah gelombang, saluran, dan infrastruktur SDA	Seribu	Masyarakat	dan/atau Masyarakat	
Pembangunan bangunan tanggul dengan kala ulang 25 tahunan dan pintu air pada daerah sempadan sungai	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan tanggul untuk mengatasi rob	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir				
Pengembangan dan revitalisasi polder	Polder Kapuk Poglar, Polder Muara Karang, Polder Cengkareng, Polder Kalideres, Polder Jelambar, Polder Penjaringan <i>Junction</i> , Polder Kapuk Muara, Polder Kedoya Taman Ratu, Polder Kedoya Geen Garden, Polder Tomang Barat, Polder Pulomas, Polder Kelapa Gading / Sunter Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	1B, Polder Sunter Timur III Rawa Badak, Polder Mangga Dua, Polder Kembangan, Polder Jati Pulo, Polder Rawa Buaya, Polder Semanan, Polder Setiabudi Barat, Polder Teluk Gong, Polder Hankam Slipi, Polder Senayan TVRI, Polder Kebayoran Lama, Polder Tanjungan, Polder Penggilingan, Polder Sunter Timur II Kebantenan, Polder Perum Walikota (Don Bosco), Polder Komplek Dewa Kembar, Polder Komplek Dewa Ruci, Polder Setiabudi Timur, Polder Manggarai - Tebet, Polder PIK Golf Course, Polder PIK Selatan Timur, Polder PIK Utara Timur, Polder Kamal, Polder Pluit, Polder Sunter Utara, Polder Sunter Timur I Kodamar, Polder Sunter Selatan, Polder Kemayoran Polder Siantar Melati Polder Grogol Polder PIK BGM/Utara Barat I Polder Muara Angke, Polder Rawa			

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Kepa, Polder PIK Utara Barat 2, Polder PIK Selatan Barat			
Pembangunan polder	Polder Sunter Timur II (KBN-Kebantenan-Petukangan Cakung), Polder Semanan, Polder Cakung Timur, Polder Cipinang, Polder Duren Sawit, Polder Grogol, Polder Johar Baru, Polder Kayu Putih, Polder Klender, Polder Marunda, Polder Pasar Ikan, Polder Pegangsaan Dua, Polder Pondok Kopi, Polder Pulo Gebang, Polder Pulogadung, Polder Rawa Bunga, Polder Warung Jengkol Vespa, Polder Kelapa Gading / Sunter Timur 1B (Betik dan Artha Gading), Polder Kedoya Green Garden di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan dan Cengkareng, Polder Kamal, Polder IKPN Bintaro	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan drainase vertikal	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan air dari sampah/limbah serta menjaga luasan badan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan revitalisasi pompa pengendali banjir	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air				
Perluasan area dan kapasitas situ, danau, embung, dan waduk agar mampu menampung curah hujan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Penyediaan kios air, terminal air dan/atau tempat penampungan air komunal	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan saluran tepi jalan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sungai, saluran, kanal, pintu air, syphon, saringan sampah serta waduk	Kali Semanan, Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pemeliharaan jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pengembangan situ, danau, embung, dan waduk	Pondok Ranggon, Cilangkap, Halim, Brigif, Mangga Bolong, Babakan, Lebak Bulus pada SWP Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan tanggul sungai, waduk, situ, embung	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
Perwujudan Jaringan Perpipaan				

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pembangunan unit air baku dan unit produksi yang bersumber dari sumber air permukaan, danau/waduk, situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai air minum	IPA Taman Kota, IPA Buaran II, IPA Cilandak, IPA Pejompongan, IPA SWRO	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan bangunan penampung air dan/atau instalasi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum regional	SPAM Karian-Serpong, SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2. SPAM SWRO	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan instalasi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)	Wilayah Pesisir Pantai pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	IPA Hutan Kota pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan IPA Buaran III pada Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan				

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)				
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
Pemisahan saluran air limbah eksisting dengan saluran drainase	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pengembangan jaringan SPALDT berikut prasarana dan sarana pendukung	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pemisahan sistem saluran air limbah dengan saluran drainase secara bertahap	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
Perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik konvensional ramah lingkungan di kawasan yang belum terlayani oleh SPALDT	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat (Jakarta Sewerage System)	Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah bawah tanah di area RTH	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan sistem pengelola daur ulang air limbah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi baku mutu sebagai sumber air alternatif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik konvensional ramah lingkungan pada kawasan yang belum terlayani SPALDT	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pembangunan Instalasi sistem pengolahan air hujan dan pengolahan air limbah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Sistem Drainase				
Perwujudan Jaringan Drainase Primer				
Pengembangan sistem dan drainase primer	Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, Kali Buaran, Kali Cengkareng Drain, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervart, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cakung Lama, Kali Cakung Atas, Kali Buaran, Kali Cipinang, Kali Grogol, Kali Mookevert, Kali Sunter, Cakung Drain, Kali Kamal, Kali Muara Karang	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder				
Pengembangan sistem dan drainase sekunder	Kali Angke, Kali Sepak, Kali Ulujami, Kali Meruya, Kali Sekretaris, Sodetan Grogol Sekretaris, Kali Duri, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Jelakeng, Kali Pademangan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Timur, Kali Besar, Kali Krukut Bawah, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Kali Ciliwung Gajah Mada, Kali Ancol, Kali Pademangan Barat, Kali Pakin, Kali Semanan, Kali Mati Pademangan			
Perwujudan Jaringan Drainase Tersier				
Pengembangan sistem dan drainase tersier	Kali Item, Sal. Phb. Kali Pedongkelan, Sal. Phb. Danau Sunter C, Sal Phb. Sodetan Batu Ampar	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Pola Ruang				
Perwujudan Kawasan Lindung				
Perwujudan Badan Air				
Pemulihan dan peningkatan kemampuan media penahan aliran permukaan sebelum terbuang ke laut	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengendalian kegiatan yang mengurangi fungsi dan kualitas badan air permukaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pemberian disinsentif untuk kegiatan menggunakan air tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk resapan air meliputi penyediaan sumur resapan, kolam retensi, situ, danau, embung, dan/ atau waduk	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembuatan alat atau bangunan pengimbuhan buatan (artificial recharge) untuk memperbesar volume infiltrasi dan perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengendalian kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan resapan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengembangan, pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
sempadan sungai, pantai, dan situ, danau, embung, waduk (SDEW)		Masyarakat	dan/atau Masyarakat	
Pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, pantai, dan situ, danau, embung, waduk (SDEW) aset Daerah Khusus Jakarta yang berada diluar Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Peningkatan kemampuan badan air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Peningkatan keberadaan badan air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perbaikan kualitas air sungai, situ, danau, embung, dan waduk sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengelolaan kawasan sekitar situ/danau/embung/waduk untuk menjamin	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
keberlanjutan fungsi sebagai kawasan tangkapan/penampungan air atau pariwisata		Masyarakat	dan/atau Masyarakat	
Pengembangan, pengembalian, dan mempertahankan fungsi ekosistem	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat				
Peningkatan keberadaan badan air sebagai penampung kelebihan air	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai, danau, embung, pantai, dan waduk	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengelolaan sempadan pantai dan sempadan sungai pada ruas muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Kawasan Permukiman				
Perwujudan Kawasan Perumahan				
Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara in-situ	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara ex-situ	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Peningkatan kualitas lingkungan kampung kota melalui pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali	Kec. Cilincing (Kampung Gang Lengkon), Kec. Penjaringan (Kampung Gedong Pompa, Kampung Muara Angke, Kampung Marlina, dan Elektro), Kec. Tamansari (Kampung Kunir), Kec. Pademangan (Tongkol, Lodan, Krapu), Kec. Kebon Jeruk (Kampung Rawa Timur, Rawa Barat, Guji Baru), Kec. Cengkareng (Kampung Kali Apuran), Kec. Kebayoran Lama (Kampung Baru), Kec. Pademangan (Kampung	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pembangunan dan pengembangan rumah susun umum	Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta Utara	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	
Pembangunan dan pengembangan rumah susun (umum dan komersial) di sekitar titik transit angkutan umum massal	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	
Pembangunan dan pengembangan rumah flat atau hunian tinggal tapak (landed house) dengan lantai berjumlah 1 - 4 lantai untuk lebih dari satu kepala kepala keluarga (<i>multi family housing</i>)	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas SDA, BUMD, Swasta	

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
			dan/atau Masyarakat	
Perwujudan Kawasan Strategis				
Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi				
Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan adaptif terhadap bencana	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	BPBD, DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pembangunan utilitas dasar	Kawasan Segitiga Emas; Kawasan Tanah Abang; Kawasan JIEP; Kawasan PIK; Pulogadung; Kawasan Kepulauan Seribu; Kawasan Ancol; Kawasan Rorotan; dan Kawasan Pesisir Utara bagian Timur.	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Disnakertransgi, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Perwujudan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya				
Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama	DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Dinas	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet; Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran	pendanaan	SDA, Dinas Bina Marga, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	
Pemenuhan utilitas dasar kawasan	Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua; Kawasan Jakarta International Stadium (JIS); Kawasan Cikini; Kawasan Pluit-Muara Angke; Kawasan Tebet;	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	DCKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Disnakertransgi, Biro PLH, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
	Kawasan Glodok; Kawasan Pasar Baru; dan Kawasan Bandar Kemayoran			
Perwujudaan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Hidup				
Pembangunan tanggul pantai untuk perlindungan pesisir	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, BUMN, Bappeda, Dinas SDA, Dinas KPKP, BUMD, Swasta	2024-2029
Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas KPKP, BUMD, Swasta	2024-2029
Perbaikan lingkungan dan penataan kawasan permukiman	Kawasan Pesisir Pantai Utara bagian Barat; Pulau C,D,G; dan Kawasan Pulau Tidung Kecil	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, DCKTRP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas KPKP, Swasta	2024-2029

Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun
Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang				
Penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjaga fungsi struktur ruang/pola ruang	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Penertiban pemanfaatan ruang guna menjaga fungsi struktur ruang/pola ruang	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan	Provinsi DKI Jakarta	APBN, APBD, Swasta dan/atau Masyarakat	Kementerian PUPR, BUMN, Dinas SDA, BUMD, Swasta dan/atau Masyarakat	2024-2029

(Sumber : RTRW Jakarta 2024-2044)



2.6.10. Penelaahan Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), disepakati saat pertemuan dunia pada september tahun 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda Sustainable Development*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan – perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. *SDGs* diberlakukan dengan prinsip – prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada akhir tahun 2015.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs/TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan / goals yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesehatan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Gambarnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.14. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sumber : dokumen Sustainable Development Goals (SDGS))

Adapun tujuan/*goals* yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah tujuan/*goals* no. 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak berupaya untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Tujuan ini menekankan pada pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak sebagai kebutuhan dasar manusia. Pada intinya berupaya untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB tujuan 6 (enam) di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada panduan Metadata Edisi II (dua) serta menyesuaikan ketersediaan data di level provinsi, sehingga hanya terdapat 3 (tiga) target dan 3 (tiga) indikator yang akan diadopsi dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 :

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.

Target ini sudah diutamakan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu pada program prioritas daerah yang termanifestasikan dalam dimensi

lingkungan-bangun (*built-environment*). Dimensi tersebut dielaborasikan dalam tujuan “Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” yang secara khusus masuk dalam sasaran “Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas; Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”; dan “Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota”. Adapun beberapa strateginya mencakup “Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air; Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah minum, Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta”; Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase; dan “Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian Adapun turunan dari strategi di atas diterjemahkan kembali dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakannya diterjemahkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas air minum melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum komunal;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat terkait peningkatan akses air minum melalui pembangunan sistem pengolahan air minum regional;
3. Pembangunan infrastruktur air limbah perkotaan yang diarahkan pada peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dengan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan peningkatan sambungan air limbah pada kawasan permukiman;
4. Pengembangan sistem pengolahan limbah setempat/lokal yang diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak dapat dilayani oleh sistem terpusat;
5. Menambah volume dan kapasitas tampungan melalui pembangunan waduk, situ, embung pengendali banjir dan konservasi, serta sistem polder pada *highland* dan *lowland area* yang berpedoman pada konsep *Nature Based Solutions (NBS)*;
6. Penataan daerah aliran sungai dengan mengadopsi konsep *NBS* melalui upaya Naturalisasi dan Restorasi Kali/sungai;
7. Menyediakan sistem drainase perkotaan dan kelengkapannya;
8. Mengintegrasikan sistem drainase dengan infrastruktur *NBS* dan/atau sebaliknya;
9. Meningkatkan kapasitas sistem drainase melalui operasi, pemeliharaan, dan pengerukan sistem drainase;

10. Perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan kenaikan permukaan air laut pada kawasan pesisir melalui pengembangan tanggul laut di pesisir pantai Jakarta;
11. Perlindungan abrasi pantai di Kepulauan Seribu melalui pembangunan breakwater dan bangunan pemecah gelombang.

Kebijakan terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 menitikberatkan pada penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan mengimplementasikan serangkaian strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum yang layak dan aman;
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum agar mampu menyediakan pelayanan yang baik;
3. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efisien dan berkelanjutan;
4. Menyadarkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air dan memilih akses air minum dari sumber yang layak seperti menggunakan layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum yang aman dalam rumah tangga;
5. Meningkatkan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
6. Mendapatkan komitmen kuat dari kepala daerah untuk menyediakan layanan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Mengembangkan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
8. Mengubah perilaku masyarakat agar mencapai akses sanitasi yang aman;
9. Mengembangkan kerja sama dan pola pendanaan yang efektif dalam hal pengelolaan air dan sanitasi;

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud mencakup akses air bersih, sanitasi yang layak, dan permukiman layak huni yang pendanaannya dapat bersumber dari APBD, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah.

Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air. Pada tahun 2021, akses layanan sumber air minum layak di Jakarta telah mencapai 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) namun demikian, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 70,03% (tujuh puluh koma nol tiga persen), dengan tingkat kebocoran sebesar 46% (empat puluh enam persen) NRW (*non-revenue water*). Ke depannya, pemerintah menyiapkan roadmap rencana aksi dalam rangka penyiapan transisi pengelolaan air bersih dari operator swasta kepada PAM Jaya untuk memastikan tidak terjadi gap layanan kepada pelanggan.

Pada tahun 2026, pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses air minum perpipaan hingga 89,02% (delapan puluh sembilan koma nol dua persen) dan menurunkan tingkat kebocoran NRW menjadi 40% (empat puluh persen). Diharapkan pada tahun 2030, akses ini dapat mencapai target 100% (seratus persen) sebagaimana amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melalui penurunan NRW baik fisik maupun komersial, pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian-Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Pesanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota, dan lainnya), serta peningkatan tata kelola air di Jakarta. Perhatian tersendiri juga diberikan kepada penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air seperti kampung prioritas (diantaranya Rawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng, dan Kerang Hijau) melalui pemberian subsidi yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan keuangan daerah. Prioritas peningkatan layanan akses air bersih lainnya yaitu wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan air bersihnya dengan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* disertai peningkatan tata kelola dan alih kelola *SWRO* tersebut oleh PAM Jaya.

Pemerintah juga mengupayakan peningkatan sanitasi layak sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan pengelolaan sektor air limbah dan persampahan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah dari 21,26% (dua puluh satu koma dua puluh enam persen) menjadi 24,17% (dua puluh empat koma tujuh belas persen) pada tahun 2026. Peningkatan cakupan pelayanan ini diupayakan dengan mengakselerasi penetapan dan implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik. Kebijakan

tersebut diantaranya; pembangunan 50 (lima puluh) SPALD komunal, peningkatan tata kelola dan alih kelola 12 (dua belas) SPALD komunal termasuk SPALD komunal di Kepulauan Seribu ke PD PAL Jaya, subsidi pengolahan air limbah, dan pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) (Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2022).

2.6.11 Penelaahan Terhadap Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi Jakarta 2024-2044

Di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 41 tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044, disusun Konsep rencana pengembangan SPAM Provinsi DKI Jakarta meliputi peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kapasitas produksi, dan ketahanan air baku. Dasar penyusunan konsep pengembangan mengacu kepada RTRW Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2030, rencana pengembangan SPAM internal dan regional, serta dengan menggali potensi air baku internal Provinsi DKI Jakarta.

A. Peningkatan Cakupan Pelayanan meliputi:

1. Cakupan pelayanan 100% di tahun 2030
2. Penambahan jaringan perpipaan di wilayah yang belum terlayani
3. Peningkatan pelayanan di wilayah terlayani
4. Rekomendasi pembatasan penggunaan air tanah

B. Peningkatan Kapasitas Produksi meliputi:

1. Peningkatan produksi
 - a. SPAM Hutan Kota: 500 liter/detik (dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya pengembangan)
 - b. Uprating SPAM Buaran 1 dan 2: 400 liter/detik
 - c. Uprating SPAM Cilandak: 200 liter/detik
 - d. Uprating IPA SWRO dan BWRO Kepulauan Seribu: 15 Liter/detik*
*) Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air, diperlukan penambahan IPA SWRO dan BWRO di Kepulauan Seribu
 - e. Penambahan supply TKR : 100 liter/detik
 - f. Penambahan supply Tirta Benteng : 200 Liter/detik
2. Pembangunan SPAM Baru
 - a. SPAM Ciliwung: 200 liter/detik
 - b. SPAM Pesanggrahan: 750 liter/detik
 - c. SPAM Buaran 3: 3.000 liter/detik
3. Penambahan Supply dari SPAM regional
 - a. SPAM Jatiluhur: 4.000 liter/detik

- b. SPAM Karian: 3.200 liter/detik
 - c. SPAM Juanda dengan mempertimbangkan aspek teknis dan komersial: 2.054 liter/detik (di antaranya mempertimbangkan selisih kebutuhan yang ada dan dibandingkan dengan rencana penyediaan lainnya).
- 4. Penurunan NRW

Mengacu ke target PAM JAYA nilai NRW pada tahun 2030 sebesar 30%.

 - a. Pengendalian kebocoran secara aktif
 - b. Kecepatan dan kualitas perbaikan pipa
 - c. Manajemen aset
 - d. Pengelolaan tekanan
- C. Ketahanan Air Baku meliputi:
 - 1. Potensi Air Permukaan – Sungai: 5.071 liter/detik
 - 2. Potensi Air Permukaan – Waduk/Situ: 12.740 liter/detik
 - 3. Potensi Recycling dari Pengelolaan Air Limbah: 2.636.000 m³/hari
 - 4. Potensi Air Hujan
 - 5. Potensi Air Laut
 - 6. Efisiensi Pemakaian Air

2.6.12 Penelaahan Terhadap Konsep Pengendalian Banjir Terpadu dan Pradesain Tanggul Laut Terpadu (PTPIN/NCICD)

Di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 112/KPTS/M/2022 Tentang Konsep Pengendalian Banjir Terpadu dan Pradesain Tanggul Laut Tahap B Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)/ *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)* di Pesisir Teluk Jakarta, disusun 6 (enam) Konsep terkait :

- Perlindungan Banjir Terpadu (*Integrated Flood Safety Plan*)
 - Pembangunan Tanggul Pantai
 - Pengadaan Stasiun Pompa Primer
 - Perluasan Polder
- Penyediaan Air Bersih dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah
 - Memprioritaskan area dengan tingkat penurunan muka tanah dan kebutuhan air berada pada titik tertinggi;
 - Menyelaraskan program penyediaan air bersih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan mensinergikan prioritas dan tujuan;
 - Menciptakan kesadaran para Pemangku Kepentingan;
 - Mengendalikan pengambilan air tanah.

- Peningkatan Kualitas Air
 - Memastikan pelaksanaan program JSDP/JSS tepat waktu sesuai rencana
 - Memperlebar celah bukan tanggul laut terbuka tahap B
 - Melakukan reboisasi bakau
 - Memastikan air limbah yang dihasilkan dari zona pengembangan wilayah tidak mengalir ke waduk retensi
 - Melakukan pengukuran pemantauan kualitas air
- Perspektif dan Revitalisasi Pengembangan Kota Terpadu;
 - a. Mengurangi risiko banjir: Pengendalian penurunan muka tanah, Tahap A : penguatan tanggul pantai dan sungai yang mendesak, Tahap B dan C : keamanan banjir jangka panjang dengan tanggul laut, Mengurangi genangan lokal dengan polder.
 - b. Meningkatkan infrastruktur: Tanggul serbaguna dengan area komersial dan ruang public, Jalan lingkar luar di sisi utara, Pembangunan pelabuhan, Penyediaan air dan penampungan air baku
 - c. Memperkuat masyarakat pesisir: Penguatan masyarakat pesisir, Pembangunan ruang publik, Pusat perikanan nasional, Revitalisasi kawasan heritage di pesisir pantai, Pengembangan pariwisata dan rekreasi
 - d. Merevitalisasi lingkungan: Peningkatan kualitas air dan sanitasi , Pengelolaan sampah padat, Konservasi mangrove, Produksi energi berkelanjutan, Konsep bangunan hijau (*green building*)
- Konsep Pembangunan Tanggul Pantai dan Muara Sungai Tahap A yang Terintegrasi dengan Sistem Polder
 - Pembangunan tanggul pantai untuk melindungi Jakarta dari banjir laut/rob
 - Pembangunan tanggul pantai di desain untuk tidak mengganggu, atau dapat meningkatkan kondisi ekonomi, social, dan lingkungan di kawasan sekitar tanggul.
 - Pembangunan tanggul pantai perlu diintegrasikan dengan sistem polder yang berisi jaringan drainase, kolam retensi, dan pompa untuk menangani banjir dari hujan (hulu s/d hilir) agar tidak dilubangi oleh warga seperti yang terjadi saat ini
- Konsep dan Pradesain Tanggul Laut Terbuka Tahap B dengan Standar Keamanan Banjir Skala 1:10.000 (Satu Banding Sepuluh Ribu) Tahun yang Adaptif, Terintegrasi dengan Jalan Tol, Transportasi Publik, Pengembangan Kawasan, Skema Pembiayaan dan Kelembagaan yang Layak.

Opsi pengadaan yang telah direkomendasikan oleh Tim Tenaga Ahli Belanda dan PMU V NCICD (Bidang Perumusan Kebijakan dan Pembiayaan Infrastruktur

Sumber Daya Air) untuk pembangunan Tanggul Laut Terbuka Tahap B adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan struktur kontrak *Design-Build* (DB) untuk pembangunan tanggul laut terbuka, dan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan struktur kontrak *Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT)* untuk pembangunan jalan tol. Bentuk pengembalian investasi dari jalan tol adalah melalui *user payment* atau tarif tol, dan diperlukan dukungan pendanaan dari pemerintah berupa *Viability Gap Fund* (VGF) guna meningkatkan kelayakan finansial proyek. Sementara untuk pembangunan tanggul laut pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian pembangunan atau *milestone payment*.

2.6.13 Penelaahan Terhadap Talkshow Jakarta Future Festival 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menggelar *Jakarta Future Festival (JFF) 2025* pada 13-15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Festival bertema *"Collaborate to Elevate!"*. JFF 2025 yang merupakan sebuah ruang kolaborasi bagi gagasan maupun aksi ragam unsur kota, terhadap masa depan Jakarta. JFF 2025 sebagai wadah strategis untuk mendorong kolaborasi publik dalam menyusun masa depan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dinas Sumber Daya Air turut berpartisipasi dalam *talkshow* yang berjudul *"The Future of Water in Jakarta : Where It Will Flow?"*. Di dalam *talkshow* tersebut ada beberapa hal penting yang dibahas, diantaranya :

1. Pada dasarnya tugas DSDA adalah menangani air yang terdiri dari air banjir, air bersih dan air limbah. Penanganan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus bisa dielaborasi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga.
2. Kapasitas infrastruktur drainase Jakarta (100-150 mm) sudah tidak mampu menampung curah hujan saat ini yang sudah mencapai 350 mm. Karena itu sudah pasti akan ada genangan. Harus ada solusi untuk mengatasi ini. Salah satunya dengan menambah RTH.
3. Air limbah yang dikelola oleh Perumda PAL JAYA sangat besar. Karena itu potensinya sangat besar untuk diolah menjadi sumber air baku.
4. Perda Jakarta mewajibkan setiap rumah tangga menguras septic tank 3 (tiga) tahun sekali. Ini akan jadi pekerjaan rutin yang membutuhkan *resource* besar, namun menjadi alternatif pendapatan bagi Perumda PAL JAYA.

5. Air yang dihasilkan oleh PAM JAYA itu sebenarnya *drinkable*. Namun sayangnya saluran perpipaan sudah tua dan tidak *food grade*. Butuh investasi sekitar 14 triliun untuk meng-*upgrade* pipa air PAM.
6. PAM JAYA akan IPO di 2026 dan sedang mencari *strategic alliance*.
7. *Nuffic for Asia* bekerja sama dengan Pemprov. DKI Jakarta sudah melakukan banyak kegiatan seperti Living Lab, Kampung kreatif yang pada dasarnya mengedukasi masyarakat serta berkolaborasi dengan warga dalam proyek-proyek intervensi kreatif.
8. Di samping itu, kerja sama Pemprov. DKI Jakarta dan *Nuffic* juga dalam bentuk beasiswa *DUTEP (Dutch Training and Exposure Programme)* yang memberikan kesempatan pegawai Pemprov DKI untuk belajar di Belanda selama 10 minggu (bagian dari kerjasama DKI Jakarta – Rotterdam).

2.6.14 Kondisi Kepulauan Seribu

Berikut adalah kondisi kepulauan seribu berdasarkan 4 (empat) pilar DSDA Provinsi Jakarta:

1. Pengendalian Banjir dan Drainase

Karakteristik Wilayah

Kepulauan Seribu terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di Teluk Jakarta. Sebagian besar wilayahnya adalah pulau kecil dengan elevasi rendah (kurang dari 2 meter di atas permukaan laut), sehingga sangat rentan terhadap banjir rob dan kenaikan muka air laut. Tidak memiliki sistem sungai atau saluran air alami yang besar seperti di daratan Jakarta. Sistem drainase di pulau terdiri dari parit-parit terbuka dan saluran kecil yang mengalirkan air hujan ke pantai, namun tidak cukup jika terjadi hujan lebat atau pasang tinggi.

Penyebab Banjir:

Banjir Rob (pasang laut): Merupakan risiko utama, terutama pada saat bulan purnama dan saat terjadi kombinasi pasang tinggi dan angin kencang dari arah barat atau utara. Curah hujan tinggi: Walau tidak setinggi Jakarta daratan, hujan yang turun secara terus-menerus dapat menyebabkan genangan karena tidak adanya sistem pembuangan air yang efisien. Sampah dan sedimentasi: Sering menyumbat saluran-saluran kecil dan memperparah genangan.

Tantangan :

Lahan terbatas menyulitkan pembangunan sistem drainase konvensional. Pendangkalan akibat abrasi dan sedimentasi, menyebabkan air laut lebih mudah masuk ke wilayah daratan. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut meningkatkan risiko banjir.

2. Sistem Penyediaan Air Minum

Karakteristik Wilayah :

Kepulauan Seribu terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ketersediaan air tawar yang sangat terbatas. Tidak terdapat sumber air permukaan seperti sungai atau danau. Air tanah dangkal umumnya berasa asin atau payau karena intrusi air laut, terutama saat musim kemarau atau pasang tinggi.

Tantangan:

Intrusi air laut: membuat air tanah tidak layak konsumsi. Curah hujan musiman: air hujan hanya bisa ditampung terbatas dan tergantung musim. Tingkat kepadatan penduduk tinggi di beberapa pulau seperti Pulau Panggang dan Pulau Pramuka menambah tekanan terhadap sumber air yang tersedia. Distribusi logistik mahal: membawa air bersih dari daratan membutuhkan biaya tinggi. *Sistem RO (reverse osmosis)* sebagai teknologi utama SPAM di Kepulauan Seribu masih mahal (listrik, membran, perawatan). Kapasitas produksi RO masih terbatas belum dapat memenuhi kebutuhan pulau.

3. Layanan Air Limbah Aman

Karakteristik Wilayah :

Kepulauan Seribu adalah gugusan pulau kecil yang berada di atas terumbu karang, dengan luas daratan terbatas dan kepadatan penduduk tinggi di beberapa pulau. Tidak memiliki sistem drainase dan pengelolaan air limbah terpusat seperti di Jakarta daratan. Lingkungan pesisir yang rentan menyebabkan air limbah domestik berisiko langsung mencemari perairan laut jika tidak ditangani dengan baik.

Tantangan:

Sebagian besar rumah tangga masih menggunakan *septic tank* individual, namun tidak semuanya memenuhi standar teknis (jarak aman, kedap air, dll). Banyak *septic tank* bocor atau dangkal, yang menyebabkan infiltrasi limbah ke tanah berpori dan mencemari air tanah. Limbah *greywater* (air bekas non-tinja) seringkali langsung dialirkan ke saluran terbuka atau ke laut tanpa

pengolahan. Layanan penyedotan lumpur tinja (LLTT) sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia secara rutin, karena: kendala akses transportasi (tidak ada truk tinja, hanya kapal), tidak adanya fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di pulau-pulau tersebut, biaya penyedotan mahal karena harus dikirim ke Jakarta daratan.

4. Pengendalian *Land Subsidence*

Karakteristik Wilayah:

Kepulauan Seribu terdiri dari pulau-pulau kecil berbasis karang (*atoll* dan *coral island*). Tanah di wilayah ini bukan endapan alluvial seperti di daratan Jakarta, melainkan campuran pasir, karang mati, dan material organik sehingga risiko penurunan muka tanah (*land subsidence*) secara geoteknis sangat kecil dibandingkan dengan daratan Jakarta.

Penyebab *Land Subsidence*:

- Eksploitasi air tanah : Beberapa pulau berpenduduk, seperti Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung masih menggunakan air tanah dangkal untuk kebutuhan air bersih. Pengambilan air tanah yang berlebihan bisa menyebabkan kompaksi lapisan tanah, meski skalanya lebih kecil dibanding daratan Jakarta.
- Peningkatan beban permukaan : penambahan bangunan permanen (seperti betonisasi jalan, dermaga, dan perumahan) dalam skala besar berpotensi memberikan beban struktural yang menekan tanah pulau, meskipun ini masih dalam skala sangat lokal.
- Di Kepulauan Seribu, yang lebih dominan adalah kenaikan muka air laut (*sea level rise*), bukan penurunan tanah.

Tantangan:

Kapasitas teknis dan logistik terbatas untuk instalasi sistem monitoring permanen seperti *GPS* atau *tide gauge otomatis*.

2.6.15 Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung atau tidak langsung secara signifikan di masa mendatang. Adapun isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur pengendalian banjir dan rob serta pengelolaan penanganan banjir dan rob yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi. Pengendalian banjir

dan rob modern tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur fisik (*grey infrastructure*) seperti tanggul, waduk, dan drainase, tetapi juga mengintegrasikan:

- *Green-Blue Infrastructure*: solusi berbasis alam (*natural solutions*) yaitu waduk alami, ruang terbuka hijau, taman resapan dan naturalisasi sungai.
- *Smart Technology*: pemantauan real-time, sistem peringatan dini, dan pemodelan prediktif berbasis data.
- Tata Kelola Terpadu (*Integrated Water Resources Management/IWRM*): kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan berbasis masyarakat.

2. Sumber air baku dan akses layanan air minum aman perpipaan

Isu-isu penting terkait air baku dan air minum ini adalah sebagai berikut :

- Kemandirian dan Diversifikasi Sumber Air Baku
Mengurangi ketergantungan dari Jatiluhur dan mengembangkan Waduk Karian, pemanfaatan Sungai Ciliwung setelah revitalisasi, serta teknologi *desalination* di pesisir.
- Eksploitasi Air Tanah
Akses air perpipaan yang meningkat akan membuat penggunaan air tanah berkurang, sehingga subsidi bisa ditekan.
- Perluasan dan Pemerataan Layanan Perpipaan
Perluasan yang berfokus ke kantong permukiman padat, kawasan pesisir, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Kualitas dan Keandalan Air Baku dan Air Minum
Pengendalian pencemaran di hulu dan sungai akan meningkatkan kualitas mutu air baku; Modernisasi IPA dan sistem distribusi; Sistem monitoring kualitas air berbasis sensor *real-time*.
- Tata Kelola Terintegrasi
Sinkronisasi program Dinas SDA DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR, Perumda PAM Jaya, dan pemerintah daerah hulu (Bogor, Bekasi, Banten); Kerjasama lintas daerah untuk ketahanan air jangka panjang.

3. Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang meningkatkan akses layanan air limbah domestik aman bagi masyarakat

Isu-isu penting terkait pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Perluasan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (*Sewerage System*) : Percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Skala Kota beserta jaringan pipa air limbah dalam

kerangka *Jakarta Sewerage Development Project*; Penyediaan sambungan rumah (*house connection*) secara bertahap agar masyarakat langsung terhubung ke sistem.

- Modernisasi dan Standarisasi Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat : Kualitas tangki septik kedap sesuai standar teknis; Penerapan sedot tinja terjadwal (LLTT) yang diwajibkan dan mudah diakses; Penyediaan bantuan septik tank komunal untuk kawasan padat dan permukiman informal
- Integrasi Infrastruktur Air Limbah Domestik dengan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir : Desain saluran dan jaringan yang memisahkan air hujan dan air limbah domestik (*separated system*); Infrastruktur adaptif yang tahan banjir dan rob; Pemanfaatan air olahan IPALD untuk *flushing* toilet, irigasi taman kota, dan pengendalian kebakaran.
- Pengembangan Infrastruktur Berbasis Kawasan & Komunitas : Pembangunan IPALD komunal skala kelurahan/RW di wilayah padat penduduk; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas bersama; Penerapan teknologi tepat guna (biofilter, *constructed wetland*).
- Pemanfaatan Teknologi & Inovasi Digital : Penerapan *IoT* dan *smart monitoring* untuk memantau kualitas air limbah dan kinerja IPALD; Digitalisasi sistem layanan sedot tinja terjadwal (misalnya aplikasi *booking online*); Pemanfaatan energi terbarukan dari lumpur tinja (biogas, kompos, pupuk cair).
- Skema Pembiayaan Infrastruktur yang Berkelanjutan : Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP) untuk pembangunan jaringan air limbah; Subsidi silang antara pelanggan komersial dan rumah tangga miskin agar akses lebih merata; Tarif layanan yang wajar, transparan, dan terjangkau.
- Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Domestik : Optimalisasi peran Perumda PAL Jaya sebagai operator infrastruktur air limbah domestik; Integrasi perencanaan infrastruktur air limbah domestik dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pengendalian Banjir; Kolaborasi lintas sektor (Dinas SDA, Dinas LH, PAM Jaya, Kementerian PUPR, swasta) untuk percepatan layanan

4. Pengendalian penurunan muka tanah (*land subsidence*)

Isu-isu penting Dinas Sumber Daya Air terkait pengendalian penurunan muka tanah adalah sebagai berikut :

- Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah : Penguatan penerapan regulasi termasuk sanksinya, izin, tarif, serta sistem monitoring digital terhadap sumur dalam dan dangkal.

- Penguatan Infrastruktur Konservasi Air : Pembangunan sumur resapan, kolam retensi, dan waduk kecil untuk meningkatkan infiltrasi dan menjaga keseimbangan air tanah; Menjadikan infrastruktur konservasi air sebagai bagian dari program pengendalian banjir dan ketahanan air
- Integrasi Pengendalian Penurunan Tanah dengan Infrastruktur Pesisir : Mengintegrasikan pengendalian air tanah dengan pembangunan tanggul laut, polder, dan NCICD
- Pemanfaatan Teknologi Pemantauan *Land Subsidence* : Pengendalian yang berbasis data akurat dan terkini; Penguatan monitoring penurunan muka tanah berbasis satelit (InSAR), GPS, dan sensor tanah, lalu mengintegrasikan datanya dengan sistem perencanaan tata ruang dan SDA
- Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat : Masyarakat masih banyak yang bergantung pada sumur tanah karena akses air perpipaan belum merata; Edukasi publik tentang bahaya penurunan tanah, serta insentif penggunaan air perpipaan

Secara singkat isu-isu strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39. Identifikasi Isu Strategis Dinas Sumber Daya Air

Potensi Daerah (Peluang & Kekuatan)	Permasalahan (Ancaman & Kelemahan)	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis (global, nasional, regional)	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas Tinggi dalam Agenda Pemerintah Daerah • Pengalaman Historis dan Kapasitas Teknis • Infrastruktur yang Sudah Terbangun • Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Internasional • Regulasi dan Kerangka Hukum yang Mendukung • Kapasitas Digital Mulai Berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan Tinggi pada Infrastruktur Mekanis • Koordinasi Lintas Sektor yang Masih Lemah • Data dan Sistem Informasi Belum Terintegrasi Penuh • Partisipasi Masyarakat Masih Rendah • Alih Fungsi Lahan dan Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau • Pendekatan yang Masih Dominan Struktural (Hard Engineering) • Respon Darurat Lebih Dominan daripada Pencegahan • Ketergantungan Tinggi pada Anggaran Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya risiko bencana banjir, rob kekeringan, land subsidence • Rendahnya kualitas dan kuantitas air baku • Tingginya penggunaan air tanah • Moratorium air tanah tidak menyeluruh • Tingginya kawasan kumuh • Belum optimal akses air bersih perpipaan • Pemenuhan sanitasi aman masih sangat minim • RTH terbatas • Perubahan iklim • Peningkatan permukaan air laut • Reklamasi liar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi triple planetary crisis • Kelangkaan air yang semakin parah • Berkembangnya berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengatasi permasalahan banjir/rob, pengadaan air bersih, pengelolaan air limbah. • Konsep Nature Based Solutions untuk optimalisasi tampungan, penataan DAS, integrasi drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pengendalian banjir dan rob serta pengelolaan penanganan banjir dan rob yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi • Kemandirian dan Diversifikasi Sumber Air Baku • Meminimalisir Eksploitasi Air Tanah • Perluasan dan Pemerataan Layanan Perpipaan pada permukiman padat, kawasan pesisir, dan masyarakat berpenghasilan rendah • Minimalisir NRW • Pengendalian pencemaran di hulu dan sungai • Sinkronisasi program SDA DKI dengan Kementerian PUPR, Perumda PAM Jaya, dan pemerintah daerah hulu (Bogor, Bekasi, Banten) • Perluasan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (<i>Sewerage System</i>) • Modernisasi dan Standardisasi Infrastruktur <i>On-Site</i>

Potensi Daerah (Peluang & Kekuatan)	Permasalahan (Ancaman & Kelemahan)	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis (global, nasional, regional)	Isu Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan Penurunan Tanah • Jakarta merupakan kota yang berada pada muara sungai dan hilir dari DAS • Cakupan layanan pengelolaan air limbah dan sanitasi layak sangat rendah • NRW sangat tinggi 			<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir • Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kawasan dan Komunitas • Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital Pengelolaan Air Limbah • Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah • Penguatan Infrastruktur Konservasi Air • Integrasi Pengendalian Penurunan Tanah dengan Infrastruktur Pesisir • Pemanfaatan Teknologi Pemantauan <i>Land Subsidence</i>



BAB III

SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD 2025–2029 yang berkaitan dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta

Dalam RPJMD 2025–2029, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 yang berkaitan dengan peran dan fungsi DSDA Provinsi DKI Jakarta adalah Misi nomor 4, yaitu : Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan. Dari Misi tersebut kemudian diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan DSDA Provinsi DKI Jakarta :

- Tujuan 4.1 : Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni
- Indikator Kinerja Tujuan 4.1 : Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
- Sasaran 4.1.a : Meningkatnya Layanan Air bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Indikator Sasaran 4.1.a : Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak
- Tujuan 4.2 : Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan
- Indikator Kinerja Tujuan : Penurunan Emisi GRK
- Sasaran 4.2.b: Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Indikator Sasaran 4.2.b : Indeks Risiko Bencana

Dari Tujuan dan Strategi di atas, kemudian diturunkan menjadi Strategi Pembangunan yang berkaitan dengan peran dan fungsi DSDA Provinsi DKI Jakarta :

- Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum
- Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah
- Pengendalian banjir dan rob
- Pengelolaan geologi dan air tanah

Sementara itu Arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 dilandasi dari tahapan pembangunan pada RPJPD DKI Jakarta 2025–2045, yaitu perbaikan fundamental sebagai tahapan pertama. Pada fase ini, pembangunan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial dan lingkungan serta penguatan pondasi ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kualitas layanan

pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja. Selain itu, penguatan aspek sosial dan lingkungan juga dilakukan melalui perbaikan sistem kelembagaan dan regulasi, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Tahapan pembangunan adalah serangkaian langkah atau fase yang dilakukan dalam suatu proses pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial dalam rangka memantapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Jakarta periode 2025-2029. Pentahapan dilaksanakan atas pertimbangan waktu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mengakselerasi prioritas pembangunan Jakarta serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, sesuai dengan tahap pertama RPJPD 2025-2029 adalah Perbaikan Fundamental; berupa pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Tahapan pembangunan per tahun tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Arah Kebijakan pada 5 Tahun ke depan

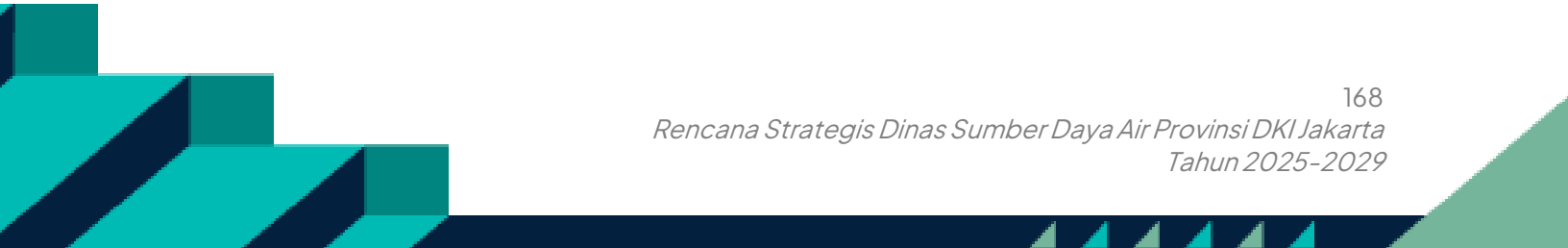
2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan pondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang berkelanjutan	Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan	Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan

(sumber : RPJMD DKI Jakarta 2025-2029)

3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Sumber Daya Air merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan geologi.

Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Rencana



Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

3.2.1 Visi

Adapun Visi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 adalah sebagai berikut :

” Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan menuju Jakarta Kota Global”

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Pengelolaan sumber daya air: pengelolaan sumber daya air dalam berbagai wujud berupa air hujan dan air laut yang menjadi air tanah, air limpasan untuk kemudian menjadi air baku yang dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi air limbah, kemudian dikelola untuk sebagian dimanfaatkan kembali. Dalam pengelolaan sumber daya air tersebut tentunya tak lepas dari pencegahan ekses air yang berlebihan dalam bentuk banjir, rob maupun kekurangan sumber air dalam bentuk penurunan volume air tanah.

Terintegrasi: menyatukan atau menggabungkan berbagai komponen sumber daya air menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi secara harmonis.

Berkelanjutan: pengelolaan sumber daya air ini memikirkan kesinambungan sumber daya air agar pemanfaatan air saat ini menjamin ketersediaan sumber daya air di masa mendatang. Pengelolaan harus terintegrasi karena merupakan satu siklus air yang tak terputus. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, diupayakan tidak ada air yang terbuang dan dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Didukung koordinasi yang baik lintas sektoral dan antar semua pihak yang berkepentingan.

Menuju Jakarta Kota Global : menuju kota yang mampu bersaing di kancah internasional dalam berbagai aspek: ekonomi, infrastruktur, kualitas hidup, layanan publik, daya tarik investasi, inovasi, dan reputasi. Kota dengan infrastruktur dan layanan publik yang mutakhir (termasuk pengelolaan air), tata ruang dan lingkungan hidup yang baik, sistem drainase dan pengendalian banjir yang andal, sanitasi, air bersih, serta keunggulan dalam teknologi dan manajemen.

3.2.2 Misi

Misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2025–2029 dalam rangka

mencapai visi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase untuk meningkatkan fungsi dan pengelolaan pengendalian banjir dan rob;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih dan air limbah domestik untuk meningkatkan akses air minum dan air limbah aman di Provinsi DKI Jakarta;
3. Mempercepat penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan fungsi pemantauan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Sementara, sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, khususnya pada Misi 4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, maka tujuan dan sasaran Dinas Sumber Daya Air disusun secara lebih terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, serta dapat menggambarkan kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta diturunkan secara berjenjang (*cascading*) berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2025-2029 dengan menggunakan pola pohon kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pohon Kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan	Optimalnya Akses Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan	Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum	Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Optimalnya Akses Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan	Terkelolanya Sistem Air Limbah	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Terbinanya Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Tersedianya Unit pengolahan setempat
				Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Terbinanya Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Meningkatnya Kualitas Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengaman Pesisir	Optimalnya Pengendalian Daya Rusak Air secara Berkelanjutan	Terkelolanya Sumber Daya Air (SDA)	Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
				Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
				Terbangunnya Polder/Kolam Retensi
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
				Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
				Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai
				Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai
			Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	Terbangunnya / meningkatnya Stasiun Pompa Banjir

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
			1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Terbangunnya Breakwater
		Terkelola dan berkembangnya Sistem Drainase	Terkelola dan berkembangnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan/Material
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya dukungan Pelaksanaan Sistem

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
				Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Konservasi Air Tanah Berkelanjutan yang sesuai dengan Daya Dukung dan Potensi Air Tanah	Mengoptimalkan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dalam upaya Membatasi Penurunan Muka Tanah	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolanya Aspek Kegeologian	Terkumpul dan terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Tujuan	Critical Success Factor	Outcome (Program)	Output (Kegiatan)	Sub Output (Sub Kegiatan)
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
				Terkumpul dan terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Berdasarkan pohon kinerja di atas disusun tujuan dan sasaran beserta target dan definisi operasional yang ditunjukkan pada **Tabel 3.3.** dan **Tabel 3.4.** sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, dan Target DSDA Provinsi DKI Jakarta 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1	Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan	Persentase Akses Layanan Air Minum Aman Perpipaan	77,21	83,93	88,95	93,03	100
Sasaran 1	Mengoptimalkan Akses Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan	Persentase peningkatan akses layanan sumber air minum aman perpipaan	3,74	6,73	5,01	4,08	6,97
Tujuan 2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan	Persentase Akses Air Limbah Aman	26,6	34,00	35,63	39,15	41,51
Sasaran 2	Mengoptimalkan Akses Pengolahan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan	Persentase peningkatan akses layanan sumber air limbah aman	1,16	7,40	1,63	3,52	2,36
Tujuan 3	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengaman Pesisir	Indeks Bahaya Banjir	1,9998	1,9829	1,9761	1,9710	1,9534
Sasaran 3	Mengoptimalkan Pengendalian Daya Rusak Air secara Berkelanjutan	Luasan Daerah Tergenang	946,63	693,73	594,54	518,10	460,10
Tujuan 4	Meningkatnya Konservasi Air Tanah Berbasis Berkelanjutan yang sesuai dengan Daya Dukung dan Potensi Air Tanah	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
Sasaran 4	Mengoptimalkan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dalam upaya Membatasi Penurunan Muka Tanah	Jumlah area dan kawasan pengendalian zona konservasi air tanah yang	73	160	214	224	261

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	2026	2027	2028	2029	2030
		telah dilayani jaringan perpipaan secara optimal					

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Tabel 3.4. Definisi Operasional Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DSDA Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional
Tujuan 1	Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Sanitasi yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase Akses Layanan Air Minum Aman Perpipaan	<p>Akses layanan air minum aman perpipaan adalah orang/rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan - Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (<i>on premises</i>); - Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan - Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. <p>Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PAM. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus : (Jumlah penduduk yang terlayani akses layanan air minum aman perpipaan / jumlah penduduk DKI Jakarta) x 100%. Jumlah penduduk DKI Jakarta dihitung menggunakan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Target yang termuat merupakan</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional
			capaian dari Provinsi DKI Jakarta (Perumda PAM Jaya yang didukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)
Sasaran 1	Mengoptimalkan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase peningkatan akses layanan sumber air minum aman perpipaan	Peningkatan akses layanan sumber air minum aman perpipaan per tahun adalah indikator yang menggambarkan besarnya penambahan cakupan layanan air minum perpipaan pertahun yang dihitung berdasarkan selisih akses layanan air minum aman perpipaan pada tahun x dengan akses layanan air minum aman perpipaan pada tahun x-1
Tujuan 2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Sanitasi yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase Akses Air Limbah Aman	<p>Akses Sanitasi Aman adalah orang/rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau - Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) <p>Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman adalah cakupan layanan air limbah yang terhubung jaringan perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) atau memiliki tangki septik yang dilakukan penyedotan secara rutin termasuk dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Cakupan layanan air limbah dihitung menggunakan rumus $(\text{jumlah orang terlayani layanan air limbah aman} / \text{jumlah penduduk DKI Jakarta}) \times 100\%$. Asumsi cakupan pelayanan air limbah adalah 1 Rumah Tangga terdiri dari 5 orang untuk SPALD yang dikelola DSDA dan berdasarkan Person</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional
			Equivalent (PE) untuk SPALD yang dikelola Perumda PAL Jaya. Jumlah penduduk menggunakan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sasaran 2	Mengoptimalkan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase peningkatan akses layanan sumber air limbah aman	Peningkatan akses layanan sumber air limbah aman per tahun adalah indikator yang menggambarkan besarnya penambahan cakupan layanan air limbah aman pertahun yang dihitung berdasarkan selisih akses layanan air limbah aman pada tahun x dengan akses layanan air limbah aman pada tahun x-1
Tujuan 3	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengaman Pesisir yang Menunjang Upaya Peningkatan Retensi dan Daur Ulang Air	Indeks Bahaya Banjir	Indeks bahaya banjir adalah skor yang menunjukkan tingkat bahaya/hazard dari peristiwa banjir yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas yakni : rendah dengan skor <1,5, sedang dengan skor 1,5 sd 2 dan tinggi dengan skor > 2 sesuai Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana. Perhitungan klasifikasi skor tingkat bahaya/hazard dihitung menggunakan formulasi: $(0,4 \times \text{nilai tinggi genangan}) + (0,2 \times \text{nilai lama genangan}) + (0,2 \times \text{frekuensi genangan}) + (0,2 \times \text{luas genangan})$ berdasarkan skala kelurahan. Baseline data yang digunakan didasarkan pada data laporan banjir yang didalamnya tercantum data jumlah RT/RW terdampak, ketinggian banjir, dan frekuensi kejadian banjir yang diperoleh dari BPBD Provinsi DKI Jakarta
Sasaran 3	Mengoptimalkan Pengendalian Daya Rusak Air secara Berkelanjutan	Luasan Daerah Tergenang	Luas daerah tergenang adalah indikator yang menggambarkan outcome kegiatan pengendalian banjir dimana diharapkan dapat menurunkan luasan daerah tergenang secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Perhitungan target dihitung berdasarkan formula (luas banjir yang diperoleh melalui peta Sebaran Genangan Berbasis Rumah Tangga yang bersumber pada Data Genangan Banjir - luasan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional
			banjir yang dapat direduksi akibat pembangunan infrastruktur tampungan air yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)
Tujuan 4	Meningkatnya Konservasi Air Tanah Berbasis Berkelanjutan yang sesuai dengan Daya Dukung dan Potensi Air Tanah	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah Rata-Rata	Tingkat penurunan permukaan tanah rata-rata adalah indikator yang menunjukkan laju penurunan permukaan tanah (landsubsidence) di Provinsi DKI Jakarta yang diukur secara rata-rata. Penentuan nilai penurunan permukaan tanah diperoleh berdasarkan pengukuran pada sejumlah titik menggunakan metode GPS Geodetik yang dilaksanakan setiap hari dan dilaporkan pada akhir tahun. Adapun banyaknya titik pengukuran didasarkan berdasarkan hasil Kajian. Perhitungan target menggunakan rumus : dimana : $a_1; a_2; a_3; \dots a_n$ = besarnya laju penurunan tanah pada titik pengukuran 1 s.d. titik pengukuran ke-n (cm); n = jumlah titik pengukuran berdasarkan hasil kajian
Sasaran 4	Mengoptimalkan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dalam upaya Membatasi Penurunan Muka Tanah	Jumlah area dan kawasan pengendalian zona konservasi air tanah yang telah dilayani jaringan perpipaan secara optimal	Pengendalian zona konservasi air tanah adalah pemantauan terhadap Kelurahan (termasuk ruas jalan dan kawasan) yang telah diberlakukan pembatasan penggunaan air tanah. Penentuan target Jumlah Kelurahan tersebut selaras dengan rencana pembangunan jaringan pipa air bersih di Provinsi DKI Jakarta dan bersifat kumulatif setiap tahunnya.

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

3.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada dasarnya tugas dan fungsi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta adalah mengelola siklus air mulai dari air hujan, air laut, air permukaan, dan air tanah untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan ini harus dilakukan secara terpadu/ terintegrasi dan harus melibatkan lintas sektor.

Pengelolaan sumber daya air dimulai dari pengelolaan air hujan yang harus dikendalikan agar tidak menimbulkan banjir, pengelolaan air baku sampai penyediaan air bersih untuk masyarakat, dilanjutkan dengan pengelolaan air limbah hasil penggunaan oleh masyarakat, pemanfaatan air limbah domestik untuk didaur ulang menjadi air baku/ air bersih kembali dan sebagian dikembalikan ke laut. Air laut pun untuk beberapa daerah dimanfaatkan menjadi air bersih dengan memanfaatkan teknologi *reverse osmosis*.

Pengelolaan sumber daya air mempertimbangkan 4 parameter yaitu :

1. Kualitas sumber daya air: sumber daya air yang dikelola harus dijamin kualitasnya sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat baik untuk kesehatan, rekreasi, stabilitas sumber daya air, maupun perlindungan dari pencemaran
2. Kuantitas sumber daya air: sumber daya air yang dikelola harus dijamin kapasitas dan ketersediaannya, efisiensi penggunaan, dan pencegahan akses air yang berlebihan (misalnya rob dan banjir)
3. Keadilan sumber daya air: sumber daya air yang dikelola harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan industri di DKI Jakarta secara adil dan proporsional, tidak diperuntukkan golongan/ pihak tertentu saja
4. Resiliensi sumber daya air: pengelolaan sumber daya air juga harus dijaga ketahanannya untuk pemenuhan kebutuhan saat ini baik di saat musim penghujan maupun kemarau (saat sumber daya air menurun) serta memperhitungkan kebutuhan sumber daya air di masa mendatang.

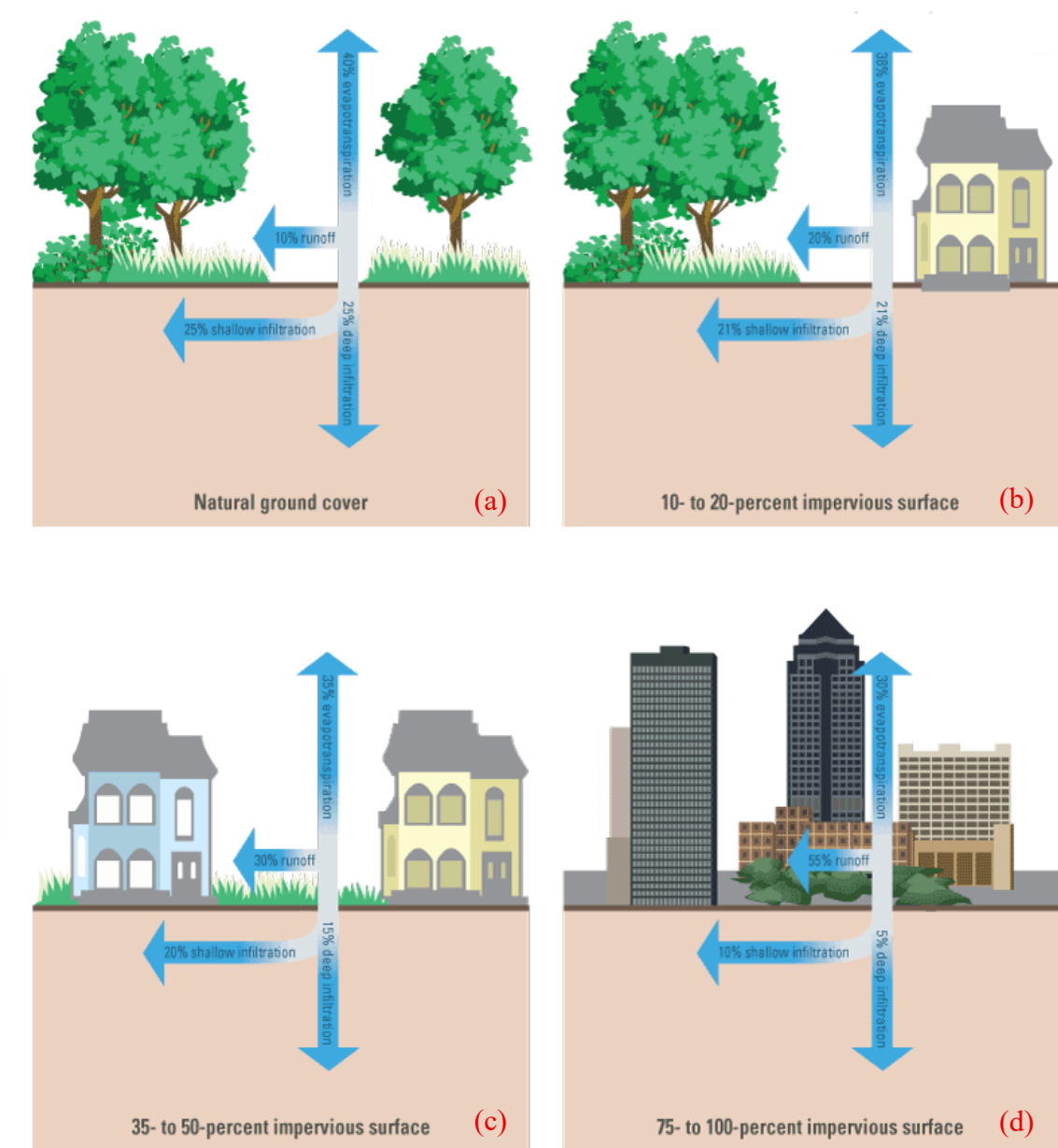
Dalam pengelolaan siklus air tersebut di atas, Dinas SDA menerapkan pendekatan *Nature-Based Solution*. *Nature-Based Solution* (NBS /Solusi Berbasis Alam) adalah suatu konsep yang dirancang oleh *World Bank's Global Program on Nature-based Solutions (GPNBS)* dan *City Resilience Program (CRP)* pada tahun 2021 yang merujuk pada intervensi yang dilakukan dalam rangka melindungi, mengelola secara berkelanjutan, serta memulihkan ekosistem pada kondisi alami. Konsep ini dirancang untuk mengatasi permasalahan lingkungan

secara efektif dan adaptif menggunakan serangkaian intervensi secara struktural maupun non-struktural yang memiliki manfaat untuk melindungi, mengelola, memulihkan, dan mengembalikan kondisi lingkungan perkotaan. Pengelolaan sumber daya air dengan menggunakan konsep *NBS* dapat mengurangi dampak bencana alam di perkotaan, seperti banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya (*World Bank, 2021. A Catalogue of Nature-based Solutions for Urban Resilience. Washington, D.C. World Bank Group*).

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, penerapan konsep *NBS* dapat mengintegrasikan seluruh komponen dalam pengelolaan sumber daya air perkotaan yang meliputi pengelolaan air permukaan, air tanah, air bersih, air minum, serta air limbah secara bersamaan sehingga konsep ini dinilai sejalan dengan apa yang akan dituju oleh Dinas Sumber Daya Air selama periode 2025 s.d. 2029.

Pada beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,415% dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan mencapai 15,68%.

Pesatnya pembangunan tersebut berdampak pada berkurangnya lahan-lahan terbuka yang dapat menyerap air ke dalam tanah dan semakin berkembangnya tutupan lahan kedap air (*impervious cover*). Bertambahnya tutupan lahan kedap air akan menambah limpasan permukaan (*surface runoff*) dan berkontribusi terhadap bencana banjir. Gambaran lingkungan perkotaan pada kondisi awal dan kondisi bertambahnya tutupan lahan kedap air digambarkan sebagai berikut:



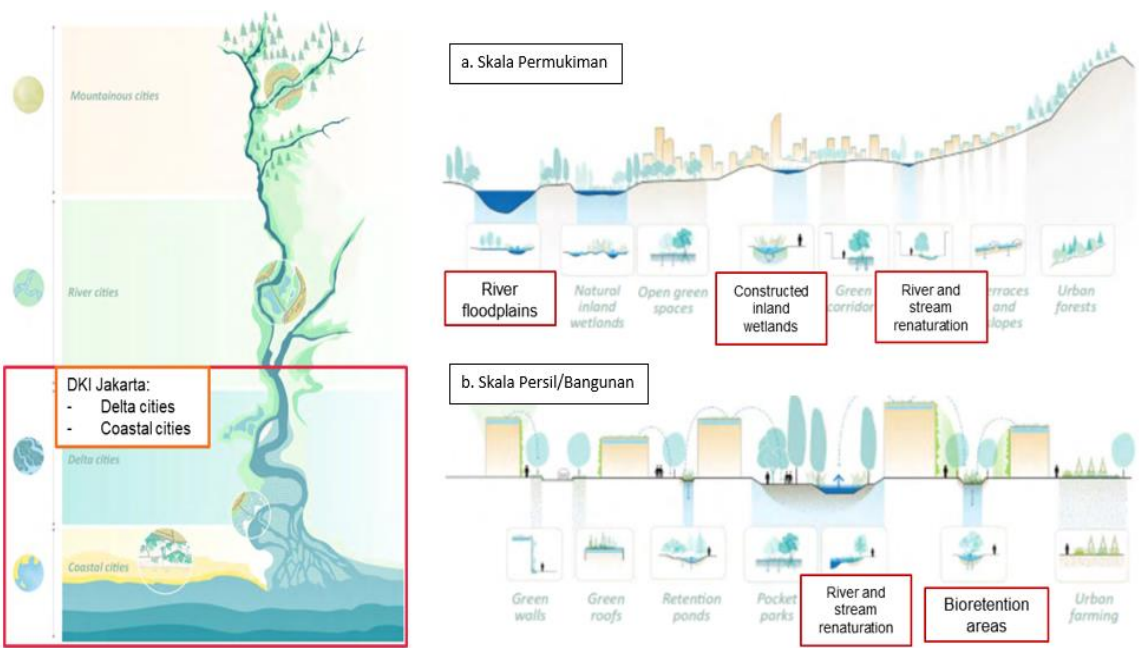
Gambar 3.1. Gambaran peningkatan kondisi runoff mengikuti tutupan lahan kedap air (impervious cover)
 (Sumber : <https://pubs.usgs.gov/publication/cir1496/full> diakses pada 16 September 2025)

Skema di atas menjelaskan gambaran jumlah *runoff* yang bertambah seiring dengan pesatnya pembangunan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya tutupan lahan kedap air. Gambar 1 menjelaskan jumlah *runoff* yang dihasilkan pada kondisi tanah sebelum terbangun sebesar 10%, Gambar 2 merupakan jumlah *runoff* pada kondisi tutupan lahan 35-50% sebesar 30% dan Gambar 3 merupakan jumlah *runoff* pada kondisi tutupan lahan 75-100% sebesar 55%.

Dalam konteks penanganan *runoff* pada kawasan perkotaan, satu hal penting dari solusi yang ditawarkan oleh konsep *NBS* adalah adanya upaya pemulihan lingkungan yaitu pengembalian kondisi lingkungan ke kondisi alami. Kondisi alami ini sendiri merupakan kondisi awal suatu daerah sebelum terbangun

dengan persentase tutupan lahan kedap air (*impervious cover*) dengan jumlah yang kecil yang pada **Gambar 3.1** di atas ditunjukkan dengan peralihan dari Gambar (b)/(c)/(d) ke Gambar a tanpa mengabaikan pembangunan itu sendiri. Melalui penerapan konsep *NBS* ini suatu wilayah akan dipertahankan kondisinya pembangunannya, namun akan dilakukan intervensi untuk mengembalikan kondisi hidrologis kawasan ini layaknya kondisinya dahulu sebelum terbangun melalui pembangunan tampungan-tampungan air hujan secara spasial.

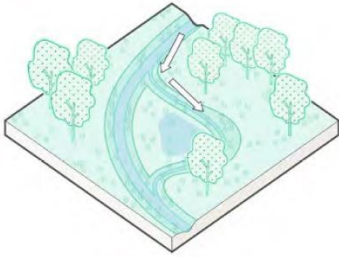
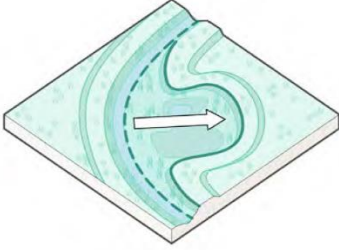
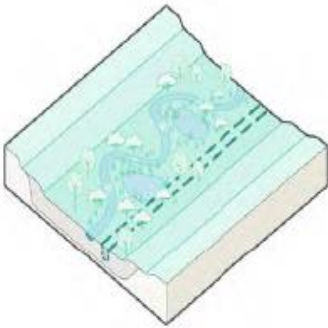

Beberapa infrastruktur *NBS* sesuai dan cocok dengan karakteristik Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat diterapkan yakni: *river floodplain*, *constructed inland-wetland*, *river and stream renaturation*, dan *bioretention areas*. Infrastruktur tersebut dapat dibangun pada skala permukiman dan skala persil/bangunan, dan dipilih berdasarkan kondisi geografis dan hidrologis DKI Jakarta sebagai kota dengan karakteristik Kota Delta/Muara (*Delta Cities*) dan Kota Pesisir (*Coastal Cities*) merujuk pada katalog *NBS*. Gambaran skema pembagian infrastruktur digambarkan sebagai berikut:



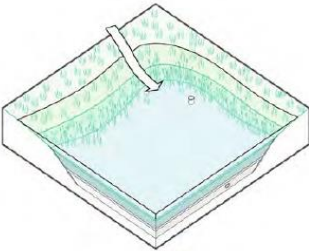
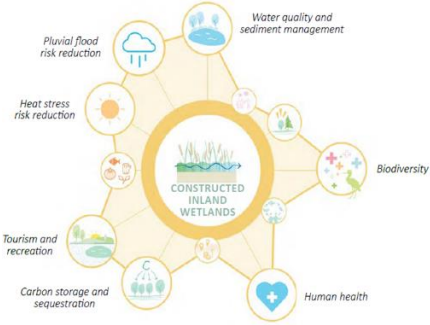
Gambar 3.2. Identifikasi penerapan infrastruktur NBS di Provinsi DKI Jakarta pada a. Skala Permukiman dan b. Skala Persil/Bangunan
(Sumber : *World Bank, 2021. A Catalogue of Nature-based Solutions for Urban Resilience. Washington, D.C. World Bank Group*, diolah)

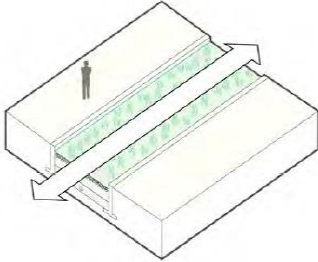
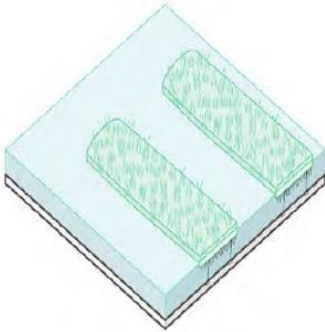
Teknik, Fungsi, dan Manfaat dari masing-masing infrastruktur NBS yang merujuk pada Katalog NBS (*World Bank, 2021. A Catalogue of Nature-based Solutions for Urban Resilience. Washington, D.C. World Bank Group*) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Infrastruktur NBS beserta Definisi, Jenis, dan Manfaatnya

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
1	River Floodplain	<p><i>River Floodplain</i>, berfokus pada kegiatan restorasi sungai dan penyediaan ruang pada badan air/sungai untuk menampung air pada saat muka air tinggi. Tekniknya dapat dilaksanakan dengan 3 cara yakni memundurkan tanggul sungai, pembangunan saluran <i>bypass/oxbow</i> sungai, dan pemanfaatan sempadan sungai sebagai dataran banjir (<i>floodplain</i>)</p>	<div><div>1. Pemunduran Tanggul Sungai</div></div> <div><div>2. <i>Bypass/Oxbow</i> Sungai</div></div> <div><div>3. Pemanfaatan Dataran Banjir (<i>Floodplain</i>)</div></div>	<div></div> <div><div>1. Mengurangi Risiko Banjir (<i>Riverine foold risk reduction</i>): Area <i>floodplain</i> merupakan area adalah pertahanan pertama terhadap dampak banjir ketika air sungai meluap, bertindak sebagai penyangga dan pelindung dan mereduksi kerusakan infrastruktur akibat banjir di lingkungan perkotaan.</div><div>2. Mengurangi Risiko Tekanan Panas (<i>Heat stress risk reduction</i>): Sungai dan <i>floodplain</i>-nya memiliki efek pendinginan di daerah sekitarnya. Tingkat pendinginan didasarkan pada suhu udara sekitar, variasi ketinggian air musiman, suhu air, radiasi matahari, albedo air, kecepatan angin, dan kelembaban relatif. Riparian dan hutan pada dataran banjir</div></div>

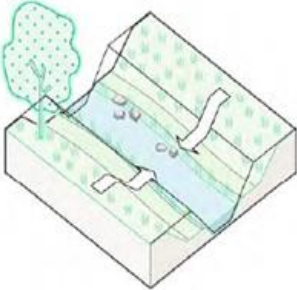
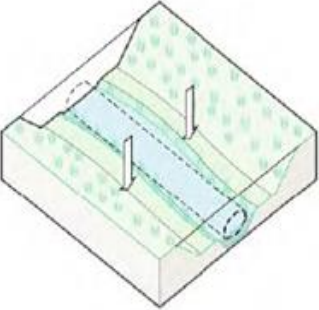


No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				<p>mengurangi dan menstabilkan suhu di sepanjang sungai.</p> <p>3. Produksi Sumber Daya Alam (<i>Resource production</i>): Area <i>Floodplain</i> dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian bagi masyarakat.</p> <p>4. Pariwisata dan Rekreasi (<i>Tourism and recreation</i>): <i>Floodplain</i> dapat menjadi habitat yang menarik untuk satwa liar, burung dan hewan lainnya serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seperti memancing, mengamati burung, bersepeda, hiking, berjalan kaki, berenang, dan kayak.</p> <p>5. Penyimpanan dan Penyerapan Karbon (<i>Carbon storage and sequestration</i>): <i>Floodplain</i> dapat menyimpan banyak karbon organik dalam tanah melalui deposisi sedimen yang berasal dari proses erosi pada Daerah Tangkapan Air (DAS/DTA).</p> <p>6. Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>): <i>Floodplain</i> dapat menjadi ekosistem biologis yang paling</p>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				<p>produktif dan beragam yang dapat menyediakan berbagai habitat mikro untuk berbagai spesies tumbuhan dan hewan.</p> <p>7. Kualitas air dan pengelolaan sedimen : Pengurangan kecepatan aliran sungai memungkinkan sedimen tersuspensi untuk menetap di area <i>floodplain</i> sehingga dapat meningkatkan kualitas air, mendukung siklus nutrisi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas habitat ikan. <i>Floodplain</i> juga dapat mengurangi polusi di hilir dengan mengurangi <i>runoff</i> dan menghilangkan sedimen dan pencemaran, sebelum air dilepaskan kembali ke sungai.</p>
2	<i>Contructed inland-wetland</i>	Sistem rekayasa yang telah dirancang dan dibangun untuk memanfaatkan proses alami yang melibatkan vegetasi lahan basah, tanah dan kumpulan mikroba terkait untuk membantu dalam	<p>1. <i>Surface Constructed Wetlands</i></p> 	 <p>1. Mengurangi Risiko Banjir Pluvial (<i>pluvial risk reduction</i>): <i>Inland</i></p>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
		<p>mengolah air limbah dan menyediakan fungsi tambahan lainnya. Di daerah perkotaan, <i>Inland Wetlands</i> yang dibangun dapat membantu mengimbangi efek antropogenik negatif terhadap lingkungan, menyerap karbon, dan membantu kota beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga membantu mengurangi kontaminan nutrisi organik, anorganik, air limbah kota, industri air limbah, limbah domestik, dan sumber pencemar lainnya. Pada daerah dengan iklim kering dan daerah lain yang kekurangan air, pembangunan <i>Inland Wetlands</i> buatan juga dapat memberikan manfaat yang besar dengan membersihkan dan memungkinkan penggunaan air kembali, pengisian</p>	<p>2. <i>Subsurface Gravel Wetlands</i></p>  <p>3. <i>Floating Wetlands</i></p> 	<p><i>Wetlands</i> yang dibangun dapat menampung limpasan air hujan selama kejadian hujan.</p> <p>2. Mengurangi Risiko Tekanan Panas (<i>heat stress risk reduction</i>): <i>Inland Wetlands</i> yang dibangun dapat berkontribusi untuk mengurangi efek <i>Urban Heat Island</i>. Hal ini dikarenakan <i>Wetlands</i> buatan didominasi oleh lahan perairan terbuka yang memantulkan sinar matahari pada sudut rendah dan membutuhkan waktu lebih lama menyerap panas dari radiasi matahari daripada area yang terbangun. Kemampuan untuk mempertahankan suhu yang lebih rendah ini memungkinkan <i>Wetlands</i> untuk memberikan pendinginan untuk daerah sekitarnya, yang secara signifikan di lingkungan perkotaan.</p> <p>3. Pariwisata dan rekreasi (<i>Tourism and Recreation</i>): <i>Wetlands</i> buatan dirancang untuk menjalankan fungsi</p>

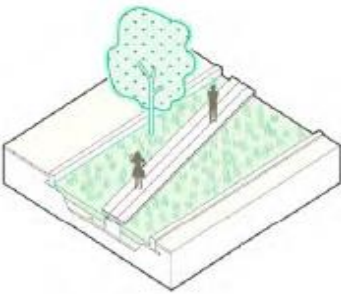
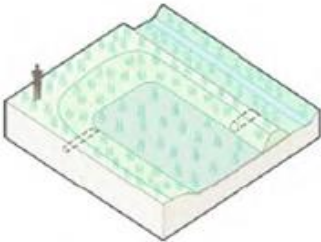
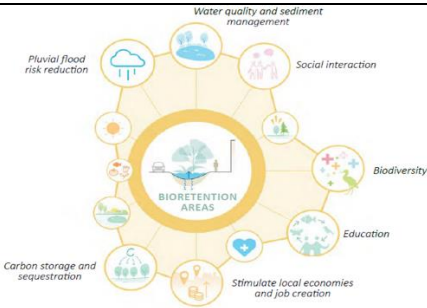
No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
		<p>akuifer, dan berkontribusi langsung terhadap konservasi sumber daya alam. <i>Inland Wetlands</i> buatan juga menawarkan pemandangan, rekreasi, pendidikan, psikologis, dan nilai ekonomi bagi masyarakat dan habitat bagi berbagai macam spesies.</p>		<p><i>Wetlands</i> alami. <i>Wetlands</i> menjadi ruang terbuka hijau perkotaan yang estetik yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi masyarakat.</p> <p>4. Penyimpanan dan Penyerapan Karbon (<i>Carbon storage and sequestration</i>): <i>Wetlands</i> buatan dapat memainkan peran penting dalam penyerapan karbon.</p> <p>5. Kesehatan manusia (<i>Human Health</i>): Dalam konteks perkotaan, pembangunan <i>inland wetland</i> buatan memiliki manfaat terhadap peningkatan kesehatan fisik dan psikologi manusia.</p> <p>6. Keanekaragaman hayati : Pembangunan <i>Inland Wetlands</i> dapat menarik spesies satwa yang akan menjadikan suatu daerah memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, pembangunan <i>Inland Wetlands</i> juga dapat mengubah karakter dan identitas lingkungan kota secara positif.</p>



No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
3	<i>River and Stream Renaturation</i>	<p>Infrastruktur NBS telah dikembangkan untuk mengembalikan dinamika alami aliran sungai diantaranya adalah renaturasi sungai, pembentukan kembali koridor riparian, penghilangan tanggul beton, dan re-vegetasi tebing sungai dan langkah-langkah lain untuk renaturasi sehingga dapat memberikan ruang tambahan yang meiningkatkan kapasitas sungai.</p>	<div> <div>1. Renaturasi Tebing dan Dasar Sungai</div>  </div> <div> <div>2. Teknik Daylighting Sungai (penghilangan lapisan beton)</div>  </div> <div> <div>3. Rekayasa Hayati (penghilangan lapisan beton)</div>  </div>	<div>  </div> <div> <div>1. Mengurangi Banjir (<i>Pluvial dan Riverine flood risk reduction</i>) :</div> <div>Upaya Renaturasi sungai adalah merupakan strategi pengelolaan runoff berskala besar, dimana tujuannya adalah untuk melindungi kota dari banjir melalui peningkatan kapasitas badan air untuk menampung jumlah air hujan yang berlebihan.</div> </div> <div> <div>2. Pariwisata dan Rekreasi (<i>Tourism and Recreation</i>) :</div> <div>Renaturasi sungai dapat menjadi tempat rekreasi seperti kegiatan memancing, berjalan – jalan dan mengamati burung.</div> </div> <div> <div>3. Meningkatkan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja (<i>Stimulate local economy and job creation</i>)</div> </div> <div> <div>4. Renaturasi sungai dapat meningkatkan nilai properti/perumahan dan jumlah wisatawan pada</div> </div>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				<p>suatu kota, sehingga membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan.</p> <p>5. Kesehatan Manusia (<i>Human Health</i>): Daerah riparian dan sungai merupakan daerah yang cocok untuk rekreasi. Studi secara khusus telah menunjukkan bahwa mengunjungi sungai, danau, dan lainnya badan air dapat meningkatkan rasa bahagia. Efek kesehatan yang positif ini sering kali mengarah pada pengurangan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas.</p> <p>6. Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>): Proyek restorasi sungai, aliran sungai, dan sempadan sungai merupakan solusi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Koridor sungai merupakan tempat makanan, tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak bagi satwa.</p>



No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				<p>7. Interaksi Sosial (Social Interaction): Teknik daylighting yang dilakukan pada sungai dapat menghasilkan Ruang terbuka hijau dan biru yang dapat menjadi tempat interaksi sosial.</p> <p>8. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Sedimen : Renaturasi sungai dapat menstabilkan tebing sungai, mencegah erosi tanah, dan mengurangi limpasan. Zona riparian dapat menjaga kualitas air dengan menangkap sedimen dan polutan.</p>
4	Bioretensi (Bioretention Areas)	Bioretensi merupakan infrastruktur NBS yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas drainase perkotaan. Bioretensi biasanya didesain sebagai cekungan bervegetasi dangkal yang dapat mencegah, menginfiltrasi, mengalihkan, mengubah volume dan kecepatan, dan menangani limpasan air hujan. Bioretensi dapat	<p>1. Bioswales dan Rain Garden</p>  <p>2. Kolam Detensi (Detention Pond)</p> 	 <p>1. Mengurangi Resiko Banjir (Pluvial flood risk reduction): Sistem bioretensi umumnya dirancang untuk mengurangi banjir dengan memperlambat limpasan air hujan. Sistem ini biasanya dirancang untuk mengatasi sumber limpasan air hujan secara lokal dan hanya dapat</p>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
		<p>dikombinasikan/terkoneksi dengan sistem pembuangan air limbah dan dapat ditempatkan pada daerah yang memiliki luasan tutupan lahan kedap air dan volume limpasan yang terkontaminasi polutan yang besar. Apabila didesain, dibangun, dan dipelihara dengan baik area bioretensi dapat menambah kapasitas sistem pengelolaan air hujan. Tanaman yang dipilih dengan benar dapat menghilangkan polutan dari limpasan air hujan.</p>	<p>3. <i>Kolam Retensi (Retention Pond)</i></p> 	<p>melayani daerah tangkapan air (DAS/DTA) dengan luasan kecil.</p> <p>2. Penyimpanan dan Penyerapan Karbon (<i>Carbon storage and sequestration</i>): Bioretensi dapat menyimpan dan menyerap karbon. Penyimpanan dan penyerapan karbon bergantung pada material dan jenis area bioretensi yang digunakan.</p> <p>3. Meningkatkan Ekonomi Lokal dan Penciptaan Lapangan Kerja (<i>Stimulate local economies and job creation</i>): Area Bioretensi dapat meningkatkan nilai properti dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Bioretensi juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan/pekerja di lokasi dengan akses ke area ini.</p> <p>4. Pendidikan (<i>Education</i>): Bioretensi Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk</p>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				<p>berinteraksi dengan alam dilingkungan perkotaan.</p> <p>5. Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>): Bioretensi dapat menyediakan habitat, mendukung keanekaragaman hayati dengan meningkatkan konektivitas ekologis dan menghubungkan lingkungan perkotaan dengan pedesaan sekitarnya.</p> <p>6. Interaksi Sosial (<i>Social interaction</i>): Area bioretensi dapat meningkatkan kualitas hidup. Area ini juga dapat digunakan sebagai ruang publik untuk interaksi sosial.</p> <p>7. Kualitas Air dan Pengelolaan Sedimen (<i>Water quality and sediment management</i>): Area bioretensi merupakan tempat penampungan pertama limpasan air hujan, dimana limpasan air hujan ini membawa polutan yang tinggi. Beberapa area bioretensi telah terbukti menghilangkan hingga 90% dari logam berat dari</p>

No	Infrastruktur NBS	Definisi	Jenis	Manfaat
				air hujan, polutan organik, dan kontaminasi nitrogen.

(Sumber : *World Bank, 2021. A Catalogue of Nature-based Solutions for Urban Resilience. Washington, D.C. World Bank Group*, diolah)

Pengintegrasian dan Pemetaan NBS kedalam nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan pembangunan dan penganggaran di daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Pemetaan penerapan NBS dalam nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan Pembangunan dan Penganggaran di Daerah

No	Infrastruktur NBS	Pemetaan Program	Pemetaan Kegiatan	Pemetaan Subkegiatan
1	<ul style="list-style-type: none"> - <i>River Floodplain</i> - <i>River and Stream Renaturation</i> 	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Normalisasi/ Restorasi Sungai
2	Bioretention (<i>Detention pond, Retention Pond</i>)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Constructed inland wetland</i> - <i>Bioretention (Bioswale, rain garden)</i> 	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

(Sumber : Olahan Data, 2025)

Dengan berpedoman pada konsep NBS, Prinsip pengelolaan limpasan yang diadopsi oleh Provinsi DKI Jakarta berfokus pada pembangunan dan pengintegrasian infrastruktur tampungan air hujan hijau-biru di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta pemanfaatan kembali air melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah pada area tersebut.

Selama kurun waktu 2025 – 2029, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan air baku dan penyediaan akses air bersih yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat di Jakarta;
2. Pengelolaan air limbah domestik dengan pendekatan yang efektif dan perencanaan yang terintegrasi dengan pengelolaan air baku;
3. Peningkatan pengelolaan akses air berupa pengendalian banjir dan rob untuk meminimalisir kerugian akibat bencana banjir dan rob;
4. Penggunaan teknologi digital untuk integrasi dan pengolahan data, pelaporan, analisis, pembuatan keputusan dan pemodelan.

A. Pengelolaan air baku dan penyediaan akses air bersih

Air baku yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di DKI Jakarta pada dasarnya berasal dari 3 sumber :

1. Air permukaan (waduk, danau, situ, sungai)
2. Air laut (melalui proses *reverse osmosis*)
3. Air limbah domestik (yang diproses daur ulang menjadi air baku)

Air tanah Jakarta sudah tidak dianggap sebagai sumber air baku karena ketersediaannya yang sudah jauh menyusut dan sudah mengakibatkan *land subsidence* yang cukup parah di Jakarta.

Kebutuhan air baku untuk masyarakat DKI Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkiraan kebutuhan air bersih (*potable water*) DKI Jakarta adalah sebesar 2,2 juta m³/ hari. Namun karena terdapat kebocoran/ kehilangan air berupa *Non Revenue Water (NRW)* sebesar 46%, maka kebutuhan produksi air bersih diperhitungkan sebesar 4,2 juta m³/ hari. Sementara pencapaian produksi air bersih Jakarta tahun 2024 hanya sekitar 2 juta m³/ hari. Gap yang ada begitu besar, bahkan bila di tahun 2030 Dinas SDA berhasil menurunkan NRW menjadi 30% pun, gap kapasitas terhadap kebutuhan masih sangat besar yaitu sekitar 1,4 juta m³/ hari. Oleh karena itu diperlukan strategi yang cermat agar gap tersebut dapat diminimalisir. Adapun arah kebijakan pengelolaan air baku dan penyediaan air bersih di DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas terpasang yang sudah ada saat ini baik dengan meningkatkan kapasitas yang sudah ada ataupun membangun sistem penyediaan air minum baru.
2. Pemanfaatan sumber air baku alternatif di internal Jakarta. Saat ini Jakarta mengandalkan sumber air baku dari Jawa Barat seperti Jatiluhur dan Karian. Ke

depannya, Jakarta harus dapat lebih mandiri mengandalkan sumber air baku dari internal. Sumber air baku internal Jakarta adalah sebagai berikut:

Sungai di Jakarta

Jakarta dialiri 13 sungai, namun saat ini hanya 2 sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku. Sungai-sungai yang ada selain debitnya kurang memadai, tingkat pencemarannya juga tinggi sehingga sulit dijadikan sumber air baku. Bila pencemaran dapat ditekan, sungai-sungai tersebut dapat dijadikan sumber air baku alternatif. Berikut ini potensi sungai yang bisa dijadikan sumber air baku internal Jakarta :

Tabel 3.7. Potensi Sungai sebagai Sumber Air Baku Jakarta

Sungai	Debit (Liter/Detik)	Keterangan
Krukut (Grogol dan Muara Karang)	450	Dari RPSDA
Banjir Kanal Barat	2871	Analisis 2021
Cengkareng Drain	300	Dari RPSDA
Mookervart	450	Dari RPSDA
BKT	750	Dari RPSDA
Kali Baru Barat	250	

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Waduk/ Situ

Waduk dan situ yang ada saat ini sebagian besar adalah untuk pengendalian banjir. Sudah ada beberapa waduk yang dijadikan sumber air baku dan akan terus dikaji dan dikembangkan waduk-waduk dan situ lainnya sehingga potensi sumber air baku Jakarta semakin meningkat. Potensi air baku dari waduk/ situ di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Potensi Waduk sebagai Sumber Air Baku Jakarta

Wilayah Kota Administrasi	Potensi Air Permukaan Provinsi DKI Jakarta		
	Sumber Air Baku	Kapasitas Pengambilan (Liter/Detik) (70% dari Q95)	
Jakarta Barat	Waduk Tomang Barat	1700	2800
	Waduk Grogol	1100	
Jakarta Selatan	Situ Babakan	990	990
Jakarta Timur	Waduk JGC Site B	1290	1290

Wilayah Kota Administrasi	Potensi Air Permukaan Provinsi DKI Jakarta		
	Sumber Air Baku	Kapasitas Pengambilan (Liter/Detik) (70% dari Q95)	
Jakarta Utara	Waduk Pluit	5950	7660
	Waduk Sunter Utara	1710	
Total			12740

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Daur Ulang Air Limbah Domestik

Air limbah domestik Jakarta jumlahnya sangat besar. Apabila didaur ulang akan dapat memenuhi gap kebutuhan air bersih warga Jakarta. Untuk itu diperlukan percepatan penyelesaian pembangunan *Jakarta Sewerage System* yang berskala besar. Namun tidak menutup potensi air baku didapatkan dari pengembangan pengolahan limbah domestik di Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik skala permukiman/ komunal yang lebih kecil. Akan dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang biaya pembangunan dan operasionalnya.

Potensi air daur ulang dari sistem pengolahan air limbah domestik tersebut adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Potensi IPAL sebagai Sumber Air Baku Jakarta

Rencana Pengembangan	Zona Sewerage	Rata-Rata Harian (m³/hari)	Maks. Harian (m³/hari)
Jangka Pendek	1	198000	264000
	6	235000	313000
Jangka Menengah	4,5,8, dan 10	47000-248000	62000-331000
Jangka Panjang	2,3,7,9,11,12,13, dan 14	24000-253000	32000-337000
Total		1977000	2636000

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Air Hujan

Dengan pendekatan pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*), didapatkan potensi air hujan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 64% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Potensi air hujan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 117% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Potensi air hujan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 87% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Potensi air hujan Kota Administrasi

Jakarta Barat sebesar 89% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 87% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Potensi air hujan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 72% dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Jadi potensi dari air hujan ini sebenarnya besar sekali asalkan bisa dijalankan dengan optimal.

Air Laut

Air laut dapat menjadi sumber air baku melalui proses pengolahan menggunakan teknologi *reverse osmosis*. Air laut dapat menjadi sumber air baku tak terbatas, namun teknologi *reverse osmosis* masih sangat mahal sehingga tidak bisa diterapkan secara massal untuk saat ini. Potensi air laut di Provinsi DKI Jakarta berada di Kota Administrasi Jakarta Utara dan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Terdapat banyak muara-muara di Kota Administrasi Jakarta Utara yang berpotensi untuk dijadikan sumber air baku.

3. Peningkatan akses air bersih melalui jaringan perpipaan

Salah satu sasaran yang ingin dicapai terkait dengan penyediaan air bersih bagi warga Jakarta adalah jangkauan/ cakupan akses warga ke air bersih/ air minum. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan cakupan pelayanan dengan strategi sebagai berikut:

a. Cakupan pelayanan 100% di tahun 2030

Mengacu ke target *SDGs* yang tertuang dalam rencana kerja Perumda PAM JAYA, pada tahun 2030 seluruh wilayah Jakarta harus tercakup layanan perpipaan air minum. Namun demikian atas arahan Gubernur DKI Jakarta, target 100% cakupan layanan perpipaan air minum dipercepat harus dipenuhi pada tahun 2029. Tahun 2024 cakupan mencapai $\pm 70\%$, jadi harus mampu menambah 30% dalam waktu 5 tahun. Fokus pengembangan cakupan adalah di wilayah yang belum terlayani (belum memiliki jaringan perpipaan dan belum terlayani SPAM) karena wilayah tersebut bisa dipastikan memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan air bersihnya.

b. Rekomendasi pembatasan penggunaan air tanah

Mengacu kepada pengaturan, perizinan, dan peta zona air tanah Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan penggunaan air tanah ini tidak bisa dilakukan secara serentak karena cakupan layanan perpipaan yang ada sekarang masih belum menyeluruh. Rencana zona pembatasan air tanah akan dikoordinasikan dengan rencana pengembangan perpipaan air minum supaya warga tetap mendapatkan air bersih.

Di samping itu, diperlukan pemanfaatan teknologi terbaru untuk memonitor penggunaan air tanah:

a. Peremajaan jaringan distribusi air minum

Saat ini *Non Revenue Water* masih sangat tinggi sekitar 46%. Air yang tidak bisa menjadi pendapatan ini disebabkan oleh dua hal yaitu 75%-nya disebabkan oleh kondisi fisik (jaringan distribusi yang sudah tua) dan 25%-nya disebabkan oleh kondisi non-fisik (masyarakat yang tidak membayar, dsb). Karena itu perlu dilakukan peremajaan jaringan distribusi air minum, selain melakukan perluasan cakupan layanan perpipaan. Dengan peremajaan jaringan distribusi, tingkat kebocoran ini bisa ditekan sehingga efisiensi penggunaan air bersih dapat meningkat. Peremajaan jaringan distribusi juga memungkinkan peningkatan tekanan air di pipa sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak terlayani air bersih padahal sudah tersambung dengan jaringan perpipaan karena tekanan air yang sangat kecil.

b. Program penghematan air

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan air merupakan upaya bersama dari Dinas SDA dengan pemangku kepentingan lain. Gerakan hemat air tidak hanya sekedar menuliskan/ menempelkan tulisan himbauan menghemat air tetapi menumbuhkan budaya menghemat air yang dimulai dari anak-anak. Kesadaran berhemat air mesti ditumbuhkan dari kecil, diajarkan baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, kebutuhan akan air bersih dapat ditekan dan dapat tercukupi secara optimal memanfaatkan sumber daya air yang sudah disiapkan.

Adapun rincian pentahapan dari strategi di atas adalah sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas Produksi

1. Peningkatan produksi

- a. SPAM Hutan Kota: 500 liter/detik (dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya pengembangan)
- b. Uprating SPAM Buaran 1 dan 2: 400 liter/detik
- c. Uprating SPAM Cilandak: 200 liter/detik
- d. Uprating IPA SWRO dan BWRO Kepulauan Seribu: 15 Liter/detik*
*) Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air, diperlukan penambahan IPA SWRO dan BWRO di Kepulauan Seribu
- e. Penambahan supply TKR : 100 liter/detik
- f. Penambahan supply Tirta Benteng : 200 Liter/detik

2. Pembangunan SPAM Baru
 - a. SPAM Ciliwung: 200 liter/detik
 - b. SPAM Pesanggrahan: 750 liter/detik
 - c. SPAM Buaran 3: 3.000 liter/detik
3. Penambahan Supply dari SPAM regional
 - a. SPAM Jatiluhur: 4.000 liter/detik
 - b. SPAM Karian: 3.200 liter/detik

Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pasokan dari lokasi lain yang belum tertulis di atas, menyesuaikan dengan dinamika internal dan eksternal yang terjadi, dengan tujuan tetap mendukung ketersediaan air bersih untuk seluruh warga masyarakat Jakarta.

Pembagian zona pelayanan dibagi menjadi 4 regional pelayanan, namun demikian sistem distribusi antar regional dilakukan secara interkoneksi sehingga setiap regional pelayanan dapat memperoleh *supply* air dari regional lainnya sesuai kebutuhan, hal ini memastikan setiap regional dapat terpenuhi kebutuhan airnya dan tidak mengalami kekurangan. Dalam perhitungan rencana pelayanan di setiap wilayah ini tidak memperhitungkan angka *NRW* sehingga hasil perhitungan merupakan gambaran kebutuhan setiap wilayah dengan suplai dari existing dan rencana pengembangan tanpa dikurangi oleh kehilangan air.

Sub Sistem Zona Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat dilayani oleh SPAM eksisting, yaitu dari IPA Pejompongan, DC-R4, DC-R5, IPA Taman kota, reservoir di Perumnas Cengkareng, IPA Mookervart, IPA Daan Mogot, dan IPA Rawa Bambu dengan total kapasitas produksi sebesar 3.744 liter/detik.

Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat akan disuplai dari:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dengan optimalisasi SPAM Hutan Kota 2 dalam kondisi tertentu dimungkinkan adanya pengembangan sebesar 500 liter/detik
- b. SPAM regional Karian sebesar 3.200 liter/detik

Kebutuhan air wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat hingga tahun 2044 sebesar 4.663 liter/detik. Dengan adanya penambahan suplai dari SPAM Hutan Kota dan SPAM Regional Karian, maka total suplai sebesar 7.444 liter/detik sehingga terdapat surplus sebesar 2.780 liter/detik. Gambaran mengenai rencana

pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.10. Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		
	1.1 IPA Pejompongan	2479	3744
	1.2 DC - R5	339	
	1.3 DC - 3R4	687	
	1.4 IPA Taman Kota	150	
	1.5 Perumnas Cengkareng	82	
	1.6 IPA Mookervart	1,2	
	1.7 IPA Daan Mogot	5	
	1.8 IPA Rawa Lumbu	0,4	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Hutan Kota 2	500	3700
	2.2 SPAM Regional Karian	3200	
3	Supply Eksisting dan Rencana Pengembangan		7444
4	Demand Tahun 2024		4663
5	Surplus		2780

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Sub Sistem Zona Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat dilayani oleh SPAM eksisting yaitu dari IPA Pulogadung, IPA Buaran dan IPA Pejompongan dengan total kapasitas produksi sebesar 3.744 liter/detik. Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat akan disuplai dari:

- SPAM regional Jatiluhur sebesar 500 liter/detik Kebutuhan air wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat hingga tahun 2044 sebesar 2.615 liter/detik. Dengan adanya penambahan suplai dari SPAM Jatiluhur, maka total suplai sebesar 4.244 liter/detik sehingga terdapat surplus sebesar 1.629 liter/detik.

Gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		
	1.1 IPA Pulogadung	2.479	3.744
	1.2 IPA Buaran	339	
	1.3 IPA Pejompongan	687	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Regional Jatibubur	500	500
3	Supply Eksisting & Rencana Pengembangan		4.244
4	Demand Tahun 2044		2.615
5	Surplus		1.629

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Sub Sistem Zona Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilayani oleh SPAM eksisting yaitu dari IPA Pejompongan, IPA Cilandak dan DCR5 serta IPA Situ Babakan dengan total kapasitas produksi sebesar 4.063 liter/detik. Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan akan disuplai dari:

- a. Pembangunan SPAM Internal Jakarta yaitu SPAM Ciliwung sebesar 200 liter/detik
- b. Pembangunan SPAM Internal Jakarta yaitu SPAM Pesanggrahan sebesar 750 liter/detik
- c. Uprating IPA Cilandak sebesar 200 liter/detik
- d. Pembangunan SPAM Internal Jakarta yaitu SPAM Buaran 3 sebesar 1.500 liter/detik
- e. Uprating SPAM Buaran 1 dan 2 sebesar 200 liter/detik
- f. SPAM regional Djuanda dengan mempertimbangkan aspek teknis, (diantaranya mempertimbangkan selisih kebutuhan yang ada dan dibandingkan dengan rencana penyediaan lainnya) dan komersial sebesar 500 liter/detik

Kebutuhan air wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga tahun 2044 sebesar 5.650 liter/detik. Dengan adanya penambahan suplai dari SPAM Internal Jakarta dan SPAM Regional, maka total suplai sebesar 7.413 liter/detik sehingga terdapat surplus sebesar 1.763 liter/detik. Gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		
	1.1 IPA Pejompongan	2.163	4.063
	1.2 DC-R5	397	
	1.3 DC-R5	1.473	
	1.4 IPA Situ Babakan	30	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Internal DKI Jakarta	200	3.350
	a. SPAM Ciliwung	750	
	b. SPAM Pesanggrahan	1.500	
	c. SPAM Buaran 3	200	
	d. Uprating SPAM Buaran 1 & 2	200	
	e. Uprating IPA Cilandak	500	
3	Supply Eksisting & Rencana Pengembangan		7.413
4	Demand Tahun 2044		5.650
5	Surplus		1.763

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Sub Sistem Zona Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

Wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur dilayani oleh SPAM eksisting yaitu dari IPA Pulogadung, dan IPA Buaran dengan total kapasitas produksi sebesar 5.396 liter/detik. Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur akan disuplai dari:

- a. Pembangunan SPAM Internal Jakarta yaitu SPAM Buaran 3 sebesar 1.500 liter/detik
- b. Uprating SPAM Buaran 1 dan 2 sebesar 200 liter/detik
- c. SPAM Regional Djuanda dengan mempertimbangkan aspek teknis (di antaranya mempertimbangkan selisih kebutuhan yang ada dan dibandingkan dengan rencana penyediaan lainnya) dan komersial sebesar 1.554 liter/detik
- d. SPAM Regional Jatiluhur sebesar 500 liter/detik

Kebutuhan air wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur hingga tahun 2044 sebesar 7.624 liter/detik. Dengan adanya penambahan suplai dari SPAM Internal Jakarta dan SPAM Regional, maka total suplai sebesar 9.150 liter/detik sehingga terdapat surplus sebesar 1.526 liter/detik. Gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		
	1.1 IPA Pulogadung	534	5.396
	1.2 IPA BUARAN	4.862	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Internal Provinsi DKI Jakarta		
	a. SPAM Buaran 3	1.500	3.754
	b. Uprating Buaran 1 & 2	200	
	2.2 SPAM Regional Djuanda	1.554	
	SPAM Regional Jatibubur	500	
3	Supply Eksisting & Rencana Pengembangan		9.150
4	Demand Tahun 2044		7.624
5	Surplus		1.526

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Sub Sistem Zona Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara

Wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara dilayani oleh SPAM eksisting, yaitu dari IPA Pulogadung, IPA Buaran, IPA Pejompongan, IPA BWRO, IPA Pompa Ancol, IPA Waduk Tomang, IPA Waduk Sunter dan IPA Hutan Kota dengan total kapasitas produksi sebesar 3.286,5 liter/detik. Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara akan disuplai dari SPAM Regional Jatiluhur sebesar 3.000 liter/detik

Kebutuhan air wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara hingga tahun 2044 sebesar 4.096 liter/detik. Dengan adanya penambahan suplai dari SPAM Internal Provinsi DKI Jakarta dan SPAM Regional, maka total suplai sebesar 6.286,5 liter/detik sehingga terdapat surplus sebesar 2.191 liter/detik. Gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 3.14. Rencana Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		
	1.1 IPA Pulogadung	2.324	3.286,5
	1.2 IPA Buaran	403	
	1.3 IPA Pejompongan	304	
	1.4 IPA BWRO	12,5	
	1.5 IPA Hutan Kota	213	

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
	1.6 IPA Waduk Tomang	20	
	1.7 IPA Pompa Ancol	5	
	1.8 IPA Waduk Sentul	5	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Regional Jatibubur	3.000	3.000
3	Supply Eksisting & Rencana Pengembangan		6.286,5
4	Demand Tahun 2044		4.096
5	Surplus		2.191

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Sub Sistem Zona Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Wilayah pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilayani oleh SPAM eksisting yaitu dari IPA SWRO dan IPA BWRO dengan total kapasitas produksi sebesar 10,05 liter/detik.

Pada rencana pengembangan wilayah pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan disuplai dari pembangunan unit IPA baru SWRO sebesar 15 liter/detik.

Kebutuhan air wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga tahun 2044 sebesar 25 liter/detik, yang akan dipenuhi dari uprating IPA SWRO. Gambaran mengenai rencana pengembangan wilayah pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Rencana Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Uraian	Supply (Liter/Detik)	Total (Liter/Detik)
1	SPAM Eksisting		10,05
	1.1 IPA Pulogadung	2,96	
	1.2 IPA Buaran	7.009	
2	Rencana Pengembangan		
	2.1 SPAM Regional Jatibubur	15	15
3	Supply Eksisting & Rencana Pengembangan		25
4	Demand Tahun 2044		25
5	Surplus		-

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



B. Pengelolaan air limbah domestik

Air limbah domestik di Jakarta merupakan permasalahan yang sangat serius. Bila diasumsikan 10 juta jiwa penduduk Jakarta menghasilkan air limbah domestik per orang sebanyak 100 liter/ hari, maka limbah domestik dari *blackwater* dan *greywater* (kegiatan mandi, cuci, kakus) mencapai 1,2 juta m³/ hari. Target RPJMN 2025 – 2029 dan SDG 6.2 menargetkan 80% limbah domestik harus dapat diolah aman di tahun 2030. Dengan demikian target pengolahan aman adalah sebesar 880 ribu m³/ hari.

Target dari cakupan layanan pengolahan limbah aman di tahun 2030 adalah sebesar 41,51% dari penduduk Jakarta, sedangkan pencapaian tahun 2024 baru mencapai ±23%. Berdasarkan uraian tersebut, arah kebijakan Dinas SDA terkait dengan pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project (JSDP)*

JSDP merupakan bagian dari *Jakarta Sewerage System (JSS)* dan tetap merupakan solusi utama untuk mengatasi permasalahan pengolahan air limbah domestik Jakarta. Walaupun mendapat tantangan berat dari segi pendanaan dan proses pembangunannya yang memakan waktu lama, *JSS* diyakini merupakan solusi yang sangat baik dan sangat diperlukan. *JSS* Zona 1 Paket 5 dan Paket 6 diharapkan akan rampung pada tahun 2027. Kemudian akan dilanjutkan dengan *JSS* Zona 6 Fase 1 Paket 4 dengan rencana pelaksanaan pada tahun 2027 s.d. 2030.

2. Membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman

SPALD-T skala permukiman ini menjadi target antara dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik dalam jangka waktu yang lebih pendek sambil menunggu *JSS* Zona 1 sampai 15 selesai seluruhnya.

SPALD-T skala permukiman ini akan difokuskan pada wilayah yang tingkat BABS tinggi dan ketersediaan lahannya memungkinkan untuk pembangunan SPALD-T.

Selain itu, proses pembangunan ini juga perlu didukung oleh proses pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang dilakukan sebelum pembangunan. Selain pengadaan tanah atau pembebasan lahan baru, juga akan dilakukan penyelesaian atas tanah-tanah yang bermasalah yaitu yang memiliki kriteria berikut :

- Lahan yang sudah melakukan pelepasan hak namun belum dibayar
- Lahan yang sudah terbangun namun belum dibayar

- Lahan yang terjepit : lahan yang tidak memiliki akses lagi karena di sekitarnya sudah ada pembanguann oleh DSDA atau pemerintah pusat
- Sisa trase yang pernah dilaksanakan pembebasan namun belum sepenuhnya dibebaskan

3. Membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD - S) skala komunal

Untuk area-area yang lebih kecil (untuk 2 – 10 unit rumah tinggal/ bangunan dan/ atau MCK) akan dibangun SPAD-T skala komunal yang akan menyediakan akses sanitasi aman untuk warga. Lokasi pembangunan juga difokuskan ke wilayah yang tingkat BABS tinggi.

Selain pembangunan sarana prasarannya, teknologi yang digunakan pun harus dipilih yang terbaik, sesuai standar teknis dan efektif tidak hanya dalam mengendalikan limbah namun juga bau dan risiko lainnya.

Sama halnya dengan pembangunan SPALD-T, proses pembangunan SPALD-S ini juga perlu didukung oleh proses pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang dilakukan sebelum pembangunan. Pengadaan tanah ini pun bisa dilakukan untuk lokasi baru ataupun penyelesaian tanah-tanah bermasalah sebelumnya.

4. Melanjutkan pemberian subsidi pengadaan tangki septik individual bagi warga kurang mampu

Untuk rumah-rumah yang sudah memiliki tangki septik namun belum memenuhi standar, diberikan bantuan subsidi untuk mengganti tangki septik mereka dengan yang sudah sesuai standar sehingga tidak mencemari lingkungan.

5. Menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik secara tegas dan konsisten

Pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta telah diatur melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2024. Peraturan Daerah ini terutama berguna untuk menegakkan aturan di mana setiap perorangan dilarang menyalurkan air limbah domestik ke tanah, saluran drainase dan/ atau badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Masih sangat banyak orang yang buang air besar sembarangan, tangki septiknya tidak standar sehingga meresap ke tanah dan mencemari air tanah, ataupun air limbah domestiknya disalurkan ke saluran drainase. Jadi penegakan aturan ini sangatlah mendesak dan penting.

Penegakan aturan tersebut harus dibarengi dengan edukasi ke masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum sadar bahwa mereka sebenarnya mencemari lingkungan. Penyuluhan dan kegiatan-kegiatan edukasi harus dilakukan secara lebih masif dan sistematis agar kesadaran masyarakat dapat

segera ditingkatkan. Diharapkan dengan kesadaran yang meningkat, penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan SPALD-T baik skala kota maupun skala pemukiman serta SPALD-S bisa semakin baik.

C. Pengendalian banjir, Rob, dan *Land Subsidence*

Pengendalian Banjir

Banjir di Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun pada dasarnya terjadi karena kapasitas daya tampung air jauh lebih kecil daripada air yang lewat. Untuk itu strategi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air untuk mengendalikan banjir di Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Normalisasi sungai

Secara geografis dan topografis Jakarta berada di daerah aliran sungai. Ada 13 sungai yang melewati kota Jakarta. Kondisi sungai-sungai tersebut semakin dangkal dan sempit sehingga debit air yang dapat melewatinya pun semakin kecil sehingga akhirnya meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.

Di samping itu, debit air yang direncanakan tidak sesuai lagi dengan kapasitas sungai yang ada. Dengan koefisien limpasan pemukiman Jakarta yang tinggi (0,6 – 0,9), hampir semua air hujan akan menjadi aliran permukaan. Dengan demikian debit air yang masuk ke sungai juga semakin besar.

Karena itu strategi yang dilakukan oleh Dinas SDA adalah melakukan normalisasi sungai, mengembalikan kapasitas sungai sehingga debit air yang tertampung lebih besar. Strategi ini dilakukan dengan cara pelebaran, pengerukan dan pemasangan tanggul/ beton dinding sungai yang harus didahului dengan relokasi pemukiman di bantaran sungai.

Kegiatan normalisasi merupakan kegiatan kolaborasi Dinas SDA dengan Kementerian PU. Fokus normalisasi saat ini adalah di Kali Ciliwung yang merupakan kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PU di mana masih ada tanggul kali Ciliwung sepanjang 16,52 km yang belum dibangun dari keseluruhan 33,69 km yang direncanakan.

Penanganan sungai di Jakarta juga akan mempertimbangkan konsep *NBS* di mana sungai akan dikembalikan sebagai ekosistem seperti sebelumnya.

2. Mengelola volume kapasitas tampungan air

Untuk kota seperti Jakarta (dengan luas $\pm 661 \text{ km}^2$ dan curah hujan ekstrem $> 150 \text{ mm/hari}$), setidaknya butuh daya tampung retensi air sebesar 5–10% dari total runoff hujan ekstrem. Dengan asumsi curah hujan ekstrem adalah sebesar 150 mm/hari maka volume air limpasan (runoff) adalah sebesar $661 \text{ km}^2 \times 0.15 \text{ m} =$

~99 juta m³ air per hari saat hujan ekstrem. Target ideal tampungan sebesar 10% × 99 juta m³ = ~10 juta m³. Maka Jakarta idealnya memiliki 300–400 unit waduk/situ/embung dengan kapasitas rata-rata 30.000 m³–50.000 m³/unit. Tempat tampungan air ini difokuskan di wilayah padat dan dataran rendah (Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Selatan).

Strategi pengelolaan volume tampungan air dibedakan untuk menghadapi banjir dari hulu dan banjir karena hujan lokal. Untuk mengatasi banjir dari hulu, Dinas SDA mengelola waduk, situ dan embung yang tersebar di seluruh Jakarta. Total waduk/situ/embung eksisting ± 147 unit yang terdiri dari waduk besar berjumlah kurang lebih 40 unit (Pluit, Ria Rio, Tomang Barat, dll), Situ dan embung (skala kecil/menengah). Total volume tampung efektif seluruhnya kurang dari 50 juta m³, jauh di bawah kebutuhan Jakarta saat hujan ekstrem. Karena itu perlu dilakukan penambahan volume tampungan air yang baru dengan cara menambah waduk, situ, embung yang baru sehingga air limpasan hujan dapat tertampung sebelum dialirkan ke sungai.

Sedangkan untuk menghadapi banjir karena hujan lokal, Dinas SDA membangun sistem polder di daerah-daerah yang sistem drainase nya tidak mampu menampung dan mengalirkan air hujan secara cepat ke sungai. Berdasarkan Kajian Roadmap Pengendalian Banjir – Analisa Sistem Polder DKI Jakarta Tahun 2024 yang kemudian menjadi acuan RTRW 2025 – 2045, akan dibangun 70 polder sampai dengan tahun 2045. Saat ini sudah terbangun 52 polder namun baru 14 sistem polder yang sudah terbangun memadai. Sebanyak 38 polder lagi yang sudah terbangun namun masih belum memadai akibat sistem drainase yang belum mendukung. Dengan demikian Dinas SDA akan melanjutkan meningkatkan 38 polder tersebut sambil tetap akan melanjutkan pembangunan 18 polder lagi untuk memenuhi rencana 70 polder di tahun 2045.

Dalam perencanaan revitalisasi dan pengembangan waduk, situ dan embung serta polder, Dinas SDA akan menerapkan konsep *Nature Based Solution* (NBS) dimana tidak hanya berfokus pada pengendalian banjir, namun juga dalam rangka peningkatan rasio Ruang Terbuka Biru (RTB) dan pemanfaatan infrastruktur sebagai ruang terbuka publik (ruang ketiga).

3. Mengelola sistem drainase untuk mengalirkan air limpasan ke sungai atau tempat tampungan

Drainase Jakarta dirancang menampung debit air dengan curah hujan maks 120 mm/hari sehingga bila hujan ekstrim akan menyebabkan banjir. Kondisi

drainase saat ini daya tampungnya sudah menurun akibat pengendapan lumpur dan sampah. Karena itu pemeliharaan sistem drainase menjadi perhatian selain pembangunan saluran drainase baru.

Pembangunan sistem drainase baru terutama di daerah yang sering tergenang air cukup tinggi dapat dilakukan dengan metode *jacking* di mana tidak perlu dilakukan penggalian di atas tanah sepanjang saluran drainase dan tingkat elevasi salurannya dapat diatur dengan lebih mudah.

Sistem polder akan digunakan untuk membantu sistem drainase yang masih kurang memadai untuk mengatasi air limpasan yang melebihi daya tampung atau kemampuan drainase.

4. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pengendalian banjir

Kebutuhan kapasitas pompa diketahui dari setiap luasan 100 ha dengan peningkatan 1 m³/detik pada daerah genangan kritis, dengan kapasitas menyesuaikan debit air hujan maksimum harian (sekitar 50–100 mm/hari). Kapasitas ideal total pompa Jakarta: ± 550–600 m³/detik.

Saat ini terdapat 209 rumah pompa dengan 609 unit pompa serta 573 unit pompa mobile. Dinas SDA juga memiliki 260 unit alat berat, 800 unit Pintu Air di 570 lokasi, 460 unit dump truck, serta didukung oleh 7,265 personel Pasukan Biru. Jumlah-jumlah ini perlu ditingkatkan lagi untukantisipasi ke depan selain diperlukan kegiatan pemeliharaan yang baik agar dapat berfungsi dengan baik saat dibutuhkan.

Rincian tahapan pelaksanaan strategi di atas adalah sebagai berikut :

1. Normalisasi Sungai :

Rencana lokasi prioritas untuk normalisasi sungai/kali 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut, namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan mempertimbangkan dinamika eksternal dan internal yang terjadi.

Tabel 3.16. Sungai/Kali Prioritas untuk dilakukan Normalisasi 5 tahun ke depan

Tahun	Lokasi
2026	Kali Cakung Lama, Kali Sodetan Sekretaris, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Jatikramat, Kali Krukut, Kali Cideng, Kali Ciliwung
2027	Kali Sekretaris, Kali Ciliwung
2028	Kali Mampang (Segmen Pondok Karya), Kali Ciliwung
2029	Kali Gendong Cakung Drain, Kali Ciliwung
2030	Kali Mampang, Kali Apuran, Kali Ciliwung

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Proses normalisasi sungai dapat dilakukan oleh DSDA DKI Jakarta ataupun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses normalisasi sungai dilengkapi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengadaan tanah/pembebasan lahan
- b. Melaksanakan normalisasi/pembangunan tanggul pada sungai prioritas
- c. Melakukan kajian Kapasitas tampung Kali/Sungai Kewenangan DKI Jakarta
- d. Membuat Rencana Pengelolaan Kali/Sungai Kewenangan DKI Jakarta
- e. Melakukan kajian sedimentasi beberapa kali/ sungai Primer
(pengembangan pemodelan Kali/Sungai)

Dalam hal pengadaan tanah/pembebasan lahan, dilakukan sesuai dengan kebutuhan normalisasi sungai yang akan dilakukan. Sama halnya dengan pembangunan SPALD-T/S, pengadaan tanah ini bisa dilakukan untuk lokasi baru ataupun penyelesaian tanah-tanah bermasalah sebelumnya.



Gambar 3.3. Ilustrasi Normalisasi Sungai 2025-2029

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

2. Pembangunan dan revitalisasi polder, pompa air, waduk, embung

Tujuan pembangunan ini untuk mengatasi genangan dari sistem existing yang hanya mengakomodasi curah hujan dengan kala ulang tahun 2 tahun kemudian ditingkatkan kapasitasnya hingga dapat mengakomodasi hujan kala ulang 5-10 tahun.

Rencana lokasi prioritas untuk pembangunan dan revitalisasi polder, pompa, waduk, situ, dan embung 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut, namun

tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan mempertimbangkan dinamika eksternal dan internal yang terjadi.

Tabel 3.17. Lokasi Prioritas untuk Pembangunan dan Revitalisasi Polder, Pompa, Waduk, dan Embung 5 tahun ke depan

Waduk, Situ, Embung

Tahun	Lokasi
2026	Waduk Pondok Labu (Waduk Bango), Waduk Kebagusan, Waduk Sunter Hulu, Waduk Penganten Ali
2027	-
2028	Waduk Rawa Lindung, Waduk Jati Kramat, Waduk Kamal
2029	Embung Jl Pd Rangon Raya
2030	-

Sistem Polder dan Pompa

Tahun	Lokasi
2026	-
2027	Polder Cempaka Putih, Polder Greenville (Pompa Mangga Raya), Polder Cengkareng Kalideres, Pompa Bulak Cabe, Pompa Kayu Putih, kel. Rawa terat, Pompa Ancol, Pompa Cilincing, Pompa Rawa Tearte, Kp. Sawah, Pompa Mangga Raya
2028	Polder Rawa Buaya, Polder Jelambar, Polder Sunter Timur III Rawa Badak
2029	Polder Grogol, Polder Kembangan,
2030	Polder Komplek Dewa Kembar, Polder Komplek Dewa Ruci.

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Proses pembangunan dan revitalisasi dilengkapi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan/ peningkatan sistem polder/subpolder pada lokasi prioritas
- b. Melaksanakan pembangunan/peningkatan waduk/situ/embung pada lokasi prioritas (waduk/situ/embung yang seluruh aset tanahnya sudah milik Pemprov. DKI Jakarta)
- c. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pembangunan polder/waduk/situ embung

Tidak hanya pembangunan polder, pompa air, waduk, situ, embung baru saja yang dilakukan, namun revitalisasi, peningkatan kapasitas, dan juga pemeliharaan rutin terhadap insfrastruktur yang sudah ada saat ini tetap dilakukan untuk menjamin kapasitasnya tetap optimal atau bahkan meningkat.



Selain itu, proses pembangunan ini juga perlu didukung oleh proses pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang dilakukan sebelumnya. Sama halnya dengan pembangunan SPALD-T/S, pengadaan tanah ini bisa dilakukan untuk lokasi baru ataupun penyelesaian tanah-tanah bermasalah sebelumnya.

3. Peningkatan kapasitas sistem drainase dengan sistem *jacking*

Sistem *jacking* ini dilakukan untuk area-area yang seringkali terjadi genangan yang cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama.

4. Dalam 5 tahun ke depan sistem ini tetap menjadi strategi yang akan dijalankan, namun belum dapat ditentukan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi prioritas. Langkah konkrit yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah melakukan kajian penanganan genangan dan menginventarisasi lokasi genangan yang ditangani melalui sistem *jacking*.

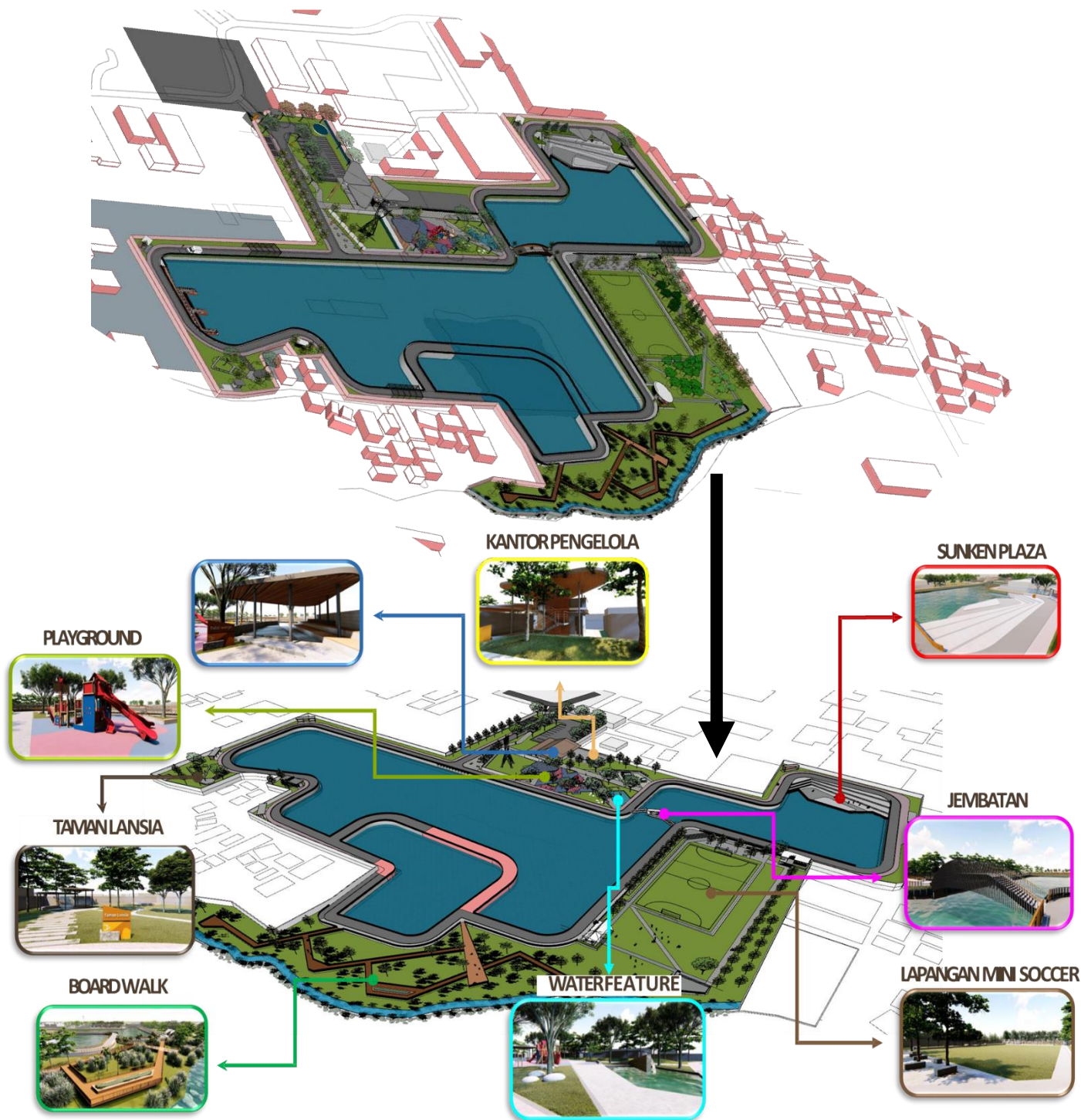
5. Sinergi antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam mengelola DAS Ciliwung dan Cisadane

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus melakukan sinergi karena memang memiliki kepentingan bersama dan saling kebergantungan. Dalam hal sumber daya air, Jabodetabek bersinergi dalam bentuk:

- Konservasi hulu – hilir
- Penyediaan air baku
- Pengendalian banjir dan drainase
- Pengendalian pencemaran dan limbah
- Tata ruang dan regulasi bersama
- Instrumen koordinasi

Bentuk sinergi di atas termasuk di dalamnya pemberian bantuan/ hibah kepada daerah lain agar tujuan bersama bisa tercapai. Selain itu, salah satu sinergi yang dilakukan terkait dengan pengendalian banjir adalah sinergi pengelolaan DAS Ciliwung dan Cisadane. Sinergi pengelolaan tersebut dilakukan dengan integrasi sistem analisis aliran sungai melalui pemodelan hidrolika sungai yang dikembangkan menjadi Early Warning System (EWS) dari hulu ke hilir. Langkah konkrit yang akan dilaksanakan dalam mendukung sinergi ini adalah:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendukung rencana pengelolaan DAS
- b. Melakukan integrasi sistem analisis aliran sungai melalui pemodelan hidrolika sungai yang dikembangkan menjadi *Early Warning System (EWS)* pada beberapa Sungai Primer, bekerjasama dengan pihak lain seperti Dinas CKTRP, BMKG, BPBD, Kementerian PU, dan sebagainya.



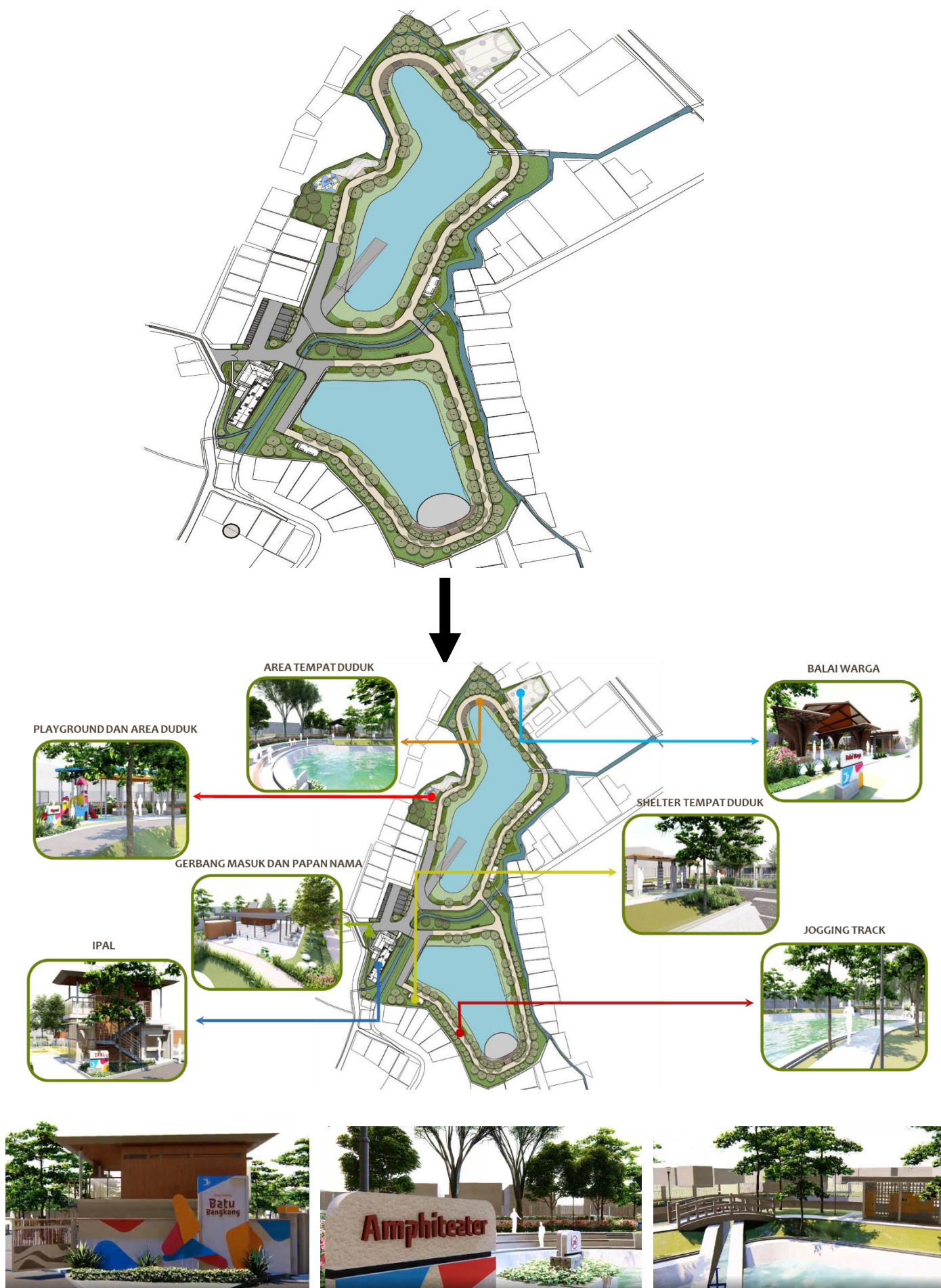
Gambar 3.4. Visioning Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 1)

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Gambar 3.5. Visioning Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 2)

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Gambar 3.6. Visioning Pembangunan Waduk, Situ, Embung, 2025-2029 (Contoh 3)

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



EKSISTING :
Tampilan rumah pompa kuno, mayoritas pompa belum dilengkapi sistem SCADA, dan mayoritas pompa dioperasikan secara manual

RENCANA :
Tampilan rumah pompa modern, semakin banyak pompa yang telah dilengkapi dengan sistem SCADA, dan mayoritas pompa beroperasi secara digital

Gambar 3.7. Rumah Pompa dan Polder Eksisting dan Rencana Pembangunan Pompa dan Polder 2025-2029
(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Pengendalian Rob dan *Land Subsidence*

Banjir akibat air laut pasang yang naik ke daratan saat ini sudah semakin meluas terutama di daerah pesisir Jakarta Utara. Laju kenaikan air laut akibat pemanasan global relatif kecil (3 - 4 mm/ tahun) dan tidak sebanding dengan penurunan muka tanah di daerah Jakarta Utara yang mencapai 10 -15 cm/ tahun. Karena itu penanganan rob tidak terlepas dari penanganan *land subsidence*. Namun penanganan *land subsidence* pun tidak terlepas dari pengelolaan air baku/ air bersih.

Jakarta sebagai kota pesisir juga akan dikembangkan untuk menjadi kota waterfront city.

Kenaikan air laut dan penurunan tanah tidak bisa dihindari. Strategi yang dapat dilakukan adalah mencegah air laut tidak masuk ke darat akibat pasang laut dan mencegah muka tanah turun lebih dalam. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan tanggul pengaman pantai *NCICD*

Pembangunan tanggul pantai *NCICD* sudah berjalan selama ini dan masih akan dilanjutkan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan (MoU) tahun 2020 yang telah ditambahkan dengan lokasi-lokasi kritis baru di 2025. Pengembangan *NCICD* ini akan disesuaikan dengan konsep pengembangan Jakarta Waterfront City, di mana kawasan pesisir Jakarta akan dikembangkan sebagai kota tepi laut yang moderen, produktif dan tangguh yang menjadi pusat perekonomian dan hunian baru. Konsep ini menekankan bahwa air menjadi bagian inti dari kota dalam perspektif penataan ruang. Dengan konsep ini diharapkan kawasan pesisir Utara Jakarta tidak lagi menjadi kawasan kumuh sering banjir namun jadi kawasan yang aman dan nyaman untuk warganya. Tentunya Jakarta Waterfront City ini tidak akan terwujud bila tidak didukung oleh *NCICD* ini.

2. Pemetaan ketinggian muka tanah di seluruh wilayah Jakarta

Penurunan muka tanah di Jakarta tidak hanya terjadi di Jakarta Utara. Wilayah Jakarta lainnya mengalami penurunan muka tanah dengan kedalaman yang bervariasi. Agar di wilayah-wilayah tersebut tidak menjadi semakin parah diperlukan kebijakan penghentian penggunaan air tanah selain pengaturan pengembangan dan pendirian bangunan tinggi. Untuk itu diperlukan pengukuran dan pemetaan area di Jakarta beserta ketinggian muka tanah secara berkala sehingga dapat dilihat tren penurunan muka tanah di area-area tersebut.

Data tersebut dapat dianalisis bersama data penggunaan air tanah untuk mendapatkan kesimpulan pengaruh penggunaan air tanah di daerah tersebut terhadap penurunan muka tanah. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberi masukan kepada pihak berkepentingan yang mengelola penyediaan air bersih/ air minum untuk memperluas cakupan penyediaan air bersih/ air minum sebelum diberlakukan penghentian penggunaan air tanah di tempat tersebut.

Terkait dengan implementasi strategi Pembangunan Tanggul *NCICD* (National Capital Integrated Coastal Development), sehubungan dengan hasil reviu DED *NCICD* Fase A yang dilaksanakan oleh PTPIN Kementerian PU pada tahun 2020, 2021, dan 2024 terdapat beberapa perubahan baik dari sisi konstruksi, struktur

tanggul, panjang trase tanggul serta fasilitas pendukung lainnya, maka perlu dibuat Nota Kesepakatan (MOU) baru.

Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tanggul *NC/CD* Fase A telah mengalami pembaruan yang mencakup hal-hal berikut antara lain:

1. Penyesuaian kembali pengelompokan dan penamaan klaster kawasan
2. Pemisahan antara tanggul pantai dan tanggul muara sungai
3. Usulan penambahan lokasi kritis

Sehubungan dengan pembaharuan tersebut, panjang tanggul yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan. Pada Nota Kesepakatan sebelumnya (tahun 2020), total panjang tanggul yang akan dibangun adalah 22,468 km. Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan terbaru tahun 2025, panjang tersebut diperbarui menjadi 28,279 km. Hingga Desember 2024, progres pelaksanaan pembangunan fisik tanggul *NC/CD* Fase A telah mencapai 9,314 km. Dengan demikian, berdasarkan Nota Kesepakatan terbaru, masih terdapat 18,965 km tanggul yang belum terbangun dan memerlukan tindak lanjut dalam pelaksanaan konstruksinya. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pembagian Tugas Pelaksanaan PTPIN Stage A tahun 2020

No.	Lokasi	Panjang Trase (Km)	Panjang Terbangun (Km)	Belum Terbangun (Km)	Tugas Kementerian PUPR (Km)	Tugas Pemprov DKI (Km)
1	Kamal Muaraa					
	- Kali Kamal Muara	0,980	0,570	0,410		0,410
	- Pantai Kamal Muara	0,940	-	0,940	0,940	
	- Kali Dadap	4,500	-	4,500	4,500	
2	Pantai Indah Kapuk					
	- Cengkareng Drain	1,890	-	1,890	1,890	
3	Muara Angke					
	- Pantai Muara Angke	2,270	0,150	2,120		2,120
	- Kali Adem, KBB, Dan K. Angke	3,900	-	3,900		3,900
4	Pantai Mutiara					
	- Pantai Mutiara	1,500	-	1,500		1,500
5	Muara Baru					
	- Sisi Barat Nizam Zachman	2,037	2,037	-		
	- Pantai Timur Muara Baru	4,025	4,025	-		
6	Sunda Kelapa	4,660	-	4,660		4,660
7	ANCOL					
	- Kali Ancol Hilir	1,840	-	1,840	1,840	
8	Tanjung Priok					
	- Tj Priok	7,330	-	7,330		7,330
9	Kali Baru					
	- Kali Baru + Cakung Drain	4,110	2,200	1,910	1,910	
10	Kali Blencong					
	- Kali Blencong	4,130	1,582	2,548		2,548
11	PLTU Muara Karang	1,650	1,650	-		
12	Kali M Karang	0,450	0,450	-		
Total		46,212	12,664	33,548	11,080	22,468

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Tabel 3.19. Kesepakatan Kerjasama (MoU) Pembagian Tugas Pelaksanaan PTPIN Stage A tahun 2025

No.	Klaster	Lokasi	Panjang Trase Berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PUPR (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Ket.
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun				
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai			
1.	Kawasan Kamal Muara Dadap	Total Panjang	6,853	1,156	4,932				0,765			6,088	0,165	
		a. Kali Kamal Muara	0,765						0,765				0,165	Selesai
		b. Pantai Kamal Muara	1,156	1,156								1,156		Selesai
		c. Kali Dadap	4,932		4,932							4,932		Selesai
2.	Kawasan Tanjungan	Total Panjang	3,260					2,312		2,312	0,948			
		a. Tanjungan Sisi Barat	1,372					1,372		1,327				Lokasi kritis baru
		b. Tanjungan Sisi Timur	0,940					0,940		0,940				Lokasi kritis baru
		c. Muara Kali Tanjungan	0,948								0,948			Lokasi kritis baru
3.	Kawasan Pantai Indah Kapuk	Total Panjang	1,835		1,835							1,835		
		a. Cengkareng Drain	1,835		1,835							1,835		Selesai
4.		Total Panjang	5,265					0,150	1,652	1,891	1,572		5,115	

No.	Klaster	Lokasi	Panjang Trase Berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PUPR (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Ket.
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun				
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai			
	Kawasan Muara Angke	a. Pantai Muara Angke	2,041					0,150		1,891			1,891	
		b. Kali Adem	3,244						1,652		1,572		3,224	
5.	Kawasan Pluit	Total Panjang	5,550					0,390		5,160			1,507	
		a. Pantai Mutiara Sisi Barat - Tengah	1,057					0,390		0,667			1,057	
		b. Pantai Mutiara Sisi Timur	0,450							0,450			0,450	
		c. Pantai Mutiara Sisi Utara	3,463							3,463				Lokasi kritis baru
		d. Greenbay Pluit	0,580							0,580				Lokasi kritis baru
6.	Kawasan Muara Baru	Total Panjang	6,383	2,375				4,008						
		a. Sisi Barat Nizam Zachman	2,037	2,037										Selesai
		b. Pantai Timur Muara Baru	4,346	0,338				4,008						Selesai
7.		Total Panjang	2,805					0,200		2,605			2,805	

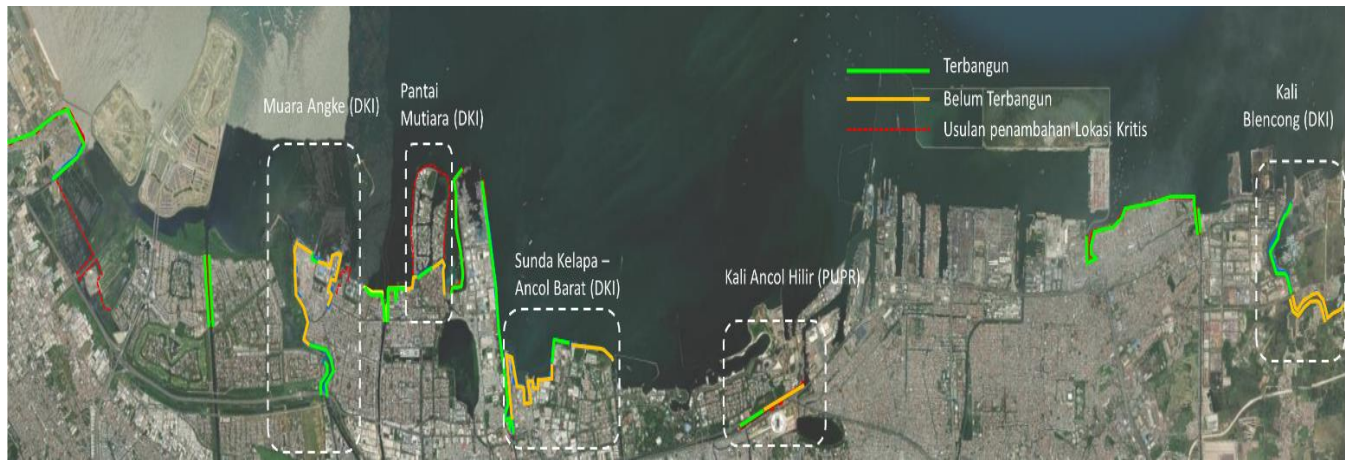
No.	Klaster	Lokasi	Panjang Trase Berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PUPR (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Ket.
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun				
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai			
	Kawasan Sunda Kelapa	a. Kawasan Rencana Induk Pelabuhan Sunda Kelapa	2,805					0,200		2,605			2,805	Akan dibuatkan PKS tersendiri antara Pemprov DKI dan PT Pelindo II
8.	Kawasan Ancol	Total Panjang	3,365		0,345		0,950	0,843		1,227		1,295	2,070	
		a. Kali Ancol Hilir	1,295		0,345		0,950					1,295		
		b. Ancol Barat	2,070					0,843		1,227			2,070	
9.	Kawasan Tanjung Priok	Total Panjang												
		a. Tanjung Priok												Pembangunan pompa sumpit dan perapihan kolektor drain
10.	Kawasan Kali Baru - Cilincing	Total Panjang	4,110	3,225	0,885							1,910		
		a. Kali Baru + Cakung Drain	4,110	3,225	0,885							1,910		Selesai
11.	Kawasan Marunda	Total Panjang	4,556						1,585		2,971		2,971	
		a. Kali Blencong	4,556						1,585		2,971		2,971	

No.	Klaster	Lokasi	Panjang Trase Berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PUPR (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Ket.	
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun					
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai				
Total			43,982	6,756	7,997		0,950	5,591	4,002	13,195	5,491	11,128	14,633		
				14,753		0,950		9,593		18,686					
				15,703				28,279							

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Berikut adalah gambaran rencana dan progress pembangunan tanggul *NC/CD* fase A:



Gambar 3.8. Rencana dan Progress Pembangunan Tanggul *NC/CD* Fase A
(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Tabel 3.20. Rencana dan Progress Pembangunan Tanggul *NC/CD* Fase A
Kewenangan Pemprov DKI Jakarta (update per Desember 2024) berdasarkan
MOU 2020

No	Lokasi Klaster	Panjang Total (km)	Terbangun (km)	Sisa (km)	Keterangan
1	Kamal Muara	0,765	0,765	-	Selesai
2	Muara Angke	5,265	1,802	3,463	Ditargetkan selesai tahun 2030
3	Pantai Mutiara	1,507	0,381	1,126	Ditargetkan selesai tahun 2027
4	Muara Baru – Pantai Timur	4,008	4,008	-	Selesai
5	Sunda Kelapa – Ancol Barat	4,875	0,773	4,102	0,573 km dibangun Pemprov DKI tahun 2024 Sisa 1,497 km kewenangan DKI on progress (MY 2024-2025) 0,200 km dibangun PT Pelindo II tahun 2024
6	Kali Blencong	4,556	1,585	2,971	Ditargetkan selesai tahun 2029
	Total	20,976	9,314	11,662	

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Pada MoU 2025 diusulkan penambahan beberapa titik kritis yang perlu dilakukan pembangunan tanggul *NC/CD*, yaitu pada lokasi berikut:

Tabel 3.21 Usulan Penambahan Lokasi Kritis pada MOU 2025

No	Lokasi	Panjang Total (km)
1	Tanjungan	3,260

No	Lokasi	Panjang Total (km)
2	Green bay Pluit	0,580
3	Pantai Mutiara Sisi Utara	3,463
	Total	7,303

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tanggul *NC/CD* Fase A untuk periode tahun 2025 hingga 2030, penentuan lokasi pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan terlebih dahulu pada lokasi-lokasi yang telah tercantum dalam Nota Kesepakatan (MoU) tahun 2020.

Berikut adalah rencana pembangunan pada setiap tahap hingga tahun 2031 :

A. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 1 *Multi Years*(2023-2025)

Ruang Lingkup:
 Lokasi Ancol Barat – Asahimas
 Lokasi Muara Angke: Tanggul Mitigasi

- Output:
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Ancol Barat – Asahimas dengan panjang rencana 1179 meter
 - Terbangunnya tanggul mitigasi banjir rob di lokasi Jalan Dermaga Ujung Muara Angke dengan panjang rencana 1150 meter

- Outcome:
- Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Ancol Barat – Asahimas dari ancaman banjir rob
 - Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Muara Angke dari ancaman banjir rob dengan ketinggian elevasi maksimal +2,5 meter PP



Gambar 3.9. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 1

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)





Gambar 3.10. Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 1
(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

B. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 2
Multiyears (2024-2025)

Ruang Lingkup: Lokasi Ancol Barat – Seafront

- Pembangunan Tanggul
- Timbunan
- *Landscape*
- Pembangunan pompa

Output:

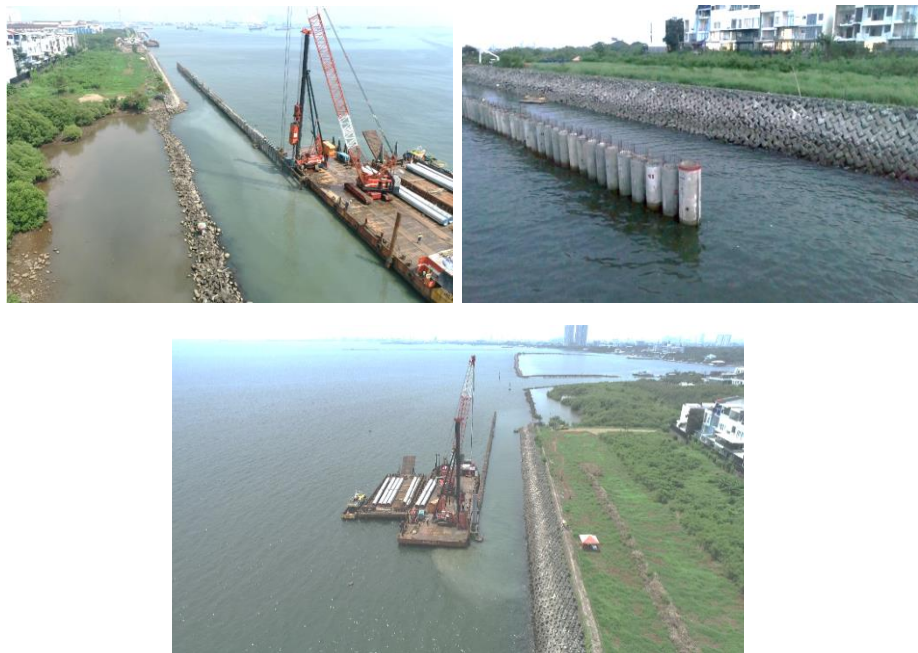
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Ancol Barat – *Seafront* dengan panjang rencana 891 meter
- Terbangunnya Rumah Pompa

Outcome:

- Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Ancol Barat – *Seafront* dari ancaman banjir rob dan banjir akibat curah hujan serta terbangunnya penataan kawasan pesisir Ancol Barat



Gambar 3.11. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 2
(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Gambar 3.12. Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Lokasi 1 Paket 2
(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

C. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Tahap III *Multiyears* (2025-2027)

Ruang Lingkup:

Lokasi Pantai Mutiara

- Pembangunan tanggul
- Tanggul *retaining wall*
- Peninggian parapet
- Timbunan
- Landscape

Lokasi Muara Angke (Kali Adem)

- Pembangunan Tanggul
- Timbunan

Lokasi Kali Blencong

- Pembangunan Tanggul
- Tanggul *retaining wall*
- Timbunan
- *Landscape*
- Akses Nelayan
- Pintu Air

Lokasi Ancol Barat – Asahimas

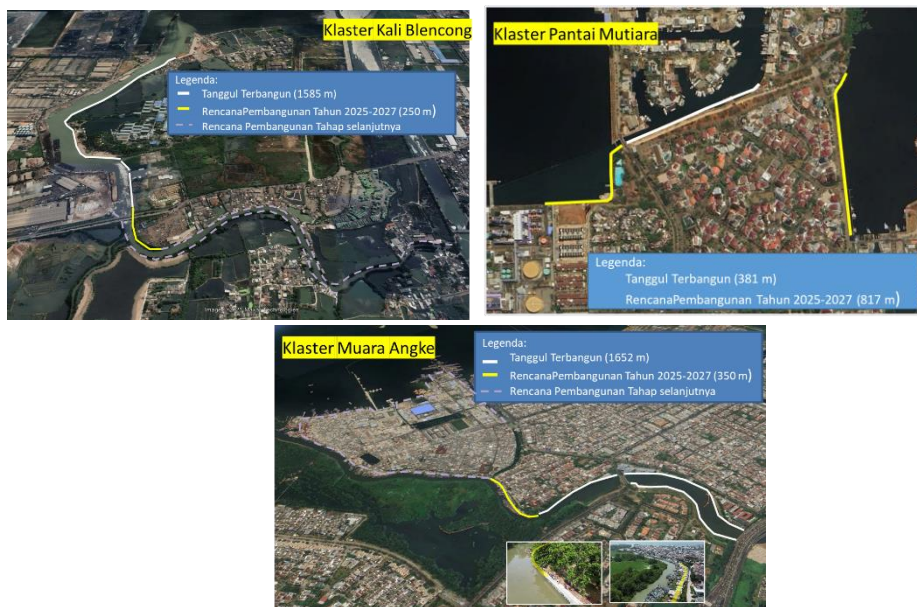
- *Landscape*

Output:

- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Pantai Mutiara dengan panjang rencana 817 meter
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Muara Angke (Kali Adem) dengan panjang rencana 350 meter
- Terbangunnya landscape di lokasi Ancol Barat – Asahimas
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Kali Blencong dengan panjang rencana 250 meter

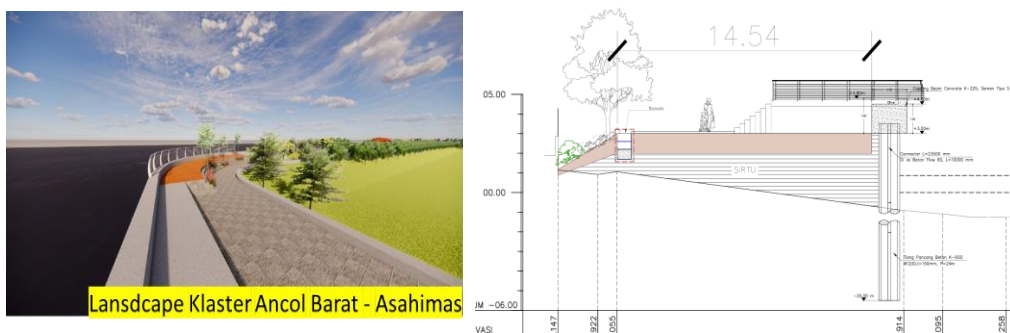
Outcome:

- Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Pluit dan kawasan Marunda dari ancaman banjir rob



Gambar 3.13. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Tahap III

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Gambar 3.14. Landscape Klaster Ancol Barat–Asahimas

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

D. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Tahap IV Multiyears (2027-2030)

Ruang Lingkup:

Lokasi Pantai Muara Angke:

- Pembangunan tanggul

Lokasi Kali Adem:

- Pembangunan tanggul

Lokasi Kali Blencong:

- Pembangunan tanggul

Output:

- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Pantai Muara Angke dengan panjang rencana 905 meter
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Kali Adem dengan panjang rencana 507 meter
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Kali Blencong dengan panjang rencana 2.720 meter

Outcome:

- Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Pluit dan Kawasan Marunda dari ancaman banjir rob dan banjir akibat curah hujan



Gambar 3.15. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Tahap IV

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

E. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai *NC/CD* Fase A Tahap V Multiyears (2028–2031)

Ruang Lingkup:

Lokasi Pantai Muara Angke:

- Pembangunan tanggul

Lokasi Kali Adem:

- Pembangunan tanggul

Output:

- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Pantai Muara Angke sisi timur dengan panjang rencana 1077 meter
- Terbangunnya tanggul *NC/CD* di lokasi Kali Adem dengan panjang rencana 1274 meter

Outcome:

- Terlindunginya wilayah pesisir utara Jakarta di kawasan Pantai Muara Angke dan Kali Adem dari ancaman banjir rob dan banjir akibat curah hujan



Gambar 3.16. Lokasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NC/CDFase A Tahap V

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)



Gambar 3.17. Ilustrasi Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

(Sumber : Data Dinas SDA 2025)

D. Penggunaan teknologi digital untuk integrasi dan pengolahan data, analisis, pembuatan keputusan dan pemodelan

Pengelolaan sumber daya air di Jakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pengendalian banjir dan rob, penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan, keterbatasan pengelolaan limbah domestik, hingga penyediaan air baku yang berkelanjutan. Kompleksitas ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan infrastruktur fisik semata, tetapi memerlukan dukungan teknologi digital yang mampu menyediakan integrasi

data, analisis cerdas, serta dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pemanfaatan teknologi digital ini dapat dilakukan dalam bentuk berikut :

1. Integrasi dan Pengolahan Data

Dinas Sumber Daya Air (SDA) dapat memanfaatkan *platform* data terintegrasi yang menghubungkan berbagai sumber informasi, antara lain:

- Sensor *IoT* dan *CCTV* di pintu air, sungai, tanggul, serta kawasan rawan banjir/rob.
- Data satelit dan *drone* untuk pemetaan wilayah terdampak banjir dan penurunan muka tanah.
- Data *smart meter* dan *SCADA* untuk memantau distribusi air baku dan penggunaan air tanah.
- Data limbah domestik dari sistem *sewerage* dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Integrasi ini memungkinkan terbentuknya *Jakarta Water Data Hub*, sebuah basis data yang selalu diperbarui secara *real-time* dan dapat diakses lintas unit kerja.

2. Analisis dan Prediksi

Dengan memanfaatkan *Big Data Analytics* dan *Machine Learning*, Dinas SDA dapat:

- Memprediksi debit banjir berdasarkan curah hujan, kapasitas sungai, dan status pintu air.
- Menghitung risiko rob dengan menggabungkan data pasang surut laut, laju penurunan tanah, serta tinggi tanggul.
- Menganalisis pola pemakaian air tanah untuk mendeteksi wilayah yang kritis.
- Mengidentifikasi efisiensi pengolahan air limbah domestik, termasuk tingkat pelayanan dan potensi pencemaran.

3. Pengambilan Keputusan

Hasil analisis digital ditampilkan dalam bentuk *dashboard* interaktif yang menyajikan:

- Peta genangan banjir/rob secara *real-time*.
- Status pintu air, pompa, dan polder system.
- Indeks kerentanan penurunan tanah.
- Proyeksi kebutuhan air baku harian dan tahunan.
- Cakupan layanan air limbah domestik.

Dashboard ini mendukung pengambilan keputusan cepat di tingkat operasional, sekaligus menjadi alat komunikasi strategis bagi pimpinan daerah dalam menetapkan kebijakan makro.

4. Pemodelan dan Perencanaan

Teknologi digital memungkinkan Dinas SDA melakukan simulasi skenario untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, antara lain:

- Pemodelan banjir perkotaan berdasarkan berbagai kondisi curah hujan ekstrem.
- Pemodelan rob dalam skenario kenaikan muka laut dan keberhasilan pembangunan tanggul laut.
- Simulasi ketersediaan air baku dengan memperhitungkan kapasitas waduk, air tanah, dan suplai perpipaan.
- Pemodelan pertumbuhan kebutuhan pengolahan limbah domestik sesuai peningkatan populasi dan cakupan jaringan perpipaan.

Dengan pemodelan ini, kebijakan dapat berbasis pada prediksi jangka panjang, bukan hanya reaksi terhadap krisis jangka pendek.

Secara spesifik, arah kebijakan yang disusun oleh Dinas SDA untuk 5 tahun ke depan akan sangat didukung oleh teknologi digital. Dukungan yang diberikan pada tiap strategi dan arah kebijakan itu adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian banjir :

- *Flood Forecasting and Warning System* pada 13 aliran sungai yang sudah dikembangkan akan disempurnakan lagi dan diintegrasikan dengan Jakarta Satu sehingga publik dapat mengakses semua data dan informasi di satu aplikasi.
- Penggunaan teknologi digital untuk menunjang kegiatan peralatan dan perbekalan serta operasional dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.

2. Pengendalian rob dan land subsidence:

- Aplikasi SINARJI yang sudah ada lebih dikembangkan lagi fitur-fiturnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih maksimal
- Perluasan stasiun pengukuran muka tanah

3. Pengelolaan limbah :

- Adanya database SPALD yang memetakan lokasi SPALD, produksi/ produktivitas, kinerja alat dan lain-lain

4. Geologi dan konservasi air baku :

- Sistem monitoring sumur resapan
- Peningkatan Sistem Informasi Geologi dan Air Tanah (SIGA)
- Integrasi data dengan PAM untuk data-data penggunaan air

5. Manajemen aset dan pelaporan :

- Pengembangan sistem inventaris aset
- Pengembangan sistem manajemen aset
- Pengembangan sistem e-monev
- Pengembangan sistem keuangan internal

Tahapan pemanfaatan teknologi digital diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 2025: konsolidasi internal dengan menyempurnakan aplikasi-aplikasi atau sistem digital yang sudah ada, memenuhi kebutuhan sistem untuk dukungan manajemen.
2. Tahun 2026: pengembangan database dan alat-alat untuk pengumpulan data-data di lapangan (sensor, alat ukur dan lain-lain)
3. Tahun 2027: pengembangan *big data analytic*
4. Tahun 2028 – 2029: pengembangan pemodelan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA DINAS
SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI
JAKARTA

4.1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DSDA 2025-2029

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan di atas, telah disusun Strategi dan Arah Kebijakan yang kemudian diturunkan dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan. Berikut ini adalah Daftar Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, beserta Indikator Kinerja dan Definisi Operasionalnya yang akan dilaksanakan DSDA pada tahun 2025-2029 :

Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan DSDA 2025-2029

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
Program	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	Kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi untuk melayani kebutuhan air minum di Provinsi DKI Jakarta. Target yang termuat merupakan capaian dari Provinsi DKI Jakarta (Perumda PAM Jaya yang di dukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase progres infrastruktur pengolahan air minum	Progres Pembangunan Infrastruktur pengolahan air minum. Target yang termuat merupakan capaian dari Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya yang didukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)
Sub-Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Dokumen Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kab/Kota mencakup: 1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Surat Keputusan, dan Surat Edaran Bidang Air Minum 2. Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum 3 Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 4. Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) 5. Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota meliputi: FS dan DED, Dokumen Kesiapan Lahan dan Komitmen Kepala Daerah (termasuk operasi pemeliharaan) 6. Pelaporan Data SPM Air Minum yang meliputi: Identifikasi Kebutuhan, Upaya Pemenuhan dan Capaian SPM Air Minum
Program	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Debit air limbah yang terolah	Jumlah debit air limbah yang terolah dihitung berdasarkan jumlah orang terlayani dikali dengan timbulan air limbah domestik sebesar 100 liter/orang/hari. Asumsi jumlah orang terlayani adalah 1 rumah tangga terdiri dari 5 orang. Rumah tangga yang dihitung adalah hasil pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik per tahun
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik regional yang beroperasi	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik regional yang beroperasi
Sub-Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencakup:

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
	Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1. Pelaporan SPM Bidang Air Limbah 2. Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan, dan Surat edaran bidang Air Limbah Domestik 3. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dan kegiatan penyusunan dokumen terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) lainnya. 5. Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 6. Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7. Dokumen Rencana Teknis Rinci Pengelolaan Air Limbah 8. Readiness Criteria untuk konstruksi SPALD Regional meliputi: FS dan DED, Dokumen Kesiapan Lahan dan Komitmen Kepala Daerah (termasuk operasi pemeliharaan)
Sub-Kegiatan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Pembangunan SPALD Terpusat merupakan kegiatan pembangunan baru prasarana dan sarana SPALD-T lingkup pelayanan perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa
Sub-Kegiatan	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) meliputi kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		Limbah Domestik (SPALD)	dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik kab/kota yang beroperasi	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik kab/kota yang beroperasi
Sub-Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencakup: 1. Pelaporan SPM Bidang Air Limbah 2. Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan, dan Surat edaran bidang Air Limbah Domestik 3. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4. Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) dan kegiatan penyusunan dokumen terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) lainnya. 5. Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6. Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 7. Dokumen Rencana Teknis Rinci Pengelolaan Air Limbah 8. Readiness Criteria untuk konstruksi SPALD meliputi: FS dan DED, Dokumen Kesiapan Lahan dan Komitmen Kepala Daerah (termasuk operasi pemeliharaan)
Sub-Kegiatan	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar	Fasilitas buang air besar individual (bilik) dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat.

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		individu dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Unit pengolahan setempat, terdiri dari: a. unit pengolahan setempat anaerob, yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sesuai SNI 2398); atau b. unit pengolahan setempat aerob, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa
Sub-Kegiatan	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Peningkatan kapasitas SPALD Terpusat Skala Permukiman merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menambah/meningkatkan kapasitas layanan infrastruktur SPALD Terpusat Skala Permukiman yang telah terbangun SPALD Terpusat Skala Permukiman merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan dengan lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa
Sub-Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama
Sub-Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		Dioperasikan dan Dipelihara	limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
Program	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume Kapasitas Tampungan Air	Volume kapasitas tampungan merupakan volume yang tersedia melalui pembangunan tampungan seperti waduk, situ, embung, dan tampungan air lainnya
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	Penambahan persentase luasan polder yang dihitung berdasarkan rumus : (jumlah luas kawasan/sistem polder yang terbangun dibagi luas kawasan/sistem polder yang direncanakan) x 100%
		Persentase pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur pengaman pantai di seluruh Pulau di Kepulauan Seribu untuk mencegah Abrasi di pantai sesuai dengan Undang Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 31 ayat (2) dan turunannya berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 09/PRT/M/2010 tentang pedoman pengaman pantai dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, pasal 23 ayat (8). Rumusnya yaitu Panjang Pantai yang sudah terlindung dari abrasi di seluruh pulau berpenduduk kepulauan seribu dibagi panjang pantai keseluruhan pulau berpenduduk di kepulauan seribu
		Persentase pembangunan tanggul kritis di	Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		muara kali dan pantai Jakarta	
Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun	<p>Infrastruktur pengelolaan SDA terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu Air 2. Polder/Kolam Retensi 3. Sarana dan Prasarana bangunan sungai/kali 4. Stasiun Pompa Banjir <p>Bangunan Pengaman Pantai terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Breakwater di pesisir Jakarta 2. Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya <p>Realisasi dihitung berdasarkan akumulasi jumlah Infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai yang terbangun per lokasi</p>
Sub-Kegiatan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL
Sub-Kegiatan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL
Sub-Kegiatan	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
			sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru
Sub-Kegiatan	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat pompa untuk membuang air yang berlebihan. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru
Sub-Kegiatan	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Operasi dan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai, merupakan upaya dalam rangka menjamin keberlanjutan kondisi dan fungsi sungai dan prasarannya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap sungai dan prasarannya sendiri
Sub-Kegiatan	Peningkatan <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i>	Jumlah <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i> yang Ditingkatkan	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
			banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali
Sub-Kegiatan	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Stasiun pompa banjir berfungsi untuk memompa dan mengalirkan air kelebihan atau air banjir dari daerah yang rawan banjir, seperti dataran rendah, ke sungai, laut, atau saluran pembuangan lain, sehingga dapat mencegah atau mengurangi risiko banjir. Lingkup dalam kegiatan ini meliputi pembangunan stasiun pompa pengendali banjir
Sub-Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Stasiun pompa banjir berfungsi untuk memompa dan mengalirkan air kelebihan atau air banjir dari daerah yang rawan banjir, seperti dataran rendah, ke sungai, laut, atau saluran pembuangan lain, sehingga dapat mencegah atau mengurangi risiko banjir. Lingkup dalam kegiatan ini meliputi pemeliharaan stasiun pompa pengendali banjir
Sub-Kegiatan	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	Merupakan pekerjaan pembangunan baru. Bangunan pengamanan pantai yang dimaksud dapat berupa seawall, breakwater, tanggul pantai, dll
Sub-Kegiatan	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	Meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarana

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
			breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya
Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada WS dalam satu daerah yang dibangun	<p>Infrastruktur pengelolaan SDA terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stasiun pompa banjir (peningkatan) 2. pembangunan embung <p>Bangunan Pengaman Pantai terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan breakwater di Kepulauan Seribu <p>Realisasi dihitung berdasarkan akumulasi jumlah Infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai yang terbangun per lokasi</p>
Sub-Kegiatan	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Merupakan pekerjaan peningkatan fungsi stasiun pompa banjir, seperti peningkatan kapasitas pompa banjir untuk mempercepat penurunan muka air banjir
Sub-Kegiatan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Embung dan penampung air lainnya merupakan Merupakan tampungan buatan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan
Sub-Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Embung dan penampung air lainnya merupakan Merupakan tampungan buatan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pemeliharaan embung dan tampungan air lainnya
Sub-Kegiatan	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	Pembangunan Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam/memecah daya rusak gelombang/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
Program	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Target dihitung dari banyaknya lokasi titik genangan selama 1 tahun yang terjadi kurang dari 2 jam. Rumus (Jumlah genangan yang kurang dari 2 Jam : Jumlah genangan di DKI Jakarta) x 100%
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase sistem Drainase Perkotaan yang dikelola	Persentase sistem Drainase Perkotaan yang dikelola adalah indikator yang menggambarkan pengelolaan sistem drainase di Provinsi DKI Jakarta yang dihitung berdasarkan total pengerukan dan pemeliharaan rutin sistem drainase (waduk/situ/embung, sungai/kali (saluran primer dan sekunder), saluran tersier (PHB)) selama 1 tahun. Perhitungan : (Jumlah total pengerukan dan pemeliharaan rutin sistem drainase (waduk/situ/embung, sungai/kali (saluran primer dan sekunder), saluran tersier (PHB)) dibagi Jumlah saluran tersier/PHB berdasarkan data Portal Data DSDA) dikali 100%. (Catatan: Jumlah saluran tersier/PHB berdasarkan portal data DSDA (https://portaldataadsda.jakarta.go.id/phb/list/view/0) sejumlah 1206 Unit)
Sub-Kegiatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
			permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut. Lingkup pekerjaan terdiri dari pembangunan dan revitalisasi saluran drainase
Sub-Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan banjir/genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke sungai melalui sistem saluran-saluran tersebut. Lingkup pekerjaan terdiri atas pemeliharaan saluran drainase
Program	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah terhadap pelanggan air tanah yang terdaftar di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Persentase dihitung berdasarkan jumlah laporan pemantauan yang diselenggarakan per triwulan setiap tahun
Kegiatan	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah Kawasan dan/atau ruas jalan yang menerapkan zona bebas air tanah	Persentase jumlah Kawasan dan/atau ruas jalan yang menerapkan zona bebas air tanah. Cara perhitungannya adalah (jumlah kawasan dan atau ruas jalan yang telah mengimplementasikan zona bebas air tanah / total kawasan dan ruas jalan yang termuat dalam pergub 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah)x100 persen
Sub-Kegiatan	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Sub-Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil	Jumlah laporan hasil pengendalian dan

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
	Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 :

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
			Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Sub-Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub-Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Sub-Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
Sub-Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Sub-Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Sub-Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub-Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Sub-Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		Lapangan yang Disediakan	
Sub-Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Sub-Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Sub-Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Sub-Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan

No	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	internal dan eksternal kantor dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99
Sub-Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Sub-Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
Sub-Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Sub-Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



4.2 Kinerja Dinas Sumber Daya Air 2025 – 2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Target kinerja disusun menjadi standar pencapaian kinerja yang disepakati bersama oleh semua satuan dalam organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Dinas Sumber Daya Air digambarkan dengan sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air. Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Sumber Daya Air. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Sumber Daya Air ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Untuk dapat mengukur Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK), ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan Target Kinerja. Spesifiknya, target kinerja Dinas Sumber Daya Air sebagai suatu lembaga secara keseluruhan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kinerjanya.

Secara lebih spesifik IKSS Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025-2030 disusun sebagai indikator *outcome* yang diturunkan dari Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-20230 serta menjadi ukuran pencapaian Sasaran Strategis (SS) Dinas Sumber Daya Air. Detail mengenai proses penurunan sasaran (SN, SS, SP, SK) berikut dengan indikator kinerjanya (IKSS, IKP, IKK) diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tersebut di atas.

Secara lengkap Tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif selama 5 tahun kinerja yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air 2025 – 2029 berdasarkan SIPJM ditunjukkan pada Lampiran I Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Disertai Pagu Indikatif Tahun 2025-2029.





BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air 2025–2029 nantinya akan menjadi dokumen operasional utama yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan sebagai alat pengendali dan evaluasi pembangunan daerah di bidang sumber daya air. Penyusunan Renstra ini menekankan pendekatan teknokratis yang berbasis *evidence-based planning*, sistem berpikir dinamis, serta *alignment* terhadap visi Jakarta sebagai kota global dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, inovasi layanan publik, serta dukungan pembiayaan yang efisien dan berkeadilan. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi penyelenggaraan pembangunan sektor sumber daya air yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan urbanisasi, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya.

Harapannya dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong transformasi layanan sumber daya air yang lebih baik bagi warga Jakarta menuju masa depan yang berkelanjutan dan tangguh.



LAMPIRAN I:
TABEL RENCANA PROGRAM,
KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI
PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN																	
1	MENINGKAT NYA AKSES LAYANAN DASAR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH YANG AMAN DAN BERKELANJ UTAN	PERSENTAS E AKSES LAYANAN AIR MINUM AMAN PERPIPAAN	Persen	70,03	77,21	547.204.953.4 07	83,93	493.853.928.1 07	88,95	517.369.811.8 37	93,03	417.539.124.7 31	100	376.423.868.1 60	100	2.352.391.686 .242		
		PERSENTAS E AKSES LAYANAN AIR LIMBAH AMAN	Persen	23,83	26,6		34		35,63		39,15		41,51		41,51			
1.1	MENGOPTIM ALKAN AKSES AIR MINUM YANG AMAN DAN BERKELANJ UTAN	PERSENTAS E PENINGKAT AN AKSES LAYANAN AIR MINUM AMAN PERPIPAAN	Persen	3,3	3,74	36.686.694.62 5	6,73	43.001.736.40 6	5,01	44.088.625.15 4	4,08	46.220.462.82 5	6,97	24.123.239.57 2	29,83	194.120.758.5 82		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	Liter/Detik	21371	25363	36.686.694.62 5	28878	43.001.736.40 6	31028	44.088.625.15 4	31978	46.220.462.82 5	33228	24.123.239.57 2	33228	194.120.758.5 82	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Ko ta	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Ko ta yang beroperasi	Unit	1	5	36.686.694.62 5	6	43.001.736.40 6	8	44.088.625.15 4	8	46.220.462.82 5	9	24.123.239.57 2	9	194.120.758.5 82	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.03.1.01.001	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik	0	2	17.009.977.031	3	21.000.000.000	3	22.050.000.000	3	23.152.500.000	0	0	11	83.212.477.031	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.03.1.01.001	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	32	29	17.953.709.594	29	19.534.006.006	29	20.538.625.154	29	21.567.962.825	29	22.623.239.572	29	102.217.543.151	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.03.1.01.002	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	2	2	1.723.008.000	2	2.467.730.400	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	9	8.690.738.400	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.2	MENGOPTIMALKAN AKSES AIR LIMBAH YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENINGKATAN AKSES LAYANAN AIR LIMBAH AMAN	Persen	2,05	1,16	510.518.258.782	7,4	450.852.191.701	1,63	473.281.186.683	3,52	371.318.661.906	2,36	352.300.628.588	18,12	2.158.270.927.660		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Debit air limbah yang terolah	m3/hari	1666	18704	510.518.258.782	120304	450.852.191.701	121904	473.281.186.683	123504	371.318.661.906	125104	352.300.628.588	125104	2.158.270.927.660	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik regional yang beroperasi	Unit	0	0	147.500.110.250	1	18.200.000.000	1	18.200.000.000	1	18.200.000.000	1	18.200.000.000	1	220.300.110.250	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.1.01.001	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M³/Hari	0	0	130.000.000.000	200000	100.000.000	200000	100.000.000	200000	100.000.000	200000	100.000.000	200000	130.400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.1.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	6	7	14.500.000.100	7	15.000.000.000	7	15.000.000.000	7	15.000.000.000	7	15.000.000.000	41	74.500.000.100	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.1.01.001	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.1.01.002	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	791	200	3.000.110.150	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	1791	15.000.110.150	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pengolahan air limbah domestik kab/kota yang beroperasi	Unit	197	360	363.018.148.532	461	432.652.191.701	563	455.081.186.683	664	353.118.661.906	766	334.100.628.588	766	1.937.970.817.410	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.05.2.01.002	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M³/Hari	2550	4000	130.000.000.000	4000	140.000.000.000	4000	140.000.000.000	4000	140.000.000.000	4000	140.000.000.000	22550	690.000.000.000	UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.2.01.003	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	M³/Hari	364	450	120.724.084.322	400	152.747.788.538	1200	167.210.177.965	300	53.677.253.428	100	22.000.000.000	2814	516.359.304.253	BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.05.2.01.003	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	55	58	62.125.872.506	59	49.894.233.984	61	55.209.583.718	62	61.156.911.478	64	67.814.706.588	64	296.201.308.274	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.05.2.01.004	Pembinaan dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	223	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	973	7.500.000.000	BIDANG PENGELOLAA N AIR LIMBAH	DKI JAKARTA
1.03.05.2.01.004	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesua i SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	1650	1760	45.770.855.798	4250	85.891.833.000	4250	91.161.425.000	4250	96.784.497.000	4250	102.785.922.000	20410	422.394.532.798	BIDANG PENGELOLAA N AIR LIMBAH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.05.2.01.004	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	4	3	2.897.335.906	3	2.618.336.179	0	0	0	0	0	0	10	5.515.672.085	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
2.2	MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN KOTA TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM																	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	MENINGKAT NYA KUALITAS PEMULIHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PENGAMAN PESISIR	INDEKS BAHAYA BANJIR	Skor	2,0041	1,9998	3.576.129.512 .500	1,9829	3.742.621.954 .280	1,9761	3.843.922.726 .938	1,971	4.056.588.017 .584	1,9534	4.222.014.626 .594	1,9534	19.441.276.83 7.896		
1.1	MENGOPTIM ALKAN PENGENDALI AN DAYA RUSAK AIR SECARA BERKELANJ UTAN	LUASAN DAERAH TERGENANG	Ha	966,41	946,63	3.576.129.512 .500	693,73	3.742.621.954 .280	594,54	3.843.922.726 .938	518,1	4.056.588.017 .584	460,1	4.222.014.626 .594	460,1	19.441.276.83 7.896		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	887.218.688.6 47	4	951.828.345.3 41	4	930.444.093.8 49	4	976.161.919.6 28	4	1.053.563.164 .714	4	4.799.216.212 .179	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR PUSAT DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	222.884.574.8 94	4	228.452.738.0 16	4	239.864.222.4 17	4	257.839.785.3 48	4	283.590.408.8 83	4	1.232.631.729 .558	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	468	500	222.526.524.894	525	228.089.688.016	525	239.494.172.417	525	257.456.235.348	525	283.201.858.883	525	1.230.768.479.558	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.03.01.1.02.000	Belaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	84	84	358.050.000	84	363.050.000	84	370.050.000	84	383.550.000	84	388.550.000	504	1.863.250.000	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	200.324.775.385	4	215.153.491.523	4	231.927.917.280	4	250.100.237.651	4	269.818.948.093	4	1.167.325.369.932	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.03.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	17	13.060.513.783	18	13.173.643.523	18	13.772.987.099	18	14.412.767.898	18	15.096.653.498	105	69.516.565.801	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
1.03.01.1.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	571.894.954	7	600.266.350	7	635.474.360	7	668.251.671	7	711.847.847	42	3.187.735.182	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.01.1.06.001	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	9	179.658.138.366	9	193.736.370.354	9	209.230.843.073	9	226.028.305.260	9	244.249.232.248	53	1.052.902.889.301	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.06.002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	28	1.717.033.114	28	1.877.426.033	28	2.029.378.485	28	2.188.884.559	28	2.362.113.237	147	10.174.835.428	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.06.003	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	5.317.195.168	2	5.765.785.263	2	6.259.234.263	2	6.802.028.263	2	7.399.101.263	12	31.543.344.220	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	122.041.155.250	4	161.280.880.892	4	101.344.924.936	4	101.412.171.183	4	121.482.779.742	4	607.561.912.003	UNIT PENGELOLA PENELITIAN, PENELITIAN, PENGUKURAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	127	122.041.155.250	122	161.280.880.892	128	101.344.924.936	127	101.412.171.183	126	121.482.779.742	674	607.561.912.003	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	228.652.375.061	4	233.422.110.273	4	237.299.287.016	4	241.369.768.648	4	245.708.182.766	4	1.186.451.723.764	SEKRETARIAT SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	115.436.010.035	24	115.451.179.542	24	115.467.107.524	24	115.483.831.906	24	115.501.392.507	144	577.339.521.514	SEKRETARIAT SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.01.1.08.0000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	28	28	4.174.022.497	28	4.245.169.592	28	4.287.526.476	28	4.331.940.499	28	4.378.730.728	168	21.417.389.79 2	SEKRETARIAT <	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	300	358	10.325.389.293	371	11.474.628.447	371	12.714.463.992	371	14.101.373.162	371	15.652.846.975	371	64.268.701.869	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	710	755	79.081.063.717	775	88.192.877.560	795	93.175.937.738	815	98.485.820.124	835	104.150.120.280	835	463.085.819.419	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
																	UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	226	319	5.114.007.466	330	5.076.875.928	330	5.342.597.768	330	5.632.616.312	330	5.939.730.775	330	27.105.828.249	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
																	UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN SUMBER DAYA AIR	
1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	4	18.795.347.581	2	8.774.742.702	2	8.774.742.702	1	7.220.147.200	1	7.220.147.200	13	50.785.127.385	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
																	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume Kapasitas Tampungan Air	m3	416238	707138	1.320.701.252 .386	765138	1.229.476.616 .397	806938	1.346.651.849 .829	835738	1.424.596.189 .243	995738	1.415.662.099 .727	995738	6.737.088.007 .582	BIDANG PENGENDALIA N BANJIR DAN DRAINASE SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
		Persentase luas kawasan/siste m polder yang memadai	Persen	8,976	8,976		18,246		26,986		32,296		38,846		38,846		BIDANG PENGENDALIA N BANJIR DAN DRAINASE	
		Persentase pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persen	66,87	70,08		71,31		72,55		73,78		75,02		75,02		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persen	50	53		59		69		78		85		85		BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta yang dibangun	Unit	21	26	955.137.881.8 05	31	956.257.003.9 54	26	1.056.199.295 .520	24	1.115.653.251 .788	25	1.086.668.971 .654	153	5.169.916.404 .721	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BIDANG PENGENDALIA N BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.02.1.01.001	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	2	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	11	500.000.000	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.002	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	149	153	498.800.989.580	157	606.965.056.959	159	705.932.128.423	161	764.119.517.864	163	733.309.189.703	163	3.309.126.882.529	BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.003	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	KM	1,53	12,4	300.000.000	11,9	300.000.000	2	200.000.000	4,5	100.000.000	6,7	100.000.000	39,03	1.000.000.000	BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.004	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	5	0	200.000.000	8	200.000.000	3	200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	19	1.000.000.000	BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.010	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	1	2	41.502.682.396	2	40.971.596.000	2	41.020.176.000	2	41.071.185.000	2	41.124.744.000	11	205.690.383.396	PUSAT DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR UNIT PENGELOLA PENELITIAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.02.1.01.01.09	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	34	22	18.334.971.806	18	15.769.167.730	18	15.602.397.179	18	14.954.114.343	18	14.325.509.792	128	78.986.160.850	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.01.10	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	2.202.760.000	1	3.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.300.000.000	6	10.002.760.000	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.01.12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	20	30	50.955.007.624	34	48.772.619.429	34	49.457.101.890	34	50.336.567.951	34	51.274.068.198	186	250.795.365.092	SEKRETARIAT BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BIDANG PENGENDALIA N BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH: 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	UNIT PENGELOLA PENYELIDIK AN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR	
1.03.02.1.01.01.01	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	KM	0	5,8	68.741.483.77 3	5,5	40.178.563.83 6	5,5	41.687.492.02 8	5,5	43.271.866.63 0	5,5	44.935.459.96 1	27,8	238.814.866.2 28	BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.1.01.01.02	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	KM	0	0,5	273.999.986.6 26	1,2	200.000.000.0 00	1,4	200.000.000.0 00	1,7	200.000.000.0 00	0,5	200.000.000.0 00	5,3	1.073.999.986 .626	BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI	DKI JAKARTA
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah infrastruktur pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada WS dalam satu daerah yang dibangun	Unit	0	16	365.563.370.5 81	4	273.219.612.4 43	8	290.452.554.3 09	6	308.942.937.4 55	10	328.993.128.0 73	44	1.567.171.602 .861	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BIDANG PENGENDALIA N BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIA N ROB DAN PENGEMBANG AN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.02.2.01.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	6	108.025.056.576	20	113.500.000.000	18	121.750.000.000	21	130.025.000.000	22	138.327.500.000	87	611.627.556.576	BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.2.01.000	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	0	5	256.638.314.005	1	159.219.612.443	2	168.102.554.309	2	178.317.937.455	5	190.065.628.073	15	952.344.046.285	BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.2.01.010	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	0,4	0,9	200.000.000	0,7	200.000.000	0,7	200.000.000	0,7	200.000.000	0,7	200.000.000	4,1	1.000.000.000	BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.02.2.01.010	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	7	10	700.000.000	2	300.000.000	5	400.000.000	3	400.000.000	4	400.000.000	31	2.200.000.000	BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	UNIT PENGADAAN TANAH SUMBER DAYA AIR	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85,77	87	1.368.209.571 .467	88	1.561.316.992 .542	89	1.566.826.783 .260	90	1.655.829.908 .713	91	1.752.789.362 .153	91	7.904.972.618 .135	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase sistem Drainase Perkotaan yang dikelola	Persen	0	11,88	1.368.209.571 .467	12,18	1.561.316.992 .542	12,95	1.566.826.783 .260	13,95	1.655.829.908 .713	15,02	1.752.789.362 .153	15,02	7.904.972.618 .135	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.06.1.01.001	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	0	35	685.283.635.8 31	38	764.083.939.3 69	39	707.120.682.8 27	42	726.098.018.1 62	45	744.426.689.7 83	199	3.627.012.965 .972	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1.03.06.1.01.001	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	510	120	682.925.935.6 36	121	797.233.053.1 73	130	859.706.100.4 33	140	929.731.890.5 51	151	1.008.362.672 .370	1172	4.277.959.652 .163	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR	DKI JAKARTA
1	MENINGKAT NYA KONSERVAS I AIR TANAH BERKELANJ UTAN YANG SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN POTENSI AIR TANAH	TINGKAT PENURUNAN PERMUKAAN TANAH RATA-RATA	Cm	3,6	3,5	11.517.764.27 4	3,4	14.000.000.00 0	3,3	14.000.000.00 0	3,2	15.000.000.00 0	3,1	15.000.000.00 0	3,1	69.517.764.27 4		



TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1	MENGOPTIMALKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH DALAM UPAYA MEMBATASI PENURUNAN MUKA TANAH	JUMLAH AREA DAN KAWASAN PENGENDALIAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH YANG TELAH DILAYANI JARINGAN PERPIPAAN SECARA OPTIMAL	Kelurahan	21	73	11.517.764.274	160	14.000.000.000	214	14.000.000.000	224	15.000.000.000	261	15.000.000.000	261	69.517.764.274		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah	Persen	0	8	11.517.764.274	6	14.000.000.000	4	14.000.000.000	2	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	69.517.764.274	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH	DKI JAKARTA
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah	Persen	97	97,1	11.517.764.274	97,2	14.000.000.000	97,3	14.000.000.000	97,4	15.000.000.000	97,5	15.000.000.000	97,5	69.517.764.274	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH	DKI JAKARTA
3.29.02.1.01.00	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1.000.328.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	6	7.000.328.000	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH	DKI JAKARTA
3.29.02.1.01.00	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	2	10.517.436.274	2	12.500.000.000	2	12.500.000.000	2	13.500.000.000	2	13.500.000.000	12	62.517.436.274	BIDANG GEOLOGI, KONSERVASI AIR BAKU, DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH BIDANG PENGENDALIAN ROB DAN PENGEMBANGAN PESISIR PANTAI	DKI JAKARTA







LAMPIRAN II:

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
DAN AGENDA KERJA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER
DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025 – 2029



**DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 623 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0014 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025-2029
- KESATU : Membentuk tim penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 9 APRIL 2025

Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IKA AGUSTIN NINGRUM
NIP 198208012006042013

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sumber
Daya Air Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 623 Tahun 2025
Tanggal : 09-04-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

Pengarah : Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Ketua : Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
Koordinator : 1. Para Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Unit Kerja Jakarta
2. Para Kepala Unit Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota
Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Anggota : 1. Para Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Dinas
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Subkelompok Sekretariat Dinas Sumber Daya
Air Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Subbagian Sekretariat Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Dinas Sumber
Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi
Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
6. Para Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Sumber Daya
Air Lima Kota Administrasi
7. Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Sumber Daya Air
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sekretariat : Para Pelaksana Subkelompok Program dan Pelaporan
Sekretariat Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IKA AGUSTIN NINGRUM
NIP. 198208012006042013

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sumber
Daya Air Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : *623 Tahun 2025*
Tanggal : *09-04-2025*

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER
DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- b. melaksanakan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

2. Ketua

- a. memimpin Tim dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 kepada Pengarah Tim;
- c. menyusun produk naskah dinas yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

3. Sekretaris

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan pada pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- b. menyelenggarakan rapat, forum, dan pertemuan lain terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- c. mengoordinasikan penyiapan bahan dan materi terkait penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- d. melaksanakan koordinasi antar unit kerja dan pengumpulan data terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- e. mengoordinasikan pengolahan data dan informasi serta pelaporan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- f. menyusun Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Strategis sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Koordinator Unit Kerja

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 pada unit kerja masing-masing;
- b. memberikan arahan kepada anggota Tim Penyusun Rencana Strategis pada unit kerja masing-masing.

5. Anggota

- a. menyiapkan data, informasi, dan materi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- b. membantu pengolahan data dan informasi serta pelaporan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- c. membantu penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

6. Sekretariat

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung tugas Sekretaris Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- c. melaksanakan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- d. menyiapkan rapat, forum, dan pertemuan lain terkait dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029;
- e. melakukan pengolahan data dan informasi serta pelaporan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Plt. KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



TIKA AGUSTIN NINGRUM
NIP 198208012006042013



**DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT TUGAS

NOMOR 6149/RB.02.01

TENTANG

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA
AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025-2029**

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 623 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029, dengan ini

MENUGASKAN :

Kepada :

Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 623 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029

Untuk :

1. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan Agenda Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini
2. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 Jakarta

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 10 April 2025

Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta,



Ika Agustin Ningrum
NIP. 198208012006042013

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Unit Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusdatin SDA Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025-2029**

No	Tahapan	Jadwal Pelaksanaan																								
		Januari					Februari					Maret					April					Mei				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
I	Persiapan																									
1	Penetapan Tim Penyusun Renstra																									
2	Orientasi Mengenai Renstra DSDA																									
3	Penyusunan Agenda Kerja																									
4	Penyiapan data dan informasi																									
II	Penyusunan Rancangan Renstra																									
1	Penyelarasan substansi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029																									
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Berita Acara Forum Perangkat Daerah)																									
3	Penyempurnaan rancangan renstra sesuai Berita Acara Forum Perangkat Daerah																									
4	Penyampaian dokumen Rancangan Perubahan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi																									
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra sesuai hasil verifikasi Bappeda																									
III	Rancangan Akhir Renstra																									
1	Penyelarasan strategi, arah kebijakan dan program Dinas Sumber Daya Air dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029																									
2	Penyelarasan target indikator kegiatan dan sub kegiatan dengan target indikator program																									
3	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi																									
4	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra sesuai hasil verifikasi Bappeda																									
IV	Penetapan Renstra																									
1	Penyampaian dokumen Rancangan Akhir Renstra ke Bappeda untuk ditetapkan dengan Pergub																									


 Pjt. Kepala Dinas Sumber Daya Air
 Provinsi DKI Jakarta,
 Ika Agustin Ningrum
 NIP. 198208012006042013



LAMPIRAN III:

BERITA ACARA FORUM PERANGKAT
DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENSTRA DINAS SUMBER DAYA
AIR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025-2029

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI
JAKARTA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029 DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

Pemaparan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, tanggapan, dan saran dari seluruh peserta Forum terhadap materi yang telah dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan, maka pada:

hari/tanggal : Kamis

pukul : 09.00 WIB

tempat : *Virtual Meeting via Zoom, Meeting ID: 503 050 0487*

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan, dan sasaran rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.





Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.








Ditetapkan di Jakarta, 15 Mei 2025




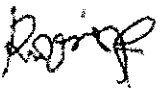






Pimpinan Sidang,
a.n. Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas,












Hendri
NIP. 196806301998031004

Menyetujui,
Wakil peserta Form Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya
Air Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
1		Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta			Tidak ada perwakilan yang hadir
2		Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta			Tidak ada perwakilan yang hadir
3	Andika, Purnomo	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Staf		
4	Indra	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Staf		
5	Rana, Tamara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Perencana Ahli Pertama		
6	Alifa, Nabila	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Pelaksana Subkelompok		

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
			Program dan Pelaporan		
7	Siti Harfiah, Kartikasari	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Pelaksana		
8	Jelly, Rampu	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	TA		
9	Satrio, Wijonarko	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	TA		
10	Iqbal Fikri, Ihsan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	TA		
11	Indriani, Wahyuningsih	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Staf		
12		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta			Tidak ada perwakilan yang hadir
13	Edward, Yahya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Staf Pengelola Program dan Pelaporan		
14	Yosi, Lusia	Biro Pembangunan	Ketua Sub Kel		






No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
		dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Lingkungan Hidup		
15	Reza, iskandar	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Staf		
16		Perumda PAM Jaya			Tidak ada perwakilan yang hadir
17	Camelia Indah, Murniwati	Perumda PAL Jaya	Asisten Manajer Perencanaan Korporasi		
18	Astrid, Marzia	Sekretariat	Ketua Subkel Program dan Pelaporan		
19	Rizky Putro, Kurniawan	Sekretariat	Staf		
20	M, Rafi	Sekretariat	Staf		
21	Desy Awal, Sapariah	Sekretariat	Staf		
22	Deliana, Prasetiyana	Sekretariat	Staf		
23	Rahmat, Khamdani	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	Staf		
24	Alfan, Widyastanto	Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai	Kasubkel Perencanaan		
25	Intan Tri, Lestari	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan	Staf		






No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
		Penyediaan Air Bersih			
26	Damar, Wahyu	Bidang Pengelolaan Air Limbah	Staf		
27		Unit Alkal			Tidak ada perwakilan yang hadir
28	Fathur, Fakhri	UP4 SDA	Staf		
29	Ade, Sudiman	Pusdatin SDA	Staf		
30		U.P. Tanah			Tidak ada perwakilan yang hadir
31	Rahmi, Agustina	Sudin SDA JP	Staf Perencanaan		
32	Desni, Mumpuni	Sudin SDA JU	Staf Perencanaan		
33	Islauni, Juliana	Sudin SDA JB	Ka.Sie Perencanaan		
34	Inge Sukma, Yupicha	Sudin SDA JS	Kasi Perencanaan		
35	Fajar, Avisena	Sudin SDA JT	Kepala Seksi Perencanaan		
36	Yuda Dwi Yulian	Sudin SDA Kepulauan Seribu	Staf Seksi Perencanaan		
37	Handi, Swardika	Arofrasa	Konsultan		












Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Hasil
Forum Perangkat Daerah/ Lintas
Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
Nomor :
Tanggal : 15 - 05 - 2025





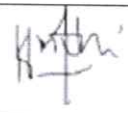
Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas
Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
tempat : Virtual Meeting via Zoom, Meeting ID: 503 050 0487

No.	Nama	L/P	Unsur Perwakilan	No. Telepon	Tanda Tangan
1			Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta		
2			Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta		
3	Andika, Purnomo	L	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	<u>+6281297393997</u>	
4	Rana, Tamara	P	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	<u>085692377800</u>	
5	Indra	L	Badan Pengelola Keuangan Daerah	<u>08129904334</u>	
6	Alifa, Nabila	P	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	<u>087883769784</u>	
7	Siti Harfiah, Kartikasari	P	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	<u>081314216520</u>	

No.	Nama	L/P	Unsur Perwakilan	No. Telepon	Tanda Tangan
			Provinsi DKI Jakarta		
8	Jelly, Rampu	L	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	<u>085343818720</u>	
9	Satrio, Wijonarko	L	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	<u>085813447438</u>	
10	Iqbal Fikri, Ihsan	L	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	<u>087884609360</u>	
11	Indriani, Wahyuningsih	P	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	<u>085773382850</u>	
12			Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta		
13	Edward, Yahya	L	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	<u>08561251940</u>	
14	Yosi, Lusia	P	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda	<u>+62181513390008</u>	

No.	Nama	L/P	Unsur Perwakilan	No. Telepon	Tanda Tangan
			Provinsi DKI Jakarta		
15	Reza, Iskandar	L	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	<u>0882100799</u>	
16			Perumda PAM Jaya		
17	Camelia Indah, Murniwati	P	Perumda PAL Jaya	<u>081381266935</u>	
18	Astrid, Marzia	P	Sekretariat	<u>085777323483</u>	
19	Rizky Putro Kurniawan	L	Sekretariat	<u>083136830348</u>	
20	M, Rafi	L	Sekretariat	<u>+6281364771943</u>	
21	Desy Awal, Sapariah	P	Sekretariat	<u>081285346897</u>	
22	Deliana, Prasetyana	P	Sekretariat	<u>082119754734</u>	
23	Rahmat, Khamdani	L	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	<u>081380945049</u>	
24	Alfan, Widyastanto	L	Bidang Pengendalian ROB dan Pengembangan Pesisir Pantai	<u>08156721651</u>	
25	Intan Tri, Lestari	P	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	<u>08972229909</u>	
26	Damar, Wahyu	L	Bidang Pengelolaan Air Limbah	<u>085781155145</u>	

No.	Nama	L/P	Unsur Perwakilan	No. Telepon	Tanda Tangan
27	Fathur, Fakhri	L	UP4 SDA	082226662123	
28	Ade, Sudiman	L	Pusdatin SDA	081212411736	
29			U.P. Tanah		
30	Rahmi, Agustina		Sudin SDA JP	081934110287	
31	Desni, Mumpuni	P	Sudin SDA JU	081212933395	
32	Islauni, Juliana	P	Sudin SDA JB	085230154147	
33	Inge Sukma, Yupicha	P	Sudin SDA JS	081282820482	
34	Fajar, Avisena	L	Sudin SDA JT	081555775425	
35	Yuda Dwi, Yulian	L	Sudin SDA Kepulauan Seribu	081288151639	
36	Handi, Swardika	L	Arofrasa	081319815068	

Pimpinan Sidang,
a.n. Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas,



Hendri

NIP 196806301998031004

Lampiran II : Berita Acara Kesepakatan Hasil
Forum Perangkat Daerah/ Lintas
Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
Nomor :
Tanggal : 15 - 05 - 2025

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terhadap Isu Strategis, Tujuan, dan
Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
tempat : Ruang Rapat I Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Jl. Taman Jatibaru
No. 1, Cideng, Jakarta Pusat

MANDAT (DASAR HUKUM) : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 3. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
	Pengendalian Banjir dan Drainase	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Pengaman Pesisir
	Peningkatan akses layanan air minum aman perpipaan	Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan
	Peningkatan akses layanan air limbah aman	
	Pengendalian penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>)	Meningkatnya Konservasi Air Tanah Berkelanjutan yang sesuai dengan Daya Dukung dan Potensi Air Tanah

<p>7. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi</p>		
<p>8. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>		
<p>9. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik</p>		
<p>10. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah</p>		
<p>11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p>		

<p>HARAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan nilai indeks bahaya banjir dari Tinggi (2,0000 Skor) pada tahun 2025 ke Sedang (1,9534 Skor) pada akhir tahun 2030 2. Menurunkan luasan genangan banjir dari 958,75 Ha pada tahun 2025 menjadi 460,10 Ha pada akhir tahun 2030 3. Mengawal Perumda PAM Jaya dalam meningkatkan akses layanan air minum aman perpipaan dari 73,47% pada tahun 2025 menjadi 100% pada akhir tahun 2030 4. Meningkatkan layanan air limbah aman dari 25,44% pada tahun 2025 menjadi 41,51% pada akhir tahun 2030 5. Mengendalikan penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>) rata-rata dari 3,6 cm pada tahun 2025 menjadi 3,1 cm pada akhir tahun 2030 6. Meningkatkan area zona bebas air tanah dari 23 Kelurahan pada tahun 2025 menjadi 261 Kelurahan pada akhir tahun 2030 		
---	--	--

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Daerah Aliran Sungai dan Pengaman Pesisir yang	1. Indeks bahaya banjir turun dari Tinggi (2,0000 Skor) pada tahun 2025 menjadi	1. Pembangunan tampungan-tampungan air seperti Waduk, situ, embung, dan	Mengoptimalkan Pengendalian Daya Rusak Air secara Berkelanjutan

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
Menunjang Peningkatan Retensi dan Daur Ulang Air	<p>Sedang (1,9534) pada akhir tahun 2030</p> <p>2. Luasan genangan banjir turun dari 958,75 Ha pada Tahun 2025 menjadi 460,10 Ha pada akhir tahun 2030</p>	<p>infrastruktur lain seperti sumur resapan</p> <p>2. Perbaiki sistem tata air melalui pembangunan saluran drainase perkotaan, pembangunan dan peningkatan sistem pompa, polder dan kelengkapannya, Pembangunan pintu air dan kelengkapannya, serta normalisasi/ restorasi sungai</p> <p>3. Pengadaan tanah Sungai/kali dan waduk/situ/embung</p> <p>4. Penataan Kawasan pesisir melalui pembangunan breakwater dan bangunan pengaman Pantai</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP.) infrastruktur sumber daya air diantaranya OP. Pompa, OP. Waduk, dan OP Sistem Drainase (kegiatan pengerukan saluran, kali, sungai, dan embung)</p>	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
<p>Meningkatnya Akses Layanan Dasar Air Minum dan Air Limbah yang Aman dan Berkelanjutan</p>	<p>Akses layanan air minum aman perpipaan meningkat dari 73,47% pada tahun 2025 menjadi 100% pada akhir tahun 2030</p> <p>*Catatan : Target yang termuat merupakan target pemenuhan akses layanan pada tahun 2030 dengan catatan SPAM Karian dapat terbangun.</p> <p>Untuk pemenuhan target pada tahun 2029, Rincian terkait <i>Stagging</i>/ pentahapan Pembangunan infrastruktur alternatif pengganti SPAM Karian Serpong belum diperoleh dari Perumda PAM Jaya.</p> <p>Penuntasan target pemenuhan akses air minum aman perpipaan pada tahun 2029 perlu dituangkan dalam Surat Komitmen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Pendampingan Pembangunan SPAM regional 2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk subsidi air minum 	<p>Mengoptimalkan Akses Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan</p>

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
	oleh Perumda PAM Jaya.		
	Akses layanan air limbah aman meningkat dari 25.44% pada tahun 2025 menjadi 41,51% pada akhir tahun 2030	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (<i>Jakarta Sewerage System/JSS</i>) 2. Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 4. Pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 5. Penyediaan Unit pengolahan setempat 6. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan 	Mengoptimalkan Akses limbah yang Aman dan Berkelanjutan

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
		Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman 7. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman	
Meningkatnya Konservasi Air Tanah Berkelanjutan yang sesuai dengan Daya Dukung dan Potensi Air Tanah	1. Penurunan permukaan tanah (<i>land subsidence</i>) turun dari 3,6 cm pada tahun 2025 menjadi 3,1 cm pada akhir tahun 2030 2. Area zona bebas air tanah meningkat dari 23 Kelurahan pada tahun 2025 menjadi 261 Kelurahan pada akhir tahun 2030	1. Pembatasan penggunaan air tanah melalui peningkatan akses air minum perpipaan 2. Pemberlakuan dan peningkatan zona bebas air tanah	Mengoptimalkan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dalam upaya Membatasi Penurunan Muka Tanah

Pimpinan Sidang,
a.n. Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dinas,



Hendri

NIP 196806301998031004

